



PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

2016

ANNUAL REPORT
LAPORAN TAHUNAN



KEEP GROWING
AND MAINTAIN THE TRUST

TERUS BERKEMBANG
DAN MEMPERTAHANKAN KEPERCAYAAN

Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menuju badan klasifikasi kelas dunia. Memimpin Asian Classification Society untuk tahun 2015, BKI juga berupaya memenuhi standar IACS dan memperluas jangkauannya di dalam kompetisi yang semakin mendunia.





Biro Klasifikasi Indonesia is moving towards a world class classification society. As one of the Asian Classification Society founder, BKI is also broadening its coverage in an increasingly global competition.

DAFTAR ISI

Contents



04

KILAS KINERJA
PERFORMANCE
HIGHLIGHT 2016



14

LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT
REPORT



46

PROFIL PERUSAHAAN
CORPORATE
PROFILE



86

ANALISA DAN
PEMBAHASAN MANAJEMEN
MANAGEMENT DISCUSSION
AND ANALYSIS



106

TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE
GOVERNANCE



158

TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY



166

LAPORAN KEUANGAN
FINANCIAL
STATEMENT

IKHTISAR DATA KEUANGAN 2016

Financial Highlights 2016

*Dalam Rupiah (in IDR)

Hasil Usaha / Operating Income	2016	2015	2014
Pendapatan / Revenues	737,993,402,735	706,648,960,946	756,660,228,022
Laba Bruto / Gross Profit	506,769,025,232	450,515,450,176	588,868,187,666
Laba Usaha / Operating Income	92,794,252,177	93,885,564,123	192,088,856,193
Laba Bersih / Net Profit	67,613,274,993	80,522,489,708	149,941,626,551

Posisi Keuangan / Financial Position	2016	2015	2014
Jumlah Aset / Total Assets	771,643,452,464	689,302,093,526	451,755,674,830
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	211,868,883,543	181,618,546,731	143,003,642,652
Jumlah Ekuitas / Equity	559,774,568,921	507,683,546,795	308,752,032,178

Ratio Keuangan / Financial ratio	2016	2015	2014
Likuiditas / Liquidity			
Current Ratio	336.70%	372.05%	176.04%
Acid Test Ratio	336.70%	372.05%	176.04%
Cash Ratio	54.20%	126.62%	143.34%
Working Capital to Asset Ratio	50.59%	60.49%	55.97%
Solvabilitas / Solvency			
Total debt to Equity Ratio	37.85%	35.77%	30.03%
Operating Income Ratio	12.57%	13.29%	32.60%
Operating Ratio	87.43%	86.71%	74.07%
Gross Operating Ratio	68.67%	63.75%	77.82%
Net Profit Margin Ratio	9.16%	11.39%	26.11%
Return on Investment Ratio	8.76%	11.68%	56.51%
Return Equity Ratio	14.34%	19.08%	31.79%
Aktivitas / Activity			
Total Asset Turn Over	1.03X	1.03X	1.29X
Working Capital Turn Over	1.89X	1.88X	2.26X
Receivables Turn Over	2.79X	3.22X	1.24X
Collection Period	131 Hari / Days	107 Hari / Days	113 Hari / Days
Equity to Total Asses Ratio	95.64%	73.65%	52.15%

**IDR 771,643 MILLION
TOTAL ASSETS**

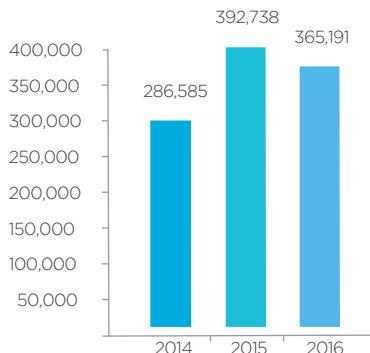
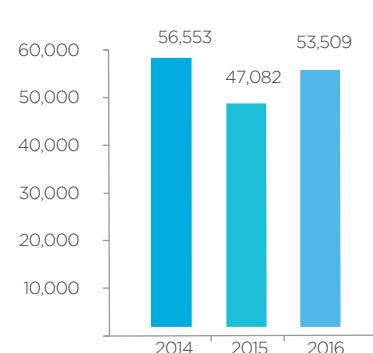
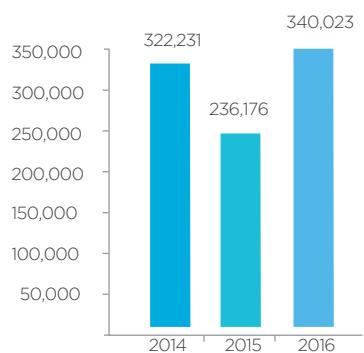
**IDR 737,993 MILLION
REVENUE**

**IDR 60,521 MILLION
COMPREHENSIVE PROFIT**

Produksi Kelas Tunggal
Single Class Production
(dalam ribu poin / in thousand points)

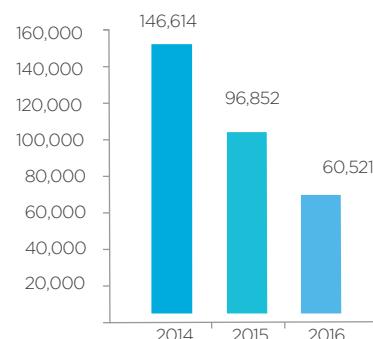
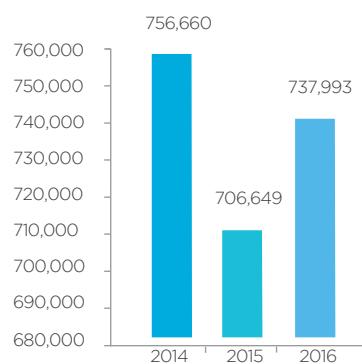
Produksi Kelas Ganda
Dual Class Production
(dalam ribu poin / in thousand points)

Produksi Marine & Industrial
Marine & Industrial Production
(dalam ribu poin / in thousand points)



Pendapatan
Revenue
(dalam juta Rupiah / in millions of Rupiah)

Laba Komprehensif
Comprehensive Profit
(dalam juta Rupiah / in millions of Rupiah)





**Pelayanan Prima dan Kepuasan Pelanggan
Merupakan Tolak Ukur Kami**



**Service Excellent And Customer Satisfaction
is Our Benchmark**

PERISTIWA PENTING KORPORASI 2016

Corporate Highlight Event in 2016

1 Januari - April 2016.



2 Januari- April 2016.

Tekad manajemen BKI untuk ikut mendukung program KPK dalam mencegah dan memberantas korupsi tercermin dari ditandatanganinya Pernyataan Komitmen Penerapan Sistem Pengendalian Gratifikasi dan penerimaan drop box pelaporan gratifikasi oleh Direktur Utama BKI dengan disaksikan Direktur Gratifikasi KPK.

BKI's management eagerness to support KPK's program in preventing and combating corruption was reflected in the signing of the Statement of Commitment to Implement Gratuity Control System and acceptance of gratuity report drop box by BKI President Director witnessed by Director of Gratification of KPK.

Pengelolaan sumber daya perusahaan berbasis elektronik sudah menjadi kebutuhan bagi korporasi masa kini untuk menjaga efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Terkait dengan hal tersebut BKI menandatangani kerjasama dengan PT Telkom, Tbk untuk pengembangan dan pembangunan sistem Electronic Resources Planning (ERP) SAP HANA.

Electronically based enterprise resources management has become a necessity for today's corporations to maintain their operational efficiency and effectiveness. Related to this, BKI has signed contract with PT Telkom, Tbk for the development and construction of SAP HANA Electronic Resources Planning (ERP) system.



3 Mei - Agustus 2016.



Didirikan sebagai PN Biro Klasifikasi Indonesia pada 1 Juli 1964, tahun 2016 ini PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) genap berusia 52 tahun Peringatan HUT yang berlangsung pada bulan Ramadhan ini antara lain diisi dengan pemberian penghargaan pengabdian kepada karyawan-karyawati yang telah membaktikan diri selama 15 dan 25 tahun, memberikan bantuan angkutan mudik lebaran, santunan kepada anak yatim-piatu dan janda-janda tidak mampu dari lingkungan sekitar kantor pusat perusahaan.

Established on July 1st, 1964 as PN Biro Klasifikasi Indonesia, by the year 2016 BKI was promptly 52 years old. The anniversary commemoration which went on in Ramadhan month was among others filled with awarding devotion award to employees who had devoted themselves for 15 and 25 years, providing homecoming transportation support for Eid, providing aid to underprivileged widows and orphans from the head office surrounding neighborhood.

4 Mei - Agustus 2016.

Menjadi anggota International Association of Classification Societies (IACS) adalah cita-cita yang telah lama diupayakan oleh BKI. Tanggal 7 Juli 2016 Tim BKI yang dipimpin Direktur Utama Rudiyanto dan Ketua Majelis BKI Laksamana TNI (Purn) DR Marsetio menyerahkan kelengkapan dokumen untuk aplikasi menjadi anggota IACS ke Sekretariat Permanen IACS di London. 1 November 2016 Sekretariat Permanen IACS menyampaikan bahwa BKI memenuhi ketentuan sebagai badan klasifikasi sesuai Piagam IACS dan boleh meneruskan proses aplikasinya menjadi anggota.

Being a member of the International Association of Classification Societies (IACS) is an ambition that have been long struggled by BKI. On 7 July, 2016 BKI team led by President Director Rudiyanto and BKI Council Chairman Admiral (Ret.) DR Marsetio submitted documents for membership application to IACS Permanent Secretariat in London. On 1 November 2016 IACS Permanent Secretary notified that BKI meets the requirements as a classification society under the IACS Charter and may continue its membership application process.



5 Mei - Agustus 2016.



Direksi BKI melakukan peletakan batu pertama dan ground breaking tanda dimulainya pembangunan Gedung SBU dan Graha BKI yang berada di sisi Selatan area kantor pusat Jakarta. Selain untuk perkantoran, gedung Graha BKI juga akan digunakan oleh BKI Academy, pusat pendidikan dan pelatihan sumber daya maritim terkait regulasi dan teknologi maritim untuk publik internal maupun eksternal perusahaan.

The Board of Directors conducted the laying of first stone and ground breaking, marking the commencement of the SBU and Graha BKI building construction which situated on the south side of Jakarta's headquarters area. Besides for office use, this Graha BKI building will also be used by BKI Academy, the center of maritime technological and international regulatory based human resources training and development center, for internal and external public purposes.

6 Mei - Agustus 2016.

Dalam memperingati Hari jadinya yang ke 52 pada 2016, BKI bersama dengan tujuh BUMN lain yang juga berulang tahun pada bulan Juli (Aneka Tambang, Tbk, Bank BNI, Indofarma, Jamkrindo, Perumnas, Petro Kimia Gresik, dan TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko) mengadakan kegiatan ulang tahun bersama dan acara program tanggung jawab sosial perusahaan yang dipusatkan di Wonosobo, Jawa Tengah. Acara yang dikemas sebagai bagian dari rangkaian kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri itu dihadiri oleh Menteri BUMN, direksi lebih dari 100 BUMN, para pejabat tinggi setempat, dan undangan penting lainnya.

In commemorating its 52nd Anniversary in 2016, BKI together with seven other SOEs which also had anniversary on July (Aneka Tambang, Tbk, Bank BNI, Indofarma, Jamkrindo, Perumnas, Petro Kimia Gresik, and TWC Borobudur, Prambanan and Ratu Boko) held a joint anniversary commemoration and corporate social responsibility program events in Wonosobo, Central Java. The events which were packaged as part of the series of BUMN Hadir Untuk Negeri program was attended by the Minister of SOEs, Board of Directors from more than 100 SOEs, local high rank officials, and other prominent guests.



7 September - Desember 2016.



BKI beserta dua BUMN jasa survey dan sertifikasi lainnya, Sucofindo dan Surveyor Indonesia, hadir dalam stand bersama BUMN Jasa Survey & Sertifikasi dalam kegiatan pameran berskala internasional Indonesian Business and Development Expo 2016 yang diprakarsai oleh Kementerian BUMN di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta.

BKI and the other two survey and certification services state-owned enterprises, Sucofindo and Surveyor Indonesia, were present under the "SOEs of Survey and Certification Services" joint booth at the international scale exhibition event of Indonesian Business and Development (IBD) Expo 2016 initiated by the Ministry of SOEs at Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta.

8 September - Desember 2016.

Manajemen BKI menyerahkan program bantuan bina lingkungan berupa 200 paket kebutuhan pokok serta beasiswa kepada siswa sekolah dasar warga Jalan Remaja Kelurahan Kebon Bawang yang menjadi tetangga terdekat kantor pusat BKI.

BKI Management gave corporate social responsibility aid in form of 200 packages of basic needs as well scholarships to primary school students residents of Remaja Street, Kebon Bawang Village which are the nearest neighbor of the company's head office.



9 | September- Desember 2016.



Kepedulian Manajemen BKI kepada pendidikan generasi muda di lingkungan terdekatnya diwujudkan melalui penyerahan bantuan beasiswa kepada 30 orang siswa-siswi SMK Yappenda Tanjung Priok yang berprestasi.

BKI Management attention to its closest neighborhood younger generation education were realized by awarding scholarship grant to 30 outstanding students of Yappenda Vocational High School, Tanjung Priok.

10 | September- Desember 2016.

BKI mendapatkan penghargaan sebagai BUMN Bidang Sertifikasi dengan kinerja keuangan "sangat bagus" dalam Rating BUMN 2016 yang dilakukan oleh Majalah Infobank. BKI mendapatkan predikat tersebut bedasarkan penilaian Biro Riset Infobank terhadap beberapa aspek kinerja keuangan antara lain pertumbuhan aset, penjualan, dan laba serta rasio keuangan seperti efisiensi, rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas.

BKI awarded as SOE in Certification Field with "excellent" financial performance in 2016 SOEs Rating conducted by Infobank Magazine. BKI got such predicate based on Infobank Research Bureau assessment on several financial performance aspect like assets growth, sales and profit as well the financial ratios like efficiency, profitability, liquidity and solvency.



11 | September- Desember 2016.



Pengakuan dan dukungan terhadap peranan strategis BKI terus mengalir dari para pemangku kepentingan. Direktur Utama BKI memberikan pemaparan dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan Fakultas Teknik Universitas Indonesia dalam acara Indonesian Cabotage Advocation Forum (Incafo) ke 6 yang diselenggarakan di Hotel Kempinski Jakarta.

Recognition and support to BKI's strategic roles continuously flowing from the stakeholders. BKI's President Director gave presentation and signed Memorandum of Understanding with Technical Faculty of University of Indonesia in 6th Indonesian Cabotage Advocation Forum (6th Incafo) held in Kempinski Hotel, Jakarta.

12 September- Desember 2016.

Industri asuransi, terutama yang bergerak di bidang asuransi lambung kapal dan muatan kapal adalah pemangku kepentingan utama sebuah badan klasifikasi. Cikal bakal lahirnya badan klasifikasi juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan pihak asuransi selaku penjamin muatan dan kapal pengangkutnya. Menanggapi hal tersebut manajemen BKI bekerjasama dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). AAUI mengadakan acara Focus Group Discussion dengan para praktisi dan underwriter marine sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil kerja BKI.

The insurance industry, especially those engaged in marine hull and marine cargo coverage are main stakeholders of a classification societies. The embryo of the birth of the classification society also can not be separated from the interests of the insurer as the guarantor of cargo and the ship as carrier. Responding to that matter, BKI Management in cooperated with the General Insurance Association of Indonesia (AAUI), held Focus Group Discussion with marine insurance practitioners and underwriters as one of effort to improve BKI works and quality service level.



13 Januari - Desember Tahun 2016



Selama tahun 2016 ini BKI menggelar sembilan acara customer meeting di Jakarta, Semarang, Surabaya, Jambi, Pekanbaru, Batam, Bitung, Ambon, dan Sorong yang bertujuan menjalin komunikasi langsung dan mendekatkan diri dengan para pemakai jasa, mitra kerja, dan pemangku kepentingan

During in 2016, BKI held nine customer meeting events in Jakarta, Semarang, Surabaya, Jambi, Pekanbaru, Batam, Bitung, Ambon and Sorong which aim to establish more directly communication and closer relationship with customers, working partners, and broader stakeholders.

14 Januari - Desember Tahun 2016.

BKI terus berpartisipasi aktif mendukung Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dalam sidang-sidang International Maritime Organization (IMO) baik sebagai peserta maupun penyiapannya materi. Sepanjang 2016 BKI mendukung Delegasi Pemerintah RI baik dalam upaya mempertahankan keanggotaan Dewan IMO Kategori C maupun menyuarakan kepentingan maritim strategis lainnya dalam forum MEPC, MSC, dan sidang Dewan IMO

BKI continues to actively participated in supporting the Indonesian Government Delegation on International Maritime Organization (IMO) sessions either as delegation member well in material preparation. During 2016 BKI supported Indonesian Delegation such as in preserving IMO Council "C Category" membership as well voicing other national maritime strategic interest in MEPC and MSC forums and IMO Council meetings.



Mengintensifkan Jasa Klasifikasi, Memperluas Portofolio Jasa Komersial

Intensifying Classification Services, Expanding
the Commercial Services Portfolio



PROFIL DEWAN KOMISARIS

Profile of The Board of Commissioners



DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

Erwin Rosmali
Komisaris
Commissioner

Minto Widodo
Komisaris
Commissioner



Sukatno

Komisaris Utama

President Commissioner

Faisal Ahmad

Komisaris

Commissioner



Di tengah kompetisi yang merebak di bidang klasifikasi, strategi BKI untuk menuju badan klasifikasi berstandar internasional mendapat ujian yang tidak mudah.

Within the increasing competition of the classification business, BKI's intention to become an international standard classification society faced significant challenges.

Pendahuluan

Para Pemangku Kepentingan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yang terhormat,

Secara umum perekonomian Indonesia pada tahun 2016 tumbuh 5,02 persen. Kondisi ekonomi nasional tersebut antara lain dipengaruhi kondisi perekonomian global di kuartal IV 2016 yang menunjukkan peningkatan namun pertumbuhannya belum merata.

Kondisi bisnis BKI pada tahun 2016, dapat dikatakan hampir sama dengan kondisi yang dialami di tahun 2015 lalu, dan masih terjadi saat ini. Demikian juga kondisi yang dialami oleh bisnis lain yang berkaitan dengan aktivitas Industri Perkapalan misalnya industri Migas, Batubara dan sumber daya alam lainnya serta industri transportasi yang masih belum menunjukkan perubahan signifikan. Disisi lain, dari segmen usaha Komersil kondisinya sangat kompetitif.

Dalam kondisi tersebut pada tahun 2016 BKI membukukan laba bersih sebesar Rp 67,61 miliar atau 69,42% dari target Tahun 2016

Introduction

Dear Stakeholders of PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero),

In general, the Indonesian economy in 2016 grew 5.02 percent. The national economic condition is influenced by the global economic condition in the fourth quarter of 2016, which shows an increase, yet the growth is not evenly distributed.

BKI's business condition in 2016 can be said to be almost the same as the condition experienced in 2015, which still lasting today. So is with the conditions experienced by other businesses related to shipping industry activities such as in oil and gas industry, coal and other natural resources and transportation industries that not yet shown significant changes. On the other hand, in the commercial business segment, the condition is very competitive.

Despite of these conditions, in 2016 BKI booked net profit of Rp 67.61 billion or 69.42% of the target in 2016

dan posisi aktiva/pasiva terealisir sebesar Rp. 771,64 miliar atau meningkat 11,95% dari posisi per 31 Desember 2015 yang sebesar Rp. 689,30 miliar. Laporan keuangan tahun 2016 BKI, telah diaudit oleh dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Ghazali, Sahat & Rekan, dengan opini Wajar Dalam Semua Hal Yang Material.

Kondisi yang secara signifikan memberi dampak terhadap kinerja BKI adalah sebagai berikut:

- a) Industri Pertambangan dan Energi masih belum menunjukkan perubahan dalam situasi harga masih cenderung mengalami penurunan, sehingga belum mampu menggerakkan investasi di sektor tambang dan energi.
- b) Industri Perkapalan mengalami perlambatan yaitu penurunan permintaan pembangunan kapal baru, sehingga beberapa galangan kapal ditutup misalnya yang terjadi di Batam.
- c) Regulasi Pemerintah: diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.61/2014 yang mengatur bahwa kewajiban klasifikasi kapal-kapal ber-bendera Indonesia, tidak lagi diharuskan oleh BKI namun diperbolehkan disertifikasi oleh badan klasifikasi asing yang diakui Pemerintah. Peraturan tersebut mencabut / revisi Nomor: PM.07/2013 dimana kewajiban klasifikasi kapal dilakukan oleh BKI.

Hal ini mengakibatkan menurunnya permintaan jasa BKI, yang akhirnya berakibat menurunnya pendapatan segmen klasifikasi baik penerimaan Klas maupun periodik. Dampak terbesar dialami oleh Cabang Batam dan Singapura.

Terhadap hal ini, Dewan Komisaris mengapresiasi upaya-upaya Direksi sudah efektif guna menahan laju penurunan segmen Klasifikasi antara lain dengan cara penerapan Automatic Class Suspension yang secara aktif menginformasikan survey status secara elektronik maupun pengiriman surat dan pemberitahuan lain kepada pemilik kapal.

and asset/liability position was grew amounting to Rp 771.64 billion or an increase of 11.95% from the position as of 31 December 2015 which was Rp 689.30 billion. The 2016 BKI financial statements have been audited by the Public Accountant Firm (KAP) Ghazali, Sahat & Rekan, with Fair opinion in all material matters.

The conditions that significantly influenced BKI's performance are as follows:

- a) The mining and energy industry still has not shown any change in the price trend, even with possibility to decrease, so it has not been able to grow investment in mining and energy sector.
- b) The shipbuilding industry is experiencing a slowdown which is the decrease in demand for new vessel construction, so that several shipyards are forced to ceased business such as in Batam.
- c) Government Regulation: the enactment of Minister of Transportation Regulation Number: PM.61/2014 stipulating that the obligation of classification of Indonesian-flagged vessels shall no longer be required only to BKI but may also carried out by recognized foreign classification body. The regulation revised the previous regulation No. PM.07 / 2013 which required the Indonesian-flagged vessels classed to BKI.

This resulted in a decrease in the demand for BKI services, which at the end resulted in declining class segment revenues either from admission to class or periodic survey. The biggest impact is experienced by Batam and Singapore Branches.

To this matter, the Board of Commissioners appreciated the Board of Directors' effective efforts in reducing the decline rate of classification segment by applying Automatic Class Suspension which actively informs the survey status electronically and sends letters and other notifications to the ship owner.

Dewan Komisaris juga telah mengarahkan agar Direksi berupaya meningkatkan pendapatan melalui peningkatan dan perluasan usaha Segmen Komersil agar sustainability Perusahaan dapat lebih terjamin. Dewan Komisaris sering mengingatkan Direksi bahwa segmen Komersil merupakan bisnis yang sangat kompetitif, sehingga dituntut kemampuan perhitungan bisnis yang akurat disertai manajemen risiko yang baik, dan sisi pengawasan/pengendalian biaya yang ketat agar terhindari dari kerugian.

Sebagai penyedia layanan jasa klasifikasi kapal dan keahlian teknik terkait, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) berupaya lebih meningkatkan profesionalisme dan integritasnya untuk memberikan pelayanan secara prima, terpercaya dan beretika. Perusahaan juga perlu terus melanjutkan kiprah aktifnya dalam sidang IMO dan semakin mensejajarkan dirinya dengan Klasifikasi Asing lainnya di Asia melalui Forum ACS (Asian Classification Societies Executive) Meeting untuk belajar dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya. Dalam bidang Konsultansi dan Supervisi, perusahaan juga tetap perlu memperkuat eksistensinya dengan meraih pasar dari kebutuhan jasa industri swasta, merealisasikan potensi pasar dan melengkapi infrastruktur serta kompetensi SDM untuk meningkatkan layanan kepada pengguna jasa.

Secara umum, Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi menekankan pentingnya menjaga pertumbuhan nilai perusahaan secara jangka panjang. Perusahaan perlu mengimbangi kegiatan bisnis dengan upaya pengembangan pada sumber daya manusia sebagai modal utama perusahaan, kegiatan riset dan pengembangan, penciptaan pasar baru, memperkuat database perusahaan serta pemenuhan mutu layanan yang berorientasi pada standar mutu internasional.

Demikian juga, pemanfaatan IT untuk inovasi pelayanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional harus terus dilanjutkan.

The Board of Commissioners has also directed the BOD to increase revenues through enhancement and expansion of commercial segment business so that the Company's sustainability can be more secure. The Board of Commissioners often reminds the BOD that the commercial segment is a highly competitive business, requiring accurate business calculation capability along with good risk management, and strict supervision/ cost control to avoid loss.

As a service provider in ship classification and related technical expertise, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) seeks to further enhance its professionalism and integrity to provide excellent, trusted and ethical service. The company also needs to continue its active participation in the IMO session to further equating itself with other foreign classifications in Asia through the ACS (Asian Classification Societies) Executive Forum Meeting to learn and improve its competence and capacity. In the field of consultancy and supervision, the Company also needs to strengthen its existence by reaching the market of private industry services demands, realizing market potential and completing infrastructure and human resource competencies to improve services to customers.

In general, the Board of Commissioners, together with the Board of Directors, emphasized the importance of maintaining long-term corporate value growth. Companies need to balance business activities with human resource development as the company's main capital, research and development activities, creation of new markets, strengthening corporate databases and fulfilling the quality of service oriented to international quality standards.

Likewise, IT utilization for service innovation and increased effectiveness and operational efficiency should be continued.

Di tengah kondisi saat ini, seluruh pencapaian PT BKI pada tahun 2016 tentunya dapat diraih atas rahmat dan karunia-Nya semata, oleh karena itu Dewan Komisaris memanjatkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kepada jajaran Direksi dan Staf, Dewan Komisaris juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi. Demikian juga kepada semua stakeholders atas kepercayaannya kepada perusahaan, Pemegang Saham yang senantiasa memberikan saran dan arahan pengelolaan perusahaan serta kepada Komite Audit yang telah bekerja sama dalam upaya pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing kita dalam melanjutkan perjuangan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) di masa mendatang serta secara konsisten mampu menerapkan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance.

In the middle of current conditions, all of BKI achievements in 2016. can only be achieved solely by His mercy and grace, therefore the Board of Commissioners offer gratitude to the presence of God Almighty. To the Board of Directors and Staffs, the Board of Commissioners also expressed gratitude and appreciation. Similarly, to all stakeholders for their trust to the Company, to Shareholders who always provide advice and directive in corporate management and to the Audit Committee who have cooperated in the effort of Board of Commissioners duty implementation.

May God Almighty guide us in continuing the struggle of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) in the future and able to consistently apply the Good Corporate Governance Principles.



Sukatno
Komisaris Utama
President Commissioner

Sukatno

Komisaris Utama
President Commissioner



Menjabat sebagai Komisaris Utama BKI dengan dasar hukum pengangkatan Keputusan Menteri BUMN No. SK-12/MBU/2014 tanggal 15 Januari 2014, Sukatno pernah menjadi Direktur Sekolah Intelijen Maritim TNI-AL, Ketua Tim Pemeriksa (Auditor) Kementerian Pertahanan & TNI, serta Pengajar Bidang Hankam di Lemhanas RI. Sukatno merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut. Pada akhir tahun 2016, beliau berusia 61 tahun.

Holding the position of President Commissioner of BKI based on the Minister of SOE's Decree No. SK-12/MBU/2014 of 15 January 2014, Sukatno was the Director of the Indonesian Navy School of Intelligent, Head of the Auditor Team of the Ministry of Defence & Armed Force, and Lecturer in Defense and Security subject of Lemhanas RI. Sukatno graduated from Indonesian Naval Academy and by the end of 2016 he was 61 years old.

Minto Widodo

Komisaris
Commissioner



Menjabat sebagai Komisaris BKI dengan dasar hukum pengangkatan Keputusan Menteri BUMN No. SK-322/MBU/2012 tanggal 11 September 2012 dan Keputusan Dewan Komisaris No. KU.001/Dekom.101/ III/2013 tanggal 1 Maret 2013, Minto Widodo menjadi pegawai Kementerian Keuangan RI pada tahun 1981 dan pernah menjadi Kepala Pusat Sistem Informasi Keuangan Daerah (1996–2004), serta Sekretaris Bapeksta Keuangan (1996). Minto Widodo mendapatkan gelar Master of Arts Ekonomi dari Colorado State University, AS (1989) dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1981). Pada akhir tahun 2016, beliau berusia 64 tahun.

Holding the position of BKI's Commissioner based on Minister of SOE's Decree SK-322/MBU/2012 of 11 September 2012 and the Board of Commissioners Decree No. KU.001/Dekom.101/III/2013 of 1 March 2013, Minto Widodo became an officer of the Indonesian Ministry of Finance in 1981 and was the Head of the Centre of Regional Financial Information (1996-2004) and the Secretary of Bapeksta Keuangan (1996). Minto Widodo holds Master Degree in Economic from Colorado State University, USA (1989) and Bachelor Degree in Economic from Gajah Mada University, Yogyakarta (1981). At the end of 2016, he was 64 years old.

Faisal Ahmad

Komisaris
Commissioner



Menjabat sebagai Komisaris BKI dengan dasar hukum pengangkatan Keputusan Menteri BUMN No. SK-12/MBU/2014 tanggal 15 Januari 2014, Faisal Ahmad merupakan Kepala Bidang Usaha Industri Strategis Kementerian BUMN (2014-sekarang) dan pernah menjadi Komisaris PT Rajawali I Surabaya (2012-2014). Faisal Ahmad mendapatkan gelar Magister Manajemen Keuangan Universitas Bhayangkara, Jakarta (2008) dan Sarjana Manajemen Universitas Pancasila, Jakarta (1993). Pada akhir tahun 2016, beliau berusia 47 tahun.

Holding the position of BKI's Commissioner based on the Minister of SOEs Decree No. SK-12/MBU/2014 of 15 January 2014, Mr. Faisal Ahmad is the Head of the Field of Strategic Industries of the Indonesian Ministry of SOEs and was Commissioner of PT Rajawali I Surabaya (2012-2014). He hold Master Degree in Financial Management from Bhayangkara University (2008) and Bachelor Degree in Management from Pancasila University, Jakarta (1993). At the end of 2016, he was 47 years old.

Erwin Rosmali

Komisaris
Commissioner



Menjabat sebagai Komisaris BKI dengan dasar hukum pengangkatan Keputusan Menteri BUMN No. SK-322/MBU/2012 tanggal 11 September 2012 dan Keputusan Dewan Komisaris No. KU.001/Dekom.101/III/2013 tanggal 1 Maret 2013, Erwin Rosmali merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI. Erwin Rosmali merupakan lulusan Akademi Ilmu Pelayaran. Pada akhir tahun 2016, beliau berusia 61 tahun.

Holding the position of Commissioner of BKI based on the Minister of SOEs Decree SK-322/MBU/2012 of 11 September 2012 and the Board of Commissioners Decree No. KU.001/Dekom.101/III/2013 of 1 March 2013, Erwin Rosmali was formerly Secretary of Directorate General of Sea Transportation, of the Indonesian Transportation Ministry. He graduated from Maritime Institute, Jakarta. At the end of 2016, he was 61 years old.

BKI Tumbuh Bersama Pemangku Kepentingan





Bki Growing With the Stakeholders

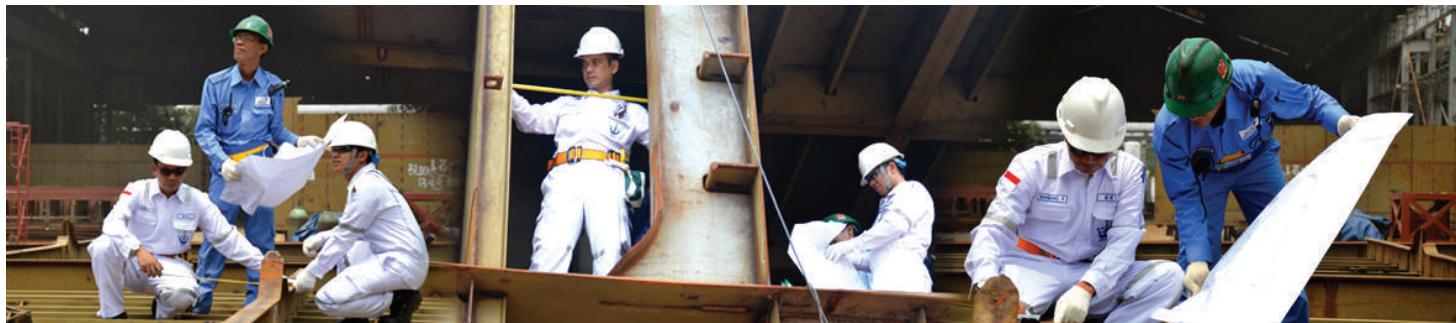
LAPORAN DEWAN DIREKSI

Boards of Directors



Menjadi badan klasifikasi dan perusahaan
jasa pemastian berkelas dunia

To become a world-class classification society
and independent assurance company



Kinerja keuangan BKI tidak terlepas dari kondisi perekonomian Indonesia, khususnya dinamika usaha industri pelayaran dan galangan kapal nasional.

BKI financial performance can not be separate with Indonesia's economic condition, especially to national shipping and ship building industries business condition dynamics.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Secara garis besar kondisi perekonomian nasional sepanjang tahun 2016 belum menunjukkan perbaikan yang berarti dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu pula yang terjadi dalam sektor industri pelayaran, galangan kapal, dan industri penunjangnya serta bidang migas yang menjadi sumber pendapatan material Perusahaan.

Terlepas dari kondisi yang masih belum bergairah tersebut, Manajemen BKI berbesar hati untuk melaporkan bahwa sepanjang tahun 2016 ini kinerja usaha Perusahaan masih dapat dijaga sehingga terhindar dari stagnasi ataupun penurunan yang drastis.

Hal yang patut disyukuri adalah bahwa ibarat sebuah kapal, BKI masih dapat mengarungi gelombang lautan menuju arah yang benar sekali pun tidak dalam kecepatan penuh. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya serius yang dilakukan oleh seluruh jajaran BKI, baik di pusat maupun cabang-cabang, untuk terus mengupayakan produktivitas yang tinggi baik pada segmen klasifikasi maupun komersil.

Dear respective Shareholder and Stakeholders,

Generally speaking, the national economic condition during 2016 has not shown any significant improvement compared to the previous year. As well as what happened in the shipping and shipbuilding industry, and its supporting industries as well oil and gas sector which become of material source of income for the Company.

Despite the lackluster condition, BKI Management is heartened to report that throughout the year 2016, the Company's business performance still can be maintained so as to avoid stagnation or drastic decline.

The thing we should be grateful for is that like a ship, BKI was still able to sail the ocean turbulence in the right direction even though not at full speed. This surely could not be separated from the serious efforts undertaken by the whole BKI range, both at the head office and branches, to continue attempting for high productivity either in classification or commercial segment.

Kondisi sektor industri pelayaran, galangan kapal, dan industri penunjangnya serta bisnis migas yang belum menunjukkan gairah yang menggembirakan itu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pencapaian target kinerja Perusahaan.

Melemahnya kegiatan usaha pelayaran dan galangan kapal, sebagai akibat dari penurunan kegiatan di bidang usaha yang banyak memanfaatkan kapal sebagai sara angkutan, berdampak langsung pada penurunan kinerja unit usaha klasifikas dan statutoria. Masih banyaknya jumlah kapal yang di-lay up karena tidak kunjung mendapatkan kontrak muatan serta sedikitnya kapal baru yang dibangun masih dominan mewarnai sektor ini.

Di segmen komersil, yang membidangi usaha bidang konsultansi dan supervisi maritim, industri, dan energi, kondisinya juga tidak jauh berbeda. Banyak proyek-proyek yang dijadwalkan kembali atau ditunda, serta mengalami kelambatan dalam pembayarannya.

Di tengah-tengah kondisi yang masih belum menguntungkan bagi pertumbuhan usaha itu, upaya Manajemen membawa Perusahaan agar bisa bertahan dan terus menunjukkan kinerja yang terbaik membawa hasil yang patut disyukuri.

Tahun 2016 ini menjadi tonggak sejarah penting bagi Perseroan terkait dengan keanggotaan International Association of Classification Societies (IACS) atau Asosiasi Internasional Badan-badan Klasifikasi. Para tanggal 7 Juli 2016, Tim yang dipimpin Direktur Utama dan Ketua Majelis BKI menyerahkan beras aplikasi keanggotaan kepada kantor pusat IACS di London, Inggris dan diterima oleh Sekretaris Permanen dan Sekretaris Kualitas IACS .

Sekitar empat bulan kemudian, tanggal 1 November 2016, BKI menerima surat dari Sekretaris Permanen IACS memberitahukan bahwa BKI memenuhi kriteria sebagai badan klasifikasi sesuai Piagam IACS dan dapat meneruskan proses aplikasi keanggotaannya. Posisi saat ini berkas aplikasi keanggotaan BKI masih dalam pembahasan tim panel IACS untuk nantinya ditindaklantut melalui kegiatan audit dan verifikasi.

The condition of the shipping sector, shipyard, and its supporting industries as well oil and gas business that have not shown exciting passion led significant enough impact on the achievement of Corporate performance targets.

The weakening of shipping and shipyard business activities, as a result of the declining activities in business that use plenty of ships as a means of transportation, resulted a direct impact of performance decrease in classification and statutory business. The large number of ships that are laid-up due to unable to get freight contract and the lack of new vessels built was still dominant coloring in this sector.

In the commercial segments, which consist of consultancy and supervision business in maritime, industry and energy, the conditions are not much different. Many projects were rescheduled or postponed, and had a delay in its payments.

In the midst of unfavorable conditions for business growth, Management's efforts in bringing the Company to survive and continue to show its best performance resulted in something to be thankful for.

This year 2016 becomes an important milestone for the Company in relation to membership of the International Association of Classification Societies (IACS). On 7 July, 2016, a Team led by the President Director and BKI Committee Chairman submitted membership application file to IACS head quarter in London, England, and received by IACS' Permanent Secretary and Quality Secretary.

About four months later, on 1 November 2016, BKI received a letter from the IACS Permanent Secretary informing that BKI meets the criteria as a classification society under the IACS Charter and may continue its membership application process. The current position of BKI's membership application file is still under discussion of the IACS Panel Team to be later followed up by audit and verification activities.

Sekilas Kinerja Korporasi

Untuk keseluruhan segmen klasifikasi dan komersil, Perseroan untuk tahun 2016 ini berhasil memperoleh pendapatan sebesar Rp 737,993 miliar atau 83,71% dari target anggaran tahun 2016. Dari jumlah tersebut segmen klas memberikan kontribusi pendapatan sebesar Rp 372,802 miliar (91,53% dari target anggaran 2016) dan segmen komersil sebesar Rp 365,191 miliar atau 76,98% dari anggaran 2016.

Upaya kehati-hatian dan prinsip efisiensi yang dijalankan Manajemen memberikan kontribusi yang positif dalam menjaga kinerja keuangan perusahaan. Hingga akhir tahun buku 2016 Manajemen berhasil menjaga agar biaya-biaya dan pengeluaran tidak melampaui anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp 645,199 miliar atau 86,45% dari anggaran tahun 2016.

Dari jumlah pendapatan dan pengeluaran yang demikian itu, pada akhir tahun buku 2016 Perseroan berhasil membukukan laba usaha sebesar Rp 92,794 miliar (68,55% dari anggaran tahun 2016) dan laba setelah pajak sebesar Rp 67,613 miliar atau 69,42% dari jumlah yang dianggarkan.

Kondisi likuiditas Perseroan secara umum cukup baik, dengan Current Ratio sebesar 336,70% kondisi finansial Perseroan cukup aman dengan hutang-hutang jangka pendek dijamin lebih kurang tiga kali oleh aset lancar Perusahaan. Cash Ratio Perusahaan mencapai 54,20%, dengan saldo kas dan setara kas mencapai Rp 89,396 miliar yang mengindikasikan bahwa kondisi likuiditas perusahaan secara umum baik.

Rentabilitas atau kemampuan Perseroan medatangkan keuntungan yang tercermin dari angka Return on Equity (ROE) dan Return on Asset (ROA) untuk tahun 2016 ini masing-masing berada di 14,34% dan 11,64 persen. Jika dibandingkan dengan tingkat suku bunga rata-rata bank yang berlaku sepanjang 2016 sebesar 7,5% per tahun, dapat disimpulkan bahwa kinerja Manajemen untuk memaksimalkan keuntungan Pemegang Saham atau terhadap aset masih perlu ditingkatkan.

Corporate Performance

For the entire classification and commercial segment, the Company for the year 2016 managed to yield revenue of Rp 737.993 billion or 83.71% of the 2016 budget target. From that amount the classification segment contributed revenue of Rp 372.802 billion (91.53% of the 2016 budget target) and commercial segment of Rp 365,191 billion or 76.98% of the 2016 budget.

Prudential efforts and efficiency principles taken by Management lead to a positive contribution in maintaining Company's financial performance. By the end of 2016 fiscal year, the Management managed to keep overall costs and expenses to not exceeding the set budget, with total of Rp 645,199 billion or 86.45% of the 2016 budget.

Of the such total revenues and expenditures, by the end of 2016 fiscal year, the Company successfully booked operating profit of Rp 92.794 billion (68.55% of the 2016 budget) and profit after tax of Rp 67.613 billion or 69.42% of the budgeted number.

The Company's liquidity condition in general is quite good, with the Current Ratio of 336.70% the Company's financial condition is quite safe with short-term debt secured approximately three times by the Company's current assets. The Company's Cash Ratio reached 54.20% with cash and cash equivalents amounting to Rp 89.396 billion, indicating that the company's liquidity condition is generally good.

The profitability or Company's capability to bring profits as reflected in Return on Equity (ROE) and Return on Assets (ROA) figures for 2016, respectively at 14.34% and 11.64%. Compared with the prevailing average banks interest rates of 7.5% per annum in 2016, it can be concluded that the Management's performance to maximize shareholder profits or towards on assets still needed to be improved.

Untuk penilaian tingkat kesehatan BUMN pada periode 2016, Perseroan mendapatkan nilai 85,50 dengan predikat Sehat "AA". Untuk penilaian tingkat pencapaian Kontrak Manajemen sesuai Key Performance Indicator (KPI), Perseroan mendapatkan angka 86,17%. Sedangkan untuk pencapaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) yang dilakukan oleh assessor independen dari Forum Ekselen BUMN, Perseroan mendapatkan skor 500,50.

Dari sisi kinerja per segment usaha, jasa klasifikasi dan statutoria mampu memberikan kontribusi Rp 372,802 miliar atau 50,50% total pendapatan Perseroan. Selama 2016 BKI menerima 22.615 permintaan survei yang didominasi oleh permintaan survei tahunan, survei pengedokan, dan survei khusus. Selain itu untuk kegiatan statutoria, BKI melakukan sebanyak 9.368 permintaan yang didominasi oleh survei dan sertifikasi untuk Garis Muat, Kode ISM, dan Kode ISPS.

Untuk segmen jasa konsultansi dan supervsi yang sekarang dikenal dengan nama segmen jasa komersil, BKI berhasil membukukan pendapatan Rp 365,191 miliar atau 49,50% dari total pemasukan Perusahaan. Beberapa proyek besar yang digarap sepanjang 2016 yang secara material berkontribusi pada pendapatan segmen ini antara lain proyek KSO BKI-Sucofindo untuk sertifikasi peralatan dan instalasi Pertamina, proyek pengawasan pembangunan dan sertifikasi kapal penangkap ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, penerbitan Surat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) dan Surat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi terbesar di dunia Sarulla, dan pekerjaan konsultan pengawas independen jaringan kabel bawah laut Palapa Ring Timur.

Prospek Usaha

Mencermati kinerja Perseroan sepanjang tahun 2016 dan prospek usaha di tahun 2017, Manajemen BKI menetapkan beberapa asumsi makro internal dan eksternal sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2017. Beberapa asumsi internal yang dijadikan pertimbangan adalah:

For the SOEs Wellness Level Assessment in the 2016 period, the Company obtained a score of 85.50 with Healthy "AA" predicate. For the Management Contract achievement level assessment according to Key Performance Indicator (KPI), the Company got 86.17%. And for the achievement of the Superior Performance Appraisal Criteria (KPKU) held by independent assessor of the SOEs Excellent Forum, the Company obtained a score of 500.50.

In terms of performance by each business segment, the classification and statutory services contributed Rp 372.802 billion or 50.50% of total revenues. During 2016 BKI received 22,615 survey requests which were dominated by annual survey requests, docking surveys and special surveys. In addition, for the statutory activities BKI performing as many as 9,368 requests mostly for survey and certification of Load Line, ISM Code and ISPS Code.

For the consultancy and supervision services now known as the commercial services segment, BKI successfully booked Rp 365,191 billion revenues or 49.50% of the Company's total. Several significant projects carried out during 2016 that materially contribute to the segment's revenues include the KSO BKI - Sucofindo project for Pertamina equipment and installation certification, Fishing Vessels construction supervision and certification project of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, the issuance of the Installation Feasibility Letter (SKPI) And SKPP of world's largest Geothermal Power Plant project, Sarulla and independent supervision consultant job contract for East Palapa Ring undersea fiber optic cable network.

Business prospect

Observing the Company's performance throughout 2016 and of 2017 business prospects, BKI Management sets several internal and external macro assumptions as the basis in compiling the Company's Working Plan and Budget (RKAP) 2017. Some of the internal assumptions made into consideration are:

- Pertumbuhan penerimaan klas +/- 3% dari jumlah kapal register BKI
- Pertumbuhan pendapatan segmen klasifikasi dan statutoria 14,52% dari prognosis 2016
- Pertumbuhan pendapatan segmen komersil 18,06% dari prognosis 2016
- Kenaikan gaji pegawai rata-rata 10%
- Bonus pegawai dibebankan kepada biaya usaha Rp 13,5 miliar
- Biaya balas jada purna tugas 75% dari THP
- Kenaikan tarif layanan +/- 10%

Sedangkan beberapa asumsi eksternal yang digunakan sebagai dasar penyusunan RKAP 2017 adalah:

- Pertumbuhan ekonomi nasional 5,3%
- Angka inflasi 4%
- Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS Rp 13.300,-
- Suku bunga SPN 3 bulan 5,3%
- Harga minyak mentah Indonesia (ICP) 45 Dollar AS per barrel
- Lifting minyak 780 ribu barrel per hari Tidak ada perubahan kebijakan
- Pemerintah yang berpengaruh terhadap penugasan BKI
- Situasi keamanan dan perekonomian nasional tetap stabil

Berangkat dari asumsi-asumsi di atas, sasaran yang diharapkan dapat dicapai oleh Perseroan pada tahun 2017 adalah:

- Tercapainya kualitas pelayanan setara dengan standar IACS untuk meningkatkan kepercayaan pemakai jasa dan pengakuan pemangku kepentingan.
- Mendapatkan tambahan pelimpahan otorisasi statutoria dari Pemerintah Indonesia dan negara lain.
- Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dan profesional yang memiliki integritas tinggi dan daya saing global.
- Mempunyai sistem manajemen dan organisasi yang sehat untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan.
- Pelaksanaan audit oleh BSI selaku badan sertifikasi yang terakreditasi IACS terkait aplikasi sebagai anggota IACS.

- Admission to class growth is +/- 3% of the number of BKI's registered ships
- Classification and statutory segment revenue growth is 14.52% of 2016 prognosis
- Commercial segment revenue growth is 18.06% of 2016 prognosis
- An increase in employee salaries on average 10%
- Employee bonuses charged to business expenses of Rp 13.5 billion
- Retirement benefits 75% of THP
- Service rate fee increase +/- 10%

While some of the external assumptions used as the basis for compiling the RKAP 2017 are:

- National economic growth of 5.3%
- Inflation rate of 4%
- The Rupiah exchange rate against the US Dollar is Rp 13,300, -
- 3 month SPN rate of 5.3%
- Indonesia's crude oil price (ICP) of 45 US dollars per barrel
- National oil lifting 780,000 barrels per day
- No change in Government policy that may influence BKI assignment
- National security and economic conditions remain stable

Based on above assumptions, Targets expected to be reached by the Company in 2017 are:

- The achievement of service quality equivalent to IACS standard to increase customer trust and stakeholder recognition.
- Obtained additional statutory authorization delegation from Indonesian Government and other countries.
- Have competent and professional human resources with high integrity and global competitiveness.
- Have a sound management and organization system to improve employee productivity and welfare.
- Implementation of audits by BSI as IACS accredited certification body related to IACS membership application

- Memiliki sistem Teknologi Informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Untuk segmen jasa klasifikasi dan statutoria, sasaran yang akan diwujudkan pada tahun 2017 di antaranya adalah penerapan IACS-QSCS, IACS Unified Requirements, dan Procedural Requirements, peningkatan kecepatan informasi pelaksanaan survey secara on line dalam 2 x 24 jam dan penyelesaian laporan survey dalam 18 hari kerja, peningkatan kecepatan persetujuan pemeriksaan gambar dalam 30 hari setelah gambar diterima di kantor pusat dengan proses e-drawing, peningkatan kecepatan penerbitan sertifikat permanen dalam 30 hari, penerapan automatic class suspension dan informasi status survey kapal via on line, mendapatkan tambahan otorisasi penuh penugasan statutoria dari Pemerintah Indonesia dan negara lain, dan mendapatkan kinerja "high performance" dalam Annual Report PSC Tokyo Mou.

Sementara untuk segmen jasa komersil beberapa sasaran yang diharapkan dicapai adalah mempertahankan dan memberikan nilai tambah terhadap portofolio bisnis yang telah dikerjakan, menambah portofolio bisnis dan pelanggan baru dalam layanan jasa pemastian independen bidang marine yang memiliki nilai pendapatan tinggi, dan melakukan ekspansi bisnis.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) adalah salah satu cara meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan nilai Perseroan secara keseluruhan, selain sebagai pedoman etika dan integritas dalam menjalankan kegiatan usaha. Terkait dengan penerapan prinsip GCG pada tahun 2015 BKI telah melakukan self assessment untuk mengetahui kinerja implementasi Tata Kelola Perusahaan dengan nilai 92,43 dengan capaian sebesar 92,25%.

BKI memiliki beberapa organ yang membantu penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Selain Komite Audit yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, BKI memiliki fungsi Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

- Have an Information Technology system that suits needs and technological developments.

For classification and statutory services segment, the targets to be achieved in 2017 including the implementation of IACS-QSCS, IACS Unified Requirements, and IACS Procedural Requirements; increasing the quickness of on-line survey information in 2 x 24 hours and completion of survey reports in 18 working days, increased drawing approval process quickness in 30 days after drawings received at head office by e-drawing process, increasing permanent certificate issuance quickness within 30 days, applying automatic class suspension and on line ship survey status information, obtaining additional full statutory authorization assignment from the Indonesian Government and other countries, and gained "high performance" status in Tokyo MoU PSC Annual Report.

While for the commercial services segment, some of the expected targets achieved are maintaining and giving value added to existing business portfolio, increasing business portfolio and gain new customers in independent marine assurance services with high income value, and expanding the business.

Implementation of Good Corporate Governance

The Implementation of Good Corporate Governance (GCG) is one way to improve overall management accountability and company value, as well as ethical and integrity guidance in running business activities. Associated with the implementation of GCG principles, in 2015 BKI has conducted self assessment to determine the Corporate Governance implementation performance with a score of 92.43 and achievement level of 92.25%.

BKI has several organs that help good corporate governance implementation. In addition to the Audit Committee responsible to the Board of Commissioners, BKI has the functions of the Internal Audit Unit (SPI) and ISO 9001: 2008 Quality Management System.

Sepanjang tahun 2017, SPI BKI melakukan 18 Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) di unit produksi klasifikasi dan komersil, dan dua unit kerja kantor pusat. Untuk pelaksanaan audit internal terkait sistem manajemen mutu dilakukan oleh Divisi Manajemen Strategi yang mencakup 28 unit produksi klasifikasi dan statutoria, 18 unit produksi komersil, serta audit HSE di 21 unit produksi.

Mewakili Direksi dan Manejemen Perseroan, perkenankan saya mengucapkan terima kasih atas nasehat, pengawasan, dan dukungan yang telah diberikan Pemegang Saham dan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2016. Untuk tahun yang akan datang, Direksi memandang tahun 2017 dengan optimisme bahwa tahun ini akan membawa pertumbuhan yang positif bagi BKI.

Kepada seluruh insan Perseroan di semua lini, Direksi juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan, disertai harapan bahwa untuk tahun 2017 kita dapat mengoptimalkan kinerja masing-masing untuk pencapaian kinerja terbaik BKI secara keseluruhan serta bagi kebaikan dan kesejahteraan kita semua.

Throughout 2016, SPI BKI conducted Annual Examination Work Programs (PKPT) in 18 classification and commercial production units and two head offices' working units. For the internal audits of quality management system were performed by the Strategic Management Division which includes 28 classification and statutory production units, 18 commercial production units, and HSE audits in 21 production units.

On behalf of the Board of Directors and Company's Management, please allow me to thank you the Shareholder and Board of Commissioners for the advice, supervision and support provided throughout 2016. For the coming year, the Board of Directors views 2017 with optimism that this year will bring positive growth for BKI.

To all of the Company's personnel on all fronts, the Board of Directors also expressed gratitude for the dedication and hard work that has been contributed, together with hope that in 2017 we can optimize our respective performance to achieve BKI's best performance as a whole as well for our kindness and prosperity, the nation and state.



Rudiyanto
Direktur Utama
President Director

Rudiyanto

Direktur Utama President Director



Menjabat sebagai Direktur Utama BKI dengan dasar hukum pengangkatan Keputusan Menteri BUMN No. SK-424/MBU/2013 tanggal 19 Desember 2013, Rudiyanto pernah menjadi Direktur Komersil II Sucofindo dan VP SBU Engineering dan Transportasi Sucofindo (2008-2013). Rudiyanto mendapatkan gelar Magister Manajemen dari IPMI Jakarta, BSc dari International Institute for Risk and Safety Management, Inggris, serta Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta dan Sarjana Teknik Perminyakan dari UPN Veteran Yogyakarta. Pada akhir 2016 Rudiyanto berusia 50 tahun.

Holding the position of President Director of BKI based on Minister of SOEs Decree No. SK-424/MBU/2013 of 19 December 2013, Rudiyanto was the Director of Commercial 2 of Sucofindo (2013) and VP of SBU Engineering and Transportation of Sucofindo (2008-2013). He holds Master Degree in Management from IPMI Jakarta, Bachelor of Science Degree in Risk and Safety Management from International Institute for Risk and Safety Management, UK and Bachelor Degree in Political Science from Gajah Mada University, Yogyakarta and Bachelor Degree in Oil Engineering from UPN Veteran Yogyakarta. By the end of 2016 he was 50 years old.

Iman Satria Utama

Direktur Klasifikasi
Classification Director



Menjabat sebagai Direktur Klasifikasi BKI berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-284/MBU/2012 tanggal 3 Agustus 2012 yang dikukuhkan kembali dengan Keputusan Menteri BUMN No. SK-424/MBU/2013 tanggal 19 Desember 2013, Iman Satria Utama pernah menjadi Kepala Kantor Adpel Palembang (2011-2012), Kasubdit Nautis, Teknik dan Radio Kapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan (2009-2011), dan Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal Adpel Semarang (2007-2009). Iman Satria Utama mendapatkan gelar Magister Manajemen dari STIE Budi Luhur, Jakarta dan Sarjana Ilmu Sosial Ilmu Politik dari Universitas Saburai, Bandar Lampung. Pada akhir tahun 2016 Iman Satria berusia 57 tahun.

Holding the position of Director of Classification based on Minister of SOEs Decree SK-284/MBU/ 2012 of 3 August 2012 and was re-appointed based on Decision of the Minister of SOEs SK-424/MBU/2013 of 19 December 2013, Iman Satria Utama was the Head of Palembang Port Administrator Office (2011-2012), Head of the Subdirectorate of Nautical, Technical and Ship Radio Directorate of Shipping and Seafaring Ministry of Transportation (2009-2011), and Head of Ship Seaworthiness Division - Semarang Port Administrator (2007-2009). He holds Master Degree in Management from STIE Budi Luhur, Jakarta (2001) and a Bachelor in Social-Political Science of Universitas Saburai, Bandar Lampung (1991). By the end of 2015, he was 57 years old.

Timbul Tambunan

Direktur Keuangan dan Administrasi

Director of Finance and Administration



Menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi BKI dengan dasar hukum pengangkatan Keputusan Menteri BUMN No. SK-32/MBU/2014 tanggal 5 Februari 2014, yang dikukuhkan kembali dengan Keputusan Menteri BUMN No. SK-.424/MBU/2013 tanggal 19 Desember 2013. Timbul Tambunan pernah menjadi Asisten Deputi Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN, Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero), Dewan Komisaris PT LEN Industri (Persero), PT Bharata Indonesia, dan PT Pindad (Persero). Timbul Tambunan mendapat gelar Magister Manajemen Sumber Daya Manusia dari STIE Ganesha, Jakarta dan Sarjana Ekonomi Manajemen Perusahaan dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta. Pada akhir 2016 Timbul Tambunan berusia 57 tahun.

Holding the position of Director of Financial and Administration based on Minister of SOEs Decree number: SK-32 / MBU / 2014 dated February 5, 2014, which was reinforced by the Decree of the Minister of SOEs no. SK-.424 / MBU / 2013 dated December 19, 2013. Timbul Tambunan was Minister of SOEs Deputy Assistant for Infrastructure and Logistic Business, Commissioner of PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Bharata Indonesia (Persero) and PT Pindad (Persero). Timbul Tambunan holds Master Degree in Human Resources Management from STIE Ganesha, Jakarta and Bachelor of Economy in Corporate Management from Krisnadwipayana University, Jakarta. By the end of 2016 Timbul Tambunan was 57 years old.

BKI menggunakan Kesepakatan Tingkat Pelayanan (SLA) sebagai salah satu instrumen menjaga tingkat kinerja usaha korporasi yang tinggi



BKI using Service Level Agreement as one of the instruments to maintain high level of corporate business performance

RENCANA STRATEGIS 2016 - 2020

Strategic Plan 2016 - 2020



Strategic Plan

Pendahuluan

Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia mengembangkan RPJMN 2015-2019. BKI ikut mengambil peran, berkonsultasi dengan berbagai pihak termasuk namun tidak terbatas pada Menko Maritim, Deputi Menko Perekonomian, KKP, Kemenhub, serta SKK Migas - dan mengembangkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan BKI 2015-2019.

Dari sudut pandang sebagai badan klasifikasi, BKI melihat rencana Poros Maritim dan Tol Laut serta karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan bermuara kepada pengembangan dan penguatan industri kapal nasional.

BKI berpendapat ada tiga pilar pengembangan terpadu yang menopang percepatan pengembangan daya saing industri kapal nasional, yaitu:

- Standarisasi tipe dan ukuran kapal domestik;
- Revitalisasi dan klasterisasi galangan kapal nasional; serta
- Standarisasi dan pengembangan komponen kapal dalam negeri.

Introduction

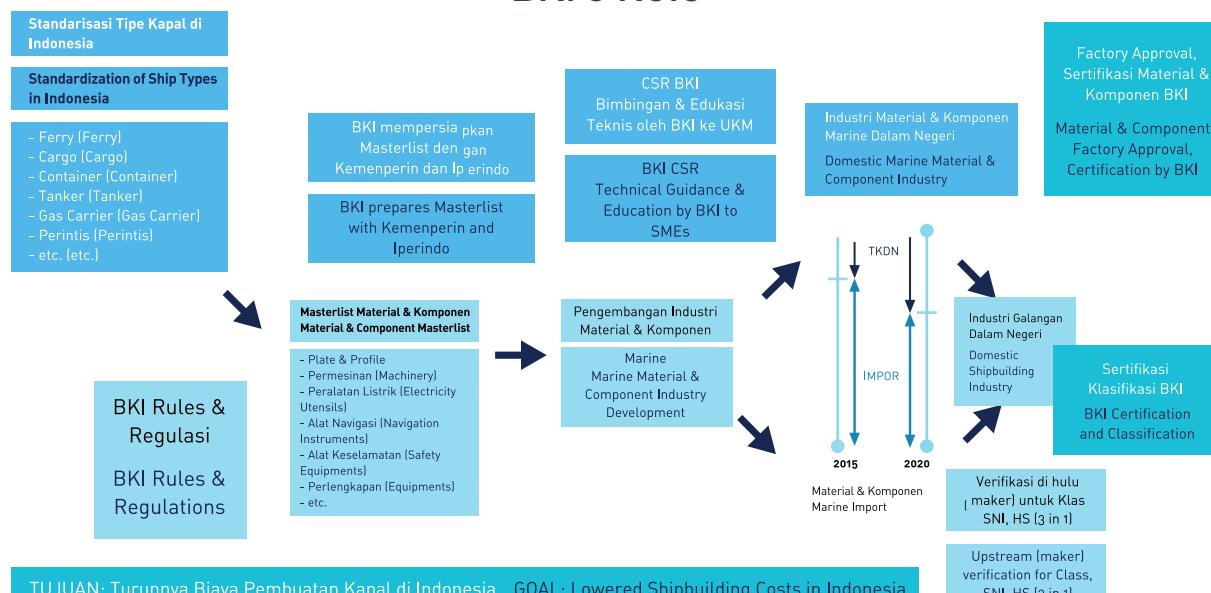
In 2014, the Indonesian Governance developed RPJMN 2015 - 2019. BKI took part, consulted with various parties--including but not limited to Coordinating Minister of Maritime Affairs, Coordinating Minister of Economics' Deputy, Ministry of Maritime Affairs and Fishery, Ministry of Transportation, and Oil and Gas Task Force--and developed BKI's Long Term Corporate Plan 2015-2019.

From point of view as classification society, BKI sees the Maritime Axis plan and Sea Toll as well Indonesian characteristic as archipelago state leads to the developing and strengthening of national shipbuilding industries.

BKI contended there were three integrated development pillars which support national shipping industry competitiveness acceleration, i.e.:

- The standardization of types and sizes of domestic ships;
- The revitalization and clustering of national shipyards; and
- The standardization and development of domestic ship components.

Peran BKI BKI's Role



BKI berkomitmen untuk mendayagunakan standarisasi kapal dan komponen kapal dalam negeri dengan tujuan ikut menurunkan biaya pembuatan kapal di Indonesia. Prosesnya adalah sebagai berikut:

- BKI mengembangkan dan menerapkan Rules & Regulations BKI untuk merumuskan standarisasi tipe kapal di Indonesia;
- Bersama Kemenperin dan Iperindo, BKI mempersiapkan master list untuk pembuat kapal dalam negeri;
- Melalui kegiatan CSR berupa bimbingan dan edukasi teknis kepada UKM, BKI mendorong pengembangan tingkat kandungan dalam negeri dalam pengembangan industri material dan komponen kelautan;
- Melalui factory approval, sertifikasi material dan komponen kelautan, BKI menarik industri material dan komponen kelautan dalam negeri agar berkembang lebih cepat sesuai standar Indonesia;
- Melalui verifikasi di hulu (maker) dalam hal kelas, SNI, dan HS, BKI memastikan kesesuaian komponen impor dengan standar Indonesia;
- Melalui sertifikasi dan klasifikasi, BKI menjaga kinerja industri galangan kapal dalam negeri sesuai dengan standar Indonesia.

BKI is committed to utilize the standardization of domestic ships and ship components to lower shipbuilding costs in Indonesia, with the following process:

- BKI develops and implements BKI Rules & Regulations to formulate the standardization of ship types in Indonesia;
- Together with the Ministry of Industry and Iperindo, BKI prepares a master list for domestic shipbuilding;
- Through CSR programs in the form of guidance and technical education to SME, BKI drives the development of local content level within the development of marine material and component industries;
- Through factory approval, marine materials and components certification, BKI appealing national marine materials and components industries to growth faster accordingly with Indonesian standards;
- Through upstream verification in term of classification, SNI, and HS, BKI ensures the suitability of imported components with Indonesian standards;
- Through certification and classification, BKI maintained domestic shipbuilding performance according to Indonesian standards.

Jalan Menuju ke IACS

BKI menyadari adanya standar internasional yang harus dihormati dalam bidang klasifikasi, statutoria, dan independent assurance, dan dalam standar ini — sesuai laporan tahunan 2015 PSC Tokyo MOU — Flag State Indonesia masih di tempatkan di dalam Black List. Sementara BKI telah masuk dalam kategori Badan Klasifikasi dengan Kinerja Tinggi.

Perkembangan ke posisi yang lebih baik telah terjadisejak ta hun 2011 untuk Flag State and bahkan sejak tahun 2009 untuk kinerja. Akan tetapi, BKI meyakini pentingnya mengejar status anggota International Association of Classification Society (IACS) untuk mendorong Indonesia ke posisi White List dan mencapai kinerja High Performance.

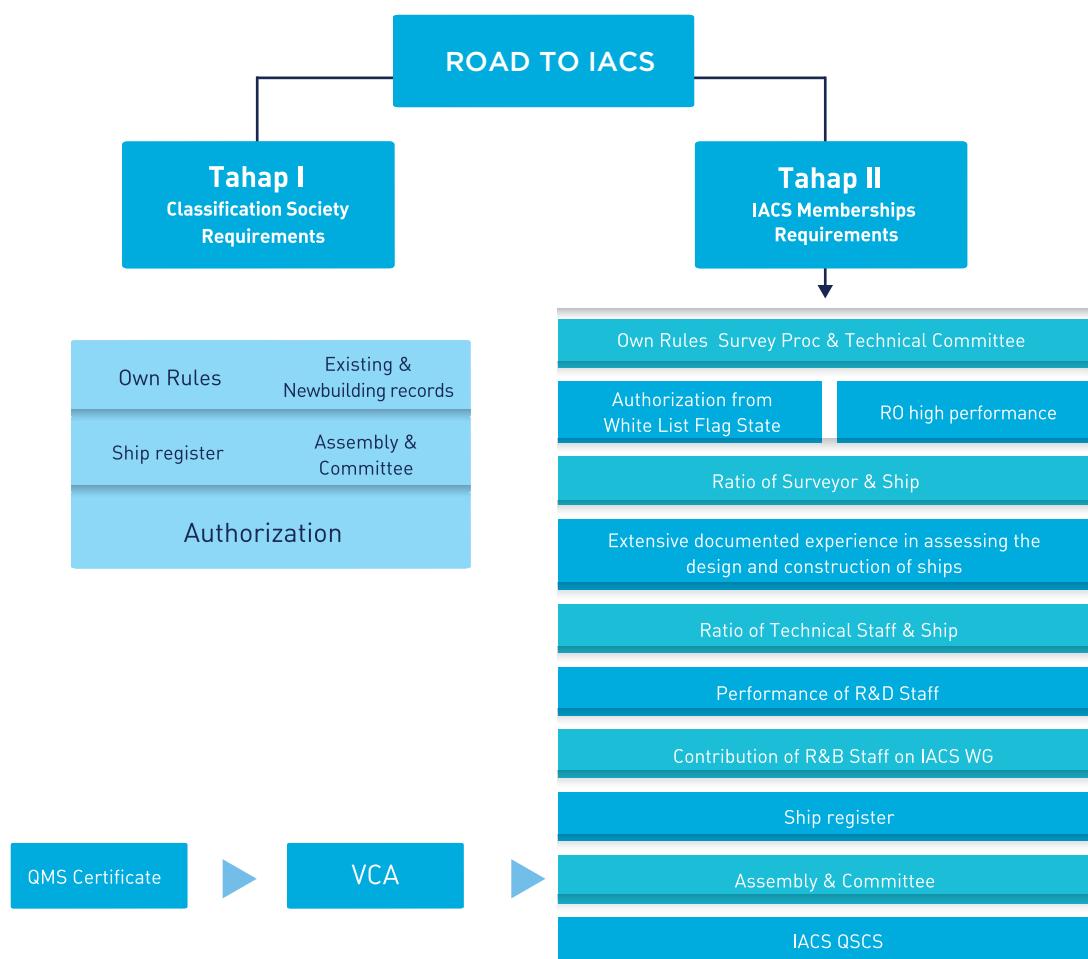
Upaya menjadi anggota IACS dijalankan dalam dua tahap, dengan tolok ukur QMS Certificate, VCA, dan kemudian IACS QSCS.

Road to IACS

BKI is aware that there is an international standard to follow in the fields of classification, statutory, and independent assurance, and that within this standard — according to the 2015 PSC Tokyo MOU annual report — the Indonesian Flag State is still placed within the Black List. While BKI already entered into Classification Society with High Performance Category.

The move towards a better position has started in 2011 for the Flag State and even since 2008 for the performance. Nevertheless, BKI believes that it is crucial to become a member of the International Association of Classification Society (IACS) to help raise Indonesia into the White Llist and to reach the status of High Performance.

The road towards becoming an IACS member consists of two stages, with the parameters of the QMS Certificate, the VCA and followed by the IACS QSCS.



Peningkatan Pelayanan

Kinerja BKI sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang klasifikasi, statutoria, dan independent assurance pada dasarnya diwujudkan dalam Service Level Agreement (SLA). Untuk meningkatkan kualitas layanan, BKI mempersiapkan hal-hal berikut:

- Layanan jasa tersedia 24/7;
- Jaringan kantor pelayanan terus diperluas;
- Drawing approval dilakukan dengan e-Drawing System ; serta
- Website perusahaan memberikan kesempatan untuk mengunduh BKI Rules/Guidelines secara cuma cuma, di samping membuka akses untuk mengetahui status survey, audit, drawing ataupun invoice.

Visi, Tujuan Korporasi dan Grand Strategy

Pada tahun 2019, BKI diharapkan mencapai visi “Menjadi Badan Klasifikasi dan Independent Assurance Berkelas Dunia” serta tujuan korporasi berupa

1. Tingkat pendapatan sebesar Rp 2.880 M;
2. Tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun 33%; serta
3. Proporsi pendapatan jasa klasifikasi dibandingkan jasa non-klasifikasi 54:46.

Untuk mewujudkan visi tersebut, BKI menjalankan grand strategy yang terdiri atas dua bagian, yaitu:

1. intensifikasi usaha klasifikasi, terutama dengan
 - a. Merealisasikan potensi pelanggan terdaftar BKI melalui diferensiasi layanan baru, yaitu sertifikasi komponen dan material;
 - b. Merealisisi potensi pasar kapal yang belum tergarap, termasuk kapal dengan kondisi standar di bawah A-100;
 - c. Meningkatkan kualitas proses bisnis internal untuk memperoleh sertifikasi IACS.

Service Improvement

BKI's performance as a company that is engaged in classification, statutory and independent assurance is essentially manifested in the Service Level Agreement (SLA). To improve the service quality, BKI is preparing the following:

- 24/7 availability of service
- Continue to expand service network
- Applying e-Drawing System in Drawing Approval Process
- The corporate website provides complimentary access to download BKI rules / Guidelines information besides providing information access on survey status, audit, drawing, or invoice.

Vision, Corporate Objectives and Grand Strategy

By 2019, BKI is expected to reach the vision of “Becoming a World-Class Classification Society and Independent Assurance Provider” with the corporate aims of:

1. Revenue rates of IDR 2,880 B;
2. Annual average growth rate of 33%; with
3. Classification service and non - classification service revenue proportion of 54:46.

To meet this vision, BKI implements a grand strategy that consists of two parts, namely:

1. intensify the classification business, with empowering
 - a. Actualizing BKI's registered customer potential through differentiation of new service i.e. material and component certification;
 - b. Actualizing the uncultivated ship market potential, including ships with condition standard below A-100;
 - c. Improving internal business process to obtain IACS certification.



2. Peningkatan portofolio usaha non klasifikasi, yaitu meningkatkan jumlah pekerjaan baru dan konsumen baru dalam layanan independent assurance pada sektor kelautan, industri, dan energi, dengan fokus layanan dengan nilai tambah tertinggi.

Dalam rangka menerapkan grand strategy ini, BKI akan menjalankan program kerja untuk menambah jumlah dan meningkatkan kompetensi SDM, serta program investasi untuk menambah dan meningkatkan peralatan dan perangkat serta sistem teknologi informasi.

2. Enhancing non classification business portfolio by increasing number of new project and new customer in independent assurance in maritime, industry and energy sector, with service focus to the highest value added.

In the course of implementing this grand strategy, BKI will implement working program to add the number and increasing HR competence as well investment program to add and increase equipment and device along with technology information system.

**SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2014**

PT Badan Klasifikasi Indonesia (Persero)

**DECLARATION MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS
ABOUT RESPONSIBILITY FOR THE 2014 ANNUAL REPORT OF**

PT Badan Klasifikasi Indonesia (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT Badan Klasifikasi Indonesia (Persero) tahun 2016 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



Sukatno
Komisaris Utama
President Commissioner



Faisal Ahmad
Komisaris
Commissioner



Minto Widodo
Komisaris
Commissioner



Erwin Rosmali
Komisaris
Commissioner

We the undersigned here stated that all information in PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) 2016 Annual Report has been completely publish and fully responsible for the accuracy and the truth of its content.

Thus this statement is made with truth.

Dewan Direksi
Board of Directors



Rudiyanto
Direktur Utama
President Director



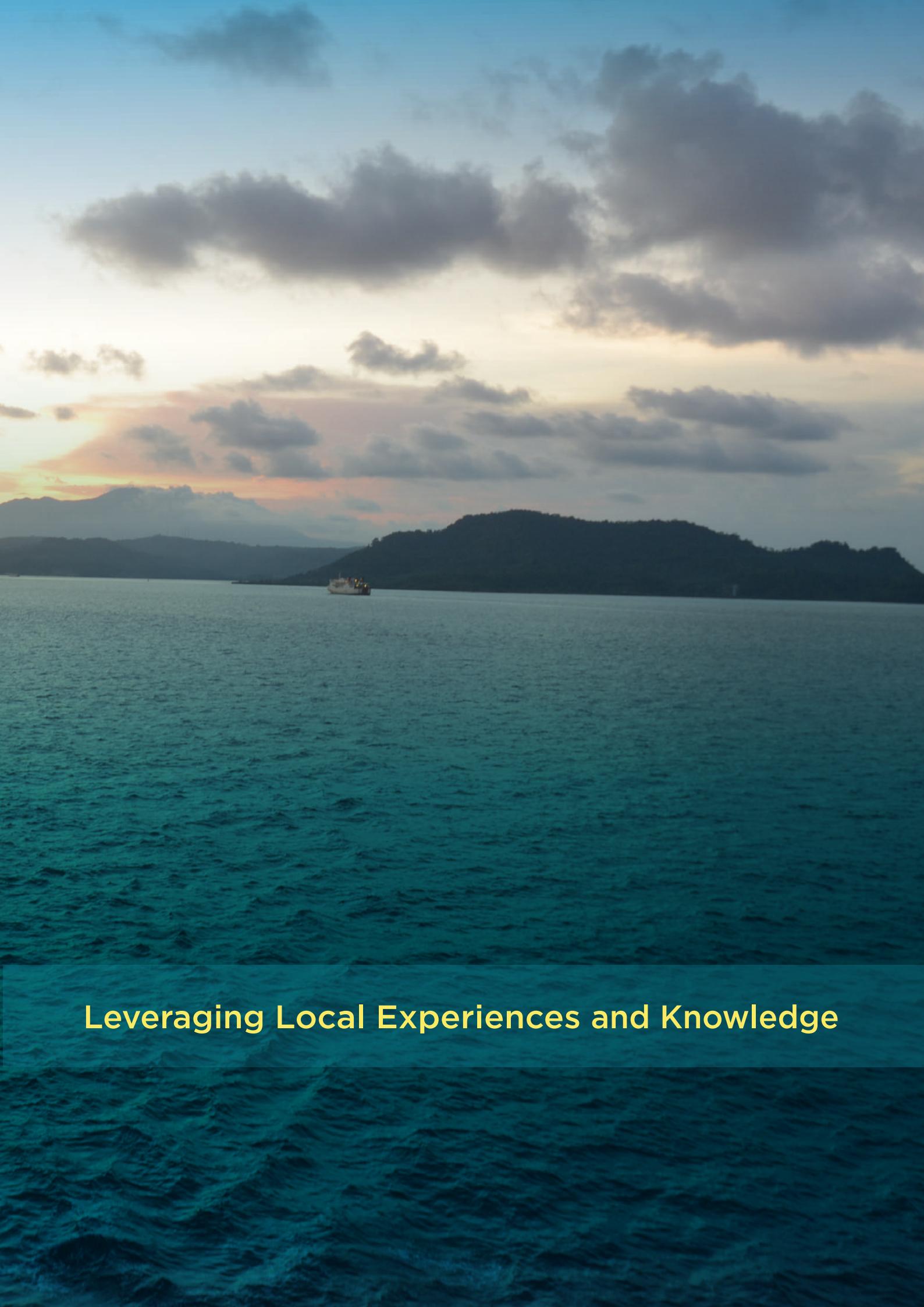
Iman Satria Utama
Direktur Klasifikasi
Classification Director



Timbul Tambunan
Direktur Keuangan dan Administrasi
Director of Finance and Administration

Mendayagunakan Pengalaman dan Pengetahuan



A wide-angle photograph of a coastal scene at sunset. The sky is filled with dramatic, colorful clouds ranging from deep blue to bright orange and yellow. In the middle ground, a dark green, hilly island or peninsula extends into a large body of water. A small white boat with a dark hull is positioned near the shore on the left side of the frame. The water is a deep teal color with visible ripples and waves.

Leveraging Local Experiences and Knowledge

BKI SURVEYING SERVICE NETWORK IN INDONESIA



Klasifikasi dan Statutoria / Classification and Statutory 
Komersil / Commercial 
Keduanya / Both 



PROFIL KORPORASI

Corporate Profile

Nama Perusahaan

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Bidang Usaha

Jasa Klasifikasi dan Registrasi Kapal, dan Jasa Konsultansi dan Supervisi

Status Perusahaan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), satu-satunya badan klasifikasi nasional yang ditugaskan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengkelaskan kapal niaga berbendera Indonesia.

Kepemilikan

100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia

Dasar Hukum Pemilikan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Tanggal Pendirian

1 Juli 1964

Dasar Hukum Pendirian

Pemerintah Republik Indonesia mendirikan Perusahaan Negara (PN) Biro Klasifikasi Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1964. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1977 Pemerintah RI mengalihkan status badan hukum BKI dari PN menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Biro Klasifikasi Indonesia.

Akta Pendirian

Notaris Imas Fatimah, SH dengan akte Nomor 57 tanggal 19 Oktober 1978, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : YA.5/345/1978 tanggal 7 November 1978 serta diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 58 Tahun 1979.

Kantor Pusat

Jl. Yos Sudarso Kav. 38-40 Tanjung Priok
Jakarta - 14320, Indonesia
Telepon: +6221 4301017
Faksimili: +6221 43936175
Call Center: +62804 117 1964
Surel: ho@bki.co.id
Situs Elektronik: www.bki.co.id

Corporate Name

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Type of Business

Ship Classification and Ship Registration Services, and Consultancy and Supervision Services

Corporate status

State-Owned Enterprise (SOE), The only national classification society assigned by the Indonesian Government to class Indonesian flag merchant vessels.

Ownership

Fully owned (100%) by the Republic of Indonesia

Legal Basis of Ownership

Act Number 19 of 2003 on State Owned Enterprises and Government Regulation Number 45 of 2005 on Establishment, Management, Supervisory and Liquidation of State Owned Enterprises.

Date of establishment

July 1st, 1964

Legal Basis of Establishment

The Government of the Republic of Indonesia established the State Enterprise (PN) Biro Klasifikasi Indonesia through Government Regulation Number 28 of 1964. Through Government Regulation Number 1 of 1977, the Indonesian Government transfer the legal status of BKI from State Enterprise (PN) to State Owned Enterprise (PT. [Persero]) Biro Klasifikasi Indonesia.

Deed of establishment

Notary Imas Fatimah, SH, by deed No. 57 dated October 19, 1978, and was legalized by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia by Decree Number YA5/345/1978 dated 7 November 1979 and recorded as Indonesian Additional State Gazette Number 58 of 1979

Head Office

Jl. Yos Sudarso Kav. 38-40 Tanjung Priok
Jakarta - 14320, Indonesia
Telephone: +6221 4301017
Facsimile: +6221 43936175
Call Center: +62804 117 1964
E-mail: ho@bki.co.id
Website: www.bki.co.id

Jaringan Kantor PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) / Office Network of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)		
Jaringan Pelayanan Service Network	Klasifikasi dan Statutoria Classification and Statutory	Komersil Commercial
Belawan	Jl. Veteran No. 218 Belawan Medan - 20411 Phone : (62-61) 6941025 Fax : (62-61) 6941276 e-mail : bn@bki.co.id	Jl. Veteran No. 218 Belawan Medan - 20411 Phone : (62-61) 6941157, 6940370 Fax : (62-61) 6941276 e-mail : bnc@bki.co.id
Batam	Graha BKI, Jl. Yos Sudarso Kav. 5 Batam - 29421 Phone : (62-778) 433388, 429023, 429024, 451228 Fax : (62-778) 429020 e-mail : bm@bki.co.id	Graha BKI, Jl. Yos Sudarso Kav. 5 Batam - 29421 Phone : (62-778) 428284, 428438, 428250, 432324 Fax : (62-778) 429021 e-mail : bmc@bki.co.id
Pekanbaru	Jl. Arifin Achmad No. 40, Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru - 28282 Phone : (62-761) 8417295, 8417296 Fax : (62-761) 8417294 e-mail : pr@bki.co.id	Jl. Arifin Achmad chmad No. 40, Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru - 28282 Phone : (62-761) 8417291, 8417292, 7662170 Fax : (62-778) 8417293, 7662180 e-mail : prc@bki.co.id
Jambi	Jl. Raden Bahrun No. E11 RT. 11 / RW. 04 Kel. Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Jambi Phone : (62-741) 671107 Fax : (62-741) 671108 e-mail : jb@bki.co.id	Jl. Raden Bahrun No. E11 RT. 11 / RW. 04 Kel. Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Jambi Phone : (62-741) 671107 Fax : (62-741) 671108 e-mail : jbc@bki.co.id
Palembang	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 226, 5 Ilir Palembang - 30115 Phone : (62-711) 713172, 713680 Fax : (62-711) 713151 e-mail : pb@bki.co.id	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 22, 5 Ilir Palembang - 30115 Phone : (62-711) 713171, 713172, 713680 Fax : (62-711) 713173 e-mail : pbc@bki.co.id
Banten (Cilegon)	JL.Gerem Raya KM. 5 No. 1A Kel. Gerem, Kec. Gerogol, Cilegon - Banten 42438 Phone : (62-254) 572673 Fax : (62-254) 572674 e-mail : cg@bki.co.id	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Komplek Istana Cilegon Blok D No. 22 Cilegon, Banten Phone : (62-254) 382347 Fax : (62-254) 382357 e-mail : cgc@bki.co.id
Tanjung Priok	Jl. Yos Sudarso 38-40 Tanjung Priok Jakarta Utara - 14320 Phone : (62-21) 43930990, 4301017, 4301703 Fax : (62-21) 4301702 e-mail : tp@bki.co.id	
Cirebon	Jl. Tuparev KM. 3 Cirebon - 45153 Phone : (62-231) 201816 Fax : (62-231) 205266 e-mail : cn@bki.co.id	Jl. Tuparev KM. 3 Cirebon - 45153 Phone : (62-231) 201816 Fax : (62-231) 205266 e-mail : cnc@bki.co.id
Semarang	Jl. Pamularsih No. 12 Semarang - 50148 Phone : (62-24) 7610399 Fax : (62-24) 7610422 e-mail : sm@bki.co.id	Jl. Pamularsih No. 12 Semarang - 50148 Phone : (62-24) 7610744 Fax : (62-24) 76670354 e-mail : smc@bki.co.id

Jaringan Pelayanan Service Network	Klasifikasi dan Statutoria Classification and Statutory	Komersil Commercial
Cilacap		<p>JL. M.T. Haryono No. 96 Cilacap Phone : (62-282) 5392115 Fax : (62-282) 5392115 e-mail : cpc@bki.co.id</p>
Surabaya	<p>Jl. Kalianget No. 14, Tanjung Perak Surabaya - 60165 Phone : (62-31) 3295448, 3295449, 3295450, Fax : (62-31) 3294520 e-mail : sb@bki.co.id</p>	<p>Jl. Kalianget No. 14, Tanjung Perak Surabaya - 60165 Phone : (62-31) 3295448, 3295449, 3295450, Fax : (62-31) 3205451 e-mail : sbc@bki.co.id</p>
Pontianak	<p>Jl. Gusti Hamzah No. 211 Pontianak - 78116 Phone : (62-561) 739579 Fax: (62-561) 743107 e-mail : pk@bki.co.id</p>	<p>Jl. Gusti Hamzah No. 211 Pontianak - 78116 Phone : (62-561) 739579 Fax : (62-561) 743107 e-mail : pkc@bki.co.id</p>
Banjarmasin	<p>Jl. Skip Lama No. 19 Banjarmasin - 70117 Phone : (62-511) 3358311, 3350983 Fax : (62-511) 3350175 e-mail : bj@bki.co.id</p>	<p>Jl. Skip Lama No. 19 Banjarmasin - 70117 Phone : (62-511) 3367361 Fax : (62-511) 3350175 e-mail : bjc@bki.co.id</p>
Balikpapan	<p>Kantor Layanan Operasional Klas Jl. Mulawarman No. 122H, Sepinggan, Balik Papan Kalimantan Timur - 76115 Phone : (62-542) 8521071, 8521072 Fax : (62-542) 8521073 e-mail : bpc@bki.co.id</p>	<p>Jl. M. T. Haryono No. 8 Ring Road Balikpapan - 76111 Phone : (62-542) 876637, 876641 Fax : (62-542) 876639 e-mail : bpc@bki.co.id</p>
Samarinda	<p>Jl. M.T. Haryono No. 199, Air Putih, Samarinda Kalimantan Timur - 75124 Phone : (62-541) 4121403, 4121404, 4121405, 4121406 Fax : (62-541) 4121407 e-mail : sd@bki.co.id</p>	
Makassar	<p>Jl. Sungai Cerekang No. 28 Makassar - 90115 Phone : (62-411) 3611993 Fax : (62-411) 36515460 e-mail : ms@bki.co.id</p>	<p>Jl. Sungai Cerekang No. 28 Makassar - 90115 Phone : (62-411) 3611993 Fax : (62-411) 36515460 e-mail : msc@bki.co.id</p>
Bitung	<p>Jl. Babe Palar No. 53, Madidir Unet Bitung - 95516 Phone : (62-438) 38720, 38721, 38722 Fax : (62-438) 21828 e-mail : bt@bki.co.id</p>	<p>Jl. Babe Palar No. 53, Madidir Unet Bitung - 95516 Phone : (62-438) 34273 Fax : (62-438) 21828 e-mail : btc@bki.co.id</p>
Ambon	<p>Jl. Laksdy Leo Wattimena No. 34, Passo, Ambon - 97232 Phone : (62-911) 362805, 362806 Fax : (62-911) 361105 e-mail : ab@bki.co.id</p>	<p>Jl. Laksdy Leo Wattimena No. 34, Passo, Ambon - 97232 Phone : (62-911) 362805, 362806 Fax : (62-911) 361105 e-mail : abc@bki.co.id</p>
Sorong	<p>Jl. Jend. Sudirman No. 140 Sorong - 98414 Phone : (62-951) 322600 Fax : (62-951) 323870 e-mail : sr@bki.co.id</p>	<p>Jl. Jend. Sudirman No. 140 Sorong - 98414 Phone : (62-951) 322600 Fax : (62-951) 323870 e-mail : src@bki.co.id</p>

Jaringan Pelayanan Service Network	Klasifikasi dan Statutoria Classification and Statutory	Komersil Commercial
Singapura	7500A Beach Road #11-301, The Plaza Singapore - 199597 Phone : 65-68830651, 68830634, 68830643 Fax : 65-63393631 e-mail : sg@bki.co.id, class@bki.com.sg	
Strategic Business Unit (SBU) Lepas Pantai	Jl. Yos Sudarso 38-40 Tanjung Priok Jakarta Utara - 14320 Phone : (62-21) 4301017, 4301703, 4300993 Fax : (62-21) 43936175 e-mail : osh@bki.co.id	
Strategic Business Unit (SBU) Marine		Ruko Green Lake Sunter Jl. Danau Sunter Selatan Blok RC/C Sunter Podomoro, Jakarta Utara - 14350 Phone : (62-21) 4300139 Fax : (62-21)43937409 e-mail : mns@bki.co.id
Strategic Business Unit (SBU) Energy		Ruko Green Lake Sunter Jl. Danau Sunter Selatan Blok RC/B Sunter Podomoro, Jakarta Utara - 14350 Phone : (62-21) 43912070, 43933925, 4366843 Fax : (62-21) 43937415 e-mail : ifs@bki.co.id
Strategic Business Unit (SBU) Industry		Ruko Green Lake Sunter Jl. Danau Sunter Selatan Blok RC/A Sunter Podomoro, Jakarta Utara - 14350 Phone : (62-21) 4300762, 43912806, 43938304 Fax : (62-21) 43900972 e-mail : ids@bki.co.id

SEKILAS BKI BKI at a glance

1964

Pendirian Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia (PN BKI) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1964. PN BKI mulai menjalankan kegiatan usahanya sebagai badan klasifikasi per 1 Januari 1965.

1964

Establishment of State Enterprise Biro Klasifikasi Indonesia (PN BKI) through Government Regulation Number 28 of 1964. By January 1st, 1965 PN Biro Klasifikasi Indonesia officially run its business as a classification society.

1977-1978

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi undang-undang, maka pada tanggal 31 Januari 1977, Pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Pengalihan bentuk dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Perseroan ini dilakukan setelah Pemerintah melakukan penelitian dan penilaian terhadap kegiatan operasional BKI termasuk mengenai prospek dan kemungkinan pengembangan bidang-bidang usahanya tanpa merugi di masa depan serta membuat anggaran dasar di hadapan Notaris Imas Fatimah SH dengan Akte No. 57 tanggal 19 Oktober 1978, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/345/1978 tanggal 7 November 1978, dan diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tahun 1979.

1977-1978

Based on Act Number 9 Year 1969 on Stipulation of Government Regulation No. 1 of 1969 on State Business Entities into act, on January 31 st, 1977, the Government of the Republic of Indonesia issued Government Regulation No. 1 of 1977 on the Transfer of Legal Status of State Enterprise Biro Klasifikasi Indonesia Become a State Owned Enterprise (PT. [Persero])

The legal status transfer from State Enterprise to State Owned Enterprise was taken after the Government done an assessment and evaluation on BKI's operational activities including the prospect and possibility of developing its business fields without loss in the future so creating the Company's Articles of Association before of Notary Imas Fatimah SH by Deed No. 57 dated October 19 th, 1978, which was legalized by the Minister of Justice Decree Number Y.A.5 / 345/1978 dated 7 November 1978, and recorded as Indonesian Additional State Gazette no. 58 of year 1979.

1982

BKI merintis bidang usaha non-class matter atau bidang nonklasifikasi yang meliputi jasa terkait konsultansi dan supervisi di bidang maritim dan industri serta bidang teknik lainnya. Bidang jasa nonklasifikasi ini diarahkan menjadi tumpuan utama kegiatan komersil dan sumber keuntungan perusahaan, sehingga unit usaha bidang ini disebut juga dengan bidang usaha jasa Komersil.

1982

BKI pioneered the development of non class matter business which includes consultancy and supervision services in the maritime and industrial fields as well in other engineering fields. This nonclassification services were aimed to become main foothold of commercial activities and sources of corporate profits, so this business unit also named as Commercial service business.

1984

Melalui Akte Notaris Imas Fatimah Nomor 180 tanggal 30 November 1984 Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar terkait tujuan dan lapangan usaha serta modal dasar perseroan. Perubahan ini dicatat dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 1479 Tahun 1985.

1984

Through Imas Fatimah Notarial Deed Number 180 of 30 November 1984, the Company amended its Articles of Association related to objectives and business field as well the company's authorized capital. This amendment is recorded as Indonesian Additional State Gazette Number 1479 of 1985.

1998

Melalui Akte Notaris Neneng Salmiah Nomor 20 tanggal 12 Maret 1998 Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar terkait jangka waktu berdirinya perseroan, tujuan dan lapangan usaha serta modal dasar perseroan. Perubahan ini dicatat dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 2504 Tahun 1999.

1998

Through Neneng Salmiah Notarial Deed Number 20 of 12 March 1998, the Company amended its Articles of Association related to term of establishment, objectives and business field as well the company's authorized capital. This amendment is recorded as Indonesian Additional State Gazette Number 2504 of 1999.

2003

Melalui Akte Notaris Neneng Salmiah Nomor 11 tanggal 14 Maret 2003 Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar terkait tujuan dan lapangan usaha serta penyesuaian dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Perubahan ini dicatat dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 11847 Tahun 2003.

2003

Through Neneng Salmiah Notarial Deed Number 11 of 14 March 2003, the Company amended its Articles of Association related to objectives and business field as well some articles adjustment related to Good Corporate Governance principles. This amendment is recorded as Indonesian Additional State Gazette Number 11847 of 2003.

2008

Melalui Akte Notaris Umaran Mansjur Nomor 5 tanggal 26 November 2008 Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar terkait tujuan dan lapangan usaha serta modal dasar perseroan. Perubahan ini dicatat dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 10918 Tahun 2009.

2008

Through Umaran Mansjur Notarial Deed Number 5 of 26 November 2008, the Company amended its Articles of Association related to objectives and business field as well the company's authorized capital. This amendment is recorded as Indonesian Additional State Gazette Number 10918 of 2009.

Kegiatan Usaha

Sesuai Anggaran Dasar yang terakhir, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang jasa klasifikasi dan registrasi kapal, jasa konsultansi dan supervisi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.

Ruang Lingkup Jasa Klasifikasi BKI

I. Penerimaan Kelas dan Mempertahankan Kelas

- a. Pemeriksaan konstruksi, pengawasan dan pengujian serta penerbitan sertifikat kelas dan registrasi kapal;
- b. Pemeriksaan dan pengujian alat-alat apung dan fasilitas konstruksi lepas pantai;
- c. Keagenan dan atau perwakilan badan klasifikasi atau konsultan asing.

II. Jasa Statutoria

- a. Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi di bidang statutoria berdasarkan otorisasi dari Pemerintah Republik Indonesia ataupun dari pemerintah negara lain;
- b. Melakukan survei dan sertifikasi atas nama Pemerintah Mongolia, Panama, Belize, dan Honduras, bekerjasama dengan IBS;
- c. Melakukan drawing/plan approval yang meliputi SOPEP/SMPEP, damage control plan, sewage treatment plan, garbage management plan, cargo securing manual, fire control and safety plan, P&A manual untuk chemical tanker, operation manual, stability calculation/booklet;
- d. Melakukan compliance survey and certification yang meliputi Marpol Annex I s/d VI, Anti Fouling System (AFS), Performance Standard for Protective Coating (PSPC), Cargo Ship Safety Equipment Certification, Cargo Ship Safety Construction Certification, ISM Certificate (DOC & SMC),

Business Activities

According to the latest Articles of Association, the Company's purposes and objectives is to conduct business in ship classification and registration services, consultancy and supervision services, and optimizing the use of Company's resources to create high quality goods and services with strong competitiveness.

Range of BKI Classification Services

I. Admission to Class and Maintenance of Class

- a. Inspection of construction, supervision and testing as well issuance of class certificates and ship registration;
- b. Inspection and testing of floating structures and offshore construction facilities;
- c. Agency and or representation of foreign classification society or consultant.

II. Statutory Services

- a. Conducting statutory inspection and certification under Indonesian Government authorization as well from foreign countries government;
- b. Conducting survey and certification on behalf of the Mongolian Government, and on behalf of the Panamanian, Belize and Honduras Government in collaboration with IBS;
- c. Conducting drawing/plan approval including SOPEP/SMPEP, damage control plan, sewage treatment plan, garbage management plan, cargo securing manual, fire control and safety plan, P&A manual for chemical tanker, operation manual, stability calculation/booklet;
- d. Performing compliance survey & certification including Marpol Annex I-VI, Anti Fouling System (AFS), Performance Standard for Protective Coating (PSPC), Cargo Ship Safety Equipment Certification, Cargo Ship Safety Construction Certification, and ISM Certification (DOC and SMC),

ISPS Certificate (ISSC), Loadline Certificate (ILLC & KM.3), Cargo Gear Certification , dan CAS Certification.

Ruang Lingkup Jasa Klasifikasi BKI
III. Jasa Sertifikasi Material dan Komponen

- a. Pengujian dan sertifikasi material dan komponen;
- b. Pengujian dan penerbitan sertifikat kualifikasi juru las, inspektor las, dan keahlian las lainnya;
- c. Sertifikasi Industri.

Dalam menjalankan kegiatannya di bidang klasifikasi, BKI mengemban amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelajaran Pasal 129 serta Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi.

ISPS Certification (ISSC), Loadline Certification (ILLC & KM.3), Cargo Gear Certification, and CAS Certification.

Scope of BKI Classification Services
III. Material and Component Certification Services

- a. Testing and certification of materials and components;
- b. Testing and issuing qualification certificate for welders, welding inspector, and other welding expertise;
- c. Industrial Certification.

In running its business in ship classification service, BKI holds the mandate of Article 129 of Law Number 17 Year 2008 regarding Shipping and Minister of Transportation Regulation Number 61 Year 2014 on Obligatory Classification for Indonesian flag vessels on Classification Agency.

Gambar Kompetensi Bisnis Jasa Klasifikasi
Classification Service Business Competence



Pelaksanaan kegiatan survey dan sertifikasi statutoria dilakukan atas dasar penugasan dari pemerintah Negara Bendera terutama Pemerintah Republik Indonesia, dan hingga akhir tahun 2016 otorisasi statutoria yang diterima BKI dari Pemerintah RI adalah sebagai berikut:

The statutory survey and certification conducted based on Flag State Government authorization, particularly the Indonesian Government and by the end of 2016 the authorization to conduct statutory services received by BKI from the Indonesian Government are as follows:

Tabel Otorisasi Statutori dari Pemerintah RI
Table Statutory Authorization from Government of Indonesia

No	Uraian Description	No. Penunjukan No. Of Mandate	Lingkup Pertunjukan Scope Of Statutory
1.	Lead Line	No. DKP/46/43/12 Tgl.12.6.1976 (ILLC) No. PY.66/1/1-93 Tgl.28-8-1993 (PGMI)	Survey dan Sertifikasi sepenuhnya oleh BKI/ Full Survey and Certificate by BKI
2.	Safety Construction	No. PY.68/1/3-95 Tgl. 6-4-1995	Survey dan Sertifikasi belum sepenuhnya oleh BKI/ Partial Survey and Certificate by BKI
3.	Marpol	No. PY.68/1/3-95 Tgl. 6-4-1995	Survey dan Sertifikasi belum sepenuhnya oleh BKI/ Partial Survey and Certificate by BKI
4.	Fitness Chemical / Gas Carrier in Bulk	No. PY.68/1/3-95 Tgl. 6-4-1995	Survey dan Sertifikasi belum sepenuhnya oleh BKI/ Partial Survey and Certificate by BKI
5.	ISM Code	No. PY/1/7-96 Tgl. 12-7-1996	Survey dan Sertifikasi belum sepenuhnya oleh BKI/ Partial Survey and Certificate by BKI
6.	ISPS Code	No. KL.93/2/02-04 Tgl. 14-0502004 (Kpl) No. KL.93/2/11-04 Tgl. 23-06-2004 (PF) BKI sbg Recognized Security Org. (RSO)	Survey dan Sertifikasi belum sepenuhnya oleh BKI/ Partial Survey and Certificate by BKI
7.	Marpol Annex VI	No. PY.67/1/7/05 Tgl. April 2015	Survey dan Sertifikasi sepenuhnya oleh BKI/ Partial Survey and Certificate by BKI
8.	Condition Assessment Scheme (CAS)	No. UM.485/3/13/DII-05 Tgl. 27-06-2005	Survey dan Sertifikasi sepenuhnya oleh BKI/ Partial Survey and Certificate by BKI

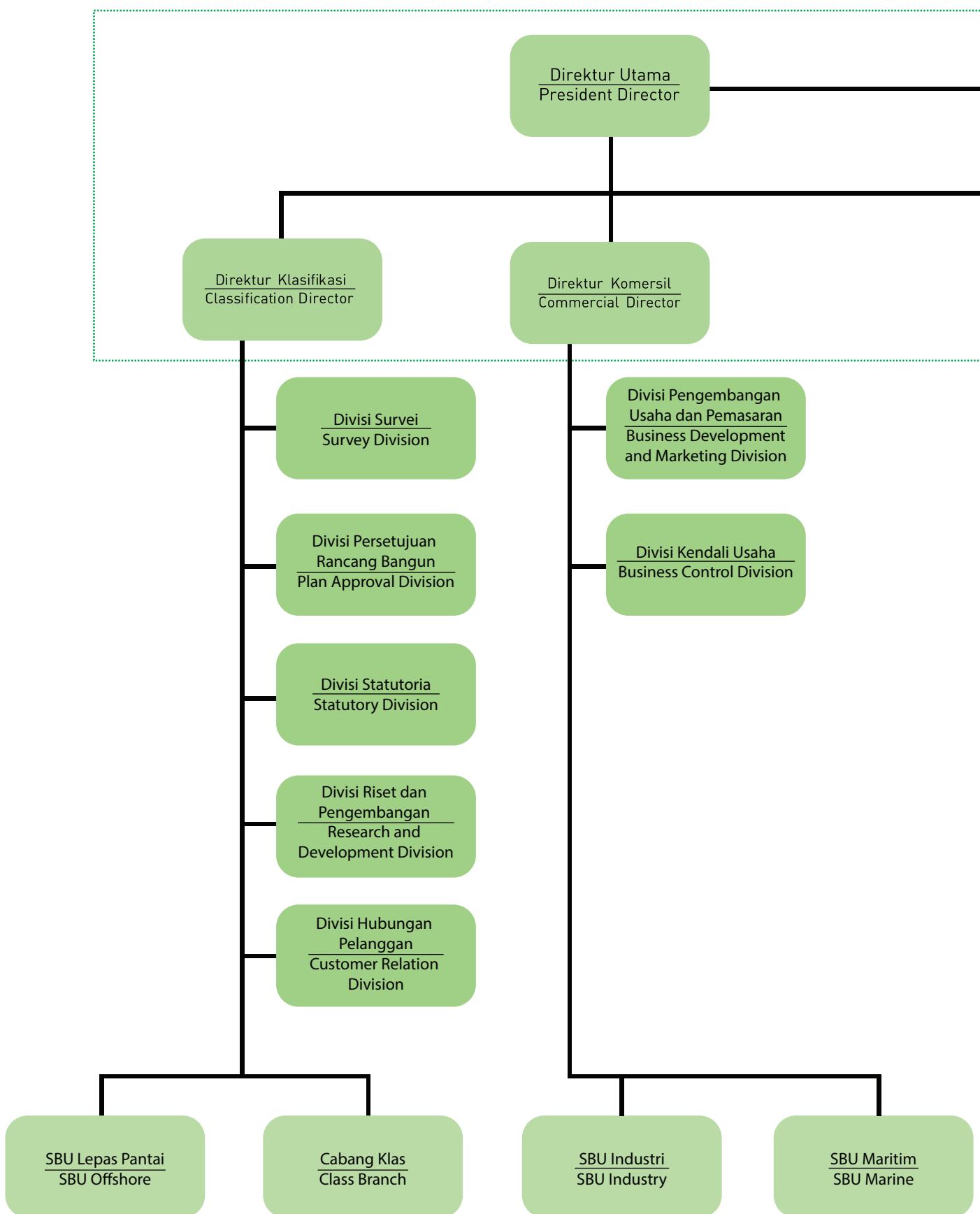
Ruang Lingkup Jasa Non Klasifikasi BKI

Perusahaan memiliki kompetensi profesional untuk melakukan 15 jenis layanan jasa pemastian independen layanan tersebut terbagi ke dalam tiga sektor;

The Scope of BKI's Non-classification Services

The Company has professional competence to conduct 15 types of independent assurance services, which are divided into three sectors;

Kompetensi / Competence	Marine	Industry	Energy
Identifikasi & Survey Mapping	Ship condition survey, etc Marine mapping	Lashing Survey, etc Pembuatan Peta Dasar Basic map creation	Petroleum Survey, etc Studi Potensi Sumberdaya Migas, etc Oil and Gas Resources Potency Study
Inspection Test	Floating object inspection, etc WPS and welder test, etc	Crane, forklift, loader, truck, etc Wich load testing, etc	Storage tabk inspection, etc WPS and welder test, etc Oil and Gas Resources Potency Study
Laboratory analysis	Analisa Air Laut, etc Sea water analysis	Mechanical testing laboratory, etc	Analisa Batubara, Minyak, Material Coal, Oil and Material Analysis
Assesment Verification and evaluation	Port assesment, etc Evaluasi kenaikan sarat kapal, etc Ship's load-line increase evaluation	Remaining Life Assesment, etc Verifikasi Harga, etc	Facilities audit, etc Verifikasi Penjualan Batubara, etc Coal Selling Verification
Monitoring Consultancy	Project Monitoring, etc New building design, etc	Monitoring Corrosion, etc Konsultan K-3, etc Occupational Health and Safety Consultant	Monitoring Penjualan LNG, etc Sistem Pemantauan Lifting Migas, etc LNG Sales Monitoring
Projecy management	Planned Maintenance System, etc	Project Supervision and Management, etc Lifting gear inspection & Certification	Studi Potensi Sumberdaya MIGAS, etc Pipeline inspection & certification
Certification	Workshop certification, etc	Welding Inspector, etc	Rigging and Signalman, etc Soil investigation, etc Penyaksian inspeksi Batubara, etc
Training Investigation Supervision	Marine inspector training, etc Insurance survey, etc New building supervision, etc	Failure Analysis, etc Project Supervision and Management, etc	Project Management Team, etc
Manpower supply	Operation and Maintenance, etc	Industrial Inspector, etc	



Direktur Keuangan & Adm.
Finance &
Administration Director

Divisi Keuangan
Finance Division

Divisi Umum
General Affairs Division

Divisi Manajemen Resiko
dan Tata Kelola
Risk Management and
Governance Division

Divisi Sumber
Daya Manusia
Human Resources
Division

Divisi Asesmen & Diklat
Assessment & Education
and Training Division

Divisi Teknologi Informasi
Information Technology
Division

Divisi Satuan
Pengawas Intern
Internal Control
Unit Division

Divisi Sekretaris
Perusahaan
Corporate Secretary
Division

Divisi Manajemen
Strategik
Strategic Management
Division

SBU Energi
SBU Energy

Cabang Komersil
Commercial Branch

Lampiran Keputusan Direksi
PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
No : DU.131/LT.101/KI-15
Tanggal 3 Agustus 2015

Attachment to the Decision of the BOD
PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
No : DU.131/LT.101/KI-15
of 3 August 2015

VISI DAN MISI PERUSAHAAN

Corporate Vision & Mission

VISI / VISION

Menjadi badan klasifikasi dan penyedia jasa pemastian independen berkelas dunia

To become a world-class classification society and independent assurance service provider

Nilai Perusahaan

- Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Etos kerja yang tinggi
- Reputasi yang senantiasa ditingkatkan, dijaga dan dipelihara
- Tertib dalam menerapkan kebijakan manajemen maupun sikap tindak pribadi
- Ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi yang harus dikuasai
- Baik dalam pelayanan dan hasil kerja

BKI menerapkan program perubahan budaya kerja sehingga nilai-nilai korporasi dapat diwujudkan secara efektif oleh setiap karyawan.

Corporate Values

- Godly to Almighty God
- High working ethos
- Reputation which always enhanced, protected and maintained
- Orderly in implementing management policies and in personal attitude
- Knowledge and advanced technologies which should be mastered
- Good in service and working result

BKI implements a work culture change program so that every employee be able to implement corporate values in effective way.

MISI / MISION

1. Memberikan nilai tambah terbaik bagi pelanggan jasa klasifikasi dan statutoria melalui layanan, operasi, dan riset rules yang berstandar internasional serta berbasis kualitas, keselamatan dan tanggung jawab sosial — lingkungan kelautan (klasifikasi)
2. Memaksimalkan sumber daya BKI dengan segenap potensinya agar dapat menjadi market leader dalam bisnis independent marine assurance (non klasifikasi)

1. Providing best added value for classification and statutory service customers through service, operation, rules with international standard research as well quality and safety and maritime environment social responsibility based (classification)
2. Maximizing BKI resources along with all its potential in order to become market leader in independent marine assurance business (non-classification)

Motto Perusahaan

Terpercaya, dengan maksud :

1. Mutu jasa BKI benar-benar berkualitas tinggi dan jasa dilaksanakan secara efisien dan tepat waktu;
2. Setiap pegawai perusahaan memiliki kualifikasi yang dapat diandalkan pada masing-masing bidang tugas atau profesiya;
3. BKI menjadi merek dagang yang dipahami sebagai produk unggulan.

Terpercaya juga menjadi rumusan falsafah perusahaan yang dikembangkan dengan paradigma :

1. Mengutamakan mutu dan pelayanan jasa berdasarkan komitmen yang tinggi terhadap masalah keselamatan;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perusahaan secara konsisten dan berkesinambungan;
3. Tanggap dan peduli terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama yang berkaitan dengan keselamatan kapal.

Corporate Motto

Trustworthy, which means:

1. BKI services quality are genuinely high quality and performed in efficient and timely manner;
2. Each company's employee hold qualification reliable for their individual task or profession;
3. BKI becomes a trademark which perceived as a superior product.

Trusted also be a formulation of corporate philosophy developed with paradigm :

1. Giving priority to quality and service based on high commitment on safety issues;
2. Consistently and continuously developing Company's human resources;
3. Perceptive and concerned to the development of science and technology, particularly related to ship safety.

LAMBANG PERUSAHAAN

Company's Emblem



Lambang Perusahaan

Perusahaan menggunakan simbol jangkar untuk mengasosiasikan lingkup dan kegiatannya di sektor kelautan. Jangkar merupakan bagian dari kapal yang merupakan sarana dan transportasi utama di laut, sekaligus memberikan makna tentang kestabilan dan keselamatan kapal dimana jangkar memiliki fungsi sebagai penambat kapal agar tidak berpindah tempat akibat hembusan angin, arus maupun gelombang. Pada bagian tengah terdapat simbol rantai dan palu yang melambangkan alat dan perkakas untuk membangun dan atau merenovasi sebuah kapal. Ini sekaligus memberikan gambaran tentang keberadaan Perusahaan yang erat kaitannya dengan penilaian atas material komponen dan seluruh proses pembuatan kapal, serta penilaian atas proses renovasi yang harus sesuai dengan standar Rules & Regulation yang ditetapkan Perusahaan.

Di bagian bawah terdapat angka 1964 yang menandakan tahun berdirinya Perusahaan. Selain itu, masing-masing huruf dari BKI sebagai nama inisial sekaligus merek dagang dari Perusahaan ditempatkan secara berurutan di sisi samping kiri, atas dan kanan logo yang diasosiasikan sebagai penanda arah mata angin. Secara khusus Perusahaan memberikan makna lingkup dan kegiatan badan klasifikasi sebagai tugas penting yang dapat memberikan petunjuk keselamatan kepada kapal saat berada di perairan.

Warna biru menjadi warna resmi Perusahaan sebagai perlambang akan warna perairan di laut. Warna ini sekaligus memberikan cerminan BKI sebagai badan klasifikasi yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab.

Company's Emblem

The Company uses anchor as symbol to associates its scope of business and activities in the maritime sector. Anchors is a part of ship as a main transportation at sea, as well providing stability and safety as the anchor functioned to hold ship on its position despite of wind, current and wave. In the middle, there is a chain and hammer figure which symbolizing equipment and tool in building and renovating a ship. This also provides an overview of the Company's existence which is closely related to the assessment of the component's material and the whole shipbuilding process, as well as the assessment of the renovation process which should be in line with the Rules & Regulation standards set by Company.

At the bottom there is 1964 figure indicating the Company's establishing year. In addition, each letter of BKI as an initial and the Company's trademark is placed in a series on the left, top and right sides of the emblem, associated with the markers of wind directions. The Company particularly gives meaning to the scope and activity of the classification society as an important duty which can provide safety instructions to ship while sailing on water.

Blue becomes official Company color as it symbolizing the sea water color. This color also gives reflection of BKI as a trusted and responsible classification society.

JASA KLASIFIKASI DAN STATUTORIA

Classification and Statutory Services



No.	Layanan Jasa	Services
1.	Klasifikasi kapal	1. Ships classification
2.	Klasifikasi struktur terapung lainnya	2. Floating structures classification
3.	Inspeksi, sertifikasi, dan konsultansi bidang statutoria	3. Inspection, certification and consultancy in statutory field
	ISM Code	ISM Code
	ISPS Code	ISPS Code
	Marine Labor Convention	Marine Labor Convention
	Port State Control	Port State Control
	Verifikasi EEDI dan EEOI	EEDI and EEOI Verification

■ LAYANAN JASA KOMERSIL BKI

BKI Commercial Services



No.	Portfolio	Pemetaan	Survey	Inspeksi	Assessment	Audit	Pengujian	Pengujian Laboratorium	Monitoring	Supervisi	Konsultansi	Sertifikasi	Training	Labor Supply
1	Refinery/Instalation Fitness Inspection, Supervision & Certification (SKPI)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
2	Platform Design & Analysis, Inspection, Supervision & Certification (SKKP)		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
3	Pressure Vessel Design & Analysis Inspection Inspection, Supervision & Certification (SKKP)			✓	✓	✓	✓			✓	✓			
4	Crane Design & Analysis, Inspection, Supervision & Certification (SKKP)			✓	✓	✓	✓			✓	✓			
5	Pipe Line Design & Analysis Inspection, Supervision & Certification (SKKP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
6	Rotating Equipment (Pump, Compressor, etc) Inspection, Supervision & Certification (SKKP)			✓	✓	✓	✓			✓	✓			
7	Electrical Equipment Inspection, Supervision & Certification (SKKP)			✓	✓	✓	✓			✓	✓			
8	StorageTank Design & Analysis Inspection, Supervision & Certification (SKKP)			✓	✓	✓	✓			✓	✓			
9	RIG Design & Analysis, Inspection, Supervision & Certification (SKKP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
10	Pressure Safety Valve Design & Analysis, Inspection, Testing & Certification (SKPP)			✓	✓	✓	✓			✓	✓			
11	Risk Based Inspection (RBI) Consultant & Audit			✓	✓	✓	✓			✓	✓			
12	Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Inspeksi & Sertifikasi (SLO DJK)	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓			
13	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Tinggi Inspeksi & Sertifikasi (SLO DJK)	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓			

No.	Portfolio	Pemetaan	Survey	Inspeksi	Assessment	Audit	Pengujian	Pengujian Laboratorium	Monitoring	Supervisi	Konsultansi	Sertifikasi	Training	Labor Supply
14	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Menengah Inspeksi & Sertifikasi (SLO DJK)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
15	Rigging/Lifting Gear Design, Inspection, Testing & Certification		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			
16	Well Head & Drilling Unit (BOP, Tubing Casing, X-Over, etc) Inspection, Testing & Certification		✓	✓			✓				✓			
17	Valve Inspection, Testing & Certification		✓	✓			✓				✓			
18	Cementing Unit Inspection, Testing & Certification		✓	✓			✓				✓			
19	Welder Qualification & Certification		✓	✓			✓	✓		✓			✓	
20	Welding Procedure Specification Consultant, Qualification & Certification		✓	✓			✓	✓		✓	✓			
21	Remaining Life Assessment (RLA) of Refinery & Structural Equipment				✓	✓					✓			
22	Corrosion Protection (Coating/Painting, CP, Etc) Design, Inspection, Testing & Analysis	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓			
23	HAZOP/HAZID Audit, Verification & Consultant		✓	✓	✓					✓		✓		
24	Top Side Facilities Independent Verification		✓	✓	✓						✓	✓		
25	Oil & Gas Asset Integrity		✓	✓							✓			
26	Oil & Gas Equipment Feasibility Study										✓			
27	Oil & Gas Structural (Local & Global) Analysis										✓			
28	Oil & Gas FEED										✓			
29	UT Thickness								✓					
30	UT Flow								✓					
31	Magnetic Test								✓					
32	Penetrant Test								✓					
33	Acoustic emission								✓			✓		
34	Long Range UT								✓			✓		
35	Eddy Current								✓			✓		
36	Magnetic Flux Katodik								✓			✓		
37	Radiography Test								✓					
38	ACFM								✓					
39	FMD								✓					
40	UT Phassed Array								✓					
41	UT Crawler								✓					
42	Megger Test								✓					
43	Noise Level								✓					
44	Metering System						✓		✓					
45	Material Mechanical & Chemical Test								✓					
46	Gas Free Test						✓	✓		✓				
47	Vibration Test								✓					



No.	Portfolio	Pemetaan	Survey	Inspeksi	Assessment	Audit	Pengujian	Pengujian Laboratorium	Monitoring	Supervisi	Konsultansi	Sertifikasi	Training	Labor Supply
48	Thermograph						✓							
49	Underwater Survey	✓	✓	✓	✓		✓							
50	Wire Rope Test							✓						
51	Crack Depth Test						✓							
52	Hydrotest						✓							
53	Vacum Test						✓							
54	Casing-Tubing		✓	✓		✓	✓				✓			
55	Box Crossover Thread Inpection, Testing & Certification		✓	✓		✓	✓				✓			
56	Working at Height/Rope Access Techniq (RAT)	✓	✓	✓	✓		✓							✓
57	SIO Angkat Angkut Training & Sertifikasi (MIGAS)						✓						✓	
58	Oil & Gas Man Power Supply													✓
59	Survey Lifting Batu Bara (Minerba)	✓	✓						✓	✓				



No.	Portfolio	Pemetaan	Survey	Inspeksi	Assessment	Audit	Pengujian	Pengujian Laboratorium	Monitoring	Supervisi	Konsultansi	Sertifikasi	Training	Labor Supply
1	Industrial / Instalation Fitness Inspection, Supervision & Certification	v	v	v	v	v	v			v	v			
2	Pressure Vessel Design & Analysis Inspection Inspection, Supervision & Certification (DISNAKER)		v	v	v	v				v	v			
3	Crane Design & Analysis, Inspection Supervision & Migas Certification (DISNAKER)		v	v	v	v				v	v			
4	Rotating Equipement (Pump, Compressor, etc) Inspection, Supervision & Certification (DISNAKER)		v	v	v	v				v	v			
5	Electrical Equipment Inspection, Supervision & Certification (DISNAKER)		v	v	v	v				v	v			
6	Non Petrochemical StorageTank Design & Analysis Inspection, Supervision & Certification		v	v	v	v				v	v			
7	Pressure Safety Valve Design & Analysis, Inspection, Testing & Certification (Industrial)		v	v	v	v				v	v			
8	Boiler Design & Analysis, Inspection, Supervision & Certification (DISNAKER)		v	v	v	v				v	v			
9	Management System HSE / SMK3 Audit & Certification (DISNAKER)		v	v	v	v				v	v			
10	Risk Based Inspection (RBI) Consultant & Audit (Industrial)		v	v	v						v			
11	Heliport Design & Analysis, Inspection & Certification (DEPHUB)		v	v	v	v				v	v			
12	Rail Design & Analysis, Testing, Inspection, & Certification		v	v	v	v				v	v			
13	Rigging/Lifting Gear Design, Inspection, Testing & Certification		v	v	v	v				v	v			

No.	Portfolio	Pemetaan	Survey	Inspeksi	Assessment	Audit	Pengujian	Pengujian Laboratorium	Monitoring	Supervisi	Konsultansi	Sertifikasi	Training	Labor Supply
14	Lightning Arrestor Design, Inspection, Testing & Certification		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			
15	VSD Transport Skid Design, Inspection, Testing & Certification		✓	✓			✓				✓			
16	Container Metal Box Design, Inspection, Testing & Certification		✓	✓			✓				✓			
17	Basket Inspection Design, Inspection, Testing & Certification		✓	✓			✓				✓			
18	Transport Tank Inspection Design, Inspection, Testing & Certification		✓	✓			✓				✓			
19	Valve Inspection, Testing & Certification		✓	✓			✓				✓			
20	Fire & Flame Arrester System Inspection, Testing & Certification		✓	✓	✓	✓	✓				✓			
21	Skid and Spreader Bar Inspection, Testing & Certification		✓	✓			✓				✓			
22	Welder Qualification & Certification		✓	✓			✓				✓			
23	Welding Procedure Specification Consultant, Qualification & Certification		✓	✓			✓			✓			✓	
24	Remaining Life Assessment (RLA) of Industrial & Structural Equipment		✓	✓			✓			✓	✓			
25	Corrosion Protection (Coating/Painting, CP, Etc) Design, Inspection, Testing & Analysis				✓	✓					✓			
26	Environment Study	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓			
27	SMK3/Management HSE			✓	✓	✓					✓			✓
28	Various Industrial & Social Mapping & Survey	✓	✓											
29	UT Thickness			✓	✓			✓		✓		✓		
30	UT Flow								✓					
31	Magnetic Test								✓					
32	Penetrant Test								✓					
33	Acoustic emission								✓				✓	
34	Long Range UT								✓				✓	
35	Eddy Current								✓				✓	
36	Magnetic Flux Katodik								✓				✓	
37	Radiography Test								✓					
38	Gas Free Test								✓					
39	Vibration Tets			✓	✓	✓	✓							
40	Thermograph								✓					
41	Wire Rope Test		✓	✓			✓							
42	Crack Depth Test								✓					
43	Hydrotest								✓					
44	Vacum Test								✓					
45	Pengujian Gas Emisi								✓				✓	

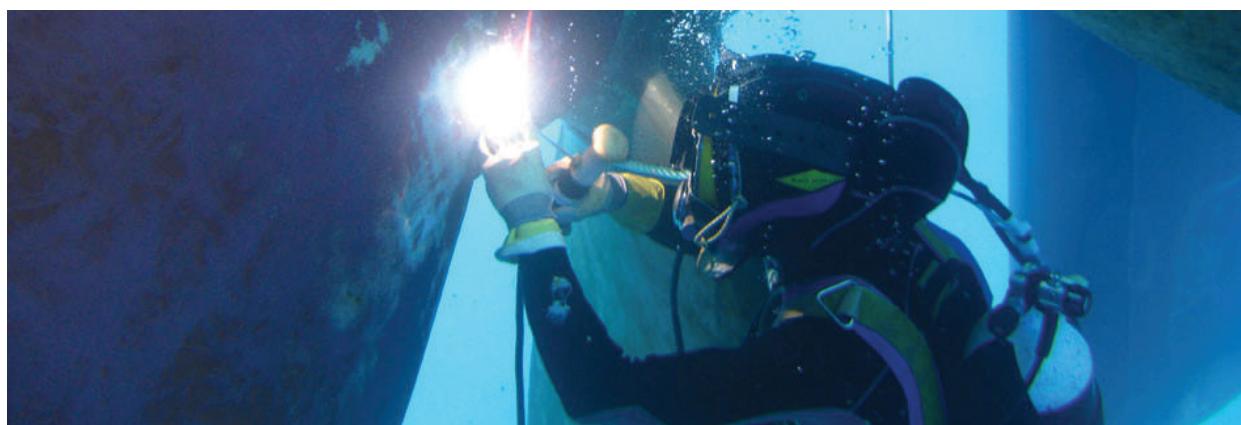


No.	Portfolio	Pemetaan	Survey	Inspeksi	Assessment	Audit	Pengujian	Pengujian Laboratorium	Monitoring	Supervisi	Konsultansi	Sertifikasi	Training	Labor Supply
46	SIO Angkat Angkut (DISNAKER) Training												✓	
47	Welding Inspector (DISNAKER) Training												✓	
48	Industrial Various Man Power Supply													✓
49	Survey Barang Modal Bukan Baru (KEMENDAG)	✓	✓	✓	✓							✓		
50	Convention for Safe Container (CSC)		✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		
51	Information Technology	✓			✓	✓						✓		
52	Civil & Industrial Infrastructure	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		



No.	Portfolio	Pemetaan	Survey	Inspeksi	Assessment	Audit	Pengujian	Pengujian Laboratorium	Monitoring	Supervisi	Konsultansi	Sertifikasi	Training	Labor Supply
1	Ship New Building Design & Analysis, Inspection & Supervision	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
2	Ship Repair & Modification (Re-activation, Conversion, etc) Design & Analysis, Inspection & Supervision	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
3	Intact Stability Calculation				✓						✓			
4	Hydrodynamic Analysis				✓						✓			
5	Mooring Design, Analysis & Survey	✓	✓	✓							✓			
6	Ship As Built Drawing	✓		✓							✓			
7	Ship Tank / Tank Calibration & Survey	✓		✓							✓			
8	Consultation of Marine Transportation	✓				✓					✓			
9	Machinery Analyses				✓	✓	✓				✓			
10	Structural Analysis	✓	✓	✓							✓			
11	WPS Consultant, Qualification & Certification	✓	✓				✓			✓	✓			✓
12	Welder Qualification & Certification	✓	✓				✓			✓			✓	
13	Ship Integrity Services (Asset & Certificate Database, Inspection & Testing)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓				
14	Ship Condition Survey	✓	✓			✓								
15	Ship On and Off Hire Survey	✓	✓			✓								
16	Ship Towing and Lashing Survey & Analysis / Cargo Securing Manual	✓	✓	✓			✓			✓		✓	✓	
17	Ship Draught Survey	✓	✓		✓					✓	✓			

No.	Portfolio	Pemetaan	Survey	Inspeksi	Assessment	Audit	Pengujian	Pengujian Laboratorium	Monitoring	Supervisi	Konsultansi	Sertifikasi	Training	Labor Supply
18	Liquid Cargo (Sounding) Quantity Survey		✓	✓		✓			✓	✓				
19	Technical Audit of Ship Performance	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	UT Thickness							✓						
21	UT Flow							✓						
22	Magnetic Test							✓						
23	Penetrant Test							✓						
24	Acoustic emission							✓					✓	
25	Long Range UT							✓					✓	
26	Eddy Current							✓					✓	
27	Magnetic Flux Leakage							✓					✓	
28	Radiography Test							✓						
29	Gas Free Test							✓						
30	Underwater Survey	✓	✓	✓	✓	✓		✓						
31	Crank Shaft Deflection Survey					✓	✓		✓					
32	Insulation Resistance/ Megger Test								✓					
33	Noise Level								✓					
34	Corrosion Control (Coating/Painting, CP, Etc) Design, Testing & Monitoring	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		
35	Vibration Test								✓					
36	Phase Sequence								✓					
37	Speed/RPM Ship Machine								✓					
38	Bollard Pull Test						✓	✓	✓					
39	Ship Speed Trial						✓	✓	✓	✓				
40	Ship Inclining Test						✓	✓	✓	✓				
41	Ship Particulars						✓	✓	✓	✓	✓			
42	Fuel Consumption Test						✓	✓	✓	✓	✓			
43	ISPS Code Consultant, Survey, Verification & Certification (Port)						✓				✓	✓		
44	ISM Code Consultant						✓				✓	✓		
45	SIMON (Surat Ijin Memasuki Operasi Migas)						✓	✓	✓			✓		
46	Dermaga Keperluan Khusus	✓	✓	✓	✓	✓						✓		
47	Marine Surveyor Training											✓	✓	
48	Internal Auditor ISM CODE Training											✓	✓	
49	Designated Person Ashore (DPA - ISM CODE) Training											✓		
50	Company Security Officer (CSO - ISPS CODE) Training											✓		
51	Port Facility Security Officer (PFSO - ISPS CODE) Training											✓		
52	International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG CODE) Training											✓		



No.	Portfolio	Pemetaan	Survey	Inspeksi	Assessment	Audit	Pengujian	Pengujian Laboratorium	Monitoring	Supervisi	Konsultansi	Sertifikasi	Training	Labor Supply
53	Welding Inspector Training											✓	✓	
54	Ship Security Officer (SSO) Training											✓		
55	Internal Auditor ISPS-Code Training											✓		
56	Ship Automation Survey Training											✓		
57	Draught Survey Training											✓		
58	On and Off Hire Survey Training											✓		
59	Damage and Repair Survey Training											✓		
60	Industrial and Marine Stagging Training											✓		
61	Towing and Lashing Training											✓		
62	Ship Condition Survey Training											✓		
63	Fising Vessel Certification (KKP)											✓		
64	VGM Certification											✓		
65	Container Condition Survey	✓	✓	✓							✓	✓	✓	
66	Marine Labour Convention Consultant											✓		
67	Marine Transportation Statutory Certification Consultant											✓		
68	Marine House Assessment	✓	✓	✓								✓		
69	Vessel Planed Maintenance System	✓										✓		
70	Vessel Condition Survey (SIRE, Vetting & TMSA, OCIMF & OVID)	✓	✓	✓	✓	✓						✓		
71	Vessel Reflaging Certificate											✓		
72	Tenorm	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	
73	Protection & Indemnity Insurance Survey & Hull & Machinery Survey	✓	✓	✓	✓	✓						✓		
74	Vessel Leakage Test								✓					
75	Hidrografi	✓	✓			✓						✓		
76	Oceanografi	✓	✓			✓						✓		
77	Mooring (SPM/SBM)	✓	✓	✓	✓		✓					✓		
78	Anchoring System & Mooring Line	✓	✓	✓	✓		✓					✓		
79	Port Design & Analysis, Inspection, Supervision	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	

Sumber Daya Manusia

Karyawan yang kompeten, profesional dan berdedikasi terhadap pencapaian tujuan merupakan kunci keberhasilan setiap perusahaan, termasuk BKI. Namun, sebagai badan klasifikasi, BKI membutuhkan kompetensi dan profesionalisme yang khas dan terkait dengan tujuan meningkatkan kepastian dan keselamatan industri perkapalan dan industri pelayaran. Karena itu melalui perekutan, pendidikan dan pelatihan yang dilakukan serta pengembangan budaya perusahaan, BKI memastikan para karyawannya memiliki visi tentang peran penting klasifikasi, statutoria, serta jasa pemastian independen bagi industri perkapalan dan industri pelayaran.

Human Resources

Competent, professional and dedicated employee towards the achievement of goals are key to the success of every company, including BKI. However, as a classification society, BKI requires specific competence and professionalism associated with the objective to enhance assurance and safety level of shipping and the shipbuilding industry. Therefore through the undertaken recruitment, education and training as well the development of corporate culture, BKI ensures that its employees owned a vision of the important role of classification, statutory and independent assurance service for the shipping and ship-building industry.

Komposisi Sumber Daya Manusia
Human Resource Composition**Realisasi Turn over pegawai sesuai fungsi sampai dengan Desember 2016**
Actual Turn over personnel as per function until December 2016

No	Keterangan Note	Posisi Per Position as 01/01/2016	Diterima / Admitted		Keluar Excused		Posisi Per Position as 31/12/2016				
			R	AS/AF	M	JML					
I. Pegawai Tetap/ Permanent Employees:											
1.	Operasional/Operational	511	48	26	0	74	9	0	4	13	572
2.	Supporting/Supporting	123	0	20	0	20	7	0	2	9	134
Sub Total I		634	48	46	0	94	16	0	6	22	706
II. Kontrak Kerja/Job Contract:											
1.	Operasional/Operational	52	6	0	0	6	4	17	0	21	37
2.	Supporting/Supporting	104	7	0	0	7	4	12	0	16	95
Sub Total II		156	13	0	0	13	8	29	0	37	132
III. Kontrak Proyek/Project Contract:											
1.	Operasional/Operational	158	2	0	0	2	47	0	0	47	113
2.	Supporting/Supporting	108	0	0	0	0	16	0	1	17	91
		266	2	0	0	2	63	0	1	64	204
Total I+II+III											
1.	Operasional/Operational	721	56	26	0	82	45	17	4	66	722
2.	Supporting/Supporting	335	7	20	0	27	22	12	3	37	320
Total (I+II)		1056	63	46	0	109	67	29	7	103	1042

Catatan : tidak termasuk 4 (empat) orang Direksi dan peng. Kontrak proyek

- R = Rekrutmen (Recruitment)
- M = Mutasi (Mutation)
- B = Berhenti (Stop)
- AS = Alih Status (Over Status)

Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan sampai dengan Desember 2016
Employee composition by education level until December 2016

No	Keterangan Note	S3	S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD	Jumlah Total
I. Pegawai Tetap/ Permanent Employees:									
1.	Operasional/Operational	3	25	416	40	88	0	0	572
2.	Suporting/Supporting	0	7	62	11	51	3	0	134
	Sub Total I	3	32	478	51	139	3	0	706
II. Kontrak Kerja/ Job Contract:									
1.	Operasional/Operational	1	1	14	7	14	0	0	37
2.	Suporting/Supporting	0	9	16	5	71	3	0	95
	Sub Total II	1	1	30	12	85	3	0	132
III. Kontrak Proyek/ Project Contract:									
1.	Operasional/Operational	0	2	64	16	31	0	0	113
2.	Suporting/Supporting	0	0	31	1	58	1	0	91
	Total I+II+III								
1.	Operasional/Operational	4	28	494	63	133	0	0	722
2.	Suporting/Supporting	0	7	109	17	180	7	0	320
	Total (I+II)	4	35	603	80	313	7	0	1042

Catatan : tidak termasuk 4 (empat) orang Direksi

Komposisi pegawai sesuai usia sampai dengan Desember 2016
The composition of employees as per age until December 2016

No	Keterangan Note	USIA													
		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-50		51-54	
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
I. Pegawai Tetap/ Permanent Employees:															
1.	Operasional/Operational	12	3	106	7	99	9	109	14	77	0	68	1	45	1
2.	Suporting/Supporting	0	1	3	3	9	11	15	8	14	10	19	11	14	4
	Sub Total I	12	4	109	10	108	20	124	22	91	10	87	12	59	5
	II. Kontrak Kerja/ Job Contract:														
1.	Operasional/Operational	1	0	2	1	15	0	0	0	5	0	3	0	0	1
2.	Suporting/Supporting	17	5	11	10	13	2	14	1	6	0	11	0	4	0
	Sub Total II	18	5	13	11	28	2	14	1	11	0	14	0	4	0
	III. Kontrak Proyek/ Project Contract:														
1.	Operasional/Operational	30	1	26	4	26	1	15	0	2	0	4	0	3	0
2.	Suporting/Supporting	19	4	20	13	16	0	6	0	7	0	3	0	1	0
	Sub Total III	49	5	46	17	42	1	21	0	9	0	7	0	4	0
	Total I+II+III														
1.	Operasional/Operational	43	4	134	12	140	10	124	14	84	0	75	1	48	1
2.	Suporting/Supporting	36	10	34	26	38	13	35	9	27	10	33	11	19	4
	Total (I+II+III)	79	14	168	38	178	23	159	23	111	10	108	12	67	5
	Total (I+II+III)	33	14	903	139										

Catatan : tidak termasuk 4 (empat) Direksi

(L) = Laki-laki (P) = Perempuan

Pendidikan dan Pelatihan

Selama tahun 2016, BKI melanjutkan upaya pendidikan dan pelatihan dalam rangka memenuhi standar IACS-QSCS sekaligus sebagai persiapan jika BKI mendapatkan tambahan pendelegasian kewenangan statutoria dari Pemerintah Indonesia. Secara ringkas pelatihan selama 2016 ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Education and Training

During 2016 BKI continued its education and training programs to meet IACS-QSCS standards as well as preparation if the society obtained additional statutory authority delegating by the Indonesian Government. Briefly the 2016 training activities are summarized in the table below:

Pelatihan Pegawai Tahun 2016 Training of Employees in 2016		
No	Uraian / Description	Jumlah
I.	Bidang Klasifikasi (In the field of Classification)	
1.	Principal Surveyor	0
2.	Senior Surveyor	14
3.	Surveyor	44
4.	Asisten Surveyor / Assistant Surveyor	0
5.	Inhouse Training Statutory	9
II.	Bidang Komersil (In the field of Commercial)	
1.	Ahli Radiography Level I / Radiography expertise Level I	3
2.	Ahli Radiography Level II / Radiography expertise Level II	0
3.	NDT Level I	0
4.	NDT Level II'	1
5.	Welding Inspector	5
6.	Welding Inspector - AWS	0
7.	Welding Engineering	0
8.	AK-3 Umum (DEPNAKER)	4
9.	Crane Inspector (DEPNAKER)	0
10.	Crane Inspector (MIGAS)	0
11.	Inspector Perpipaan / Piping Inspector	1
12.	Inspector Casing & Tubing	0
13.	Inspector Tangki Timbun / Storage Tank Inspector	0
14.	Petugas Proteksi Radiasi / Radiation Protection Officer	2
15.	Offshore Pipeline	0
16.	Cathodic/Corrosion Inspector	0
17.	Sea Survival	6
18.	Pembinaan Pemeriksaan Teknis & Pengujian Katup Pengaman / Development of Technical Inspection & Safety Valve Testing	0
19.	HUET	0
20.	Pressure Vessel Safety	0
21.	(BOSIET) Offshore Safety Induction Emergency Training Incl. EBS & Travel Safety Bu Boat	5
22.	Pelatihan Katup / Valve Training	1
23.	K3 Listrik / Electricity K3	3
24.	K3 Migas Akualita	4
III.	Bidang Sertifikasi (In the field of Certification)	
1.	Safety Auditor	0
2.	Quality Auditor	0
3.	ISPS Code	0
4.	ISM Code	1
5.	Auditor Lingkungan / Environmental Auditor	2
6.	Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Hulu Migas / Procurement of Goods and Services Upstream Oil and Gas	1
7.	SMK3 / Occupational Health and Safety	1
IV.	Sistem Informasi (Information System)	2
V.	Akuntan (Accountant) /Keuangan (Finance) /PKBL	6
VI.	Manajemen Risk (Risk Management)+Leadership Training+GCG	3
VII.	SDM (Human Resource) /Kehumasan (Public Relations) /TOT/UMUM (General)	37

Di samping pelatihan rutin, BKI juga mengadakan pelatihan khusus untuk secara langsung menunjang perkembangan usahanya.

Besides periodical training, BKI also held special training for directly supporting its business development.

Program Diklat Utama Pegawai PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
Periode : Januari s.d Desember 2016

Main Employee Education and Training Program pf PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
Period : January up to December 2016

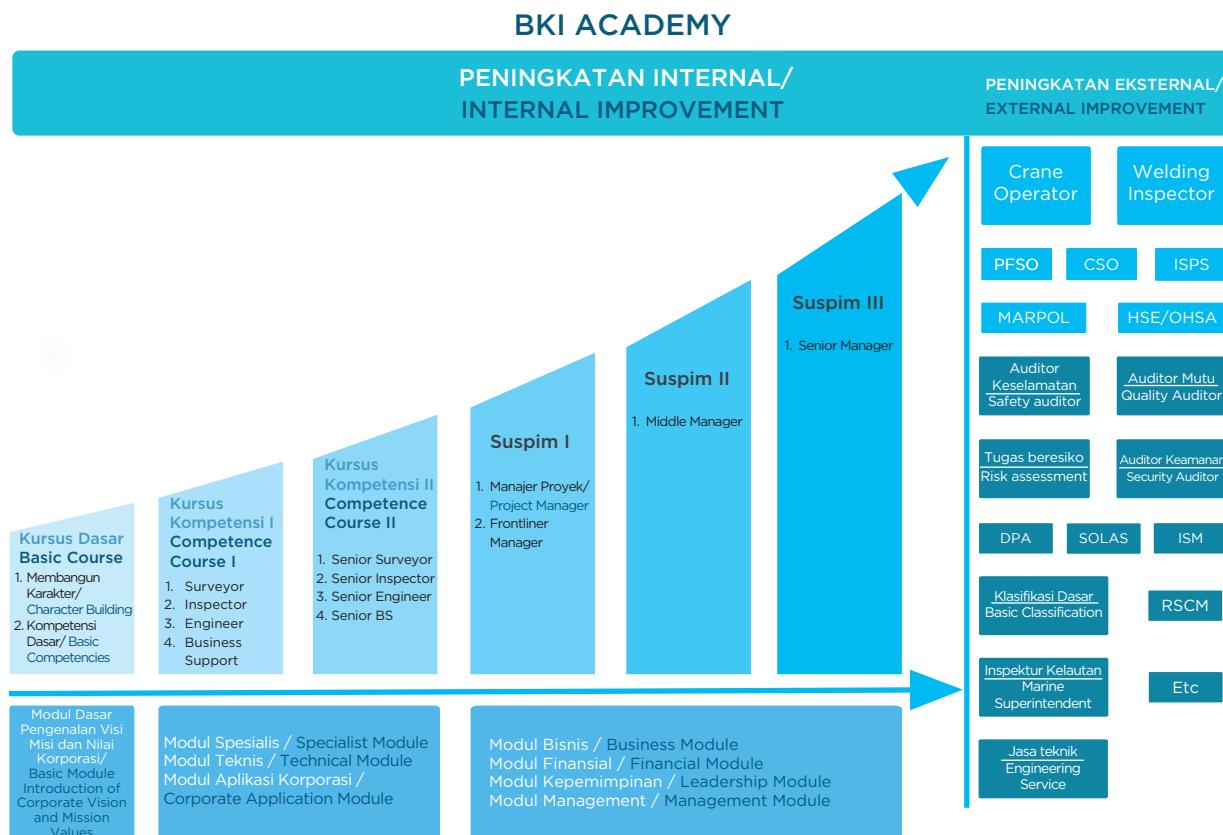
No.	Jenis Program Diklat Tahun 2016 Type of Education and Training Program 2016	Jumlah Personil 2016 Number of Personnel 2016
1.	Orientation for new Joining employee	21
2.	Assistant surveyor training	18
3.	Surveyor training	0
4.	Senior surveyor training	0
5.	Crane migas	43
6.	Stabilitas / Stability	1
7.	Marine surveyor	2
8.	MT & PT Level I	74
9.	RT Level II	24
10.	UT Level II	20
11.	Pipeline migas	1
12.	Pressure vessel migas	13
13.	Tangki penimbun migas / migas storage tank	10
14.	Peralatan putar (Rotating) migas	22
15.	Kelistrikan migas / Electricity migas	7
16.	K3 Migas / Oil & Gas Occupational Health and Safety	3
17.	PSV Migas / Oil & Gas PSV	3
18.	Instalasi migas / MIGAS installation	0
19.	Sea survival & HUET	6
20.	T-BOSIET	29
21.	Welding inspector	29
22.	Auditor ISM Code	12
23.	Auditor ISPS	0
24.	K3 Pesawat Uap / Pressure Vessel Occupational Health and Safety	5
25.	K3 Pesawat Angkut / Transportation Occupational Health and Safety	13
26.	K3 SKPI / Installation Fitness Occupational Health and Safety	0
27.	K3 Listrik / Electricity Occupational Health and Safety	8
28.	HAKIT	47
29.	Pengembangan diri (Character Building) & Kepemimpinan (Leadership)	91
30.	Manajemen pemasaran / Marketing Management	63
31.	Manajemen SDM / Human Resource Management	159
32.	Manajemen proyek / Project Management	15
33.	Risk management & Leadership Training	5
34.	Perpajakan (Taxation) + akuntansi (Accountant) + FinOps (inhouse training)	6
35.	ISO/IEC, QSCS, QMS, 9001:2008, 17025 Overview and Analysis	32
36.	HSE, Occupational Health and Safety, SMK3, Confined Space, Basic First Aid & Donut	21
37.	Perencanaan, IT & Komputer / Planning, IT & Computers	12
38.	Tugas belajar S2/S3 di luar negeri / Studying S2/S3 abroad	5
39.	Workshop / seminar (dalam (domestic) / luar negeri (abroad))	28
40.	Maritime Labour Convention (MLC) Inspector	26
41.	In House Training Statutory	62
42.	Cathodic/Corrosion Inspector	21
43.	Training Survey Bangunan Baru / New Building Survey Training	25
44.	Legal, Hukum, Kehumasan, Kontrak/kontrak/jalinan / Legal, Law, Public Relations, Contracyency / agreement	5
45.	Hearing & Sharing	3
46.	Training for Trainers	10
		1.000

BKI Academy

Dengan Program Diklat Utama yang telah berkembang begitu rupa, BKI mengambil langkah strategis yang sangat penting pada tahun 2016 dengan mempersiapkan pendirian BKI Academy. Lembaga pendidikan dan pelatihan ini berfungsi untuk mengembangkan karakter melalui pelatihan dasar dan mengembangkan sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengembangan usaha jasa sertifikasi statutoria.

BKI Academy

With Major Training Program that has developed in such way, in 2016 BKI took crucial strategic step by preparing the establishment of BKI Academy. This educational and training institute works to develop character through basic training and developing human resources needed for developing statutory certification service business.



Riset dan Pengembangan

BKI memiliki beberapa inisiatif riset dan pengembangan di beberapa bidang yang terkait dengan jasa klasifikasi, komersial serta statutoria. Penelitian yang sedang dan sudah selesai dilakukan pada 2016 antara lain :

Stabilitas

Analisis freeboard berdasarkan kriteria stabilitas dan penilaian kekuatan longitudinal untuk perairan Indonesia

Research and Development

BKI has several research and development initiatives in some fields related to classification, commercial and statutory services. The research efforts that have been completed and on-going during 2016 are:

Stability

Freeboard analysis based on stability criteria and longitudinal strength assessment for Indonesia waterways

Hidrodinamik

- Melakukan penelitian tentang system propulsi propeller yang optimal terkait penghematan bahan bakar;
- Rancang bangun kapal performa tinggi pada gelombang dengan parameter form yang teroptimasi;
- Pemetaan karakteristik kondisi lingkungan laut sepanjang jalur air Indonesia sebagai acuan rancangan dan operasional kapal serta unit floating off-shore

Analisis Struktural

- Analisa tentang random fatigue struktur kapal sepanjang daerah perairan Indonesia;
- Tingkat korosi dari kapal-kapal BKI;
- Fatigue mooring line analysis ;
- Studi Sederhana Penilaian Kekuatan Tertinggi Hull Girder Konstruksi Kapal sesuai Aturan BKI untuk Lambung Kapal
- Kebutuhan scantling lokal dari model kasus pemuatan global berdasarkan peraturan BKI untuk Hull - Bagian 3

Sistem Permesinan

Pada 2016 BKI juga telah merencanakan beberapa kegiatan penelitian dan pengembangan yang akan dilakukan, antara lain:

- Evaluasi fatigue untuk struktur terapung lepas pantai berdasarkan Petunjuk FPI
- Pengembangan Aplikasi Sirkuit Pendek di bawah IEC 61363
- Rancang bangun sistem monitoring kondisi untuk getaran akibat torsi pada propeller shaft

Selain hal di atas, aktivitas BKI terkait dengan pengembangan aplikasi teknik antara lain:

1. Perhitungan scantling lambung kapal
2. Mesin hitung angka indeks desain efisiensi energi (Green Padma);
3. Perhitungan arus listrik arus pendek
4. Migrasi sistem COPs, CSOps & FINOpS ke OGS

Hydrodynamics

- Conducting research on optimum propeller propulsion system in regards to fuel saving and efficiency;
- Engineering of a high performance ship in wave with optimized form parameters;
- Indonesian waterways ocean environmental condition characteristic mapping for referential purpose in designing and operating a ship and off shore floating unit.

Structural Analysis

- Fully random fatigue of ship structural member along Indonesian waterways area;
- Advance corrosion rate of BKI vessels;
- Fatigue mooring analysis;
- Simplified Ultimate Strength Assessment of Hull Girder Ship Structures Based on BKI Rules for Hull;
- Local scantling requirement from global loading cases model based on BKI rules for Hull - Part 3

Engine System

In 2016 BKI also has planned several research and development initiatives that will be conducted, among others:

- Fatigue assessment for floating offshore structure based on FPI Guidelines;
- Short Circuit Application Development Under IEC 61363
- Engineering of condition monitoring system for propeller shaft torsional vibration

In addition to those research initiatives, BKI also has several technical applications developments, which are:

1. Ship Hull scantling calculation (Dewaruci);
2. Energy efficiency design index calculator (Green Padma);
3. Electrical short circuit current calculation (SoTON).
4. COpS, CSOpS and FinOpS system migration to OGS

Pengembangan Peraturan Teknik

Peraturan teknik BKI terdiri dari Rules, Guidelines dan Guidance yang dikembangkan oleh Divisi Penelitian dan Pengembangan, serta Regulasi yang dikembangkan oleh Divisi Statutoria. Peraturan teknik BKI disusun berdasarkan standart dan prosedur internal yang mengacu pada IACS QSCS. Setiap tahunnya, peraturan teknik dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memenuhi persyaratan internasional seperti IACS, SOLAS, MARPOL dan standart internasional lainnya seperti ISO, IEC serta untuk mengakomodir masukan-masukan dari berbagai sumber seperti masukan dari divisi terkait, masukan dari stakeholder, hasil penelitian dan sumber lainnya.

Kegiatan pengembangan teknik

1. Kegiatan Pengembangan Peraturan Teknik (Working Group) yang masih berlangsung:

- Petunjuk Notasi Klas
- Peraturan untuk Klasifikasi dan Survey
- Peraturan Domestik Instalasi Kelistrikan

- Peraturan Domestik Instalasi Permesinan Petunjuk untuk Klasifikasi dan
- Pembangunan Instalasi Produksi Terapung
- Petunjuk untuk Persetujuan Pabrikan
- dan Persetujuan Tipe Material dan Peralatan untuk Penggunaan Marine
- Peraturan Lambung Kapal
- Peraturan Kapal Peti Kemas
- Paket Dokumen IMO GBS
- Petunjuk untuk Kapal yang Ditujukan untuk Mengangkut CNG Curah

Kegiatan Pengembangan Peraturan Teknik (Working Group) yang harus divalidasi sebelum di publikasikan:

- Peraturan Domestik Klasifikasi dan Survey
- Peraturan Domestik Instalasi Permesinan
- Peraturan Domestik Instalasi Listrik

- Peraturan Lambung Kapal
- Peraturan untuk Klasifikasi dan Survey

Kegiatan Pengembangan Peraturan Teknik (Working Group) yang telah Terealisasi

- Pedoman Domestik Lambung

Development of Technical Regulations

BKI Technical Regulations comprises of Rules, Guidelines and Guidance that are developed by Research and Development Division, and Regulations developed by Statutory Division. BKI Technical regulations are composed in accordance to internal standards and procedures referring to IACS- QSCS. Each year, technical regulations are developed to meet market need and fulfilling international requirements such as IACS, SOLAS, MARPOL as well other international standards like ISO and IEC and also to accommodate inputs from various sources such as related division, suggestion from stakeholders, research and development results, and other sources.

Technical development activities

1. On going Technical Regulatory Development Activities:

- Guidance of Class Notation
- Rules for Classification & Survey
- Domestic Regulation of Electrical Installation
- Domestic Regulation of Machinery Installation
- Guidelines of Classification and Floating Production Installation Construction
- Guidance for Plan Approval and Type Approval of Material and Equipment for marine use
- Rules for Hull
- Rules for Container Ship
- IMO-GBS Documents Package Guidelines for Ship Intended to Carry

Technical Regulatory Development Activities (Working Group) that must be validated prior to publication:

- Domestic Regulation of Classification and Survey
- Domestic Regulation of Machinery Installation
- Domestic Regulation of Electrical Installation
- Rules for Hull
- Rules for Classification & Survey

Technical Regulatory Development Activities (Working Group) that have been realized

- Domestic Guidelines for Hull

- Peraturan Domestik Klasifikasi dan Survey
- Peraturan Klasifikasi untuk Kapal yang Mengangkut Gas Cair Curah
- IMO GBS untuk Kapal Tangker Minyak dan Kapal Curah
- Peraturan Klasifikasi untuk Persetujuan Pabrikan dan Penyedia Jasa
- Peraturan Klasifikasi untuk Kapal Cepat

2. Kegiatan Pengembangan Peraturan Teknik (Working Group) Masing-masing Bidang

- Kegiatan pengembangan peraturan-peraturan klasifikasi dan survey
- Peraturan Klasifikasi untuk kapal yacht
- Petunjuk Notasi Klas
- Petunjuk untuk Proses Persetujuan Pabrikan dan Persetujuan Tipe
- Welding Inspector
- New Building Batch - III

Kegiatan Peraturan Teknik Lambung dan Material

- Peraturan Lambung Domestik
- Peraturan untuk Kapal Cepat
- Standar untuk Kapal Tangker Minyak dan Kapal Curah
- Petunjuk untuk Persetujuan Pabrikan dan Persetujuan Tipe Material dan Perlengkapan untuk Penggunaan Marine
- Peraturan untuk Persetujuan Pabrikan dan Penyedia Jasa
- Peraturan untuk Lambung Kapal
- Peraturan untuk Struktur Kapal Peti Kemas

Kegiatan Pengembangan Peraturan Teknik bidang Survey dan Pengklasan

- Petunjuk Notas Klas
- Paket Dokumen Peraturan IMO GBS, IACS, HCSR untuk Kapal Curah dan Kapal Tangker Minyak
- Seminar ACS

Kegiatan Pengembangan Peraturan Teknik Permesinan dan Kelistrikan

- Petunjuk Domestik untuk Instalasi Kelistrikan
- Petunjuk untuk Notasi Klas
- Peraturan untuk Kapal Pengangkut CNG

- Domestic Regulation of Classification and Survey
- Rules for Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk
- IMO GBS for Oil Tanker and Bulk Carrier
- Rules for Manufacturer Approval and Service Provider Approval
- Rules for High Speed Craft

2. Technical Regulatory Development Activities (Working Group) Each Field

- Classification and survey regulations development activities
- Rules for Yacht
- Guidance for Class Notation
- Guidance for Approval of Manufacturing Process and Type Approval
- Welding Inspector
- New Building Batch - III

Activity Regulation of Gastric and Material Engineering

- Domestic Hull Regulations
- Rules for High Speed Craft
- Standard for Oil Tanker and Bulk Carrier
- Guidanace for Plan Approval and Type Approval of Materials and Equipment for Marine Use.
- Rules for Manufacturer Approval and Service Provider Approval
- Rules for Hull
- Rules for Container Ship Construction

Technical Regulatory Development Activities in the field of Survey and Welding

- Guidance for Class Notation
- Documents Package (IMO GBS, IACS, HCSR) Rules for Bulk Carrier and Oil Tanker
- ACS Seminars

Development of Engineering Regulations on Machinery and Electricity

- Domestic Guidance for Electrical Installation
- Guidance for Class Notation
- Rules for CNG Carrier Vessel

- Petunjuk untuk Persetujuan Proses Pembuatan dan Persetujuan Tipe
- Petunjuk Domestik untuk Instalasi Permesinan
- FGD Standar Kapal Non Konvensi (NCVS)
- Seminar MARTEC 2016

Kegiatan Pengembangan Peraturan Teknik Lepas Pantai Statutoria

- Petunjuk untuk Proses Pembuatan dan Persetujuan Tipe
- Peraturan Struktural Umum yang Diselaraskan untuk Kapal Curah dan Kapal Tangker Minyak
- Buku Notasi Klas

Kegiatan Pengembangan Peraturan Teknik Lepas Pantai

- Peraturan untuk Klasifikasi dan Survey
- Petunjuk untuk Klasifikasi dan Pembangunan Instalasi
- Seminar The Building of FPSO
- Survey pengumpulan data untuk analisa kekuatan rantai jangkar MT.Gebang untuk kegiatan STS.
- Analisa kekuatan rantai jangkar MT.Gebang untuk kegiatan STS menggunakan program komputer berbasis FEM
- Paket Dokumen Peraturan IMO GBS, IACS, HCSR untuk Kapal Curah dan Kapal Tangker Minyak
- Petunjuk untuk Notasi Klas
- Peraturan untuk Lambung
- Pedoman Listrik Domestik
- Seminar Permeriksaan dokumen Mooring Analysis

Jaringan Kerjasama

Sesama BUMN

BKI bekerjasama dengan BUMN yang juga merupakan pengguna jasa BKI, baik jasa klasifikasi maupun statutoria. Beberapa BUMN yang melakukan kerjasama dengan BKI adalah ASDP, PELNI, PUSRI, Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, Pelindo IV dan Rukindo. Ruang lingkup kerja sama meliputi pendidikan dan pelatihan, jasa konsultasi, asistensi supervisi, sertifikasi dan jasa lain yang relevan dengan kebutuhan BUMN mitra dan kapabilitas BKI.

- Guidance for Manufacturing Process Approval and Type Approval
- Domestic Guidance for Machinery Installation
- FGD on Non Convention Vessel Standard (NCVS)
- MARTEC 2016 Seminar

Offshore Technique Regulatory Development Activities

- Guidelines for Manufacturing Process and Type Approval
- Harmonised Common Structural Rules for Bulk Carrier and Oil Tanker
- Class Notation Book

Offshore Engineering Rules Development Activities

- Rules for Classification and Survey
- Guidelines for Classification and Installation Construction
- The Building of FPSO Seminar
- Data collecting survey for MT Gebang anchor strength analysis for STS purpose
- MT Gebang anchor strength analysis for STS activities using FEM-based computer program
- Documents Package (IMO GBS, IACS, HCSR) Rules for Bulk Carrier and Oil Tanker Bulk Carrier and Oil Tanker
- Guidance for Class Notation
- Rules for Hull
- Domestic Guidance for Electricity
- Seminar on Mooring Analysis Documents Evaluation

Cooperation Network

With others State-Owned Enterprises

BKI maintains cooperation with other SOEs as Company's customer either in classification or statutory services. Those SOEs which team up with BKI are ASDP, PELNI, PUSRI, Pelindo I-IV and Rukindo. The scope of cooperation covers education and training, consulting service, supervision assistance, certification and other services relevant to the SOEs need and BKI's capabilities.

Dengan Mitra Usaha Lain

BKI juga memiliki kerja sama dengan mitra usaha non-BUMN, diantaranya:

- a. Dengan Asosiasi Industri Komponen Kapal Indonesia (AIKKI) terkait bantuan teknis untuk pengklasan komponen kapal;
- b. Dengan KNKT dalam rangka kerja sama investigasi kecelakaan kapal;
- c. Dengan INSA, GAPASDAP, IPERINDO, dan AAUI dalam meningkatkan tingkat keselamatan industri pelayaran nasional;
- d. Dengan Isthmus Bureau of Shipping (IBS) untuk melakukan survey statutoria bagi kapal-kapal bendera Panama dan Belize di Indonesia;
- e. Dengan American Bureau of Shipping (ABS), Korean Register (KR), dan Nippon Kaiji Kyokai (NK) terkait dengan pengembangan rules & regulation;
- f. Dengan mitra usaha strategis pada kegiatan Komersil dalam beberapa usaha, misalnya TUV Rheinland, TUV Nord, dan Bureau Veritas Indonesia;
- g. Pertukaran informasi di lingkungan anggota ACS dalam rangka partisipasi aktif terhadap peraturan yang dibahas dalam forum IMO;
- h. Dengan perguruan tinggi ITS, UNHAS, dan UI dalam bidang penelitian / pengembangan peraturan BKI;
- i. Dengan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dalam inspeksi peti kemas berbasis IT;
- j. Dengan Pemerintah Mongolia terkait pendeklegasian wewenang survey dan sertifikasi statutoria kapal-kapal berbendera Mongolia.
- k. Dengan ABS, BN, dan DNV terkait penelitian dan pengembangan energi alternatif;
- l. Dengan STIP dalam peningkatan kompetensi surveyor terutama pada survey statutoria;
- m. Memiliki MoU dengan BPPT untuk pengembangan riset bersama di sektor maritim dan standarisasi kapal.

With Other Business Partners

BKI also maintained cooperation with non-SOE business partner, such as:

- a. With Indonesian Ship Component Industries Association (AIKKI) for technical assistance related to classification of ship components;
- b. With National Committee on Transportation Safety (KNKT) for partnership in ship accident investigation;
- c. With INSA, GAPASDAP, IPERINDO and AAUI for increasing national shipping industry safety level;
- d. With Isthmus Bureau of Shipping (IBS) for conducting statutory survey on board Panamanian and Belizean flag vessels in Indonesia;
- e. With American Bureau of Shipping (ABS), Korean Register (KR) and Nippon Kaiji Kyokai (NK) on rules and regulations development;
- f. With strategic business partners in several non classification projects such as TUV Rheinland, TUV Nord and Bureau Veritas Indonesia;
- g. Information exchange with ACS members relating to regulations discussed in IMO forums;
- h. With colleges like ITS, UNHAS and UI on BKI's rules research and development;
- i. With Indonesian Logistic and Forwarder Association (ALFI) for IT based container inspection;
- j. With Mongolian Government for Mongolian flag vessels Statutory Authorization;
- k. With ABS, BV and DnV relating to alternative energy research and development;
- l. With Maritime Higher Education Institute (STIP) for surveyor's competence development mainly in statutory surveys;
- m. With Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT) for joint research development in maritime sector and ship standardization.

Pemegang Saham

Seluruh saham (100%) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dalam RUPS, Pemerintah selaku pemegang saham negara diwakili oleh Menteri BUMN

Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, Perusahaan Ventura

BKI tidak memiliki ataupun memiliki saham pada entitas anak, perusahaan asosiasi, atau perusahaan ventura.

Kronologi Pencatatan Saham dan Efek Lainnya

BKI belum pernah melakukan pencatatan saham ataupun efek lainnya di bursa.

Pemeringkat Efek, Lembaga dan atau Profesi Penunjang Pasar Modal

BKI belum pernah menggunakan jasa pemeringkat efek, lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal.

Kerjasama Luar Negeri

Sebagai bagian dari industri klasifikasi dan layanan statutori global, BKI juga memiliki kerjasama dengan hampir semua anggota IACS dan badan klasifikasi penting lainnya yang bukan anggota IACS:

Shareholder

All (100%) shares of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) are owned by the State of Republic of Indonesia. In General Shareholder Meeting, the Indonesian Government as state share holder is represented by the Minister of SOEs.

Subsidiary, Associated Company, Venture Capital Company

BKI does not posses any or having share of subsidiaries, associated companies, or venture capital companies.

Chronology of Listing of Shares or Other Securities

BKI has not listed any shares or other securities in the stock market

Securities Rating Agency, Capital Market Support Institution or Professional

BKI has not used services of securities rating agencies or capital market supporting professions

Foreign Partnership

As part of the classification industry and global statutory services, BKI also maintained partnership with most of IACS members and other prominent non IACS classification societies:

Cooperation agreement in the field of classification Perjanjian Kerjasama bidang kegiatan klasifikasi			
No	Nama Badan Klasifikasi Name of Classification Society	Negara Country	Bentuk Kerjasama Form of Partnership
1	American Bureau of Shipping	USA	Dual Class
2	Bureau Veritas	Prancis/France	Dual Class
3	China Classification Society	RRC/People's Republic of China	Mutual Representation
4	Det Norske Veritas	Norwegia/Norway	Dual Class
5	Germanischer Lloyd	Jerman/Germany	Mutual Representation
6	Hellenic Register of Shipping	Yunani/Greece	Mutual Representation
7	Indian Register of Shipping	India	Mutual Representation
8	Korean Register of Shipping	Korea Selatan/South Korea	Mutual Representation
9	Korean Classification Society	Korea Utara/North Korea	Mutual Representation
10	Lloyd's Register of Shipping	Ingris/England	Dual Class
11	Nippon Kaiji Kyokai	Jepang/Japan	Mutual Representation
12	Registrul Naval Roman	Rumania/Romania	Mutual Representation
13	Rinave Portugueusa	Portugal	Mutual Representation
14	Ships Classification Malaysia	Malaysia	Mutual Representation
15	Vietnam Register	Vietnam/Vietnamese	Mutual Representation
16	Polski Rejestr Statko'w	Polandia/Poland	Mutual Representation
17	Registro Italiano Navale	Italia/Italy	Dual Class
18	Isthmus Bureau of Shipping	Panama	Mutual Representation

Kinerja BKI sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang klasifikasi, statutoria, dan independent assurance pada dasarnya diwujudkan dalam Service Level Agreement (SLA)





BKI's performance as a company that is engaged in classification, statutory and independent assurance is essentially manifested in the Service Level Agreement (SLA)

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion and Analysis

Tinjauan Operasional

Kegiatan operasional BKI terbagi ke dalam dua jenis layanan, yaitu jasa Klasifikasi dan Statutoria dan jasa Non-klasifikasi yang dikenal juga sebagai Jasa Komersil.

Bidang jasa Klasifikasi terbagi atas klasifikasi tunggal (single class) dan kerjasama dengan badan klasifikasi partner (mutual representatives dan dual class). Masing-masing mencakup pelaksanaan survei, persetujuan gambar, dan penerbitan sertifikat klasifikasi, serta kegiatan yang berkaitan dengan survei dan sertifikasi statutoria. Layanan jasa klasifikasi dan statutoria ini diberikan melalui kantor-kantor Cabang Klasifikasi di kota-kota pelabuhan utama Indonesia.

Sedangkan untuk bidang jasa non-klasifikasi atau komersil terbagi dalam kelompok jasa bidang Marine, Industri, dan Energi. Layanan jasa bidang komersil ini secara khusus diberikan melalui tiga Strategic Business Unit (SBU) dan Kantor Cabang Komersil BKI.

BKI tidak melakukan proses produksi maupun pengolahan bahan baku. Perkembangan operasional BKI ditentukan oleh kemampuannya meningkatkan jumlah penggunaan dan jenis layanan yang ditawarkan oleh pemakai jasa, melalui intensifikasi dan diversifikasi layanan yang sejalan dengan kompetensi inti Perusahaan.

Segmen Jasa Klasifikasi Dan Statutoria

Pada posisi 31 Desember 2016 jumlah keseluruhan kapal yang terdaftar dalam Register BKI sebanyak 21.169 unit dengan jumlah tonase kotor 30.353.889 gross ton. Dari jumlah itu kapal yang masih aktif atau mempertahankan validitas sertifikasi klasifikasinya sebanyak 10.256 unit dengan jumlah tonase kotor 15.999.711 gross ton.

Dari jumlah kapal yang aktif itu terlihat adanya penurunan sebanyak 126 unit atau 1,21% jika dibandingkan dengan tahun 2015.

Operational Overview

BKI operational activities are divided into two types of services, namely Classification and Statutoria services and Non-classification services which also named as Commercial services.

Classification service area is divided into a single classification (single class) and cooperation with partner classification bodies (mutual representatives and dual class). Each includes the survey, drawing approval, and the issuance of the certificate of classification, as well as activities related to the survey and statutory certification. Classification and statutory services are provided through Classification Branch offices all over major port cities in Indonesia.

The non classification service field were divided into three service categories: Marine, Industrial and Energy. Services in commercial field particularly delivered through three Strategic Business Units (SBUs) and BKI Commercial Branch Offices.

BKI does not do any production process nor raw material processing. BKI's operational growth is determined by its ability to increase the number of use and variety of service offered through service intensification and diversification in line with Company's core competencies.

Classification and Statutory Services Segment

By 31 December 2016, the total number of ships recorded in the BKI Register was 21,169 units with total of 30,353,889 gross tons. Of that number, the number of vessels actively maintained its classification certificate were 10,256 units with total tonnage of 15,999,711 gross ton.

The active vessel number showed a slightly declined of 126 units or 1.21% compared with 2015 number.



Meskipun demikian segmen klasifikasi dan statutoria tetap tercatat memberikan kontribusi yang positif sebesar 50,52% dari total pendapatan bersih Perusahaan.

Dari sisi kinerja operasional, segmen klasifikasi dan statutoria pada 2016 secara keseluruhan mencatat produktivitas sebesar 393.531.344 poin, meningkat 38,58% dibandingkan 2015 yang tercatat sebesar 283.978.353 poin. Peningkatan produktivitas yang cukup signifikan itu antara lain disebabkan adanya lonjakan produksi Klas Tunggal BKI sebesar 143,97% dan kegiatan kerjasama dengan class partner dalam pelaksanaan survey klas BKI di luar negeri sebesar 185,01%.

Nevertheless the classification and statutory segments still booked positive contribution of 50.52% to the Company's total net revenues.

From operational performance side, in 2016 classification and statutory segment in overall registered 393,531,344 productivity points, a 38.58% rise compared to 2015 which recorded 283,978,353 points. This quite significant productivity increase among others caused by 143,97% production leap of BKI Single Class and 185,01% of BKI Class overseas survey performed under cooperation scheme with class partner.

Realisasi Produksi Jasa Klasifikasi (Poin) / Production Realization of Classification Services (Points)	2016	2015
Kelas tunggal - dalam negeri / BKI Single Class (domestic)	323.801.968	222.780.578
Kelas tunggal - di luar negeri / BKI Single Class (foreign)	16.220.868	13.395.190
Kelas tunggal BKI di luar negeri oleh asing (luar negeri) / BKI Single Class by Foreign Classification Agency	1.333.460	720.762
Kelas ganda - dalam negeri / Dual Class (domestic)	48.064.179	43.569.191
Kelas ganda - di luar negeri / Dual Class (foreign)	4.110.869	3.512.632
Kelas asing - di Indonesia / Foreign Class in Indonesia	-	-
Jumlah / Total	393.531.344	283.978.353



Segmen Jasa Non Klasifikasi (Jasa Bidang Komersil)

Kinerja operasional bidang komersil BKI sepanjang tahun 2016 masih menunjukkan produktivitas yang cukup baik, dengan total 365.191.182 man-days.

Angka ini sedikit lebih kecil sebesar 0,7% dibandingkan 2015 yang berjumlah 392.738.421 man-days. Dengan angka produktivitas ini, bidang komersil BKI memberikan kontribusi pendapatan bersih sebesar 49,48% dari keseluruhan pendapatan perusahaan. Rincian pencapaian operasional segmen komersil dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Realisasi Produksi Jasa Non-Klasifikasi (Man-Days) / Production Realization of Non-Classification Services (Man-Days)	2016	2015
Sektor Maritim / Maritime Sector	135.961.368	-
Sektor Industri / Industry Sector	143.080.421	279.738.462
Sektor Infrastruktur / Infrastructure Sector	86.149.393	112.999.959
Share Partner / Partner's Share	-	-
Jumlah / Total	365.191.182	392.738.421

Analisa Kinerja Keuangan Komprehensif Total Asset

Total aset perusahaan pada akhir tahun buku 2016 mencapai Rp 771,64 miliar, dengan komposisi aset lancar sebesar 71,96% dan asset tidak lancar sebesar 28,04%. Jumlah total aset perusahaan ini meningkat 11,95% dibandingkan 2015 yang sebesar Rp 689,30 miliar.

Non Classification Services Segment (Commercial Services)

BKI's commercial segment operational performance during 2016 still indicating quite good at productivity with total of 365,191,182 man-days.

This figure is a bit, 0.7%, lower compared to 2015 which registered 392,738,421 man-days. With this productivity number, the commercial segment gave 49.48% contribution to net corporate income. Commercial segment operational performance detail breakdown are presented in the table below:

Comprehensive Financial Report Analysis Total Assets

The company's total assets reaching Rp 771.64 billion by the end of 2016 fiscal year, with composition of 71.96% in form of current assets and 28.04% in non-current assets. This total company's assets number is increasing 11.95% compared to 2015 position which was Rp 689.30 billion.



Aset Lancar

Dari total nilai aset sebesar Rp 771,64 miliar itu sebagian besar atau senilai Rp 555,30 miliar merupakan aset lancar, dan Rp 216,34 miliar tergolong sebagai aset tidak lancar. Jumlah aset lancar ini mengalami pertumbuhan 8,28% dari angka Rp 512,82 miliar pada posisi 31 Desember 2015.

Komponen terbesar dari aset lancar adalah berupa piutang usaha sebesar Rp 301,982 miliar, atau sebesar 54,36% dari total aset lancar pada 31 Desember 2016. Komponen terbesar lainnya pajak yang dibayar di muka serta kas dan setara kas masing-masing sebesar Rp 116,82 miliar dan Rp 89,39 miliar.

Meskipun total aset mengalami peningkatan, posisi kas dan setara kas mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 48,78% dari semula Rp 174,58 miliar di tahun 2015 menjadi Rp 89,39 miliar di tahun 2016.

Current Assets

From that total asset value of Rp 771.64 billion, mostly or Rp 555.30 billion were in form of current assets and Rp 216.34 billion of non-current assets. This current assets number indicating 8.28% increase from Rp 512.82 billion of 31 December 2015 position.

The main component of current assets was in accounts receivable amounting Rp 301,982 billion or 54.36% of 31 December 2016 total current assets number. Other significant component were prepaid tax as well cash and cash equivalent which each consist of Rp 116.82 billion and Rp 89.39 billion.

Even though the total assets number increased, the cash and cash equivalent position experienced significant derivation of 48.78% from Rp 174.58 billion on 2015 to Rp 89.39 billion on 2016.

Aset Tidak Lancar

Posisi aset tidak lancar per 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp 216,34 miliar yang terdiri atas aset tetap setelah dikurangi penyusutan sebesar Rp 195,55 miliar, pajak tangguhan sebesar Rp 20,20 miliar dan aset tidak lancar lainnya sebesar 585,03 juta.

Aset tidak lancar pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 22,59% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 176,48 miliar.

Kewajiban

Per 31 Desember 2016, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 211,87 miliar, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp 164,92 miliar dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 46,95 miliar.

Jumlah kewajiban Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 16,66% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari semula Rp 181,62 miliar di tahun 2015 menjadi Rp 211,87 miliar pada tahun 2016.

Kewajiban Jangka Pendek

Total kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2016 sebesar Rp 164,92 miliar, mengalami kenaikan sebesar 19,65% dibandingkan dengan kewajiban yang sama pada akhir tahun 2015 sebesar Rp 137,84 miliar.

Kenaikan liabilitas jangka pendek ini disebabkan adanya kenaikan cukup material pada hutang pajak sebesar 58,78 %, dari Rp 56,24 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp 89,29 miliar pada tahun 2016.

Kewajiban Jangka Panjang

Perseroan hanya memiliki satu akun terkait dengan kewajiban jangka panjang, yaitu imbalan kerja, yang mengalami kenaikan sebesar 7,23% dari Rp 43,78 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp 46,95 miliar pada tahun 2016.

Non Current Asset

Non-current assets position as of December 31, 2016 was recorded at Rp 216.34 billion which earned from fixed assets subtracted by depreciation amounted Rp 195.55 billion, Rp 20.20 billion of deferred tax and Rp 585.03 million of other non-current asset.

Compared to the previous year position of Rp 176.48 billion, at the end 2016 non-current assets shown 22.59% growth.

Liabilities

As of 31 December 2016, total company's liabilities is Rp 211.87 billion, consisting Rp 164.92 short-term liabilities and RP 46.95 long term liabilities.

The total Company's liabilities number was inclined about 16.66% if compared to the previous year, from Rp 181.62 billion in 2015 to Rp 211.87 billion in 2016.

Short Term Liabilities

By the end of 2016, total Company's short-term liabilities is Rp 164.92 billion, a 19.65% higher compared to the same liabilities by the end of 2015 which was Rp 137.84 billion.

This increase in short term liabilities were driven by the 58.78% increase in tax liabilities from Rp 56.24 billion in 2015 to Rp 89.29 billion in 2016 is due to a significant increase in trade payables and taxes payable.

Long Term Liabilities

The company only has one account related to long-term liabilities, which is employee benefits, which was increased by 7.23% from Rp 43.78 billion in 2015 to Rp 46.95 billion in 2016.



Ekuitas

Total Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 559,77 miliar, naik sebesar 10,26% dibandingkan posisi pada akhir tahun 2015 sebesar Rp 507,68 miliar.

Kenaikan ekuitas Perseroan dipengaruhi oleh jumlah saldo laba ditahan, yang meningkat 24,56% menjadi Rp 300,17 miliar dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 240.98 miliar.

Pendapatan

Untuk tahun 2016, Perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar Rp 737,99 miliar, sedikit meningkat (4,44%) dibandingkan pendapatan tahun 2015 yang sebesar Rp 706,65 miliar.

Dari jumlah tersebut, segmen jasa klasifikasi dan statutoria memberikan kontribusi sebesar Rp 372,80 miliar atau 50,52%, sedangkan segmen jasa komersil memberikan Rp 365,19 atau 49,48%.

Dari angka tersebut terlihat bahwa baik segmen jasa klasifikasi & statutoria atau jasa komersil memberikan kontribusi pendapatan yang hampir seimbang.

Equity

By the end of 2016, total Company's equity is Rp 559.77 billion, a 10.26% rise compared to Rp 507.68 of 2015 year end position.

The Company's equities rising was influenced by the number of retained earnings balance which increased 24.56% to Rp 300.17 billion from previous year's Rp 240.98 billion.

Revenues

For 2016 fiscal year, the Company booked total revenue of Rp 737.99 billion, a slight increase (4.44%) compared to the 2015's revenue which amounting Rp 706.65 billion.

From that amount the classification and statutory services segment contributed Rp 372.80 billion or 50.52%, while the commercial services segment provided Rp 365.19 or 49.48%.

From those figures seen that either classification & statutory or commercial services segments provided almost balanced revenue contribution.

Laba Kotor

Pada akhir tahun 2016 ini Perseroan berhasil mencetak laba kotor sebesar Rp 506.77 miliar yang merupakan peningkatan 12,49% dari angka Rp 450.51 miliar yang didapatkan sepanjang tahun 2015.

Beban Usaha

Total beban usaha yang ditanggung Perseroan sepanjang tahun 2016 adalah sebesar Rp 413,97 miliar. Jumlah itu lebih besar 16.08% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 356.63 miliar.

Bertambahnya beban usaha ini utamanya disebabkan oleh adanya peningkatan beban administrasi dan umum yang cukup material dibandingkan tahun 2015.

Laba Usaha

Laba usaha yang berhasil didapat untuk tahun 2016 ini sebesar Rp 92,79 miliar. Jumlah ini berbeda sedikit dibandingkan pencapaian tahun lalu sebesar Rp 93,89 miliar. Sementara untuk margin laba usaha berada di kisaran 12,57%, sedikit di bawah 2015 yang berada di angka 13,29%.

Laba Sebelum Pajak

Perusahaan memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp 89,81 miliar, 16,87% di bawah angka tahun sebelumnya sebesar Rp 108,03 miliar.

Laba Bersih Periode Berjalan

Untuk jumlah laba periode berjalan, Perusahaan berhasil mencatatkan jumlah Rp 67,61 miliar. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 16,03% dibandingkan pencapaian tahun 2015 yang berada di angka Rp 80,52 miliar.

Pendapatan Komprehensif Lain

Untuk tahun 2016, Perusahaan mengalami defisit dalam pendapatan komprehensif lainnya sebesar Rp 7,09 miliar. Sementara untuk tahun 2015, Perusahaan masih mendapatkan surplus melalui pendapatan sebesar Rp 16,33 miliar. Defisit pendapatan di akun ini terjadi akibat Perusahaan mengalami kerugian aktuarial sebesar Rp 9,21 miliar.

Gross Profit

By the end of this 2016 the Company managed to score gross profit of Rp 506.77 billion which was a 12.49% increment from Rp 450.51 billion figures earned throughout the year 2015.

Operating Expenses

Total operating expenses borne by the Company during 2016 amounted to Rp 413.97 billion. This is 16.08% higher than previous year's which was Rp 356.63 billion.

This increment in operating expenses was primarily due to increase in general and administrative costs that are quite material compared to 2015.

Operating Profit

The operating profit for 2016 is amounted to Rp 92.79 billion. These numbers were slightly different compared to last year's achievement of Rp 93.89 billion. As for the operating profit margin is in the range of 12.57%, slightly below 2015 which was at 13.29%.

Profit before tax

The Company earned profit before tax of Rp 89.81 billion, 16.87% below the previous year's figure of Rp 108.03 billion.

Net Income For The Year

For the amount of current period profit, the Company managed to record the amount of Rp 67.61 billion. This figure shows 16.03% declined compared to the 2015 result which was at Rp 80.52 billion

Other Comprehensive Income

For the year 2016, the Company experienced a deficit in other comprehensive income of Rp 7.09 billion. Meanwhile, for the year 2015, the Company still got a surplus through Rp 16.33 billion revenue. The shortage in this account was due to the Company having an actuarial loss of Rp 9.21 billion.

Laba Komprehensif Periode Berjalan

Perseroan mengalami penurunan yang signifikan dalam keuntungan komprehensif tahun berjalan untuk tahun 2016 menjadi Rp 60,52 miliar. Jumlah ini 37,51% lebih rendah dari angka Rp 96,85 miliar yang tercatat untuk tahun sebelumnya.

Arus Kas

Arus kas dan setara kas Perusahaan turun dari Rp 174,53 miliar di akhir tahun 2015 menjadi Rp 89,39 miliar di akhir tahun 2016.

Penurunan arus kas ini antara lain dipengaruhi oleh laju pelunasan pembayaran pemakai jasa dan keterlambatan pembayaran pada beberapa proyek berjalan dan selesai.

Untuk tahun fiskal 2016, kas yang diperoleh dari kegiatan operasional tercatat mengalami defisit sebesar Rp 17,40 miliar, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp 56,77 miliar, dan kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp 10,96 miliar.

Likuiditas dan Solvabilitas Perseroan

Kemampuan Perseroan untuk membayar hutang atau kewajiban dapat dilihat dari dua indikator utama, yaitu rasio lancar dan rasio total liabilitas terhadap ekuitas. Rasio lancar menunjukkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban - kewajiban jangka pendeknya, sementara rasio hutang terhadap ekuitas menunjukkan struktur modal perseroan.

Pada 2016 rasio lancar Perseroan sebesar 3,37, turun dari rasio lancar pada 2015 sebesar 3,72. Meskipun terjadi penurunan, Manajemen tetap berhasil menjaga likuiditas Perseroan pada tingkatan yang cukup baik.

Rasio total liabilitas terhadap ekuitas Perseroan pada 2016 sebesar 0,38, meningkat tipis dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,36. Rasio ekuitas yang demikian itu menggambarkan bahwa struktur permodalan Perseroan masih berada pada tingkatan yang baik.

Comprehensive Profit For The Period

The Company had significant decrease in comprehensive profit of current year for 2016 to Rp 60.52 billion. This amount is 37.51% lower than the Rp 96.85 billion figure recorded for the previous year.

Cash Flow

The Company's cash and cash equivalents flows went down from Rp 174.53 billion at the end of 2015 to Rp 89.39 billion at the end of 2016.

This cash flows decrease were among others influenced by the pace of customer payments acquittance and payment delay on several on going and completed projects.

For 2016 fiscal year, cash derived from operating activities was recorded a shortage of Rp 17.40 billion, cash used for investment activities of Rp 56.77 billion, and cash used for financing activities of Rp 10.96 billion.

Liquidity and Solvency

The company's ability to fulfill its debts or obligations can be measured from two major indicators, which are current ratio and debt to equity ratio. Current ratio provides a measurement of company ability to meet its short term liabilities where debt to equity ratio provides a measurement of company's capital structure.

In 2016 the Company's current ratio was 3.37, down from its current ratio of 3.72 in 2015. Despite the decline, the Management managed to maintain the Company's liquidity at a fairly good level.

The Company's total liabilities to equities ratio in 2016 is 0.38, thinly increased from the previous year's number of 0.36. Such equity ratio illustrates that the Company's capital structure is still at a good level.



Tingkat Kolektibilitas Piutang

Posisi piutang tahun 2016 sebesar Rp 301,98 miliar dengan tingkat kolektibilitas piutang Perseroan pada 2016 tercatat sebesar 131 hari, naik sebesar 22.43%, dibandingkan dengan kolektibilitas pada 2015 sebesar 107 hari.

Tingkat kolektibilitas piutang digunakan untuk mengukur periode waktu yang diperlukan Perusahaan untuk menagih piutang menjadi kas sejak selesainya pekerjaan/jasa dilakukan. Kualitas pencairan piutang menurun dari tahun lalu (107 hari menjadi 131 hari) dan masih belum dapat mencapai target collecting period yang telah dianggarkan yaitu 80 hari. Namun Direksi terus untuk berupaya mempercepat proses penagihan piutang agar target collecting period terpenuhi dengan sistem blok dalam aplikasi komputer.

Collectability of Receivables

The position of receivables in 2016 amounted to Rp 301.98 billion with the Company's receivable collectability in 2016 at 131 days, an increase of 22.43%, compared to the collectability in 2015 of 107 days.

The collectability of receivables is used to measure the period of time the Company takes to collect receivables into cash since the completion of the work/service Receivable disbursement quality decreased from last year (107 days to 131 days) and unable to meet the budget target of 80 days. However, the Board of Directors continues the attempt to speed up the receivables billing process so that the targeted collecting period is met associated with the blocking system in computer applications.

Mekanisme pengingat kepada para debitur juga terus ditingkatkan, monitoring langsung dari Kantor Pusat kepada unit-unit produksi dalam rangka penanganan percepatan penagihan piutang serta penerapan account locking system juga dilakukan.

Selain mengoptimalkan penagihan para Kepala Unit Produksi Klas dan Komersil juga diminta untuk membuat pernyataan kesanggupan mempertahankan tingkat pencairan piutang pada +/- 80 hari.

Struktur Permodalan

Struktur permodalan Perseroan terdiri dari modal saham dan saldo laba. Pada 2016 modal saham Perseroan sebesar Rp 255 miliar dan saldo laba sebesar Rp 300,17 miliar. Perseroan tidak melakukan restrukturisasi hutang atau pun tambahan modal pada 2016.

Sesuai RKAP 2016 dan 2015, Perusahaan terus berupaya menjaga rasio kecukupan modal dengan mengacu pada rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset yang masing-masing ditargetkan 84,82% dan 68,93%. Rasio tersebut dihitung sebagai perbandingan antara jumlah seluruh aset (di luar aset yang belum jelas statusnya) dibagi dengan jumlah modal sendiri (di luar dana yang belum jelas statusnya).

Sampai dengan 31 Desember 2016, rasio modal terhadap total aset mencapai 95,64% dan pada 31 Desember 2015 sebesar 73,65%.

Manajemen Perusahaan melakukan pengelolaan kecukupan permodalan dengan tujuan menjaga kemampuan Perusahaan dalam menjamin kelangsungan usahanya sehingga Perusahaan dapat memenuhi seluruh komitmennya baik kepada Pemegang Saham, Fiskus, rekanan penyedia barang/jasa, maupun karyawan.

Ikatan material untuk Investasi Barang Modal

Perusahaan merealisasikan investasi multi years berupa pembangunan gedung kantor 12 lantai di area kantor pusat Jakarta sebesar Rp 45,764 miliar pada 2016 dan pengadaan peralatan pengujian senilai Rp 8,184 miliar.

Reminder mechanism to the debtors are also continuously improved, direct monitoring from the Head Office to production units in order to handle receivables billing acceleration and account locking system implementation is also conducted.

In addition to optimizing receivables billing, Heads of Class and Commercial Production Units were also required to make a statement of ability to maintain the receivables disbursement level of +/- 80 days.

Capital Structure

The Company's capital structure comprises of share capital and retained earnings. As of 2016 the shares equity were Rp 255 billion and retained earnings were Rp 300.17 billion. The Company did not conduct any debt or capital restructuring in 2016.

In accordance with the 2016 and 2015 RKAP the Company continues to maintain its capital adequacy ratio by referring to Own Capital Ratio to Total Assets, which targeted 84.82% and 68.93% respectively. The ratio is calculated as comparison of the total assets amount (excluding unclear assets) divided by the number of own capital (excluding the unclear funds).

As to 31 December 2016 the ratio of capital to total assets reached 95.64% and by 31 December 2015 amounted to 73.65%.

The Company's Management conducting capital adequacy management in order to maintain the Company's ability to secure its business continuity so that the Company can fulfill all of its commitments to Shareholders, related to financial, to goods/service suppliers and employees.

Material Commitment for Capital Goods Investment

The company materialized a multi-year investment in the construction of a 12-storey office building in Jakarta head office area which worth Rp 45.764 billion in 2016 and procurement of testing equipment worth Rp 8.184 billion.

Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan

Mulai dari tanggal laporan akuntan sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan tidak ada informasi dan fakta material yang terjadi.

Kinerja Usaha dan Tata Kelola

Untuk keseluruhan segmen klasifikasi dan komersil, Perseroan untuk tahun 2016 ini berhasil memperoleh pendapatan sebesar Rp 737,993 miliar atau 83,71% dari target anggaran tahun 2016. Dari jumlah tersebut segmen klas memberikan kontribusi pendapatan sebesar Rp 372,802 miliar (91.53% dari target anggaran 2016) dan segmen komersil sebesar Rp 365,199 miliar atau 86,45% dari anggaran 2016.

Upaya kehati-hatian dan prinsip efisiensi yang dijalankan Manajemen memberikan kontribusi yang positif dalam menjaga kinerja keuangan perusahaan. Hingga akhir tahun buku 2016 Manajemen berhasil menjaga agar biaya-biaya dan pengeluaran Perusahaan lainnya tidak melampaui anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp 645,199 miliar atau 86,45% dari anggaran tahun 2016.

Dari jumlah pendapatan dan pengeluaran yang demikian itu, pada akhir tahun buku 2016 Perseroan berhasil membukukan laba usaha sebesar Rp 92,794 miliar (68,55% dari anggaran tahun 2016) dan laba setelah pajak sebesar Rp 67,613 miliar atau 69,42% dari jumlah yang dianggarkan.

Kondisi likuiditas Perseroan secara umum cukup baik, dengan Current Ratio sebesar 336,70% kondisi finansial Perseroan cukup aman dengan hutang-hutang jangka pendek dijamin lebih kurang tiga kali oleh aset lancar Perusahaan. Cash Ratio Perusahaan mencapai 54,20% dengan saldo kas dan setara kas mencapai Rp 89,396 miliar yang mengindikasikan bahwa kondisi likuiditas perusahaan secara umum baik.

Rentabilitas atau kemampuan Perseroan medatangkan keuntungan yang tercermin dari angka Return on Equity (ROE) dan Return on Asset (ROA) untuk tahun 2016 ini masing-masing berada di 14,34% dan 11,64 persen.

Material Fact and Information After the Date of Accountant Report

From the accountant report date until publishing date of this Annual Report there were no information and material fact happened.

Business Performance and Governance

For the entire classification and commercial segment, the Company for the year 2016 is able to earn revenue of Rp 737.993 billion or 83.71% of the target budget in 2016. From that amount the class segment contributed revenue of Rp 372.802 billion (91.53% of the target budget 2016) and commercial segment of Rp 365.199 billion or 86.45% of the 2016 budget.

Prudential efforts and efficiency principles carried out by Management provide a positive contribution in maintaining the company's financial performance. Until the end of the fiscal year 2016, the Company managed to keep the costs and expenses of other companies not exceeding the set budget of Rp 645.199 billion or 86.45% of the 2016 budget.

Of the total revenues and expenditures, by the end of the fiscal year 2016, the Company successfully booked operating profit of Rp 92.794 billion (68.55% of the budget in 2016) and profit after tax of Rp 67.613 billion or 69.42% of the budgeted amount .

The Company's liquidity condition is generally quite good, with the Current Ratio of 336.70% of the Company's financial condition quite secure with short-term debt secured approximately three times by the Company's current assets. Cash Ratio The Company reached 54.20% with cash and cash equivalents amounting to Rp 89.396 billion indicating that the company's liquidity condition is generally good.

The profitability or ability of the Company will bring profits as reflected in Return on Equity (ROE) and Return on Assets (ROA) for 2016, respectively at 14.34% and 11.64%.

Jika dibandingkan dengan tingkat suku bunga rata-rata bank yang berlaku sepanjang 2016 sebesar 7,5% per tahun, dapat disimpulkan bahwa kinerja Manajemen untuk memaksimalkan keuntungan Pemegang Saham atau terhadap aset masih perlu ditingkatkan.

Untuk penilaian tingkat kesehatan BUMN pada periode 2016, Perseroan mendapatkan nilai 85,50 dengan predikat Sehat "AA". Untuk penilaian tingkat pencapaian Kontrak Manajemen sesuai Key Performance Indicator (KPI), Perseroan mendapatkan angka 86,17%. Sedangkan untuk pencapaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) yang dilakukan oleh assessor independen dari Forum Ekselen BUMN, Perseroan mendapatkan skor 500,50.

Dari sisi kinerja usaha, segmen jasa klasifikasi dan statutoria masih mampu memberikan kontribusi Rp 372,802 miliar atau 50,50% total pendapatan Perseroan. Selama 2016 BKI menerima 22.615 permintaan survey yang didominasi oleh permintaan survey tahunan, survey pengedokan, dan survey khusus. Selain itu untuk kegiatan statutoria, BKI melakukan sebanyak 9.368 permintaan yang didominasi oleh survey dan sertifikasi lambung timbul, Koda ISM, dan Koda ISPS.

Untuk segmen jasa konsultansi dan supervsi yang sekarang dikenal dengan nama segmen jasa komersil, BKI berhasil membukukan pendapatan Rp 365,199 miliar atau 49,50% dari total pemasukan Perusahaan. Beberapa proyek besar yang digarap sepanjang 2016 yang secara material berkontribusi pada pendapatan segmen ini antara lain proyek KSO BKI - Sucofindo untuk sertifikasi peralatan dan instalasi Pertamina, proyek pengawasan pembangunan dan sertifikasi kapal penangkap ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, penerbitan Surat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) dan Surat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi terbesar di dunia Sarulla, dan pekerjaan konsultan pengawas independen jaringan kabel bawah laut Palapa Ring Timur.

Compared with the prevailing average interest rate of banks in 2016 of 7.5% per annum, it can be concluded that the Management's performance to maximize shareholder profits or on assets still needs to be improved.

To assess the soundness of SOEs in the period 2016, the Company obtained a score of 85.50 with the predicate Healthy "AA". For assessment of achievement level of Contract Management pursuant to Key Performance Indicator (KPI), Company get 86.17%. As for the achievement of the Superior Performance Appraisal Criteria (KPKU) conducted by an independent assessor of the Extraordinary Forum for SOEs, the Company obtained a score of 500.50.

In terms of business performance, the classification and statutory service segment is still able to contribute Rp 372.802 billion or 50.50% of total revenues. During 2016 BKI received 22,615 survey requests which were dominated by annual survey requests, tailing surveys, and special surveys. In addition to statutory activities, BKI conducted as many as 9,368 requests dominated by survey and certification of emerged gastric, Koda ISM, and Koda ISPS.

For the segment of consultancy and supervision services now known as the commercial services segment, BKI successfully booked revenues of Rp 365,199 billion or 49.50% of the Company's total revenue. Several major projects to be carried out throughout 2016 that materially contribute to the segment's revenues include the KSO BKI - Sucofindo project for Pertamina equipment and installation certification, development supervision projects and certification of fishing vessels of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, the issuance of the Installation Feasibility Letter (SKPI) And SKPP of Sarulla's largest Geothermal Power Plant project, and an independent consultant work for the submarine cable network of the East Palapa Ring.



Prospek Usaha

Mencermati kinerja Perseroan sepanjang tahun 2016 dan prospek usaha di tahun 2017, Manajemen BKI menetapkan beberapa asumsi makro internal dan eksternal sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2017. Beberapa asumsi internal yang dijadikan pertimbangan adalah:

- Pertumbuhan penerimaan klas +/- 3% dari jumlah kapal register BKI
- Pertumbuhan pendapatan segmen klasifikasi dan statutoria 14,52% dari prognosis 2016
- Pertumbuhan pendapatan segmen komersil 18,06% dari prognosis 2016
- Kenaikan gaji pegawai rata-rata 10%
- Lifting minyak 780 ribu barrel per hari
- Tidak ada perubahan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh terhadap penugasan BKI
- Situasi keamanan dan perekonomian nasional tetap stabil

Business Prospect

Observing the Company's performance throughout 2016 and business prospects in 2017, BKI Management establishes several internal and external macro assumptions as the basis for the preparation of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) 2017. Some of the internal assumptions taken into consideration are:

- Growth of class acceptance +/- 3% from number of ships register BKI
- The growth of segment classification and statutory income 14.52% of the 2016 prognosis
- Commercial segment revenue growth of 18.06% of 2016 prognosis
- An increase in salaries of employees on average 10%
- Lifting oil 780 thousand barrels per day
- No change of Government policy has any effect on BKI assignment
- The security situation and the national economy remain stable

Berangkat dari asumsi-asumsi di atas, Sasaran Korporasi yang diharapkan dapat diwujudkan oleh Perseroan pada tahun 2017 adalah:

- Tercapainya kualitas pelayanan setara dengan standar IACS untuk meningkatkan kepercayaan pemakai jasa dan pengakuan pemangku kepentingan.
- Mendapatkan tambahan pelimpahan otorisasi statutoria

Perbandingan Antara Target dengan Pencapaian 2015

Pendapatan

Perseroan menyusun target pendapatan pada 2016 sebesar Rp 881,66 miliar, dan realisasi perolehan pendapatan sebesar Rp 737,99 miliar, Perseroan merealisasikan target pendapatan sebesar 83,71%.

- Pertumbuhan penerimaan klas +/- 3% dari jumlah kapal register BKI
- Pertumbuhan pendapatan segmen klasifikasi dan statutoria 14,52% dari prognosis 2016
- Pertumbuhan pendapatan segmen komersil 18,06% dari prognosis 2016
- Kenaikan gaji pegawai rata-rata 10%
- Lifting minyak 780 ribu barrel per hari
- Tidak ada perubahan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh terhadap penugasan BKI
- Situasi keamanan dan perekonomian nasional tetap stabil

Berangkat dari asumsi-asumsi di atas, Sasaran Korporasi yang diharapkan dapat diwujudkan oleh Perseroan pada tahun 2017 adalah:

- Tercapainya kualitas pelayanan setara dengan standar IACS untuk meningkatkan kepercayaan pemakai jasa dan pengakuan pemangku kepentingan.
- Mendapatkan tambahan pelimpahan otorisasi statutoria

Departing from the above assumptions, the Corporate Objectives expected to be realized by the Company in 2017 are:

- The achievement of service quality is equivalent to IACS standards to improve the confidence of service users and stakeholder recognition.
- Get additional statutoria authorization abundance

Comparison Between Target and Achievement in 2015

Revenues

The Company set a revenue target of Rp 881.66 billion in 2016 and Rp 737.99 billion in revenue, the Company realized its revenue target of 83.71%.

- Growth of class acceptance +/- 3% from number of ships register BKI
- The growth of segment classification and statutory income 14.52% of the 2016 prognosis
- Commercial segment revenue growth of 18.06% of 2016 prognosis
- An increase in salaries of employees on average 10%
- Lifting oil 780 thousand barrels per day
- No change of Government policy has any effect on BKI assignment
- The security situation and the national economy remain stable

Departing from the above assumptions, the Corporate Objectives expected to be realized by the Company in 2017 are:

- The achievement of service quality is equivalent to IACS standards to improve the confidence of service users and stakeholder recognition.
- Get additional statutoria authorization abundance

Perbandingan Antara Target dengan Pencapaian 2015

Pendapatan

Perseroan menyusun target pendapatan pada 2016 sebesar Rp 881,66 miliar, dan realisasi perolehan pendapatan sebesar Rp 737,99 miliar, Perseroan merealisasikan target pendapatan sebesar 83,71%.

Laba

Laba komprehensif tahun berjalan pada 2016 ditargetkan sebesar Rp 97,39 miliar. Realisasi dari target pada 2016 sebesar Rp 60,52 miliar atau 62,14% dari target.

Struktur Permodalan

Total ekuitas Perseroan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 559,77 miliar, atau setara dengan pencapaian target sebesar 48,83% dari nilai yang ditargetkan sebesar Rp 1.145,36 miliar. Liabilitas jangka pendek ditargetkan sebesar Rp 60,70 miliar dengan realisasi Rp 164,92 miliar, setara dengan 272,53%. Sebagai catatan, Perseroan tidak memiliki liabilitas jangka pendek berupa hutang bank ataupun hutang kepada lembaga pembiayaan.

Sementara hutang jangka panjang ditargetkan sebesar Rp 29,50 miliar dengan realisasi Rp 46,95 miliar, setara dengan 159,14%. Sama halnya dengan liabilitas jangka pendek, Perseroan tidak memiliki liabilitas jangka panjang yang berupa pinjaman kepada bank ataupun lembaga pembiayaan.

Pembagian Laba

Penggunaan laba bersih tahun buku 2016 sebesar 10,47% dari laba bersih tahun buku 2015 sebesar Rp 80,52 miliar, atau setara dengan Rp 8,43 miliar digunakan untuk pembagian deviden.

Pemasaran

Secara umum kegiatan pemasaran BKI diarahkan kepada dua segmen:

- Segmen klasifikasi dan statutoria
- Segmen konsultansi dan supervisi atau yang dikenal juga sebagai segmen komersil.

Comparison Between Target and Achievement in 2015

Revenues

The Company set a revenue target of Rp 881.66 billion in 2016 and Rp 737.99 billion in revenue, the Company realized its revenue target of 83.71%.

Income

The comprehensive profit of the current year in 2016 is targeted at Rp 97.39 billion. Realization of the target in 2016 amounted to Rp 60.52 billion or 62.14% of the target.

Capital Structure

Total equity of the Company as of December 31, 2016 amounted to Rp 559.77 billion, or equivalent to achieving the target of 48.83% of the targeted value of Rp 1,145.36 billion. Short-term liabilities are targeted at Rp 60.70 billion with realization of Rp 164.92 billion, equivalent to 272.53%. As a note, the Company has no short-term liabilities in form of bank loans or debts to the finance institution.

Meanwhile, long-term debt is targeted at Rp 29.50 billion with realization of Rp 46.95 billion, equivalent to 159.14%. Similar to short-term liabilities, the Company does not have long-term liabilities in the form of loans to banks or financing institutions.

Deviden Payment

The use of net profit for the fiscal year 2016 of 10.47% of the net profit of fiscal year 2015 of Rp 80.52 billion, equivalent to Rp 8.43 billion is used for dividend payments.

Marketing

In general, BKI marketing activities are directed into two segments:

- Classification and statutory segment
- Consultancy and supervision segment which also known as commercial segment.

Pasar segmen klasifikasi dan statutoria adalah industri pelayaran yang memiliki kapal-kapal berbendera Indonesia atau berbendera asing yang memenuhi kriteria tertentu sehingga wajib diklaskan pada badan klasifikasi--baik yang melakukan pelayaran domestik maupun internasional, industri galangan kapal nasional, industri material dan komponen yang terkait dengan pembangunan dan perawatan kapal, kalangan asuransi marine hull dan marine cargo, lembaga pembiayaan, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Data Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyebutkan jumlah kapal yang terkena peraturan wajib klas sebanyak 23.000 unit. Dari jumlah itu pada akhir 2016 sebanyak 10.256 unit dengan total tonase kotor 15.999.711 gross ton tercatat dalam register kapal aktif BKI.

Sedangkan untuk pasar bidang komersil adalah kalangan industri yang membutuhkan jasa pemastian independen serta konsultansi dan supervisi dalam bidang maritim, industri, dan energi. Terkait dengan jasa di bidang ini BKI juga didukung dengan fasilitas laboratorium pengujian modern.

Untuk melayani segmen jasa klasifikasi dan statutoria maupun komersil ini, BKI didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten yang memiliki kualifikasi sesuai persyaratan standar profesional industri.

Kompetensi sumber daya manusia sebagai salah satu kunci sukses dalam membangun kualitas pelayanan yang unggul ini dijaga dan ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan berkala untuk menjamin kesesuaian kompetensinya dengan standar terkini yang berlaku secara nasional maupun internasional.

Kebijakan dan Pembagian Dividen

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) nomor: B.769a/UM.010/KI-17 tanggal 12 Mei 2017 tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016, Pemegang Saham menyetujui penggunaan laba bersih Perusahaan sebagai berikut:

The classification and statutory segment's market are shipping industry owning Indonesian-flagged or foreign flagged ships that meet certain criteria, so it must be classed to the classification society, both trading domestically and internationally, shipbuilding industry, material and component industries related to shipbuilding and ship maintenance, financial institutions, and other interested parties.

Data from the Directorate of Shipping and Marine Affairs at the Directorate General of Transportation mentioned that the number of vessels affected by class mandatory regulation is 23,000 units. Of that number by the end of 2016 10,256 units with a total gross tonnage of 15,999,711 GT were listed in the of BKI active ship registers.

While the commercial service segment market are the industries that required independent assurance services as well as consultancy and supervision in maritime, industry, and energy fields. Related to services in this field BKI is also supported with modern testing laboratory facilities.

To serve these classification and statutory and commercial services segment, BKI supported by competent human resources with appropriate qualification in accordance with industrial standards requirements .

The human resources competence as one of the keys to success in building this excellent service quality are maintained and up graded with periodic education and training to ensure competence compatibility with current national and international standards.

Dividend Policy

Based on the Minutes of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) General Shareholders Meeting (RUPS) number: B.0769a / UM.010 / KI-17 dated 12 May 2017 regarding Approval of Annual Report of 2016 Fiscal Year and Ratification of Financial Statements of Fiscal Year 2016, the Shareholder approved the use of the Company's net profit as follows:

	Pembagian laba tahun 2016 Appropriation of Retained Earnings 2016	Pembagian laba tahun 2015 Appropriation of Retained Earnings 2015
Pembagian Dividen / Dividend Distribution	Rp. 6.000.000.000	Rp. 8.430.000.000
Penyisihan Cadangan Umum / General Reserve Allocation	Rp. 61.613.274.993	Rp. 72.092.489.708
Jumlah / Total	Rp. 67.613.274.993	Rp. 80.552.489.708

Informasi Material**Investasi**

Peningkatan pencapaian Investasi sesuai dengan program kerja Investasi tahun 2016 telah diupayakan semaksimal mungkin sesuai kebutuhan perusahaan, dimana realisasi investasi tahun 2016 sebesar Rp 56,77 miliar atau pencapaian sebesar 50,40% dari RKAP 2016 senilai Rp 112,63 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

Tanah	Rp 2,50 miliar
Bangunan dalam pelaksanaan	Rp 45,76 miliar
Furniture	Rp 0,19 miliar
Mesin Kantor	Rp 0,17 miliar
Peralatan pengujian	Rp 8,15 miliar
JUMLAH	Rp 56,77 miliar

Ekspansi

Pada 2016 Perseroan tidak melakukan ekspansi.

Divestasi

Pada 2016 Perseroan tidak melakukan divestasi.

Penggabungan usaha

Pada 2016 Perseroan tidak melakukan penggabungan usaha.

Akuisisi

Pada 2016 Perseroan tidak melakukan Akuisisi.

Restrukturisasi Hutang

Pada 2016 Perseroan tidak melakukan restrukturisasi hutang.

Material Information**Investment**

Increased investment achievement in accordance with the work program Investments in 2016 has been pursued as much as possible according to the needs of the company, where the realization of investment in 2016 amounting to Rp 56.77 billion or the achievement of 50.40% of RKAP 2016 worth Rp 112.63 billion, with details as follows :

Tanah	Rp 2,50 billion
Bangunan dalam pelaksanaan	Rp 45.76 billion
Furniture	Rp 0.19 billion
Mesin Kantor	Rp 0.17 billion
Peralatan pengujian	Rp 8.15 billion
TOTAL	Rp 56.77 billion

Expansion

In 2016 the Company did not do any expansion.

Divestment

In 2016 the Company did not do any divestment.

Merger

In 2016 the Company did not do any merger.

Acquisition

In 2016 the Company did not do any acquisition.

Debt Restructuring

In 2016 the Company did not do any debt restructuring



Transaksi dengan Pihak Terafiliasi

Pada 2016 Perseroan tidak melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi yang dapat memberikan dampak material terhadap kinerja keuangan.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pada 2016 Perseroan tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Pada 2016 tidak ada perubahan pada peraturan perundang - undangan yang berpengaruh signifikan terhadap status, kinerja dan laporan keuangan Perseroan.

Perubahan Kebijakan Akutansi

Pada 2016 tidak terjadi perubahan kebijakan akutansi yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja maupun laporan keuangan Perseroan.

Transaction with Affiliated Parties

In 2016 the Company did not do any transaction with affiliated parties that might have material impact to financial performance.

Transactions with Potential Conflicts of Interest

In 2016 the Company did not do transactions with potential conflict of interest.

Changes in Law and Regulation

In 2016 there were no changes in laws and regulations that have significant impact to Company's status, performance, and financial report.

Changes in Accounting Policy

In 2016 there were no changes in accounting policy that have significant impact to Company's status, performance, and financial report.



ESU ENERGY

PERSERO KLASIFIKASI

INDONESIA

BAMBANG W.

Meningkatkan Tata Kelola, Menyiapkan Landasan
untuk Lompatan ke Depan



Improving Governance, Preparing the Stage for
Quantum Leap

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance

Pendahuluan

Dalam era persaingan bebas, Biro Klasifikasi Indonesia selaku BUMN dituntut untuk dapat berkompetisi baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Perusahaan terus melakukan perbaikan agar dapat menciptakan dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Selain itu BKI juga terus melakukan peningkatan dalam pengelolaan perusahaan. Penerapan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu langkah penting bagi Perusahaan untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai Perusahaan (corporate value).

BKI meyakini bahwa konsep penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau GCG dalam praktik organisasi akan mendorong kinerja Perusahaan menuju kesuksesan di masa-masa yang akan datang dan akan tumbuh besar karena adanya kepercayaan yang tinggi dari seluruh pelanggan maupun stakeholder. Perusahaan percaya, penerapan praktik GCG dapat memenuhi kewajiban seutuhnya baik kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, mitra bisnis, serta seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mendukung hal tersebut, Perusahaan menganggap perlu untuk merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG di Perusahaan yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran .

Assessment GCG

Prosedur pelaksanaan assessment GCG di Perusahaan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 02/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, dan Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance di Badan Usaha Milik Negara.

Pelaksanaan assessment tersebut menggunakan alat ukur/kriteria/parameter yang ada pada

Introduction

In the era of free competition, Biro Klasifikasi Indonesia as an SOE required to be able to compete both in domestic and international market. The Company continues to make improvements in order to create and enhance its competitive advantage. In addition, BKI also continues to improve Company's management. The implementation of Good Corporate Governance (GCG) practices is one of the Company's important steps to improve and maximize corporate value.

BKI believes that the concept of implementing GCG principles in organizational practice will drive the Company's performance to success and growth in the future due to the high customers and stakeholders trust. The Company believes that by implementing GCG practices it can fulfill its complete obligations to the Shareholders, Board of Commissioners, business partners, and all stakeholders.

To support this matter, BKI considers it is necessary to formulate and apply GCG Principles in enterprise which are Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness.

GCG Assessment

The GCG assessment procedures in corporation referred to the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 02/POJK.05/2014 on Good Corporate Governance for Insurance Companies and Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/2011 on Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises.

The Implementation of the assessment using measurement tools/criteria/parameters as in

SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator / Parameter Penilaian dan Evaluasi Ata Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, dengan aspek yang diukur juga meliputi Dewan Komisaris dan Direksi.

Pada tahun 2015, assessment telah dilakukan oleh assessor Independen APB Indonesia yang menghasilkan skor 92,43 dari 100 dan kualifikasi "SANGAT BAIK". Asesmen eksternal dilakukan pada bulan Agustus 2015 oleh asesor independen external PT APB Indonesia dengan hasil dari asesmen yang dapat dirinci per aspek sebagai berikut :

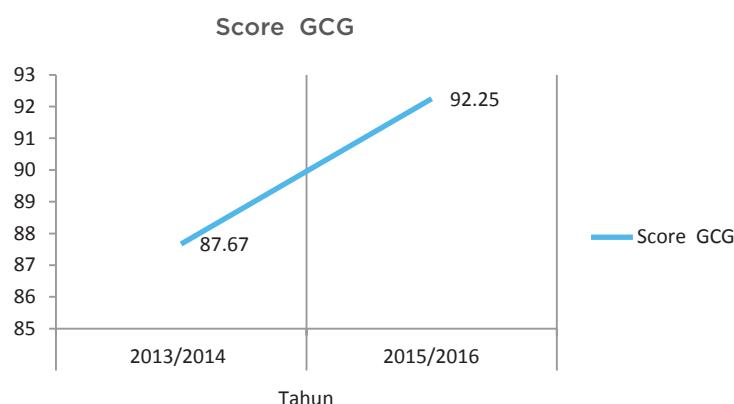
SK-16/S.MBU / 2012 dated June 6, 2012 on Indicators / Parameters Assessment and Evaluation on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, which also includes the Board of Commissioners and Board of Directors as measuring aspect.

In 2015 the assessment on Company's GCG implementation has been carried out by Independent assessors of APB Indonesia which resulted a 92.43 score out of 100 and "EXCELLENT" predicate. The external assessment was held in August 2015 by independent external assessors of PT APB Indonesia with detail per aspect of assessment results as follows:

No.	Aspek / Aspect	Bobot / Weight	Skor / Score	%Capaian / %Achievements
1.	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan / Commitment to the Implementation of Good Corporate Governance Sustainable	7,000	6,63	94,77%
2.	Pemegang Saham dan RUPS Pemilik Modal / Shareholder and General Meeting of Shareholders	9,000	8,86	98,39%
3.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas / Board of Commissioners/Board of Trustees	35,000	33,22	94,92%
4.	Direksi / Board of Directors	35,000	32,31	92,30%
5.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi / Disclosure of Information and Transparency	9,000	7,49	83,17%
6.	Aspek Lainnya / Other Aspects	5,000	3,75	75,00%
Skor Keseluruhan / Total Score		100,000	92,43	92.25%
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG / GCG Implementation Quality Classification				sangat BAIK EXCELLENT

Pencapaian GCG BKI dapat digambarkan dalam grafik di bawah ini:

The BKI's GCG achievement can be described in chart as below:



Selanjutnya, laporan penerapan tata kelola perusahaan tahun 2015 ini akan memberikan penjelasan tentang kinerja organ perusahaan dan komite pendukungnya, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, sistem manajemen kualitas, serta beberapa topik lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS Perusahaan memiliki kewenangan khusus yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris maupun Direksi. Dalam RUPS, Pemegang Saham berhak mendapatkan informasi berkaitan dengan Perusahaan dari Dewan Komisaris dan atau Direksi sepanjang sejalan dengan kepentingan Perusahaan. RUPS merupakan organ perusahaan BKI dengan kekuasaan tertinggi dan melalui pertemuan ini Pemegang Saham menjalankan haknya untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan.

RUPS juga dipergunakan oleh Pemegang Saham untuk memperoleh informasi tentang perusahaan, kinerja perusahaan, serta asset dan kegiatan perusahaan, disamping menentukan arah pengembangan perusahaan berdasarkan Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diusulkan oleh Manajemen.

Untuk tahun buku 2016, BKI telah mengadakan 3 kali RUPS dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal / Date	Tempat / Place	Perihal / subject
12 Mei 2017	Jakarta	RUPS pertanggungjawaban Laporan Manajemen tahun 2016/ <i>General Meeting of Shareholders' Management Responsibility 2016</i>
22 Des 2016	Jakarta	RUPS Pengesahan RKAP 2016 / <i>GMS Ratification of 2016 RKAP</i>

RUPS tanggal 12 Mei 2016 telah menghasilkan keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui laporan tahunan perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016 serta mengesahkan laporan keuangan perseroan dan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun buku 2016

Furthermore, this 2015 report on corporate governance implementation will provide explanation on the Company's organs performance and its supporting committees, internal control systems, risk management systems, quality management systems and other relevant topics according to legislation.

General Share Holder Meeting (RUPS)

The Company's General Shareholders Meeting has specific authority which not granted to the Board of Commissioners or the Board of Directors. In the RUPS, Shareholders are entitled to obtain information related to the Company from the Board of Commissioners and / or Board of Directors as long as in line with the Corporate interests. RUPS is BKI's corporate organ with the highest authority and through this meeting the Shareholder can exercises its right requesting the BoC and BoD accountabilities related to the company management performance.

The RUPS is also used by Shareholders to obtain informations relating to the company, its performance, its assets and activities, besides to determine the company's development direction according to its Corporate Long Term Plan (RJPP) and Working Plan and Budget (RKAP) proposed by the management.

During the 2016 fiscal year, BKI hold 3 times RUPS with details as follow:

The 12 May 2016 RUPS had set below decisions:

1. Approved the Company's annual report including the Board of Commissioners Supervisory Report for the 2016 fiscal year and ratify the Company's Financial and Implementation Report of Partnership and Community Development Program (PKBL) for the 2016 fiscal year,

yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Husni, Mucharam & Rasidi dengan opini "Wajar" dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (valledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menetapkan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2016, dan penyetoran deviden ke Kas Negara agar dilakukan dalam batasan waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penetapan besarnya penghasilan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris berupa gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2016 serta tantiem tahun buku 2016 ditetapkan kemudian secara tersendiri.
4. Dewan Komisaris melalui Komite Audit diminta untuk melakukan seleksi KAP yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan PKBL tahun buku 2016 dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku, dan hasil seleksi disampaikan Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapatkan penetapan.

Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris BKI memiliki tugas, tanggung jawab dan hak sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan

audited by Husni, Mucharam & Rasidi Public Accounting Firm with "Fair" opinion in all aspects that are materials, and granted repayment and fully waiver of responsibility (valledig acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners of any managerial and supervisory actions carried out in the fiscal year which ended on 31 December 2016, provided that such action is not a criminal act and such action is reflected in the Company's Annual and Financial Report, in accordance with applicable laws and regulations.

2. To determine the use of the Company's net profit for the fiscal year 2016, and the payment of dividend to the State Treasury to be completed within the time limit in accordance with the prevailing laws and regulations.
3. The determination of the Board of Directors and Board of Commissioners members earnings amount in form of salary/honorarium along with other facilities and allowances for 2016 and 2016 incentives will defined later separately.
4. The Board of Commissioners through the Audit Committee is required to conduct Public Accounting Firm (KAP) selection for year 2016's Corporate Financial Statements and PKBL Reports audit according to prevailing provisions, and the selection outcomes should be submitted by Board of Commissioners to the Shareholders General Meeting for approval.

Board Of Commissioners

The Board of Commissioners Duties and Responsibilities

According to the Company's Articles of Association, BKI's Board of Commissioners has following duties, responsibilities and rights as follow:

- Performing supervision and providing advice to the Board of Directors for the sake of Corporate interest

- Memastikan Direksi memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengurus perusahaan sesuai maksud dan tujuan BKI, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan, menerapkan GCG, melaksanakan RKAP dan Keputusan RUPS, serta bertanggungjawab kepada Pemegang Saham;
- Memperoleh informasi yang diperlukan dalam rangka menjalankan tugasnya, serta menggunakan saran profesional yang mandiri dan atau membentuk komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

- Confirming that the Board of Directors has capability to lead and manage the company according to Corporate intention and objectives, improving company efficiency and effectiveness, implementing GCG principles as well RKAP and RUPS conclusion and be responsible to the Shareholders;
- Getting the necessary information in order to do its duties, and use independent professional advice and or establish committees to support the Board of Commissioners duties performance.

Susunan Dewan Komisaris

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-12/MBU/2014 tanggal 15 Januari 2014 dan SK-93/MBU/2014 tanggal 30 April 2014, susunan Dewan Komisaris Perusahaan sebagai berikut:

No.	Dewan Komisaris Board Of Commissioners	Nama Name	Bidang Tugas Task Field
1.	Komisaris Utama President Commissioner	Sukatno	Mengkoordinir tugas-tugas Komisaris dan Menangani Bidang Komersil Coordinate the duties of the Commissioner and Handle
2.	Komisaris Commissioner	Minto Widodo	Menangani bidang Keuangan, SDM, Hukum dan GCG Handling the areas of Finance, Human Resources, Law and GCG
3.	Komisaris Commissioner	Faisal Ahmad	Menangani bidang Pemasaran serta Bidang Komersil Handling Marketing and Commercial Fields
4.	Komisaris Commissioner	Erwin Rosmali	Menangani bidang Klasifikasi dan Sertifikasi Handles the field of Classification and Certification

Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris selama tahun 2016:

1. Dewan Komisaris telah melakukan 25 rapat :
 - 13 rapat internal Dewan Komisaris
 - 12 rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat.
2. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, termasuk:
 - Pelaksanaan RKAP berdasarkan anggaran dasar perusahaan, keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan;

Composition of the Board of Commissioners

Based in the Minister of SOEs Decree No. SK-12/MBU/2014 dated 15 January 2014 and SK-93/MBU/2014 dated 30 April 2014, the Board of Commissioners composition are:

The Board of Commissioners duties and responsibilities performance in 2016:

1. The Board of Commissioners has conducted 25 meetings:
 - 13 internal Board of Commissioners meetings
 - 12 joint meetings with the Board of Directors. The results of the meeting were written in minutes of meetings.
2. Conducting supervision towards the Board of Director's policy and corporate management practice, including:
 - The implementation of the RKAP based on the Articles of Association, RUPS conclusion, and applicable laws and regulations

- Monitoring and evaluation sesuai KPI terhadap Cabang Banten, Makassar, Ambon, Pontianak, Sorong, Pekanbaru, Batam, Bitung, Banjarmasin.
 - Memberikan tanggapan, saran dan pendapat kepada Pemegang Saham pada RUPS atas laporan keuangan tahun 2016 yang telah diaudit, RJPP tahun 2015-2019, serta Laporan Manajemen Semester I Tahun 2016, serta menyampaikan indikator aspek operasional dalam RKAP tahun 2016, KPI dan RKA tahun 2017, serta hal-hal lain yang diminta Pemegang Saham.
3. Memberikan tanggapan, pendapat, dan arahan atas hal-hal yang bersifat strategis, termasuk :
- Pemantauan tindak lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI pada PT BKI (Persero)
 - Memberikan arahan-arahan untuk pengendalian internal (hasil monitoring Cabang-cabang BKI)
 - Persetujuan perpanjangan waktu Bank Garansi
 - Memberikan persetujuan atas permintaan penilaian ulang nilai buku asset (Inventaris Kantor)
 - Memberi persetujuan pengalihan anggaran untuk Cabang Samarinda
 - Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan audit umum atas laporan keuangan dan PKBL tahun buku 2016 PT BKI (Persero)
 - Evaluasi kinerja Satuan Pengawasan Intern PT BKI
4. Memberikan masukan, arahan dan persetujuan terkait :
- Memberikan persetujuan atas perjalanan dinas Direksi ke Luar Negeri
 - Mereview dan menindaklanjuti masukan serta rekomendasi dari Komite Audit diantaranya mengenai kinerja perusahaan, usulan seleksi KAP yang akan melaksanakan audit laporan keuangan Tahun Buku 2016 dan lain-lain.
- KPI based branch office monitoring and evaluation in Banten, Makassar, Ambon, Pontianak, Sorong, Pekanbaru, Batam, Bitung and Pontianak.
 - Giving feedback, suggestion and opinions to the Shareholder during RUPS on 2016 Audited Financial Statements, RJPP 2015-2016 and 2016 1st Semester Management Report and delivering operational aspect indicators of RKAP 2016, KPI, and 2017 RKA as well other matters requested by the Shareholder.
3. Provide responses, opinions, and directions on strategically matters, including:
- Monitoring the follow up of BPK RI audit recommendation to BKI
 - Giving referrals for internal control (as a result of BKI branch offices monitoring)
 - Giving approval on Bank Guarantee extension
 - Giving approval for asset book value revaluation (office inventory)
 - Giving approval on Samarinda Branch budget transfer
 - Giving approval on Public Accounting Firm appointment for the general audit of BKI's 2016 Financial and PKBL Report
 - Conducting performance evaluation of Company's Internal Audit Unit
4. Giving relevant feedback, directives and approvals:
- Giving approval on the Board of Directors official overseas business trips
 - Reviewing and carried out inputs and recommendations from the Audit Committee such as in corporate performance related matter, KAP--for 2016 fiscal year financial report audit--selection proposal, etc.



Remunerasi Dewan Komisaris

Remunerasi Dewan Komisaris sesuai dengan RUPS tanggal 12 Mei 2015 No. RIS-42/D3.MBU/05/2015 dan surat No. S-115/D3.MBU/ 06/2015 tanggal 10 Juni 2015 perihal Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk tahun 2016 serta tantiem atas kinerja Tahun Buku 2016 sebagai berikut:

No.	Dewan Komisaris Board Of Commissioners	Honorarium (Rp) / Honorarium (Rp)	Tunjangan Komunikasi (Rp) / Communication Allowance (Rp)	Tunjangan Transport (Rp) / Transport Allowance (Rp)
1.	Sukatno Komisaris Utama / President Commissioner	33.750.000	0	6.750.000
2.	Minto Widodo Komisaris / Commissioner	30.375.000	0	6.075.000
3.	Faisal Ahmad Komisaris / Commissioner	30.375.000	0	6.075.000
4.	Erwin Rosmali Komisaris / Commissioner	30.375.000	0	6.075.000

Selain remunerasi tersebut diatas, Dewan Komisaris tidak diberikan fasilitas kendaraan dinas operasional dan kepada Dewan Komisaris tidak memperoleh fasilitas kendaraan, akan tetapi mendapatkan tunjangan transport sesuai azas kepentasan dan kemampuan perusahaan, dengan tetap mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/M-BU/2014 tanggal 10 Maret 2014, tidak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas yang diberikan perusahaan sebelum berlakunya ketentuan tersebut.

*) Tantiem 2016 masih menunggu hasil RUPS pada bulan Mei 2017

Remuneration of the Board of Commissioners

Remuneration of the Board of Commissioners are in accordance with the General Shareholder Meeting dated 12 May, 2015 No. RIS-42/ D3.MBU/05/2015 and Letter no. S-115/D3.MBU/ 06/2015 dated 10 June, 2015 regarding Salary/Honorarium, Benefits and Facility for 2016 and tantiem for the 2016 fiscal year performance are as follows:

Other than above remuneration, the Board of Commissioners does not get official car but receiving transportation allowance according to propriety and corporate capability principles, as to Minister of SOE's Regulation No. PER-04/MBU/2014 dated 10 March 2014.

*) Tantiem 2016 is still awaiting the results of the GMS in May 2017.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2016

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris diukur oleh Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris sebagai berikut:

The Board of Commissioners 2016 Performance Assessment

The Board of Commissioner performance is measured by the achievement score of the Board's Key Performance Indicators (KPI) as below:

No.	Aspek dan Parameter Aspects and Parameters	Periode Period	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Skor Score
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Aspek Pengawasan dan Nasehat / Supervision and Advice Aspect							
1.	Memberikan persetujuan/tanggapan kepada Pemegang Saham terhadap/ <i>Providing approval/response to the shareholder in terms of:</i>						
a.	Rencana Kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) dan Rencana kerja dan Anggaran (RKA) PKBL/ <i>Annual Work Plan and Budget of the Company and PKBL Work Plan and Budget</i>	Tahunan/ Yearly	Surat Letter	5	1	1	5,0
b.	Laporan Tahunan/ <i>Annual Report</i>	Tahunan/ Yearly	Surat Letter	3	1	1	3,0
c.	Analisis Kinerja Triwulan / <i>Quarterly performance analysis</i>	Triwulan/ Quarterly	Surat Letter	2	4	4	2,0
2.	Memberikan Persetujuan atau pendapat atas usulan Direksi yang merupakan wewenang Dewan Komisaris / <i>Providing approval or response to suggestions by the Board of Directors that concern the authority of the Board of Commissioners</i>	Setahun/ Once a year	%	10	100	95	10
3.	Rapat Dewan Komisaris/ <i>Meetings of the BOC</i>						
a.	Jumlah rapat/ <i>Number of Meetings</i>	Bulanan/ Monthly	Kali/ Times	2	12	12	2,0
b.	Kehadiran rapat/ <i>Attendance</i>	Bulanan/ Monthly	%	2	100	100	2,0
c.	Penyelesaian risalah rapat/ <i>Completion of proceeding</i>	Bulanan/ Monthly	Risalah/ Proceeding	1	12	12	1,0
4.	Monitoring tindak lanjut temuan SPI dan External Audit serta Assesment GCG/ <i>Monitoring of follow ups on findings of the internal control unit and external audit as well as GCG assessment</i>	Setahun/ Once a year	Surat Letter	10	3	3	10
5.	Evaluasi pelaksanaan evaluasi Auditor/ <i>Evaluation of external auditor work</i>	Tahunan/ Yearly	Surat Letter	10	1	1	10
6.	Monitor dan evaluasi kantor cabang/ <i>Monitoring and evaluation of Branch Offices</i>	Setahun/ Once a year	Kunjungan/ Visit	5	8	8	5
Sub Total I						50	57,8
II. Aspek Pelaporan / Reposting Aspect							
7.	Rencana kerja dan anggaran Dekom/ <i>Annual work plan and budget</i>	Tahunan/ Yearly	Laporan/ Report	15	1	1	15
8.	Laporan pengawasan tahunan/ <i>Annual supervision report</i>	Tahunan/ Yearly	Laporan/ Report	15	1	1	15
Sub Total II						30	30,0
III. Aspek Dinamis / Dynamic Aspect							
9.	Peningkatan kompetensi melalui seminar, workshop dll/ <i>Competence Enhancement through seminars, workshops, and others</i>	Setahun/ Once a year	Kali/ Times	10	4	1	7,5
10.	Tindak lanjut rekomendasi hasil assessment GCG/ <i>Follow up of GCG Assessment recommendations</i>	Setahun/ Once a year	%	10	100	95	9,5
Sub Total III						20	19,0
Total (I + II + III)						100	106,8

Skor pencapaian KPI kinerja Dewan Komisaris untuk tahun 2016 adalah 106,8 poin yang terdiri dari:

- a. 57,80 poin aspek Pengawasan dan Nasehat
- b. 30,00 poin aspek Pelaporan
- c. 19,00 point aspek Dinamis

Rapat Koordinasi Dewan Komisaris

Komisaris mengadakan rapat minimal 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu untuk membicarakan berbagai permasalahan dan bisnis Perusahaan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja Perusahaan.

Panggilan rapat Komisaris dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Dalam panggilan rapat dicantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat.

Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama; dalam kondisi Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama memimpin rapat.

Risalah rapat ditandatangani oleh Komisaris Utama atau pimpinan rapat yang ditunjuk dan yang hadir dalam rapat tersebut. Setiap anggota Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Komisaris, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut.

The KPI performance achievement score for the Board of Commissioners for the year 2016 is 106.8 points which consists of:

- a. 57.80 points of Supervision and Counseling aspect
- b. 30.0 points of Reporting aspect
- c. 19.0 points of Dynamics aspect

Coordination Meeting of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners holds at least once meeting on each month and at any time if considered needed to discuss various issues and Company's business as well conducting evaluation on the Corporate performance.

The Board of Commissioners meeting calls are made in writing by the President Commissioner or the Board's member appointed by President Commissioner. A meeting call includes events, dates, times and places.

All Board of Commissioners meetings are chaired by the President Commissioner, in the event that President Commissioner was leave or unable to, the Commissioner appointed by the President Commissioner leads the meeting.

The minutes of meeting shall be signed by the President Commissioner or the appointed Board meeting chairman and those attending the meeting. Each Board of Commissioners member is entitled to receive a copy of the minutes of the Board's meeting even though he or she was not attending the meeting.

No.	Dewan Komisaris Board Of Commissioners	Nama Name	Jumlah Rapat Number of meeting	Jumlah Kehadiran Number of attendance	% Kehadiran % Presence	Alasan ketidakhadiran Absence reasons
1.	Komisaris Utama President Commissioner	Sukatno	13	13	100%	Hadir setiap kali rapat Present at each meeting
2.	Komisaris Commissioner	Minto Widodo	13	13	100%	Hadir setiap kali rapat Present at each meeting
3.	Komisaris Commissioner	Faisal Ahmad	13	13	100%	Hadir setiap kali rapat Present at each meeting

Direksi

Direksi merupakan organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengelola Perusahaan, Direksi mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, peraturan eksternal baik dari Pemegang Saham maupun regulator, serta ketentuan internal mencakup Anggaran Dasar dan Board Manual.

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang terkait dengan aktivitas Perusahaan. Direksi bertindak secara cermat, berhati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi menggunakan wewenang dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan semata-mata hanya untuk kepentingan Perusahaan.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Tugas Utama Direksi Yaitu :

1. Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perusahaan.
3. Menerapkan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang sehat (GCG) dalam Perusahaan.
4. Bertugas sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS serta peraturan lainnya.
5. Direksi bertanggung jawab kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

Wewenang Direksi Meliputi :

- Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- Mempergunakan saran profesional;
- Menetapkan kebijakan dan ketentuan dalam kepemimpinan dan kepengurusan Perusahaan;

Board Of Directors

The Board of Directors is the corporate organ authorized and fully responsible for the management and achievement of company purposes and objectives as well represents the Company either inside or outside the court according to the Company's Articles of Association.

In carrying its duties and responsibilities in managing the Company, the Board of Directors refers to the Law of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Companies, external regulations from both Shareholders and regulators, as well as internal regulations including statute and Board Manual.

In performing its duties, the Board of Directors shall concerned the balance of interests of all parties related to the Company's activities. The Board of Directors acts carefully, cautiously and considers important aspects relevant to the performance of its duties. The Board of Directors exercises Corporate powers and resources solely for the benefit of the Company.

The Board of Directors Duties, Responsibilities and Authorities

The main duties of the Board of Directors are:

1. Leading and managing the Company according to the Company's purpose and objectives
2. Improving Company's efficiency and effectiveness
3. Implementing healthy Good Corporate Governance (GCG) practice in Company.
4. Performing its duty in accordance to Company's Articles of Association, RUPS decisions and other regulations.
5. The Board of Directors shall be responsible to the Shareholder through RUPS.

The Board of Directors authorities encompass:

- Represent the Company inside and outside the court;
- Using professional advice;
- Defining policies and provisions within leading and managing the Company

- Melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam struktur organisasi saat ini yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri BUMN No. SK-424/MBU/2013 tanggal 19 Desember 2013, Direksi BKI terdiri atas Direktur Utama, Direktur Klasifikasi, Direktur Komersil, serta Direktur Keuangan dan Administrasi.

Pembagian Tugas Direksi

Di samping memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolegial, demi menjaga kejelasan tugas dan fungsi, serta menerapkan prinsip akuntabilitas, maka tugas masing-masing Direksi antara lain sebagai berikut:

- a. Direktur Utama (Keputusan Menteri BUMN No. SK-424/MBU/ 2013 tanggal 19 Desember 2013)
 - Menyiapkan program kerja dan rencana pengembangan perusahaan, baik jangka panjang maupun tahunan;
 - Mengkoordinasi Direksi dalam memutuskan dan menetapkan kebijakan perusahaan;
 - Menjalin dan meningkatkan hubungan kerja dan interelasi, baik domestik maupun internasional;
 - Memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan bersama anggota Direksi lainnya;
 - Melakukan pembinaan terhadap personil perusahaan;
 - Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan manajemen oleh seluruh unit kerja perusahaan, bersama anggota Direksi lainnya;
 - Mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan perusahaan kepada RUPS sesuai lingkup kewenangannya.
- b. Direktur Klasifikasi (Keputusan Menteri BUMN No. SK-284/MBU/2012 tanggal 3 Agustus 2012)
 - Menyiapkan pada waktunya program kerja dan rencana pengembangan perusahaan di bidang teknik,

- Performing all acts and behaviors in line with applicable law and regulation either relating to managing or ownership.

In the current organizational structure which is adapted to the Minister of SOEs Decree No. SK-424/MBU/2013 dated 19 December 2013, BKI's Board of Directors consists of President Director, Director of Classification, Commercial Director and Director of Finance and Administration

Division of Directors' Duties

Besides having collegial duties and responsibilities, in order to maintain clearness in duties and functions as well applying accountability principles, the duties of each Board of Directors member are as follows:

- a. President Director (Minister of SOEs Decree No. SK-424 / MBU / 2013 dated 19 December, 2013)
 - Preparing working programs and corporate development plans, both for annual or long term.
 - Coordinates the BOD members in deciding and setting the Company policies
 - Establishing and enhancing inter-relation and working partnership either domestically and internationally
 - Maintain and managing Company's assets together with other BOD's members
 - Conducting Company's personnel coaching
 - Together with other BOD members, conducting supervision and control over the implementation of management policies by all Company's working units
 - Hold responsible on Company's management result to the RUPS in accordance with his scope of authority
- b. Director of Classification (Minister of SOEs Decree No. SK-284/MBU/2012 dated 3 August, 2012)
 - Preparing working programs and corporate development plans,

- baik jangka panjang maupun tahunan;
- Mengurus perusahaan, khususnya di bidang teknologi, termasuk antara lain menangani penkajian dan atau penelitian, penyusunan, penerapan dan pengembangan peraturan teknik, classification rules and regulations, technical information, BKI circulars-guidance-standards, secara rutin dan berkesinambungan, serta kegiatan operasional;
 - Melakukan kegiatan pemasaran, khususnya dalam hal peningkatan kerja sama dengan badan klasifikasi asing dan atau instansi terkait dalam bidang ekonomi;
 - Meningkatkan kemampuan dan keahlian SDM perusahaan dalam bidang teknologi;
 - Bersama anggota Direksi lainnya meningkatkan mutu pengelolaan perusahaan dalam hal penerapan kebijakan mutu, penerapan sistem informasi manajemen, evaluasi tarif jasa, menyiapkan dan menetapkan kebijakan perusahaan, mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan perusahaan kepada RUPS sesuai lingkup kewenangannya.
- c. Direktur Komersil (Keputusan Menteri BUMN No. SK-175/MBU/ 2013 tanggal 5 Maret 2013)
- Menyiapkan pada waktunya program kerja dan rencana pengembangan usaha perusahaan di bidang komersial, baik jangka panjang maupun tahunan;
 - Mengurus perusahaan terutama dalam bidang pengembangan usaha, termasuk antara lain menciptakan pasar baru dan atau unit usaha baru, memperluas pangsa pasar, melaksanakan penelitian pasar, menyiapkan konsep strategi usaha, serta menangani kegiatan operasional di bidangnya;
 - Melakukan kegiatan pemasaran antara lain pengembangan dan peningkatan mutu kerja sama,
- both for annual or long term.
- Managing the company, especially in the field of technology, such as handling research and development, implementation and development of technical regulations, classification rules and regulations, technical information, BKI circulars-guidance-standards, routinely and continuously, and operational activities;
 - Conducting marketing activities, particularly in developing cooperation with foreign classification societies and economic related institutions.
 - Improving Company's human resources ability and expertise in technological field.
 - Together with other BOD members, improves the quality of corporate management in relating to the implementation of quality policy, management information system implementation, service tariff evaluation, preparing and establishing Corporate policy, as well hold responsibility on Corporate management to the RUPS according to his scope of authority.
- c. Commercial Director (Minister of SOEs Decree No. SK-175 / MBU / 2013 dated 3 March 2013)
- Preparing commercial segment working plan and business development plan in timely manner, either for annually or long term.
 - Managing the Company, particularly in business development, including creating new markets and / or new business units, expanding market share, conducting market research, preparing business strategy concepts, and handling operational activities in their fields;
 - Conducting marketing activities such as through developing and increasing cooperation quality

sekaligus melakukan kegiatan sinergi usaha dengan badan klasifikasi asing dan instansi terkait lainnya;

- Meningkatkan kemampuan dan keahlian mutu SDM di bidang pemasaran dan pengembangan usaha;
- Bersama anggota Direksi lainnya meningkatkan mutu pengelolaan perusahaan dalam hal penerapan kebijakan mutu, penerapan sistem informasi manajemen, evaluasi tarif jasa, menyiapkan dan menetapkan kebijakan perusahaan, mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan perusahaan kepada RUPS sesuai lingkup kewenangannya.

d. Direktur Keuangan & Adm (Keputusan Menteri BUMN No. SK-175/MBU/2013 tanggal 5 Maret 2013)

- Menyiapkan pada waktunya program kerja dan rencana pengembangan perusahaan di bidang keuangan, personalia, dan administrasi umum, baik jangka panjang maupun tahunan;
- Mengurus perusahaan, khususnya dalam bidang keuangan, personalia, dan administrasi umum, termasuk antara lain menangani kegiatan dan pengelolaan keuangan perusahaan; kegiatan administrasi kepegawaian, rekrutmen, pelatihan, serta pengembangan karir; kegiatan ketatausahaan, pengadaan barang dan kerumahtanggaan; serta kegiatan kehumasan dan penanggangan urusan hukum;
- Mendukung secara aktif pelaksanaan kebijakan perusahaan di bidang pemasaran;
- Meningkatkan kemampuan dan keahlian mutu SDM perusahaan di bidang keuangan, personalia, dan administrasi umum;
- Bersama anggota Direksi lainnya meningkatkan mutu pengelolaan perusahaan dalam hal penerapan kebijakan mutu,

as well as forming business synergy with foreign classification societies and other related institutions.

- Improving human resources capabilities and expertise quality in marketing and business development.
- Together with other BOD members, improves the quality of corporate management in relating to the implementation of quality policy, management information system implementation, service tariff evaluation, preparing and establishing Corporate policy, as well hold responsibility on Corporate management to the RUPS according to his scope of authority.

d. Finance and Administration Director (Minister of SOEs Decree No. SK-175/MBU/2013 dated 5 March 2013)

- Preparing working program and corporate development program in finance, human resources and general administration in timely manner, for both annually and long term;
- Managing the company particularly in finance, human resources, and general administration, including among others financial activities and management, human resource management, recruitment, training, and career development, business administration, procurement of goods and inventories, and public relations as well as legal issues;
- Actively supporting the implementation of corporate marketing policies.
- Improving corporate human resources capabilities and skill quality in finance, human resources and general administration.
- Together with other BOD members, improves the quality of corporate management in relating to the implementation of quality policy,

penerapan sistem informasi manajemen, evaluasi tarif jasa, menyiapkan dan menetapkan kebijakan perusahaan, mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan perusahaan kepada RUPS sesuai lingkup kewenangannya.

Remunerasi Direksi

Remunerasi adalah imbalan yang diberikan kepada Direksi atas peran yang diberikan untuk pengurusan dan pengelolaan Perusahaan. Besaran remunerasi ditentukan dalam RUPS oleh Pemegang Saham, berdasarkan keputusan RUPS perundang-undangan yang berlaku serta pencapaian KPI Direksi

Penilaian Kinerja Direksi diukur oleh Key Performance Indicator (KPI) tahun 2015 berdasarkan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) sebagai berikut:

management information system implementation, service tariff evaluation, preparing and establishing Corporate policy, as well hold responsibility on Corporate management to the RUPS according to his scope of authority.

Board of Directors Remuneration

Remuneration is the rewards given to the Board of Directors for the role given for the management and supervision of the Company. The amount of remuneration is determined in RUPS by the Shareholders, based on the resolution of the applicable GSM and the achievement of the BOD's KPI.

The Performance Assessment of the Board of Directors is measured by, the Key Performance Indicator (KPI) in 2015 based on Criteria for excellent Performance Evaluation (KPKU) as follows:

No.	Indikator Indicator	Rumus Formula	Bobot Weight	Satuan Unit	Target Target	Realisasi Realization	Skor Score
I. Perspektif Keuangan & Pasar/ Finance & Market Perspective							
1	Pertumbuhan pendapatan Corporate/ <i>Corporate income growth</i>	$\frac{\text{Pendapatan Usaha 2016}}{\text{Pendapatan Usaha 2015}}$ $\frac{\text{Revenue of 2016}}{\text{Revenue of 2015}}$	7	%	22,5	3,07	0,95
2	Net profit margin	$\frac{\text{Laba Setelah Pajak 2016}}{\text{Pendapatan Usaha 2016}}$ $\frac{\text{Profit after tax of 2016}}{\text{Revenue of 2016}}$	7	%	10,66	8,91	5,85
3	Colecting period	$\frac{\text{(Piutang Usaha} \times 365 \text{ hari})}{\text{Pendapatan 2016}}$ $\frac{\text{(Receivables} \times 365 \text{ days})}{\text{Revenue of 2016}}$	6	Hari Days	80	131	3,66
Sub Total				20			10,47
II. Perspektif Fokus Pelanggan/ Customer Focus Perspective							
1	Indeks kepuasan pelanggan <i>Customer satisfaction Index</i>	Jumlah hari customer survey <i>Day of customer survey</i>	12	CSI	6,5	8,00	14,77
2	Penurunan proporsi keluhan pelanggan aktif/ <i>Decrease of active customer complains</i>	$\frac{\text{Proporsi keluhan 2016}}{\text{Proporsi keluhan 2015}}$ $\frac{\text{2016 customer complaints proportion}}{\text{2015 customer complaints proportion}}$	12	%	7,2	5,50	15,71
Sub Total				24			30,48
III. Perspektif Produk dan Proses/ Product and Process Perspective							
1	Maturity manajemen resiko <i>Maturity of Risk Management</i>	Memiliki daftar profil resiko <i>Risk profile list available</i>	5	Skor Score	2,5	2,55	5,10
2	Kesesuaian realisasi anggaran CAPEX <i>Match of CAPEX Realization & budget</i>	$\frac{\text{Realisasi 2016}}{\text{Anggaran 2016}}$ $\frac{\text{Realization of 2016}}{\text{Budget of 2016}}$	5	%	75	50,40	3,36
3	Pertumbuhan aset/ <i>Growth of assets</i>	$\frac{\text{Asset 2016}}{\text{Asset 2016}}$	4	%	105,05	111,95	4,26
4	Number of new services	Jumlah jasa/ Produk yang dihasilkan perusahaan dalam mendiversifikasi jasa atau produk yang ada saat ini / <i>Amount of services / Products produced by the company in diversifying services or products that exist today</i>	4	Jenis Usaha Type of business	2	4	8,00
Sub Total				18			20,72

No.	Indikator Indicator	Rumus Formula	Bobot Weight	Satuan Unit	Target Target	Realisasi Realization	Skor Score
IV. Perspektif Fokus Tenaga Kerja/ Manpower Focus Perspective							
1	Higher revenues per employee	Pendapatan/ Jumlah pegawai 2016 Pendapatan/ Jumlah pegawai 2015 <i>Revenue/Total permanent employees 2016</i> <i>Revenue/Total permanent employees 2015</i>	10	%	17,45	5,05	2,90
2	Jumlah peningkatan kompetensi/ Competence Enhancement	Sertifikat Kompetensi pegawai Employee competence certificate	10	Orang People	350	644	18,40
	Sub Total		.20				21,30
V. Perspektif Kepemimpinan/ Leadership Perspective							
1	Score GCG/ GCG score	Sesuai penilaian independen berdasarkan penilaian BUMN/ <i>Independent evaluation based on SOE criteria</i>	5	Skor Score	91	92,25	5,07
2	Market share jasa komersil/ Market share of commercial services	Pendapatan komersil/ Total Industri <i>Commercial Revenue / Total Industry</i>	5	%	6	5,80	4,83
3	Penyampaian laporan berkala secara elektronik/ <i>Submission of electronic reports periodically</i>	Ketepatan penyampaian laporan berkala BUMN secara elektronik/ <i>Accurate delivery of periodic reports on SOEs electronically</i>	4	%	100	100	4
4	Sinergi BUMN/ <i>Synergy of SOEs</i>	Jumlah tambahan kesepakatan sinergi BUMN/ <i>Additional amount of synergy agreement of SOEs</i>	4	MoU	3	7	9,33
	Sub Total		18				23,23
	TOTAL		100			100	106,20

Sesuai peraturan perundang-undangan, remunerasi Direktur terdiri atas gaji bulanan, tunjangan (THR, Asuransi Santunan Purna Jabatan, Tunjangan Cuti Tahunan, serta Tunjangan Komunikasi), fasilitas (kendaraan dinas, kesehatan dan anggota keluarga, bantuan hukum), tantiem/incentif kinerja, serta faktor pajak atas gaji, tunjangan, fasilitas dan tantiem.

Sesuai Risalah RUPS No. RIS 04/DU.MBU/2014 tanggal 27 Maret 2014, remunerasi Direktur Utama dan para Direktur adalah sebagai berikut:

In accordance with the laws and regulations, the BOD remunerations consists of monthly salary, allowances (THR, Post-Employment Benefit Insurance, Annual Leave Allowances, and Communication Benefits), facilities (official vehicles, health and family members, legal aid), tantiem / performance incentives, As well as tax factors on salaries, benefits, facilities and tantiem.

According to Minutes of RUPS No. 04/S.MBU/2014 dated 27 March 2014, the remuneration for President Director and Directors are as follows:

No.	Dewan Direksi Board Of Directors	Honorarium (Rp) / Honorarium (Rp)	Tunjangan Perumahan (Rp) / Housing Allowance (Rp)	Tunjangan Operasional (Rp) / Operational Allowance (Rp)
1.	Rudiyanto Direktur Utama / President Director	75.000.000	27.500.000	5.000.000
2.	Iman Satria Utama Direktur Klasifikasi / Classification Director	67.500.000	27.000.000	4.500.000
3.	Ibrahim Gause Direktur Komersil / Commercial Director	67.500.000	27.000.000	4.500.000
4	Timbul Tambunan Direktur Keuangan & Administrasi / Finance and Administration Director	67.500.000	27.000.000	4.500.000

*)Tantiem 2016 masih menunggu hasil RUPS pada bulan Mei 2017

*) Tantiem 2016 is still awaiting the results of the GMS in May 2017.

Direksi mengadakan rapat minimal 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu untuk membicarakan permasalahan dan bisnis perusahaan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan.

Pada tahun 2016, Direksi melakukan rapat internal sebanyak 14 kali dengan prosentase kehadiran dapat dipaparkan sebagai berikut:

- Rudiyanto (Direktur Utama): 100%
- Iman Satria Utama (Direktur Klasifikasi): 100%
- Ibrahim Gause (Direktur Komersil) : 50%
- Timbul Tambunan (Direktur Keuangan & Administrasi) : 100%

Selain Rapat internal Direksi, pada tahun 2016 juga diadakan Rapat Gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris sebanyak 12 kali.

Tindak lanjut terhadap arahan Pemegang Saham dalam RUPS tahun 2016 tanggal 23 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

1. Buku RKAP, RKA-PKBL, RKA Dewan Komisaris, KPI (Key Performance Indicators) Tahun 2016 yang telah disetujui dan disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Tanggapan Dewan Komisaris No. PS.15/DK.BKI/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Keputusan RUPS ini dan menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada Tahun 2016 serta sebagai sarana pemantau dan pengawasan bagi Dewan Komisaris.

Tindak lanjut

KPI akan dijadikan acuan target target utama Dekom dan Direksi dalam melaksanakan pengurusan / pengawasan Perseroan Tahun 2016.

2. Direksi diminta untuk melakukan sinergi antar BUMN yang direalisasikan sesuai target dengan menerapkan strategi yang tepat.

Tindak lanjut

BKI telah mengembangkan sinergi antar BUMN dengan Sucofindo dan Pertamina.

The Board of Directors holds a meeting at least once a month and at any time if deemed necessary to discuss problems, company's business and evaluating corporate performance.

During 2016 the BOD held 14 times internal meeting with the attendance percentage of each members as below:

- Rudiyanto (President Director): 100%
- Iman Satria Utama (Classification Director): 100%
- Ibrahim Gause (Commercial Director): 50%
- Timbul Tambunan (Finance and Administration Director): 100%

Besides internal meetings, the BOD also held 12 times joint meeting with the Board of Commissioners.

The follow up of Shareholder directives for fiscal year 2016 in RUPS of 2 May 2016 are as below:

1. The RKAP, RKA-PKBL, RKA BOC and Key Performance Indicator (KPI) books that have been approved and ratified by General Share Holders Meeting (RUPS) and Board Commissioners Response No. PS.15/DK.BKI/XII/2015 dated 18 December 2015 are integral parts of the RUPS conclusion and serve as guidelines for the BOD in implementing corporate working program and 2016 performance target as well the Board of Commissioners monitoring and supervisory tools.

Follow-up

The KPI will become reference of main targets for the BOC and BOD in managing and supervising the Company in 2016.

2. The BOD requested to develop synergy among SOEs which are implemented in accordance with target by applying proper strategies.

Follow-up

BKI has established synergy among SOEs with Sucofindo and Pertamina.

3. Direksi diminta agar mempertahankan kontrak proyek-proyek baru yang optimal dan selektif, serta meningkatkan upaya-upaya yang efektif terkait dengan bisnis BUMN jasa Survey lainnya dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

Tindak lanjut

Saran diperhatikan dan dilaksanakan dimana dalam rangka pengembangan perusahaan menerapkan prinsip-prinsip GCG

4. Direksi diminta untuk memperbaiki pengelolaan piutang, khususnya pada kecepatan kolektibilitasnya guna menjaga kelancaran perputaran modal kerja internal dan meminimalkan cost of fund dari pendanaan eksternal.

Tindak lanjut

Upaya upaya pengelolaan percepatan piutang terus menerus dilaksanakan dengan melaksanakan intensif monitoring piutang di cabang-cabang dan penerapan sistem, monitoring piutang dilakukan dengan mengoptimalkan penagihan dan membuat pernyataan kesanggupan Kepala Cabang Komersil dan Klas untuk menjaga atau mempertahankan Piutang dengan Level Collecting + 80 hari.

5. Direksi diminta untuk menindaklanjuti hasil assessment atas pelimpahan otorisasi statutoria dari Kemenhub sebagai langkah antisipasi dampak terbitnya Permengub No. 61 Tahun 2014.

Tindak lanjut

Atas hasil assesment tersebut, BKI telah menindaklanjuti dan dinyatakan clear, saat ini BKI telah mendapatkan pelimpahan sebagai RO Statutoria dari Kemenhub dan BKI sedang mempersiapkan Infrastrukturnya, secara matang dalam rangka Pelayanan Prima

3. The BOD requested to retain existing projects as well as trying to acquire new optimal and selective project contracts as well enhancing effective measures related to other Survey Service SOEs performed accordingly with applicable laws and regulations.

Follow-up

Suggestions were considered and implemented in order to corporate development in GCG principles implementation.

4. The BOD requested to improve account receivables management, especially in collectivity quickness to maintain working capital turnover smoothness and minimizing external source cost of fund.

Follow-up

Measures in account receivables acceleration management continuously conducted by implementing intensive account receivables monitoring and locking system in branch offices, optimizing debt collecting efforts, and by making statement of commitment of Classification and Commercial branch offices head to maintain account receivables collecting period in about 80 days.

5. The BOD requested to followed up the Statutory Authorization Delegation Assessment outcomes from the Ministry of Transportation as impact mitigation measures relating to the issuance of Minister of Transportation Regulation No. 61 of 2014.

Follow-up

BKI has followed up the assessment outcomes and declared cleared, currently BKI has became Recognized Organization and obtained Statutory authority delegation from the Ministry of Transportation while preparing the infrastructure thoroughly for the service excellent.

6. Direksi diminta untuk mengembangkan Teknologi Informasi yang dapat meningkatkan kinerja dan citra perusahaan

Tindak lanjut

Pengembangan TI melalui ERP SAP Hana sedang dilakukan bekerjasama dengan PT Telkom, Tbk.

7. Tantiem yang dianggarkan dalam RKAP 2016 sesuai dengan peraturan yang berlaku merupakan besaran maksimal yang dapat dibebankan dan realisasi pelaksanaanya berdasarkan pencapaian target kinerja tahun 2016 yang diputuskan dalam RUPS tahunan.

Tindak lanjut

Tantiem Tahun Buku 2016 telah diusulkan yang besarnya sesuai target-target yang telah ditetapkan dalam RKAP 2016, namun realisasinya berdasarkan Keputusan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2016.

Tindak lanjut terhadap arahan Pemegang Saham dalam RUPS tahun 2015, tanggal 2 Mei 2016 adalah sebagai berikut:

1. Semua temuan, catatan dan saran Dewan Komisaris, Auditor Internal maupun Auditor Eksternal atas Laporan Keuangan tahun 2015 agar ditindaklanjuti secara tuntas oleh Direksi dalam Tahun 2016

Tindak Lanjut :

Seluruh temuan, catatan dan saran diperhatikan dan telah ditindaklanjuti dan dilaksanakan.

2. Menyampaikan kepada Menteri BUMN Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh KAP selambat lambatnya 15 Februari 2017.

Tindak Lanjut :

Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 telah diaudit oleh KAP akan disampaikan kepada Kementerian BUMN paling lambat tanggal 15 Februari 2017.

6. The BOD requested to develop Information Technology that can up scale corporate performance and image.

Follow-up

The IT development of SAP Hana ERP is still ongoing under cooperation with PT Telkom, Tbk.

7. Tantiem which budgeted in RKAP 2016 that are according to the applicable regulation is maximum amount that can be charged and will be executed accordingly with 2016 performance target achievement which will be decided in annual RUPS.

Follow-up

Tantiem for 2016 fiscal year has been proposed with the amount corresponding to targets set in 2016 RKAP, yet its execution will be base on 2016 fiscal year RUPS decision.

The follow up of Shareholder directives in fiscal year 2016 RUPS on 2 May 2016 are as below:

1. All findings, notes and suggestion from BOC, Internal Auditor and External Auditor on year 2015 Financial Statement should be followed up thoroughly by the BOD within year 2016.

Follow-up :

All findings, notes and suggestions were taken into account and have been followed up and implemented.

2. Submitting Company's Annual Report including 2016 Financial Statement audited by Independent Accountant Firm to the Minister of SOEs no later than 15 February 2017.

Follow-up :

The Company's Annual Report including the 2016 Financial Statement audited by Independent Accountant Firm will be submitted to the Ministry of SOEs no later than 15 February 2017.

3. Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk tetap mematuhi dan melaksanakan ketentuan, prosedur hukum, dan Anggaran Dasar Perusahaan dan Manajemen Resiko secara sungguh-sungguh dalam setiap kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Tindak lanjut :

Seluruh kegiatan manajemen selalu dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip GCG.

4. Direksi dengan Pengawasan Dewan Komisaris diminta terus meningkatkan compliance/pemenuhan portal financial information system (FIS) portal asset, portal SDM, portal PKBL dan portal publik.

Tindak lanjut :

Pemenuhan portal FIS, Portal Asset Portal SDM, Portal PKBL dan Portal Publik telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

5. Berdasarkan evaluasi atas realisasi penyerapan investasi pada tahun 2015, Direksi dengan pengawasan Dewan komisaris diminta untuk meningkatkan realisasi capaian investasi sesuai dengan program kerja investasi pada tahun 2016 untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan kinerja Perusahaan serta mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional di tahun yang akan datang.

Tindak lanjut :

Peningkatan capaian Investasi sesuai dengan program kerja Investasi tahun 2016 telah diupayakan semaksimal mungkin sesuai kebutuhan perusahaan.

6. Tahun 2015 masih terdapat beberapa beban/biaya yang melebihi anggaran hal ini menunjukan bahwa cost reduction program harus menjadi perhatian dengan lebih mengedepankan efektifitas & efesiensi pengeluaran

3. The BOD and BOC requested to seriously keep comply and implement Company's provisions, legal procedures, Articles of Association and Risk Management in every corporate activities based on Good Corporate Governance (GCG) principles.

Follow-up :

All management activities are always implemented based on GCG principles.

4. Under supervision of BOC, the BOD requested to continuously increase the compliance/fulfillment of the financial information system (FIS) portal, assets portal, human resources portal, PKBL portal and public portal.

Follow-up :

Portals fulfillment for FIS, HR, Assets, PKBL and Public have been performed accordingly with provisions.

5. Based on 2015 investment absorption realization evaluation, the BOD with supervision of BOC, requested to increase investment realization achievement in line to 2016 investment working plan to propel growth and increasing Corporate performance as well supporting national economic development acceleration in the up coming year.

Follow-up :

The investment achievement increase in line with 2016 investment working plan were already attempted as much as possible according to corporate needs.

6. In 2015, there were some cost burden that still exceeding the budget, this indicates that cost reduction program should become attention with more bringing forward effective and efficient spending principles.

Tindak lanjut :

Arahan RUPS diperhatikan dan dilaksanakan untuk menetapkan dan mengedepankan azas efektifitas dan efisiensi dalam pengeluaran biaya.

Tindak lanjut terhadap arahan Dewan Komisaris terhadap RUPS RKAP tahun 2016, adalah sebagai berikut:

1. Terkait strategi dalam RKAP tahun 2016 mengenai pengembangan sumber daya manusia untuk upgrading kompetensi surveyor dan inspektor, dan utamanya untuk mendukung pelimpahan statutoria penuh kepada PT. BKI (Persero), Dewan Komisaris memandang perlu pengiriman staf untuk mengikuti sidang-sidang / working grup IMO, IACS, ACS, PSC, serta training-training ke klas-klas partner, manajemen, dan lain lain dalam rangka pemenuhan persyaratan QSCS-IACS. Hal ini bertujuan untuk dapat bersaing dengan badan klasifikasi internasional maupun perusahaan jasa teknik lainnya. Selain itu program peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM perlu digiatkan dan perekutan tenaga profesional teknis dapat lebih ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan SDM yang kompeten.

Tindak Lanjut :

Saran diperhatikan dan dilaksanakan

2. Terkait strategi dalam RKAP Tahun 2016 mengenai investasi pada komputer dan Software, Dewan Komisaris menyarankan agar dilakukan secara menyeluruh dan terpadu sesuai tuntutan pasar dan perkembangan teknologi, dengan menggunakan jasa pihak ketiga, dengan demikian proses arus informasi bisa berjalan secara mutakhir

Tindak Lanjut :

Saran diperhatikan dan dilaksanakan pengembangan IT sesuai Perkembangan Teknologi dan kebutuhan perusahaan dengan kerja sama PT Telkom, Tbk

Follow-up :

The RUPS directives were accommodated and implemented by setting and prioritizing efficient and effective principles in cost spending.

The Board of Commissioners followed up on 2016 RKAP directives are as below:

1. Associated to 2016 RKAP strategy on human resources development in upgrading surveyor's and inspector's competence, and mainly to support full statutory delegation to BKI, the BOC viewed it is needed to send staffs to attend IMO, IACS, ACS, PSC sessions/working group as well training at class partners, management, etc, in order to meets IACS QSCS requirements. These were aimed to be able to compete with other international classification societies or other technical service companies. Besides that, the HR capability and competence improvement program needed to be intensified and the recruitment of professional technical staff can be more increased to meets corporate needs on competent HR.

Follow-up :

Suggestions were noticed and implemented.

2. Associated with strategies in 2016 RKAP on computer and software investment, BOC suggested that it should be conducted thoroughly and in integrated way as well in line with market demands and technological development, by using third party service, thus the information flow process can goes well.

Follow-up :

Suggestions were noticed and implemented by developing IT in accordance to technological development and corporate needs in cooperation with PT Telkom, Tbk.

3. Terkait dengan pembangunan gedung selatan Kantor Pusat BKI untuk unit kerja Komersil dan BKI Academy, agar direalisasikan dengan prinsip kehati-hatian, efisien dan efektif sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Tindak Lanjut :

Saran diperhatikan dan dilaksanakan, dimana proses pelaksanaan pengadaan/pembangunan gedung dilaksanakan dengan prinsip prinsip GCG

4. Terkait strategi dalam RKAP Tahun 2016 mengenai unit kerja Komersil, Direksi diharapkan dapat menambah program dan kegiatan pengurusan/pembaharuan perizinan, atau sertifikasi/lisensi yang harus dimiliki BKI, sebagai persyaratan suatu tender atau lelang, diantaranya perizinan kelistrikan, PLTD, dan lain sebagainya.

Tindak Lanjut :

Saran diperhatikan dan dilaksanakan, dimana dalam rangka perluasan pasar dan diversifikasi usaha, BKI melengkapi persyaratan-persyaratan yang diperlukan

5. Direksi diharapkan untuk lebih meningkatkan rasio collection period piutang; melalui penagihan yang intensif dan monitoringnya berawal dari kantor cabang terus berjenjang hingga kantor pusat sehingga kebutuhan dana yang ada dapat dipenuhi dari kontinuitas penerimaan piutang tanpa harus menyediakan kas yang terlalu besar. Dengan demikian Perusahaan tetap dapat memenuhi kebutuhan dana operasional cabang-cabang serta dapat merealisasikan kegiatan investasi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RKAP 2016.

Tindak Lanjut :

Collecting Periode merupakan perhatian utama Manajemen dibidang keuangan untuk secara terus menerus diperbaiki.

3. Related to the construction of BKI's head office south side building for Commercial working units and the BKI Academy, it should be conducted by prudent, efficient and effective principal according to the applicable laws and regulations.

Follow-up :

Suggestions were noticed and conducted through procurement and construction process carried out referred to GCG principles.

4. Associated with strategy in 2016 RKAP on Commercial Working Units, BOD is expected to add program in permits handling or renewal and acquiring certificates/licenses that BKI should owned as a tender requirement such as license in electricity, PLTD, etc.

Follow-up :

Suggestions were noticed and carried out by completing necessary permits and requirements needed for BKI's business expansion and diversification.

5. The BOD is expected to further increase receivables collection period ratio by means of intensive billing efforts and its monitoring, started from branch office in stages to head office so the cash fund needs can be fulfill form receivables payments without preparing big sum of cash. Thus then the Company can fulfill its branch offices operational cost as well materializing investment program planned in 2016 RKAP.

Follow-up :

The collection period is Management's main concerned in finance matter which continuously refined.

Saat ini telah diterapkan Locking Sistem dan Monitoring Piutang ke Cabang cabang, hasilnya masih belum membaik dari tahun lalu 107 hari menjadi 131 hari pada periode ini.

Tindak lanjut arahan Dewan Komisaris terhadap RUPS tahun 2015, adalah sebagai berikut:

1. Dari uraian kinerja yang secara detailnya sudah disampaikan oleh Direksi dalam Laporan Manajemen Tahun 2015, Dewan Komisaris berpendapat bahwa Kegiatan usaha PT. BKI tahun 2015, belum dilakukannya pelaporan kegiatan lalu lintas devisa ke Bank Indonesia; Belum dilaporkannya kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang negeri korporasi non bank; Penilaian KPI Individual belum dilakukan; Direktorat Komersial tidak memiliki perhitungan harga pokok/unit cost dan perlu ditingkatkan kesiapan SDM dalam mendukung penyusunan laporan keuangan sesuai pernyataan PSAK yang berlaku.

Tindak lanjut :

- a. PT. BKI (Persero) tidak melakukan pelaporan kegiatan lalu Lintas Devisa ke BI karena tidak terdapat utang / piutang / kegiatan Moneter Lintas Negara/ke Luar Negeri.
- b. Penilaian KPI Individual sudah dimulai dan Perhitungan Bonus akan menggunakan nilai KPI Individual.
2. Untuk Program kerja di tahun 2015 yang belum sepenuhnya terealisir sesuai rencana, Dewan Komisaris telah meminta agar dapat diselesaikan sesegera mungkin. Untuk kegiatan penerliatian dan pengembangan, perlu lebih dioptimalkan lagi di tahun yang akan datang mengingat sifat perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Locking System and inter branch Receivables Monitoring mechanism has been implemented currently, yet the result still not getting better from last year's 107 days, reached to 131 days in this period.

The BOC directives followed up on 2015 RUPS are as below:

1. From the performance description which the detail already explained by the BOD in the 2015 Management Report, The BOC argued that for business activities in 2015, BKI has not reported foreign exchange traffic to Bank Indonesia, prudential principles implementation in managing non corporate domestic debt not been done yet, individual KPI assessment not been implemented yet, the Commercial Director does not have unit cost/cost of services offered calculation and HR readiness in supporting financial report preparation according to the applicable PSAK should be increased.

Follow-up

- a. PT. BKI (Persero) does not report the activities of Foreign Exchange Flow to BI because there is no debt / receivable / cross country / overseas monetary flows activities.
- b. Individual KPI Assessment already implemented and the Bonus Calculation will use the individual KPI score.
2. For 2015 Working Program which has not been fully materialized as planned, the BOC requested those should be performed shortly. For research and development activities, it is needed to be more optimized in the coming year as the Company's nature that engaged in science and technological based services.



Tindak lanjut :

Saran diperhatikan dan dilaksanakan

3. Dari aspek piutang terdapat potensi piutang bermasalah yaitu piutang yang kurang lancar, terhadap hal tersebut Direksi diharapkan dapat, melakukan penagihan secara aktif terhadap piutang yang berumur lebih dari 12 bulan; Memperbaiki SOP yang ada sehingga lebih memperjelas mekanisme penagihan yang dilakukan terutama oleh kantor cabang; Merevisi kebijakan penetapan umur piutang dan harus disesuaikan dengan PSAK untuk memperoleh nilai piutang yang riel.

Tindak lanjut :

Upaya-upaya pengelolaan percepatan pencairan piutang terus menerus di laksanakan daengan melaksanakan monitoring piutang secara intensif serta penerapan Locking System

Komite Audit

BKI memiliki Komite Audit yang membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pelaporan keuangan, sistem pengendalian intern, proses audit, dan tata kelola perusahaan.

BKI telah memiliki Piagam Komite Audit yang menetapkan tujuan, wewenang, tanggung jawab, dan komposisi Komite Audit.

Follow-up :

Suggestions were noticed and implemented

3. From the receivables aspect, there is potential of non-performing receivable, ie receivables that are substandard, to that matter the BOD is expected more active to billing receivable older than 12 months; Improving existing SOPs so as to clarify billing mechanisms performed primarily by branch offices; revised the receivables age-adjustment policy accordingly to PSAK to obtain real accounts receivables value.

Follow-up :

Efforts to manage the acceleration of receivable disbursement is continuously carried out by implementing intensive receivables monitoring and applying Locking System

Audit Committee

BKI has an Audit Committee that assists the Board of Commissioners in running its oversight function on financial reporting, internal control systems, audit processes, and corporate governance.

BKI already has an Audit Committee Charter which sets out the objectives, authorities responsibilities, Committee's composition.

Di samping, itu Piagam Komite Audit juga merumuskan kebijakan rapat Komite Audit, serta menjamin independensi Komite Audit.

Piagam Komite Audit menentukan komposisi Komite Audit BKI terdiri atas satu orang Komisaris dan dua orang profesional dari luar perusahaan. Sesuai SK Dewan Komisaris No. KU.006/Dekom.101/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013, ditetapkan susunan Komite Audit sebagai berikut:

KETUA Komite Audit:
Minto Widodo
(Anggota Dewan Komisaris BKI)

Riwayat jabatan:
Anggota Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-322/M-BU/2012 tanggal 11 September 2012; dikukuhkan sebagai Ketua Komite Audit oleh Komisaris Utama dengan Keputusan No. 005/Dekom.101/X/KI-12 tanggal 30 Oktober 2012.

Pengalaman Kerja:
Kepala Pusat Sistem Informasi Keuangan Daerah (1996-2004), Sekretaris Bapeksta Keuangan (1996), Kementerian Keuangan R.I (1981-sekarang)

Riwayat Pendidikan:
S1 Ekonomi UGM (1981), MA Economics Colorado State University, Amerika Serikat (1989).

Periode jabatan Ketua Komite:
2 periode

In addition, the Charter also formulates the policy of the Audit Committee meeting, as well ensuring the Committee's independence.

The Charter determines the composition of the Audit Committee which consists of one Commissioner and two professionals from outside the company. In accordance with Board of Commissioners Decree No. KU.006/Dekom.101 / X / 2013 dated 1 October, 2013, the Audit Committee composition stipulates as follows:

The Audit Committee Chairman:
Minto Widodo
(BKI's Board of Commissioners member)

Position history:
Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) are appointed based on Minister of State-Owned Enterprises Decree No. SK-322/MBU/2012 dated 11 September, 2012; Confirmed as Chairman of the Audit Committee by the President Commissioner Decision No. 005/Dekom.101/X/ KI-12 dated 30 October 2012.

Work Experience:
Head of Center for Regional Financial Information System (1996-2004), Secretary of Bapeksta Keuangan (1996), Ministry of Finance R.I (1981-present)

History of Education:
S1 Economics UGM (1981), MA in Economics Colorado State University, United States (1989).

Period of office Chairman of the Committee:
2 periods

Anggota Komite Audit:
Trisyu Wimartono
(Profesional)

Riwayat jabatan :

Anggota Komite Audit BKI diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KU.006/Dekom.101/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013

Pengalaman kerja:

Dani Sudarsono & Partner, Public Accountant Firm (Desember 2012), Pusat Investasi Pemerintah (Juli 2011-September 2012), PT Permodalan Nasional Madani (Desember 2008-Juni 2011), PT Asean Market Investment (1997-Maret 2000), PT Sempati Air (1996-1997), dan BPKP (1981-1996).

Riwayat Pendidikan:

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1991).

Periode Jabatan Anggota Komite:
1 periode.

Audit Committee Member:
Trisyu Wimartono
(Professional)

Position history:

Appointed as BKI Audit Committee member by the Board of Commissioners Decree No. KU.006/Dekom.101/X/2013 dated October 1, 2013

Work Experience:

Dani Sudarsono & Partner, Public Accountant Firm (December 2012), Government Investment Center (July 2011-September 2012), PT Permodalan Nasional Madani (December 2008-June 2011), PT Asean Market Investment (1997-March 2000) PT Sempati Air (1996-1997), and BPKP (1981-1996).

Education History:

State Accounting College (1991).

Member Period Member of Committee:
1 period.

Anggota Komite Audit:
Deni Sulistiyo
(Profesional)

Riwayat jabatan:

Anggota Komite Audit BKI diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KU.006/Dekom.101/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013

Pengalaman kerja:

Senior Konsultan PT Delta Multi Jasatama (2008-2015), Senior konsultan PT Bina Mandiri Wahana (2008), KAP Mochamad Abadan (2008), Task force Kementerian Perindustrian (2007-2008), Senior Konsultan XSYS Consulting Group (2004-2006), Senior Officer BPPN (2002-2004), KAP Zulkifli & Partner (2000-2002) dan BPKP (1996-1998).

Riwayat Pendidikan: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2000).

Periode Jabatan Anggota Komite:
1 periode.

Audit Committee Member:
Deni Sulistiyo
(Professional)

Position history:

Appointed as BKI Audit Committee member by the Board of Commissioners Decree No. KU.006/Dekom.101/X/2013 dated October 1, 2013

Work experience:

Senior Consultant of PT Delta Multi Jasatama (2008-2015), Senior Consultant of PT Bina Mandiri Wahana (2008), KAP Mochamad Abadan (2008), Task force of the Ministry of Industry (2007-2008), Senior Consultant of XSYS Consulting Group (2004- 2006), Senior Officer of IBRA (2002-2004), KAP Zulkifli & Partner (2000-2002) and BPKP (1996-1998).

Education History:

State Accounting College (2000).

Membership Period Member of Committee:
1 period.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Audit mencakup pelaporan Keuangan, pengendalian intern, audit intern, audit external, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penyiapan laporan kegiatan Komite Audit.

Rapat Komite Audit

Pada tahun 2016 Komite Audit telah mengikuti rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 25 (dua puluh lima) kali.

Kegiatan Komite Audit tahun 2016:

Kegiatan Komite Audit tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Rapat Internal Dewan Komisaris, pembahasan RKA Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Direksi dan Komisaris mengenai pembahasan sebagai berikut :
 - a. Pembahasan kinerja PT BKI (Persero) setiap bulannya
 - b. Closing meeting dengan KAP HMR terkait audit laporan keuangan PT BKI tahun 2016
 - c. Paparan kinerja SPI tahun 2016 dan PKPT 2017, serta paparan kinerja per Direktorat
 - d. Pembahasan kinerja manajemen risiko dan progress pengajuan RKAP 2017
2. Rapat Komite Audit, KIPU beserta:
 - a. KAP MHR mengenai pembahasan progress Audit PT BKI (Persero)
 - b. Divisi Teknologi Informasi mengenai pembahasan IT Maspter Plan&
 - c. ERP-SAPDivisi Keuangan mengenai pembahasan kinerja PT BKI (Persero)
3. Monitoring Unit Kerja dan Unit Produksi SBU Lepas Pantai, Cabang Pratama Jambi, Cabang Utama Surabaya, Cabang Madya Semarang, Cabang Madya Banjarmasin, Cabang Pratama Sorong, Cabang Madya Pekanbaru, Cabang Pratama Belawan,

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The scope of duties and responsibilities of the Audit Committee include financial reporting, internal control, internal audit, external audit, compliance with legislations, and preparation of Audit Committee activities reports.

Audit Committee Meetings

In 2016, the Audit Committee has attended the 25 (twenty five) internal Board of Commissioners meetings.

Activity of Audit Committee 2016:

The activities of the Audit Committee in 2016 are as follows:

1. Internal Meetings of the Board of Commissioners, Discussion of RKA Board of Commissioners and Joint Meetings of the Board of Directors and Commissioners on the following discussion:
 - a. Monthly Company's performance discussion
 - b. Closing meeting with KAP HMR related to audit of financial statements of PT BKI in 2016
 - c. Exposure to SPI performance in 2016 and PKPT 2017, and performance exposure per Directorate
 - d. Discussion on the performance of risk management and progress of RKAP 2017 submission
2. Audit Committee Meetings, KIPU along with:
 - a. KAP HMR on discussing BKI's audit progress
 - b. Information Technology Division on IT Maspter Plan & ERP-SAP
 - c. discussion Finance Division on discussing BKI's financial performance
3. Production and Working Units monitoring Offshore SBU, Jambi Initial Branch, Surabaya Main Branch, Semarang Medium Branch, Banjarmasin Medium Branch, Sorong Initial Branch, Pekanbaru Medium Branch, Belawan Initial Branch,



Divisi Statutory, Cabang Utama Batam, Divisi Hubungan Pelanggan dan Cabang Utama Samarinda bertujuan untuk memantau kinerja cabang, menelaah system pengendalian internal serta memberikan tambahan motivasi dalam pelaksanaan tugas.

4. Pemberian Tanggapan terhadap laporan-laporan BKI
 - a. Laporan manajemen memberi tanggapan terhadap kinerja PT BKI
 - b. (Persero)
Tanggapan terhadap pelaksanaan
 - c. Audit PT BKI (Persero) tahun 2016
Memperpanjang perjanjian pemberian fasilitas garansi Bank
5. Penyampaian rekomendasi KAP untuk melakukan audit Laporan Keuangan PT BKI tahun 2016
6. Rapat dengan Divisi Keuangan dan rapat teknis pembahasan kinerja
7. Memberi tanggapan terhadap laporan manajemen dan kinerja cabang
8. Kick off meeting general audit PT BKI tahun 2016 dengan Direksi, manajemen dan KAP Ghazali, Sahat dan Rekan.

Statutory Division, Batam Main Branch, Customer Relationship Division and Samarinda Main Branch aims to monitor branch performance, review internal control system and provide additional motivation in Execution of tasks.

4. Provided feedback to BKI's reports:
 - a. Management Reports on BKI's performance
 - b. BKI's 2016 audits performance
 - c. Bank guarantee extension agreement
5. Submitted Public Accountant Firm recommendation for BKI's 2016 Financial Statements Audit
6. Hold meetings with Financial Division and technical discussion regarding performance
7. Responded to management's report and branch offices performance
8. Kicked off meeting of BKI 2016 general audit with BOD, management and Independent Auditor Firm Ghazali, Sahat and Partners.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary



Saifuddin Wijaya
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Riwayat Jabatan:

Kepala Bidang EDP (1992), Kepala Satuan Jaminan Mutu (2000), Kepala Satuan Perencanaan (2005), Kepala Satuan Penelitian dan Pengembangan (2011), dan Sekretaris Perusahaan (2013-sekarang)

Pendidikan:

S1 Teknik Perkapalan Institut Teknologi Sepuluh Novermber (ITS) Surabaya (1987), S2 Master of Business Administration, Indonesia Institut of Business Administration Jakarta (1992)

Pengalaman Kerja:

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
1987-sekarang.

Dasar Hukum:

Surat Keputusan Direksi No. DU.059/KP.503/KI-14 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai/Pejabat di lingkungan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dan Surat Keputusan Direksi No. DU.131/LT.101/KI-15 tanggal 03 Agustus 2015 Jo. Surat Keputusan Direksi No. DU. 058/LT.101/KI-14 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Sistem Pengendalian Internal

BKI mengembangkan sistem pengendalian internal yang terdiri atas struktur tata kelola, prosedur, serta kegiatan. Sistem pengendalian intern BKI mencakup pengendalian keuangan dan pengendalian operasional. Sistem pengendalian internal keuangan menjamin keandalan sistem akuntansi serta kewajaran penggunaan aset dan peralihan kepemilikan.

Position history:

Head of EDP (1992), Head of Quality Assurance Unit (2000), Head of Planning Unit (2005), Head of Research and Development Unit (2011), and Corporate Secretary (2013-present)

Education:

Bachelor of Naval Architect from Surabaya November 10th Technological Institute (1987), Master of Business Administration from Indonesia Institute of Business Administration (1992).

Work Experience:

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
1987-present.

Legal Basis:

BOD Decree No. DU.059/ KP.503/ KI-14 dated 30 January 2014 on Termination and Appointment of Officials within PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) and BOD Decree No. DU.131 / LT.101 / KI-15 dated 03 August 2015 Jo. BOD Decree No. DU. 058 / LT.101 / KI-14 dated January 30, 2014 on the Improvement of Organization Structure PT Bureau of Classification of Indonesia (Persero)

Internal Control System

BKI develops an internal control system consisting of governance structures, procedures, and activities. BKI's internal control system includes financial control and operational control. The internal financial control system ensures the reliability of the accounting system and the fairness of asset use and ownership transfers.

Pelaksanaan tugas pengendalian internal keuangan merupakan tanggung jawab setiap satuan kerja.

Struktur tata kelola pengendalian intern mencakup RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Satuan Pengendalian Intern, serta juga memposisikan auditor eksternal.

Struktur ini memisahkan dengan tegas fungsi dan peran Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

Hubungan antar ketiganya pun diatur dengan ketat, sehingga Dewan Komisaris hanya dapat mengadakan rapat konsultatif dengan Direksi sementara Direksi hanya dapat mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris. Tidak ada hubungan keluarga ataupun keuangan antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Adapun Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, sementara Satuan Pengendalian Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Auditor eksternal bekerja atas dasar kontrak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Prosedur pengendalian intern diuraikan dan ditetapkan di dalam Piagam Komite Audit dan Piagam Satuan Pengawasan Intern.

Kegiatan pengendalian intern mencakup audit keuangan, audit operasional, audit kepatuhan, audit sistem informasi, desk audit, serta specific review.

Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan unit yang bertanggung jawab atas efektivitas sistem pengendalian intern. Independensi SPI dijamin oleh perusahaan melalui Piagam Satuan Pengendalian Intern. Sementara itu, kapasitas SPI sebagai auditor, assuror, serta konsultan terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan anggotanya. SPI pun memantau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan reviu atas efektivitas sistem pengendalian intern.

Implementation of internal financial control tasks is the responsibility of each work unit.

Internal control governance structures include RUPS, Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Internal Control Unit, and also positioned external auditors.

This structure strictly separates the functions and roles of Shareholders, Board of Commissioners, and BOD.

The relationship between the three is also strictly regulated, so the Board of Commissioners can only hold consultative meetings with the Board of Directors while the Board of Directors can only hold a coordination meeting with the Board of Commissioners. There is no family nor financial relationship allowed between the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

The Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners, while the Internal Control Unit is responsible to the President Director. The external auditor works on a contract basis in accordance with applicable laws and regulations, and is appointed by the Board of Commissioners.

Internal control procedures are outlined and set forth in the Audit Committee Charter and the Internal Control Unit Charter.

Internal control activities include financial audits, operational audits, compliance audits, information system audits, on desk audits, and specific reviews.

The Internal Audit Unit (SPI) is the unit responsible for the effectiveness of the internal control system. The independence of SPI is guaranteed by the company through the Internal Control Unit Charter. Meanwhile, SPI's capacity as auditor, assuror, and consultant is continuously improved through various education and training activities of its members. SPI also monitors compliance with laws and regulations and reviews the effectiveness of internal control systems.

Selain itu perusahaan juga memiliki fungsi sistem manajemen sebagai penanggung jawab diterapkan sistem Manajemen Strategik berdasarkan standar ISO-9001:2008 sebagai wujud komitmen manajemen dalam meningkatkan kepuasan pemakai jasa (customer satisfaction) dan penyempurnaan yang berkesinambungan (Continuous improvement).

Satuan Pengawasan Intern

Riwayat Jabatan:
Kepala Satuan Pengawasan Intern (2014-sekarang),

Pendidikan:
S1 Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar 1986

Pengalaman Kerja:
PLN Makassar (1981), PIR Tanaman Pangan (1982), PDAM Tangerang (1987), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) 1987-sekarang.

Dasar Hukum:
Surat Keputusan Direksi No. DU.059/KP.503/KI-14 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai / Pejabat di lingkungan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dan Surat Keputusan Direksi No. DU.131/LT.101/KI-15 tanggal 03 Agustus 2015 Jo. Surat Keputusan Direksi No. DU. 058/LT.101/ KI-14 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Sertifikat:
Auditor Pemeriksa, Sukabumi tahun 2008

In addition, the company also has a function of the management system as responsible for the implementation of Strategic Management system based on ISO-9001: 2008 standard as a form of management commitment in increasing customer satisfaction and continuous improvement.

Internal Control Units



Jamaluddin Gani
Satuan Pengawasan Intern
Internal Audit Unit

Historical Position:
Head of the Internal Control Unit (2014-present),

Education:
Bachelor of Economic of Hasanuddin University, Makassar (1986)

Work Experience:
PLN Makassar (1981), PIR Crops Plant (1982), Tangerang PDAM (1987), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) 1987 - present.

Legal Basis:
BOD Decree No. DU.059/ KP.503/ KI-14 dated 30 January 2014 on Termination and Appointment of Officials within PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) and BOD Decree No. DU.131/LT.101/KI-15 dated 03 August 2015 Jo. BOD Decree No. DU. 058/ LT.101/KI-14 dated 30 January 2014 on the Improvement of Organization Structure of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Certificate:
Auditor Investigator, Sukabumi in 2008

Dalam melaksanakan tugasnya, SPI mengacu kepada kode etik The Institute of Internal Auditor Inc. yang telah disokong oleh Konsorsium Profesi Audit Internal Indonesia.

Struktur dan Kedudukan Satuan Pengawasan Intern (SPI)

SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, serta berkoordinasi dengan Komite Audit dan Auditor External.

Kewajiban SPI

1. Membantu Direktur Utama dalam hal: memantau kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian manajemen perusahaan, mendorong efektivitas organ tata kelola perusahaan, serta mendorong efektivitas proses pengendalian manajemen, manajemen risiko, implementasi etika bisnis, dan pengukuran kinerja organisasi;
2. Membantu Manajemen dalam hal memberikan kajian dan rekomendasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan dari sisi efektivitas, efisiensi, dan ekonomi serta memberikan masukan tentang perubahan lingkungan, mengidentifikasi peluang peningkatkan efisiensi dan efektivitas

Ruang Lingkup Kegiatan SPI

1. Sistem pengendalian manajemen;
2. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Informasi keuangan dan informasi operasional;
4. Perlindungan kekayaan perusahaan;
5. Tugas khusus yang terkait dengan penyimpangan, kecurangan, dan pemberoran;
6. Penyiapan laporan assurance dan rekomendasi perbaikan.

In performing its duties, the SPI refers to the Code of Ethics of The Institute of Internal Auditor Inc. Which has been supported by the Consortium of Indonesian Internal Audit Professionals.

Structure and Position of Internal Audit Unit (SPI)

SPI is directly responsible to the President Director, and coordinates with the External Audit and Audit Committee.

Liability SPI

1. Assist the President Director in terms of: monitoring the adequacy and effectiveness of the company's management control system, encouraging the effectiveness of corporate governance organs, and encouraging the effectiveness of management control processes, risk management, business ethics implementation, and organizational performance measurement;
2. Assist the Management in terms of providing reviews and recommendations on achieving company goals and objectives in terms of effectiveness, efficiency, and economy as well as providing input on environmental changes, identifying opportunities for increased efficiency and effectiveness

Scope of SPI Activities

1. Management control system;
2. The prevailing laws and regulations;
3. Financial information and operational information;
4. Protection of corporate assets;
5. Specific tasks related to deviations, fraud, and prodigality
6. Preparation of assurance reports and improvement recommendations.

Kegiatan SPI Tahun 2016

Selama tahun 2016, Audit Internal Perusahaan telah melakukan audit operasional terhadap 14 unit kerja, sedangkan Manajemen Strategik melakukan Audit Internal terhadap dua unit kerja Kantor Pusat, 10 Unit produksi bidang klasifikasi, dan 10 Unit Produksi bidang Komersil, satu Divisi Umum dan 17 Unit produksi Klas dan Komersil untuk Audit internal HSE; serta Audit Eksternal sebanyak tiga kali yang dilakukan di bulan Januari, September dan Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan PKPT SPI sampai dengan Desember 2016 dilakukan di 14 unit produksi segmen Klas dan Komersil antara lain :
 - Cabang Sorong
 - Cabang Samarinda
 - Cabang Bitung
 - Cabang Ambon
 - Cabang Pontianak
 - Cabang Palembang
 - Cabang Banten
 - Cabang Sorong
 - Cabang Bitung
 - Cabang Pontianak
 - Cabang Balikpapan
 - Perwakilan Ambon
 - Cabang Palembang
 - Cabang Banten

Sistem Pengendalian Internal

Perusahaan telah memelihara sistem pengendalian internal keuangan yang menjamin keandalan sistem akuntansi. Sistem pengendalian internal keuangan diberlakukan untuk memberikan jaminan yang wajar dalam hubungannya dengan menjaga asset dari penyalahgunaan dan peralihan kepemilikan secara tidak sah, menjaga keabsahan catatan-catatan akuntansi dan keandalan informasi keuangan yang dapat dipercaya yang digunakan dalam perusahaan maupun tanggung jawab seluruh unit/satuan kerja.

Perusahaan menetapkan Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai unit yang bertanggung jawab atas efektivitas sistem pengendalian intern.

SPI Activities Year 2016

During 2016, the Company's Internal Audit has conducted operational audits of 14 working units, while Strategic Management conducted Internal Audits to two Head Office units, 10 Classification Production Units, and 10 Commercial Production Units, one General Affairs Division and 17 Class Production Unit for HSE Internal Audit and three External Audits conducted in January, September and December 2016 with details as follows:

- a. Implementation of PKPT SPI until December 2016 is done in 14 units of production of Class and Commercial segments, among others:
 - Sorong Branch
 - Samarinda Branch
 - Bitung Branch
 - Ambon Branch
 - Pontianak Branch
 - Palembang Branch
 - Banten Branch
 - Sorong Branch
 - Bitung Branch
 - Pontianak Branch
 - Balikpapan Branch
 - Ambon Representative
 - Palembang Branch
 - Banten Branch

Internal Control System

The Company has maintained an internal financial control system that ensures the reliability of the accounting system. The internal financial control system is in place to provide reasonable guarantees in relation to safeguarding assets against unlawful misuse and transfer of ownership, maintaining the legitimacy of accounting records and reliable reliability of financial information used in the company and the responsibilities of all units / work units.

The Company establishes the Internal Audit Unit (SPI) as the unit responsible for the effectiveness of the internal control system.

Selain itu perusahaan juga memiliki fungsi sistem manajemen sebagai penanggung jawab diterapkan sistem Manajemen Strategik berdasarkan standar ISO-9001:2008 sebagai wujud komitmen manajemen dalam meningkatkan kepuasan pemakai jasa (customer satisfaction) dan penyempurnaan yang berkesinambungan (Continuous improvement).

a. Sedangkan internal audit oleh Manajemen Strategik dilaksanakan antara lain :

- Divisi Umum, Sekretariat Perusahaan, Divisi SDM, Divisi Hubungan Pelanggan, Divisi Manajemen Risiko & Tata Kelola, Divisi Statutoria, Divisi Manajemen Strategik, Divisi Survey, Divisi Riset & Pengembangan dan Divisi IT
- Kantor Cabang Surabaya, Samarinda, Banjarmasin, Tg. Priok, Sorong, Semarang, Cirebon, Pekanbaru, Batam, Belawan, Banten, Ambon, Makassar, Bitung, Pontianak, dan Palembang
- Internal Audit LOG ISO-9001:2008 Komersil 2016 terdiri dari: Kantor Pusat 4 (empat) unit kerja yaitu; Divisi Manajemen Strategik, Divisi Umum, Divisi Kendali Usaha, Divisi Pemasaran & Pengembangan;
- Kantor Cabang Komersil terdiri dari : Surabaya, Banjarmasin, Sorong, Semarang, Cirebon, Pekanbaru, Belawan, Banten, SBU Indistri, Ambon, Balikpapan, SBU Energy, Makassar, Bitung, SBU Marine dan Pontianak.

In addition, the company also has a function of the management system as responsible for the implementation of Strategic Management system based on ISO-9001: 2008 standard as a manifestation of management commitment in increasing customer satisfaction and continuous improvement.

a. While internal audit by Strategic Management implemented among others:

- General Division, Corporate Secretariat, Human Resource Division, Customer Relations Division, Risk Management & Governance Division, Statutory Division, Strategic Management Division, Survey Division, Research & Development Division and IT Division
- Surabaya Branch Office, Samarinda, Banjarmasin, Tg. Priok, Sorong, Semarang, Cirebon, Pekanbaru, Batam, Belawan, Banten, Ambon, Makassar, Bitung, Pontianak and Palembang
- Internal Audit LOG ISO-9001: 2008 Commercial 2016 consists of: Head Office 4 (four) work units namely; Strategic Management Division, General Division, Business Control Division, Marketing & Development Division;
- Commercial Branch Office consists of: Surabaya, Banjarmasin, Sorong, Semarang, Cirebon, Pekanbaru, Belawan, Banten, SBU Indistri, Ambon, Balikpapan, SBU Energy, Makassar, Bitung, SBU Marine and Pontianak.

Manajemen Resiko

Risk Management



Sudirman

Divisi Manajemen Risiko & Tata Kelola
Risk Management & Governance Division

Riwayat Jabatan:

Kepala Divisi Manajemen Risiko & Tata Kelola
(2014-sekarang),

Pendidikan:

S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah
Jakarta

Pengalaman Kerja:

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) 1984 -
sekarang.

Dasar Hukum: Surat Keputusan Direksi No. DU.059/KP.503/KI-14 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai/Pejabat di lingkungan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dan Surat Keputusan Direksi No. DU.131/LT.101/KI-15 tanggal 03 Agustus 2015 Jo. Surat Keputusan Direksi No. DU. 058/LT.101/KI-14 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Gambaran umum

BKI menerapkan Manajemen Risiko Korporasi (ERM) untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dalam menghadapi risiko. Pedoman penerapan Manajemen Risiko di lingkungan BKI disusun dengan menggunakan acuan utama ISO 31000 : 2009 (International Standard of Risk Management). ERM mencakup filosofi manajemen risiko, kriteria risiko, serta serangkaian kegiatan terkoordinasi mulai dari identifikasi risiko sampai dengan pemantauan penanganan risiko, dan juga infrastruktur manajemen risiko

Position History:

Head of Risk Management & Governance Division (2014-present),

Education:

Bachelor in Accounting, Muhammadiyah University, Jakarta

Work Experience:

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) 1984 - present.

Legal Basis:

BOD Decree No. DU.059 / KP.503 / KI-14 dated 30 January 2014 on Termination and Appointment of Officials within PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) and BOD Decree No. DU.131 / LT.101 / KI-15 dated 03 August 2015 Jo. BOD Decree No. DU. 058 / LT.101 / KI-14 dated 30 January 2014 on the Improvement of Organization Structure of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

General description

BKI implements Corporate Risk Management (ERM) to direct and control the company when facing risks. The Risk Management implementation guidelines in BKI's prepared using ISO 31000: 2009 as main refference (International Standard of Risk Management). ERM includes the philosophy of risk management, risk criteria and series coordinated activities ranging from risk identification to risk management monitoring, as well risk management infrastructure.



Sistem manajemen risiko BKI mengatur hubungan antara pemilik risiko kunci, Divisi Manajemen Risiko, serta atasan pemilik risiko kunci. Atasan ini menetapkan tujuan manajemen risiko yang terkait RJPP, RKAP, tujuan proses bisnis yang menggunakan sumber daya perusahaan serta tujuan rencana kerja pelaksanaan / aktivitas proyek.

Prosedur Identifikasi Risiko

Pemilik risiko dan divisi manajemen risiko melakukan proses identifikasi risiko yang mencakup: peristiwa risiko, penyebab risiko, sumber risiko, serta peristiwa risiko baru.

BKI's risk management system regulates the relations between key risk owners, the Risk Management Division, and the superiors of the key risk owners. The superiors set the aim of risk management in relation with the Longterm Corporate Development Plan, the Annual Work Plan and Budget, business processes objectives that use company's resources as well action/project working plan objectives.

Risk Identification Procedure

The risk owner and the risk management division conduct the risk identification process that includes: risk event, risk cause, risk sources, and new risk event.

Risiko-risiko tersebut terdiri atas adalah:

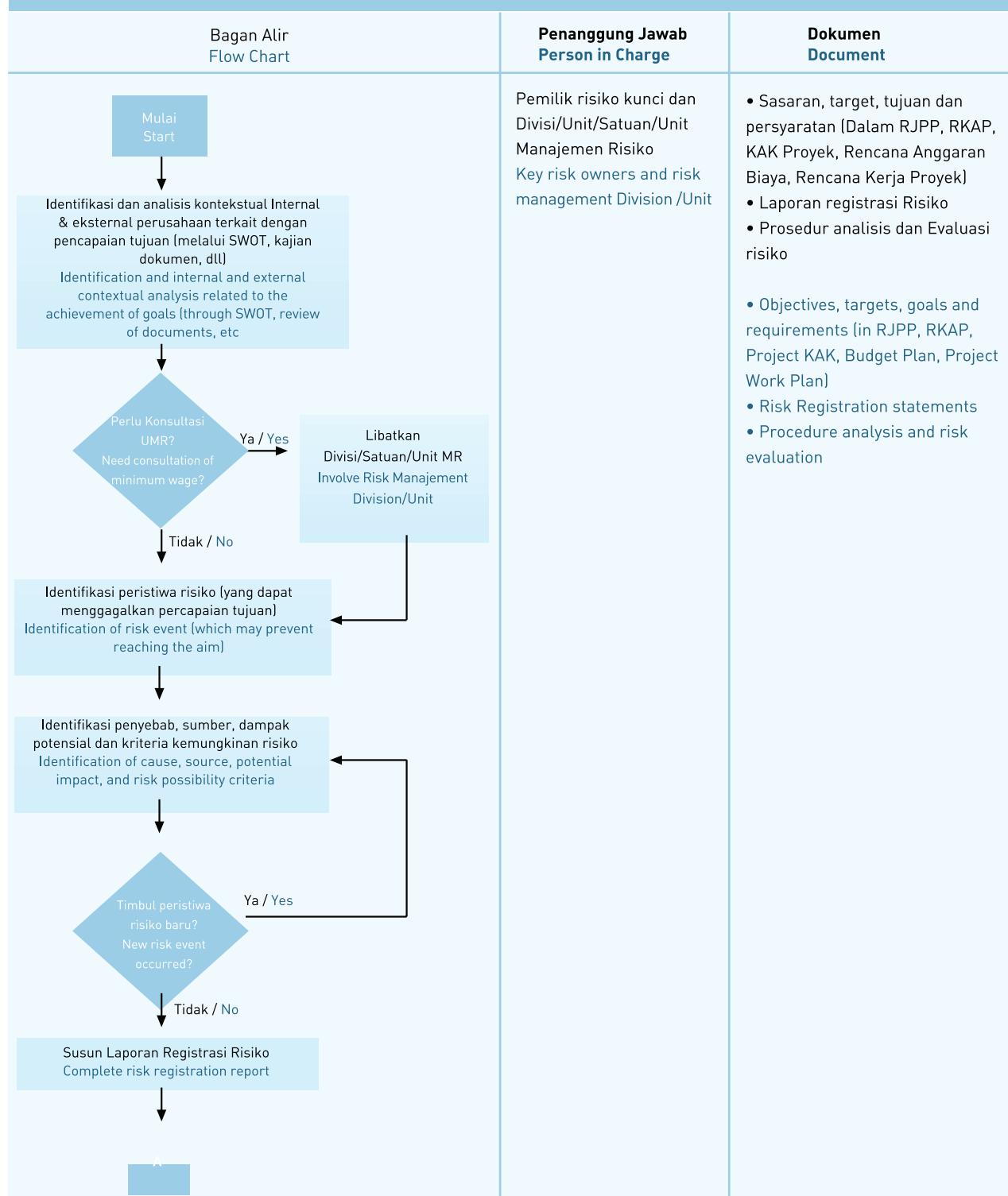
The risks comprise:

Jenis Risiko Type of Risk	Referensi Reference
<p>Risiko Strategis / Strategic Risk yaitu risiko-risiko yang / namely risks that:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akan mempengaruhi tercapainya tujuan bisnis perusahaan / may affect the achievement of business objectives; • Mengancam reputasi perusahaan dari aktifitasnya / through the company's activities may threaten the company's reputation; • Timbul karena pelanggaran terhadap GCG, hukum serta peraturan / occurs due to violations of GCG principles, rules and regulations 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN/APBD / State/Regional Annual Work Plan and Budget • RJPP / Long-term Plan of the Company • RKAP / Annual Work Plan and Budget of the Company • Dokumen Tender / Bidding Documents • Kontrak Kerja / Work Contracts • Peraturan dan Perundangundangan yang terkait, misalnya UU BUMN, Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, UU Keuangan dan Negara dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi / Prevailing rules and regulations such as for instance the SOE Law, the Presidential Decree on Procurement of Goods/Services by the Government, the Public Finance Law, and the Anti Corruption Law
<p>Risiko Operasional / Operational Risks yaitu risiko-risiko yang muncul karena / namely risks that occur due to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegagalan sistem / system failure; • Lemahnya quality control / weak quality control; • Panjangnya birokrasi / red-tape bureaucracy; • Human error dalam proses produksi / human error in the production process; 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Tender / Bidding Documents • Kontrak Kerja / Work Contracts • Sistem dan Prosedur serta bagan alir / System and Procedure and Flow Chart
<p>Risiko Finansial / Financial Risks yaitu risiko-risiko yang mempengaruhi kemampuan perusahaan menghasilkan profit seperti / namely risks that influence the company's profitability, such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya pengendalian biaya/ weak cost control; • Kurangnya modal / lack of capital; • Perubahan suku bunga / changes in interest rates; • Fluktuasi kurs valuta asing, termasuk didalamnya risiko akibat kredit dan likuiditas yang terkait dengan pelaksanaan proyek/kegiatan tersebut / currency exchange rate fluctuation, including risks that occur in relation to lending and liquidity linked to the implementation of projects/activities. 	<ul style="list-style-type: none"> • RKAP / Annual Work Plan and Budget of the company • Laporan Keuangan / Financial Report • Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Budget Plan (RAB)

Setiap potensi risiko yang timbul akan diidentifikasi pula dampak dan mitigasinya oleh Pemilik Risiko Kunci dan Divisi/Satuan/Divisi Manajemen Risiko. Seluruh potensi risiko yang teridentifikasi dimasukkan ke dalam formulir Laporan Registrasi Risiko dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Any potential risks that will arise will also be identified on its impact and mitigation by Key Risk Owners and Division/Unit/Risk Management Division. All identified risk potentials are listed in the Risk Registration Report that is signed by an authorized officials.

Bagan Alir Prosedur Identifikasi Risiko
Risk Identification Flow Chart



SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Merujuk kepada Keputusan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN, maka sebagai bentuk komitmen manajemen dalam implementasi GCG tersebut, maka BKI melaksanakan penerapan manajemen Risiko melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) No. DU.291/KP.008/KI-14 tanggal 04 Nopember 2014 Tentang Kebijakan Umum dan Penerapan Sistim Manajemen Risiko Korporasi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Dengan melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko diharapkan dapat mendukung perubahan paradigma pengelolaan perusahaan dari krisis management, yang bersifat reaktif-korektif terhadap suatu permasalahan yang timbul.

Kriteria risiko

Kriteria risiko terdiri dari kriteria dampak, kriteria kemungkinan, dan tingkat risiko yang digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan tiap risiko. Kriteria risiko digali melalui wawancara dengan unit kerja Perseroan. Diskusi ini menghasilkan kesimpulan bahwa unit kerja dapat dan biasa melakukan pembagian kriteria risiko menjadi 5 (lima), yaitu sangat kecil, kecil, sedang, besar dan sangat besar.

A. Kriteria Dampak

Kriteria dampak (consequence) adalah kriteria akibat dari suatu peristiwa yang memengaruhi pencapaian sasaran. Berdasarkan wawancara dengan unit kerja mengenai dampak suatu peristiwa terhadap tiap KPI menunjukkan adanya tujuh kategori utama dampak, yaitu terhadap pendapatan, reputasi, keluhan pelanggan, keselamatan kerja (K3), lingkungan, karyawan, dan proyek. Berikut penjabaran parameter yang digunakan untuk mengukur tiap kategori dampak.

RISK MANAGEMENT SYSTEM

Referring to the Minister of SOEs Decree No. PER-01/MBU/ 011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs, as a form of management commitment in implementing GCG principles, BKI has implemented Risk Management policy through President Director Decree No. DU.291/ KP.008/KI-14 dated 4 November 2014 on General Policy and Application of Corporate Risk Management System of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

The implementation of Risk Management policy is expected to support company's management paradigm change to crisis management which is reactive-corrective to a problem which arise.

Risk criteria

Risk criteria consist of the consequence criteria, likelihood criteria and risk level, used to determine the importance level of each risk. Risk criteria are explored through interviews with the Company's work units. This discussion leads to the conclusion that the work unit is able and usually divides the risk criteria into five levels, namely very small, small, medium, big and biggest.

A. Consequence Criterion

The consequence criterion is the resultant of an event affecting the achievement of a goal. Based on interviews with the working unit on the impact of an event on each KPI, it indicates existence of seven main consequences categories, namely revenue, reputation, customer complaints, working safety, environment, employees and projects. The following parameters are used to measure each consequence category.

Berikut adalah Tabel Matriks Kriteria Dampak :

The following is Consequence Criterion Matrix Table:

	Kategori Category	Sangat Kecil Very Low	Kecil Low	Sedang Medium	Besar High	Sangat Besar Very High
1	Pendapatan Income	Kehilangan pendapatan s/d 5M <i>Loss of income up to 5M</i>	Kehilangan pendapatan 5 s/d 25M <i>Loss of income 5 up to 25M</i>	Kehilangan pendapatan 25 s/d 50M <i>Loss of income 25 up to 50M</i>	Kehilangan pendapatan 50 s/d 100M <i>Loss of income 50 up to 100M</i>	Kehilangan pendapatan > 100M <i>Loss of income> 100M</i>
2	Reputasi Reputation	Publisitas jelek di internal perusahaan <i>Poor publicity in the company's internal</i>	Publisitas jelek di masyarakat dan media lokal <i>Bad publicity in local communities and media</i>	Publisitas jelek di media propinsi <i>Bad publicity in the provincial media</i>	Publisitas jelek di 1-2 media nasional <i>Bad publicity in 1-2 national media</i>	Publisitas jelek di lebih 5 media nasional <i>Poor publicity in over 5 national media</i>
3	Keluhan Pelanggan Customer complain	Keluhan yang disampaikan secara lisan <i>Complaint delivered orally</i>	Keluhan tertulis 1-4 kasus dalam setahun <i>Wrong complaints 1-4 cases per year</i>	Keluhan tertulis 5-10 kasus dalam setahun <i>Written complaints of 5-10 cases per year</i>	Keluhan tertulis 10-15 kasus dalam setahun <i>Written complaints of 10-15 cases per year</i>	Keluhan tertulis lebih dari 15 kasus dalam setahun <i>Written complaints of more than 15 cases in a year</i>
4	Keselamatan kerja Work safety	Cedera ringan Minor injury	Sakit biasa The usual pain	Rawat inap di RS Hospitalized at the hospital	Cacat tetap Fixed defects	Kematian Dead
5	Lingkungan Environment	Pencemaran lingkungan kerja Pollution of work environment	Pencemaran lingkungan perusahaan Company environmental pollution	Pencemaran ke masyarakat Pollution to the community	Pencemaran ke masyarakat dan menimbulkan protes Pollution to society and protests	Pencemaran lingkungan yang menimbulkan tuntutan hukum Environmental pollution that raises lawsuits
6	Iklim Kerja Working Climate	Turn over karyawan antara 1 s/d 5 orang <i>Turn over employees between 1 up to 5 people</i>	Turn over karyawan antara 6 s/d 10 orang <i>Turn over employees between 6 s / d 10 people</i>	Turn over karyawan antara 10 s/d 15 orang <i>Turn over employees between 10 s / d 15 people</i>	Beberapa karyawan berpengalaman keluar <i>Some experienced employees come out</i>	Beberapa karyawan berprestasi & berpengalaman keluar <i>Some of the outstanding & experienced employees come out</i>
7	Biaya Proyek Project Cost	Kenaikan biaya insignifikan Insignificant cost increase	Kenaikan biaya <5% <i>Increase in cost <5%</i>	Kenaikan biaya 5-10% <i>5-10% cost increase</i>	Kenaikan biaya 10-20% <i>Increase in cost 10-20%</i>	Kenaikan biaya > 20% <i>Increase in cost> 20%</i>
8	Mutu Quality	Kualitas degradasi hampir tidak terlihat <i>The quality of degradation is hardly noticeable</i>	Sangat menuntut aplikasi yang terpengaruh <i>Very demanding of affected applications</i>	Pengurangan kualitas memerlukan persetujuan klien <i>Quality reduction requires client approval</i>	Pengurangan kualitas tidak dapat diterima oleh klien <i>Reduced quality can not be accepted by the client</i>	Proyek akhir secara efektif tidak dapat digunakan <i>The final project is effectively unusable</i>
9	Waktu Time	Selipan (tambahan) jadwal insignifikan Insert (additional) insignificant schedule	Jadwal selip <5% <i>Schedule skip <5%</i>	Keseluruhan proyek selip 5-10% <i>Overall project skid 5-10%</i>	Keseluruhan proyek selip 10-20% <i>Overall project skid 10-20%</i>	Keseluruhan proyek selip > 20% <i>Overall skid project> 20%</i>

B. Kriteria Kemungkinan

Kriteria kemungkinan (likelihood) adalah kriteria kesempatan atau kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Berdasarkan wawancara dengan unit kerja menunjukkan bahwa pembagian kriteria kemungkinan dapat dilakukan dengan skala kualitatif persentase kemungkinan sangat kecil, kecil, sedang, besar dan sangat besar dengan rumusan sebagai berikut :

Kriteria Kuantitatif (Probabilitas) Quantitative Criteria (Probability)	Kriteria Seni Kuantitatif (Frekuensi/Tahun) Quantitative Art Criteria (Frequency / Year)	Kriteria Kualitas (Keterjadian) Quality Criteria (Occupation)	Sebutan Mentions	Nilai Value
0.10	1-5 Kejadian 1-5 Event	Jarang / Hampir tidak terjadi Rarely / Hardly happens	Sangat Kecil Very small	1
0.30	6-10 Kejadian 6-10 Event	Kemungkinan kecil Possibly small	Kecil Small	2
0.50	11-20 Kejadian 11-20 Event	Kemungkinan sedang Medium possibility	Sedang Medium	3
0.70	21-50 Kejadian 21-50 Event	Kemungkinan besar Great possibilities	Besar Big	4
0.90	Lebih dari 50 x terjadi More than 50x happened	Hampir pasti terjadi Almost certainly happened	Sangat Besar Very Big	5

C. Tingkat Risiko

Tingkat risiko adalah tingkat kepentingan risiko yang ditentukan berdasarkan nilai risiko. Nilai risiko sendiri adalah nilai penggabungan antara kriteria dampak dan kriteria kemungkinan suatu risiko. Penggabungan dilakukan dengan mengkuantitatifkan kriteria sangat kecil, kecil, sedang, besar dan sangat besar masing-masing menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5 lalu dilanjutkan dengan mengalikan nilai kuantitatif tersebut. Sejalan dengan tingkat dampak dan kemungkinan, tingkat risiko dibagi menjadi 4, yaitu rendah, sedang, tinggi dan ekstrim berdasarkan nilai risikonya

Tingkat risiko menentukan juga disposisi akuntabilitas pengelolaan risiko. Semakin tinggi tingkat risiko, semakin tinggi juga tingkat disposisi akuntabilitas pengelolaannya. Tabel berikut memberikan pembagian tingkat risiko Perseroan.

Tingkat/Level Risiko Level / Risk Level	Nilai Risiko/ Skor (X) Risk Value/ Score (X)	Tindakan yang diambil Actions taken
Rendah / Low	$x \leq 4$	Perlu Aturan/Prosedur/Rambu/ Need Rules / Procedures / Signs
Sedang / Medium	$4 < x < 8$	Perlu Tindakan Langsung / Need Direct Action
Tinggi / High	$8 < x < 15$	Perlu Perencanaan Pengendalian / Need Planning Control
Ekstrim / Extreme	$15 < x < 25$	Perlu Perhatian Manajemen Atasan / Need Attention Manajemen Bosses

B. Likelihood Criterion

Likelihood criterion is the chance criterion or the possibility of an event occurs. Based on interviews with the work unit shows that the distribution of possible criteria can be described with a qualitative possibilities percentage scale very small, small, medium, big and biggest with the following formulation:

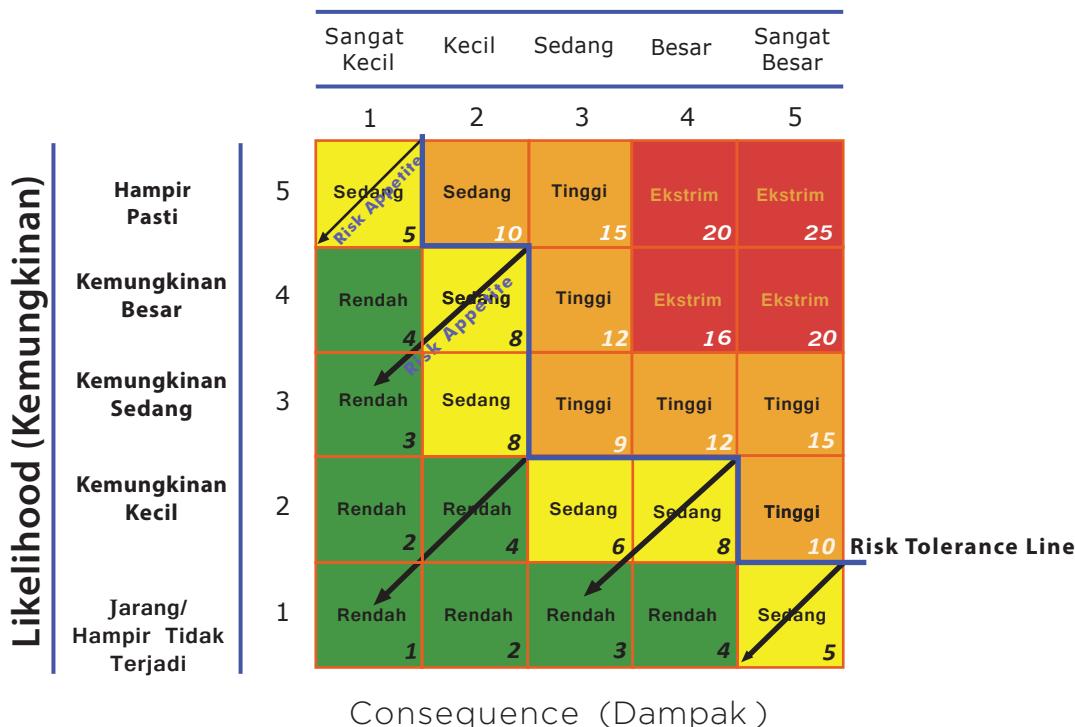
C. Risk Level

The Risk Level is the level of risk importance determined by the risk value. The risk value is the combined value of consequence criteria and likelihood criteria of a risk. The combination value is got by quantitating very small, small, medium, big and biggest scale respectively to 1, 2, 3, 4 and 5 and then multiplying by the quantitative value. In line with the consequence and likelihood level number, the risk level is divided into 4, i.e. low, medium, high and extreme based on the risk value.

The risk level also determines the disposition of risk management accountability. The higher the risk level, the higher level of management accountability disposition. The following table provides the risk sharing of the Company.

D. Toleransi Risiko dan Selera Risiko

Secara umum Toleransi Risiko dan Selera Risiko BKI berada dalam batasan cakupan risiko rendah dan sedang seperti dalam beta risiko yang ditunjukkan gambar dibawah ini :



Kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan risiko

1. Risiko yang berada di atas garis risk tolerance dan berada di level risiko mulai dari 16 sampai dengan 25 menjadi perhatian penuh Direksi dalam pengelolaannya.
2. Level risiko di atas garis risk tolerance dan berada di level risiko mulai dari 10 sampai dengan 15 menjadi perhatian penuh Kepala Unit Kerja (Divisi/SBU/Cabang)
3. Risiko di bawah garis risk tolerance sepenuhnya dalam tanggung jawab pengelolaan ditingkat operasional.

Authority and responsibility in risk management

1. The management of risks that are above the risk tolerance line and are at the risk level of 16 to 25 become the BOD full responsibility.
2. The management of risk levels above the risk tolerance line and are at risk level of 10 to 15 become the Head of Work Unit (Division/SBU/Branch) responsibility.
3. The management of risks below the risk tolerance line are entirely become the operational level responsibility.

E. Kategori Risiko

Risiko yang dihadapi perseroan dikelompokkan menjadi empat kategori besar sebagai berikut:

1. Risiko Strategis

Risiko Strategis merupakan peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi makro, hukum, regulasi, sosial/masyarakat, politik, dan/faktor lain yang mempengaruhi keberlangsungan perusahaan.

2. Risiko Operasional

Risiko Operasional merupakan peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh tidak cukupnya dan/tidak berfungsinya proses internal/prosedural, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan

3. Risiko Keuangan

Risiko Keuangan/Finansial merupakan peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh fluktuasi variable-variable pasar serta perubahan kurs valas, tingkat suku bunga, lemahnya pengendalian biaya, dan gagal bayar dari para pemakai jasa.

4. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah Risiko yang timbul karena ketidak mampuan manajemen perusahaan dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau kebangkrutan bagi perusahaan

Penilaian risiko

Proses asesmen risiko merupakan proses untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang mungkin terjadi, kemudian masing-masing risiko akan diberi atribut sesuai dengan analisis yang dilakukan terhadap setiap risiko itu dengan menggunakan kriteria risiko yang ditentukan pada tahap sebelumnya. Setelah itu akan dilakukan evaluasi untuk menentukan tingkat risiko, sehingga dapat ditentukan tingkat prioritas risiko yang akan memerlukan perlakuan risiko ditahap berikutnya. Dengan demikian maka dalam tahap ini akan dilakukan pembahasan mengenai Identifikasi risiko, Analisis risiko, dan Evaluasi risiko.

E. Risk Categories

Risks facing by the Company are grouped into four major categories as follow:

1. Strategic Risk

Strategic Risk are occurrences caused by external factor like macro economic condition change, laws, regulations, social/societal, political and other factors that influenced Company's sustainability.

2. Operational Risk

Operational Risks are occurrences caused by insufficiency and/or internal/procedural process malfunctioning, human error, system failure or any external problems affecting the company's operations.

3. Financial Risk

Financial Risk are occurrences caused by fluctuations in market variables and changes in foreign exchange rates, interest rates, weakness of cost control, and defaults customers

4. Legal Risk

Legal Risk is the risk incurred by company's management incompetence in managing legal matters that may lead to company loss or bankruptcy.

Risk Assessment

The Risk Assessment is a process to identify what risks are likely to occur, then each risk will be given attribute in accordance with the analysis performed against each of those risks by using the risk criteria specified in the previous stage. Afterwards it will be evaluated to determine the risk level, so then can be determined the risk priority level that will require risk treatment in next step. Thus, risk identification, analysis and evaluation will be conducted in this stage.

Identifikasi Risiko

Proses identifikasi risiko mengacu pada sasaran perseroan baik di tingkat korporasi maupun di tingkat divisi yang sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan maupun Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP). Alat identifikasi yang dapat digunakan antara lain Brainstorming dan Risk Breakdown Structure (RBS). Dokumen utama yang dihasilkan dalam proses ini adalah Daftar Risiko.

Analisis Risiko

Tujuan analisis risiko adalah melakukan analisis dampak dan kemungkinan semua risiko yang dapat menghambat tercapainya sasaran organisasi dan menyediakan data untuk membantu langkah evaluasi dan mitigasi risiko. Analisis risiko mencakup pertimbangan dan mengkombinasikan estimasi terhadap consequence dan likelihood didalam konteks untuk mengambil tindakan pengendalian.

Evaluasi risiko

Evaluasi risiko merupakan perbandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Dalam evaluasi risiko, level risiko dan kriteria risiko harus diperbandingkan dengan menggunakan basis yang sama. Hasil dari evaluasi risiko adalah daftar prioritas risiko untuk tindakan lebih lanjut. Risiko-risiko yang rendah atau dapat diterima harus dipantau dan ditelaah secara periodik untuk menjamin bahwa risiko-risiko tersebut tetap dapat diterima.

Risiko dikatakan memiliki tingkat yang dapat diterima bila:

- a. Level risiko rendah sehingga tidak perlu penanganan khusus;
- b. Tidak tersedia penanganan untuk risiko;
- c. Biaya penanganan termasuk biaya asuransi lebih tinggi dari manfaat yang diperoleh bila risiko tersebut diterima;
- d. Peluang dari adanya risiko tersebut lebih besar dari ancamannya.

Risk Identification

The risk identification process refers to corporate objectives at both corporate and divisional levels in accordance with the Company's Annual Work Plan (RKAP) and the Company's Long Term Plan (RJPP). Identification tools that can be used include Brainstorming and Risk Breakdown Structure (RBS). Main document generated in this process is the Risk Register.

Risk Analysis

The purpose of risk analysis is to analyze the consequences and likelihoods of all risks that may hamper organizational goals achievements as well providing data in supporting the evaluation and risk mitigation measures. Risk analysis includes consideration and combining estimates consequence and likelihood in the context of taking control measures.

Risk Evaluation

Risk evaluation is a comparison between the risk level found during the analysis process with predefined risk criteria. In risk evaluation, risk levels and risk criteria must be compared using the same basis. The outcomes of a risk evaluation is a risk priorities list for further action. Low or acceptable risks should be periodically monitored and reviewed to ensure that these risks remain acceptable.

Risk is said to have an acceptable level when:

- a. The risk level is low so there is no need for special measures;
- b. There is no available handling measures for the risk;
- c. Handling costs including insurance fees are higher than benefits earned if the risk is received;
- d. The risk opportunities are bigger than its threats.

Perlakuan risiko (Mitigasi)

Risiko-risiko yang telah tersaring pada langkah evaluasi, selanjutnya dibuat rencana pengendalian lebih lanjut, langkah ini disebut mitigasi risiko. Langkah mitigasi risiko meliputi pengidentifikasiannya opsi untuk menangani risiko, menaksir opsi tersebut, menyiapkan rencana perlakuan risiko dan mengimplementasikan rencana perlakuan risiko.

Mitigasi risiko dibedakan menjadi dua jenis yaitu pengendalian dan penanganan :

1. Pengendalian

Upaya-upaya untuk merubah risiko. Pengendalian biasanya merupakan upaya-upaya yang telah dimiliki dan bersifat rutin untuk mengantisipasi terjadinya risiko. Contoh pengendalian dapat dalam bentuk prosedur, WI, dsb.

2. Penanganan

Upaya-upaya yang akan dilakukan sebagai langkah baru untuk memperlakukan risiko karena upaya-upaya yang sudah ada belum memadai.

1. Menghindari risiko (risk avoidance), berarti tidak melaksanakan atau meneruskan kegiatan yang menimbulkan risiko tersebut.

2. Mengurangi risiko (risk reduction), yaitu perlakuan risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya atau mengurangi paparan dampaknya, atau mengurangi keduanya.

3. Transfer risiko (risk sharing), yaitu suatu tindakan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko melalui antara lain: asuransi, outsourcing, subcontracting, tindak lindung, transaksi nilai mata uang

4. asing, dll.

Menerima risiko (risk acceptance), yaitu tidak melakukan perlakuan apapun terhadap risiko tersebut.

Risk Mitigation

The risks that have been filtered in the evaluation step, then made further control plan, this step is called Risk Mitigation. Risk mitigation measures include identifying options for addressing risks, estimating those options, preparing risk treatment plans and implementing risk treatment plans.

Risk Mitigation can be divided into two types, namely controlling measures and handling measures:

1. Controlling

Controlling are measures to change the risk. Controlling are usually efforts that has been owned and is routine to anticipate the occurrence of risk. Examples of controlling may be in form of procedures, working instructions, etc.

2. Handling

Handling are measures that will be carried out as new efforts in treating risks as the existing ways were not sufficient enough.

1. Risk avoidance, measures by means not conducting or continuing activities that pose such risks.

2. Risk reduction, measures to reduce risk occurrence possibility or reducing its effect exposure or reducing both.

3. Risk sharing, measures to reduce risk possibilities through interalia, insurance, outsourcing, subcontracting, protection, foreign currency transactions, etc.

4. Risk acceptance, measures by not taking any efforts against such risks.

Pemantauan dan peninjauan

Secara umum, terdapat dua macam pelaksanaan Pemantauan, yaitu pemantauan berkelanjutan dan pemantauan terpisah. Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan dan atasan pekerja. Sedangkan pemantauan terpisah adalah pemantauan yang dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu oleh internal ataupun eksternal auditor dan hasilnya dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Pada dasarnya yang perlu mendapatkan perhatian dan harus selalu dimonitor dan direview adalah:

1. Pemantauan terhadap perubahan
2. Pemantauan kinerja manajemen risiko
3. Kemungkinan timbulnya risiko-risiko baru akibat dilaksanakannya suatu tindakan perlakuan risiko yang baru. Ini karena suatu risiko dapat menimbulkan risiko yang lainnya (chain reaction).

Pelaksanaan Enterprise Risk Management (ERM)

Adapun model pengukuran tingkat maturitas penerapan manajemen risiko berbasis ISO 31000:2009 di BKI menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Tingkat kesesuaian dengan persyaratan ISO 31000:2009.

Terdapat total 254 item persyaratan penerapan manajemen risiko didalam dokumen ISO 31000:2009 Risk Management Principles & Guideline dan ISO 31004:2012 Risk Management - Guidance for the Implementation of ISO 31000 yang terdiri atas 45 item persyaratan terkait Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko, 108 item persyaratan terkait Kerangka Kerja Manajemen Risiko, dan 101 item persyaratan terkait Proses Manajemen Risiko.

Monitoring and Review

In general, there are two kinds of Monitoring implementation: on-going monitoring and separate monitoring. On-going monitoring is conducted by the job performer (self-review or continuous monitoring) and the employee's supervisor (line management monitoring). While separate monitoring is conducted by a third party, like internal or external auditor (third party audit) and the result is reported to the BOD and BOC.

Basically what needed to be taken into consideration and should always be monitored and reviewed are:

1. Monitoring of changes
2. Monitoring of risk management performance
3. The possibility of new risks arising from the implementation of a newly risk treatment action. This is because a risk may trigger another risks (chain reaction).

The Enterprise Risk Management (ERM) Implementation

The Maturity Measurement Model of risk management application based on ISO 31000: 2009 in BKI uses the following methodology:

1. Conformity level to ISO 31000: 2009 requirements.

There are total of 254 items of risk management implementation requirements in ISO 31000:2009 Risk Management Guidance and Guideline as well ISO 31004: 2012 Risk Management Guidance for the Implementation of ISO 31000 which consisting of 45 items related to Risk Management Principles, 108 items related requirements Risk Management Framework, and 101 items related requirements of Risk Management Process.

2. Mengacu pada karakteristik Standar ISO

Penilaian tingkat maturitas penerapan manajemen risiko berbasis ISO 31000: 2009 Risk Management Principles & Guideline memperhatikan karakteristik generik standar yang dikeluarkan ISO pada umumnya, yakni mekanisme (1) Plan - Do - Check - Action (PDCA), (2) pemenuhan item-item penerapan yang dipersyaratkan oleh standar, (3) partisipasi dan kontribusi pihak-pihak di lingkungan organisasi, (4) pelaksanaan praktik yang tepat proses dan kualitas, (5) kejelasan pengaturan praktik secara tertulis dalam dokumentasi organisasi

3. Skor Model Terbobot

Penilaian tingkat maturitas penerapan manajemen risiko berbasis ISO 31000: 2009 Risk Management Principles & Guideline menggunakan suatu model skoring terbobot yang mempertimbangkan beberapa faktor yaitu:

- (1) Validitas informasi yang diperoleh mengenai situasi/kondisi terkini penerapan manajemen risiko (Bobot Kuesioner <Bobot Wawancara < Bobot Observasi < Bobot kajian Dokumen),
- (2) Kesesuaian situasi/kondisi terkini penerapan manajemen risiko dengan item persyaratan ISO 31000:2009 dengan tetap memperhatikan karakteristik generik standar ISO,
- (3) Penilaian situasi/kondisi terkini penerapan manajemen risiko berdasarkan urutan logis (logical sequence) penerapan manajemen risiko berdasarkan ISO 31000:2009 dan ISO 31004:2012 (kombinasi antara Bobot Prinsip < Bobot Kerangka Kerja < Bobot Proses dengan Bobot aktivitas penerapan Most Basic < Bobot Basic < Bobot Intermediate < Bobot Advance < Bobot Most Advance).

2. Refers to generic characteristics of ISO standard.

Assessment on risk management implementation maturity level based on ISO 31000: 2009 Risk Management Principles & Guideline concerned to generic characteristics standard issued by ISO in general, i.e. (1) Plan - Do - Check - Action (PDCA) cycles, (2) Fulfillment of applications items required by the standard, (3) Participation and contribution of the parties within the organization, (4) Implementation of appropriate process practices and quality, (5) Clarity of written practice arrangements in the organization's documentation

3. Weighted scoring model.

Implementation Maturity Level Assessment towards ISO 31000: 2009 Risk Management Principles and Guideline of Risk-based Management uses a weighted scoring models that consider several factors are:

- (1) Validity of information obtained on the current situation/condition on the implementation of risk management (Weight of Questionnaire <Interview Weight <Weight Observation <Weight Document review);
- (2) Conformity of situation/condition on current implementation of risk management with ISO 31000: 2009 requirements items with keep concern to generic characteristics of ISO standards;
- (3) Assessing the current situation/conditions of application risk management based on logical sequence implementation of risk management based on ISO 31000: 2009 and ISO 31004: 2012 (Combination of Weight of Principle <Weight of Framework Work <Weight Process with Activity Weight Application of Most Basic <Weight Basic <Weight Intermediate <Weight Advance <Weight Most Advance).

Hasil Penilaian Kematangan Manajemen Risiko

Pelaksanaan maturity assesment atas penerapan manajemen risiko berbasis ISO 31000: 2009 di BKI menunjukan hasil bahwa penerapan berada pada skor 2,55 (dua koma lima lima) dengan persentase tingkat pencapaian kesesuaian dengan ISO 31000: 2009 sebesar 42% (empat puluh dua persen). Kategorisasi tingkat maturitas penerapan manajemen risiko di BKI adalah tahap "Terstandardisasi".

Risk Management Maturity Assessment Result

The implementation of Maturity Assessment relating to the implementation of ISO 31000: 2009 based Risk Management in BKI shows the application result score of 2.55, with ISO 31000: 2009 percentage of conformity achievement level 42%. The category of Maturity Level on risk management implementation in BKI is in "Standardized" stage.

No.	Aspek Indikator Pengujian / Aspects of Testing Indicators	Skor/ Score	Bobot/ Weight	Capaian Tahun 2016/ Access of the year 2016	
				Skor Tertimbang/ Weighted score	%Capaian/ %Access
I	Mandat dan komitmen terhadap penerapan Manajemen Risiko Korporat secara berkelanjutan / <i>Mandate and commitment to the implementation of Corporate Risk Management on an ongoing basis</i>	2.75	12.26	0.34	45%
II	Desain kerangka kerja Manajemen Risiko / <i>Design of Risk Management Framework</i>	2.64	18.22	0.48	42%
III	Implementasi Manajemen Risiko / <i>Implementation of Risk Management</i>	2.45	39.86	0.98	40%
IV	Pemantauan dan peninjauan kerangka kerja / <i>Monitoring and review of the framework</i>	2.35	14.03	0.33	40%
V	Perbaikan berkesinambungan terhadap kerangka kerja / <i>Continuous improvement of the framework</i>	2.45	2.3	0.06	42%
VI	Prinsip Manajemen Risiko / <i>Risk Management Principles</i>	2.78	13.33	0.37	40%
Skor Keseluruhan / Total Score		100		2.55	42%

Perkara Penting

Pada tahun 2015, baik perusahaan, anggota Dewan Komisaris, maupun anggota Direksi tidak terlibat perkara penting yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan, kinerja keuangan, dan pelaporan keuangan

Material Legal Cases

During 2016, neither the Company nor the BOD or BOC members were involved in substantial case that may influence Company's reputation, financial performance and reporting.

Sanksi Administratif

BKI tidak sedang atau pernah mendapatkan sanksi administratif dari pihak berwenang yang terkait.

Administrative Sanctions

BKI is not being or has ever got administrative sanctions from the related authorities

Kode Etik dan Budaya Perusahaan

BKI memiliki sistem nilai yang menentukan etika kerja dan etika bisnis. Etika kerja menata nilai perusahaan sehingga menjadi pedoman perilaku. Sementara itu, etika bisnis menata nilai mengenai: integritas dalam berusaha; data perusahaan dan kerahasiaan informasi; pernyataan palsu, klaim palsu, dan konspirasi; penyelewengan dan penyimpangan; benturan kepentingan dalam hasil survei; benturan kepentingan dalam pengadaan; serta benturan kepentingan dalam aktivitas sampingan.

Code of Ethics and Corporate Culture

BKI has a value system that determined its working and business ethics. The working ethics arranged corporate values as code of conducts. Meanwhile, the business ethics arranged values about: business integrity, corporate data and information confidentiality, false statements and claims, consipiration, fraud and deviation, conflicts of interests in survey results, procurement and in side activities.

Nilai Perusahaan

1. Integritas: karyawan mengembangkan kepribadian etis dan selalu memperjuangkan kebenaran melalui kejujuran, kedisiplinan, keteladanan, dan dedikasi yang tinggi, dengan menjunjung tinggi nama baik perusahaan;
2. Profesionalisme: setiap karyawan memiliki komitmen tinggi untuk mencapai hasil terbaik dan melampaui sasaran yang ditetapkan melalui inovasi dan perbaikan berkelanjutan;
3. Kerjasama: karyawan berusaha untuk menyatukan kemampuan dan menggali potensi setiap orang melalui sinergi dan kerja tim untuk mencapai tujuan bersama melalui sikap dan perilaku empirik, proaktif, percaya, dan terbuka;
4. Pelayanan Prima: karyawan bersikap dan berperilaku ramah, menebar salam, santun, ikhlas, proaktif dalam melayani, demi kepuasan pelanggan;
5. Sadar Lingkungan: karyawan berperan aktif untuk melestarikan lingkungan alam, lingkungan kerja, dan lingkungan usaha, menjaga hubungan baik dengan mitra kerja dan masyarakat, menciptakan suasana kerja yang sehat dan menyenangkan, serta mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja;
6. Kepuasan Pelanggan: karyawan memberikan kepuasan kepada pemakai jasa melalui produk dan pelayanan prima yang bermutu, dilandasi etos kerja bertindak segera, responsif, disiplin, kerja keras, kreatif, bersih, dan baik sangka.

Integritas dalam Berusaha

BKI mendorong integritas yang baik dalam kegiatan usaha melalui penerapan GCG Code; audit dan pengenaan sanksi terkait tindakan ilegal, tidak wajar, dan melanggar norma. Secara khusus perusahaan melarang anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan terlibat transaksi yang bertentangan dengan hukum dan prinsip GCG.

Corporate Value

1. Integrity: employees develop ethical personality and defending the truth through honesty, discipline, exemplary, high dedication as well upholding Company's good reputation;
2. Professionalism: every employee have high commitment to achieve best result and surpass given targets through innovation and continuous improvement;
3. Cooperation: employees attempted to combined their capabilities and explore the potential of everyone through teamwork and synergy to achieve common goals through empiric attitude and behavior as well proactive, trust and open.
4. Service excellent: employees have good attitude and behavior, kind greeting, polite, sincere, proactive in serving, in the interest of customer satisfaction
5. Environment consciousness: employees play active role in conserving the natural, working and business environments while maintaining good relationships with partners and communities, creating a healthy and pleasant working environment as well prioritizing occupational health and safety
6. Customer Satisfaction: employees provide satisfaction to customer through excellent product quality and service based on speedy, responsive, discipline, hard work, creative, clean and good willingness working ethics.

Business Integrity

BKI encourages good integrity in business activities through the implementation of the GCG Code, audits and imposition of sanctions related to illegal acts, unearthly and violating norms. Particularly, the Company prohibits BOC members, BOD members and employees involved in transactions that violate the law and GCG principles.

Data Perusahaan dan Kerahasiaan Informasi

BKI memelihara catatan yang akurat dan andal mengenai aktivitas usaha dan operasional secara berkelanjutan. Kebijakan perusahaan melarang Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan untuk mengungkapkan informasi rahasia, namun memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menyetujui pengungkapan informasi rahasia dalam kondisi khusus.

Pernyataan Palsu, Klaim Palsu, dan Konspirasi

Seluruh jajaran perusahaan yang berkaitan dengan tugas pemasaran, drawing approval, pelaksanaan survei dan inspeksi, proses sertifikasi, pembuatan kontrak/perjanjian dan administrasi keuangan, termasuk akuntansi, harus menyadari pentingnya pernyataan yang akurat dan klaim yang benar, termasuk pernyataan lisan dan tertulis. Kesengajaan menyampaikan pernyataan atau klaim yang tidak benar atau yang menyesatkan atau yang melibatkan adanya konspirasi dengan orang lain untuk merugikan pihak lain dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi administratif, pidana dan perdata bagi personil yang bersangkutan dan pihak yang terlibat, termasuk mitra kerja perusahaan dan pegawainya.

Penyelewengan dan Penyimpangan

BKI melarang setiap bentuk penyelewengan dan penyimpangan sebagai berikut :

1. Pelanggaran terhadap peraturan perusahaan;
2. Berlaku tidak jujur atau berbohong dalam kaitandengan pelaksanaan tugas pekerjaan;
3. Penggelapan, penghilangan, atau pemindahtanganan tanpa otoritas;
4. Pemalsuan atau manipulasi surat berharga perusahaan;
5. Penyalahgunaan aset perusahaan;
6. Pengalihan kas, surat berharga atau aset perusahaan untuk keuntungan pribadi;
7. Penananganan dan pelaporan transaksi tidak sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan;
8. Pemalsuan catatan akuntansi atau laporan keuangan perusahaan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang merugikan perusahaan

Corporate Data and Information Confidentiality

BKI mantains continuous, accurate and reliable records of its business and operational activities. The Company's policy prohibits the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees to disclose confidential information, yet authorizes the Board of Directors to reveal confidential information in special conditions.

False Statements, False Claims, and Conspiracy

All Company's personnel that are related to marketing duties, drawing approval, surveys and inspections, certification process, contract/agreement making and financial administration, including accountancy, have to realize the importance of accurate statements, true claims, including verbal and written statements. Deliberately making false or misleading statements or claims or that may create conspiracy with other people to harm other parties could result in administrative, criminal and private law sanction for the personnel and parties involved, including the Company's partners and their employees.

Fraud and Deviation

BKI prohibits the following forms of fraud and deviation:

1. Violation of Company's rules;
2. Dishonest or lying in connection with related to the implementation of duties;
3. Fraud, omission, or unauthorized transfer;
4. Forgery or manipulation of the company's securities;
5. Misuse of company assets;
6. Transfer of cash, securities or company assets for personal use or interest;
7. Handling and reporting of transactions that do not comply with procedures and prevailing rules and regulations;
8. Forgery of accounting records and Corporate financial report for personal or other interests that can harm the Company.

Benturan Kepentingan dalam Keputusan Hasil Survei

Seluruh jajaran BKI harus senantiasa menjaga independensi dalam pengambilan keputusan, pembuatan rekomendasi, perumusan keputusan hasil survei, serta pembuatan laporan. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, aspek keselamatan sesuai peraturan perundang-undangan menjadi prioritas utama.

Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan karyawan tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan Perusahaan jika yang bersangkutan atau keluarganya mempunyai andil atau kepemilikan saham yang signifikan, atau mempunyai kepentingan finansial tertentu.

Benturan Kepentingan dengan Aktivitas Sampingan

Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, dan karyawan tidak boleh mengikuti aktivitas sampingan yang menurunkan kemampuan yang bersangkutan dalam memenuhi tugas pekerjaannya.

Keterlibatan dalam aktivitas sampingan yang diizinkan tidak boleh mengurangi independensi dan obyektivitas dalam mengambil keputusan.

Permohonan izin untuk mempunyai aktivitas sampingan harus mendapat persetujuan dari Direksi atau pejabat yang berwenang.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan

BKI tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

BKI telah memiliki sistem pelaporan pelanggaran yang dikukuhkan dengan Keputusan Direksi No. DU.060C/LT.101/KI-14 tanggal 5 Februari 2014 tentang Pedoman Pelaporan Pelanggaran/Whistle Blowing System (WBS). Sistem ini dikembangkan dengan azas menjamin kerahasiaan pelapor di lingkungan kerja.

Conflict of Interests in Decisions on Survey Results

All BKI personnel must constantly uphold independency in decision-making, recommending, making decisions on survey results and reporting. In the event of a conflict of interest, the safety aspect in accordance with legislation is a prime priority.

Conflict of Interests in Procurement

The Board of Commissioners, Board of Directors, Management, and employees are not allowed to participate in Company's procurement activities where they or their families have a certain stake or own a significant portion of shares, or have a certain financial interest.

Conflict of Interests in Side Activities

The Board of Commissioners, the Board of Directors, the Management, and the employees are not allowed to engage in side activities that may decrease their capabilities in fulfilling their job duties.

Engagement in side activities is allowed as long as it does not reduce independency and objectivity in decision-making.

Permission request to have side activities should be approved by the BOD or authorized officials.

Employee Share Ownership Program

BKI does not have an employee share ownership program

Whistleblowing System

BKI has a whistleblowing system that was confirmed with the BOD Decree No. DU.060C/LT.101/KI-14 of 5 February 2014 on Guidelines for Reporting Violations/Whistle Blowing System (WBS). The system has been developed with the principle of safeguarding the whistleblower identity in working environment.

Setiap karyawan dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Pedoman GCG secara pribadi melalui surat yang ditujukan kepada Direktur Utama atau Kepala SPI dalam hal terlapor bukan merupakan anggota Direksi. Apabila terlapor merupakan anggota Direksi, laporan ditujukan kepada Komisaris Utama.

Setiap laporan wajib disidik oleh tim investigasi yang dibentuk secara ad hoc oleh Direktur Utama atau Komisaris Utama. Tim ini bekerja secara independen, dengan menjaga integritas dan akuntabilitasnya. Meskipun demikian, perusahaan tetap melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja tim investigasi

Tim investigasi wajib menindaklanjuti setiap laporan yang dianggap sah, serta melaporkan perkembangan tindak lanjut laporan yang bersangkutan kepada Direktur Utama, dengan tembusan kepada anggota Direksi.

Every employee can make reports about violations of GCG Guidelines allegation, in written to the President Director or the ICU Head in the case the alleged person is not BOD member. In the event that the alleged person is a BOD member, the report is aimed to the President Commissioner.

Every report must be followed up by investigation team which formed on ad hoc basis by President Director or President Commissioner. This team works independently by maintaining its integrity and accountability. However, the Company keeps monitoring and evaluating the team's integrity and accountability.

The investigation team must follow up every considered valid reports and notify the follow up progress to President Director with copies to the BOD members.

**Mendiversifikasi Portofolio, Meluaskan Jalan Menuju
Kelas Dunia**



**Diversifying Portfolio, Broadening The Path Towards
World-Class**

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility



"Sebagai Badan Usaha Milik Negara, BKI tidak ditujukan semata-mata untuk mencari keuntungan melainkan juga memberikan nilai tambah dan manfaat langsung kehadirannya kepada masyarakat sekitarnya"

"As a State-Owned Enterprise, BKI is not intended solely to seek profit but also provide added value and direct benefit of its presence to the surrounding community"



Kemitraan dengan Masyarakat Sekitar

BKI menganut prinsip corporate citizenship, dimana sebuah entitas bisnis hadir tidak hanya mengembangkan misi ekonomi bagi pemegang saham, tetapi juga mengembangkan misi sosial bagi pemangku kepentingan yang lebih luas.

Program tanggung jawab sosial BKI terbagi menjadi dua bagian yang dikembangkan atas dasar kebijakan yang sama, yaitu komitmen untuk tumbuh bersama lingkungan sosial dan alam serta menjaga hubungan dengan karyawan, konsumen maupun masyarakat umum sebagai pemangku kepentingan Perusahaan.

Menyadari bahwa masing-masing masyarakat sekitar mempunyai karakteristik yang berbeda, sudah seharusnya Perusahaan berusaha memahami dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan membantu masyarakat dengan cara yang wajar dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan serta ketentuan yang berlaku.

Perusahaan sangat menghargai setiap aktivitas kemitraan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial Perusahaan. BKI secara khusus menjalankan program ini melalui Unit Kemitraan dan Bina Lingkungan (Unit PKBL) perusahaan.

Partnership with Community Around

BKI adheres to the principle of corporate citizenship, in which a business entity presence is not only bearing the shareholder economic mission but also carrying social mission for the benefit of broader stakeholders.

BKI's corporate social responsibility program is divided into two parts which developed on the same policy base: commitment to grow together with the social and natural environment and maintaining relationships with employee, customer and general public as Corporate stakeholder.

Recognizing that each of the surrounding communities has different characteristics, the Company should has tried to understand and interact with surrounding communities and assist them in appropriate ways with regard to corporate capability and prevailing regulations.

The Company highly values every partnership activity that contributes to society and enhances the corporate social value. BKI specifically runs this program through the corporate Partnership and Community Development Unit (PKBL Unit).

Kepedulian Untuk Memberdayakan Masyarakat Sebagai Pemangku Kepentingan

BKI menyadari nilai penting masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang tidak kecil peranannya dalam mendukung kelancaran kegiatan usaha, terutama di setiap daerah tempat BKI menjalankan kegiatan usahanya.

Hal ini sejalan dengan program yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN agar masyarakat dapat lebih merasakan langsung arti kehadiran BUMN di daerahnya melalui dampak positif pemberdayaan kehidupan dalam sisi sosial ekonomi, pendidikan, dan juga budaya.

Sebagai badan usaha dengan lebih dari 20 kantor yang tersebar mulai dari ibu kota negara dan kota-kota pelabuhan penting Nusantara, BKI juga ikut membantu pemberdayaan masyarakat melalui program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Penyaluran bantuan melalui program PKBL itu tidak hanya terbatas pada kota-kota tempat kantor BKI berada tetapi juga kota-kota lain sesuai arahan Kementerian BUMN.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Sebagai BUMN, BKI menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL/CSR) berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 316/KMK.16/1994 tanggal 27 Juni 1994 dan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Pengusaha Kecil dan Program Bina Lingkungan selanjutnya disebut PKBL.
2. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SE-03/MBU.S/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Wilayah Binaan dan BUMN Koordinator PKBL tahun 2007.

Occupational Health and Safety and Environmental Preservation

BKI recognizes the important value of the community as stakeholder which having no less contribution in supporting business continuity, especially in regions where BKI runs its business.

This is in accordance with the program declared by the Ministry of SOEs so that the public can more directly feel the significance of SOE presence in their area through the positive impact of life empowerment in socio-economic, educational and cultural side.

As an enterprise with more than 20 offices spread from the nation's capital and major port cities of the Archipelago, BKI also takes part in empowering communities through Partnership and Community Development (PKBL) program. The assistance distribution through PKBL Program is not only limited in cities where BKI office are located but also in another cities as referred by the Ministry of SOE.

Partnership and Community Development Programs

As a BUMN, BKI runs a Partnership and Community Development Program (PKBL / CSR) based on:

1. Minister of Finance Decree No. 316/KMK.16/1994 dated June 27, 1994 and Decree of the Minister of SOE Number KEP-236/MBU/2003 dated June 17, 2003 concerning Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Entrepreneurs and Community Development Program hereinafter referred to PKBL.
2. Minister of State Owned Enterprise Circular Letter SE-433/MBU/2003 dated September 16, 2003 on Guidelines for Implementation of Partnership Program of BUMN with Small Business and Community Development Program.
3. Minister of State Owned Enterprise Circular Letter SE-03 / MBU.S / 2007 dated July 17, 2007 concerning Coordinated Territory and Coordinating Enterprises of PKBL 2007.

4. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas perubahan PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan pengganti Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor. PER 07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 dan diubah dengan PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
6. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor DU.142/KP.903/KI-04 tanggal 27 Oktober 2004 dan Surat Keputusan Direksi Nomor DU.281/KP.903/KI-11 tanggal 30 Desember 2012 serta Surat Keputusan Direksi Nomor DU.086/KP.903/KI-14 tanggal 25 Februari 2014.
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik negara Nomor PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan badan Usaha Milik Negara pada pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.
4. Minister of State Owned Enterprise Circular Letter Number: PER-20 / MBU / 2012 dated 27 December 2012 on Amendment to the amendment of PER-05 / MBU / 2007 dated 27 April 2007 concerning Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Business and Community Development Program in lieu of Decision Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-236 / MBU / 2003 dated June 17, 2003 on Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Business and Community Development Program.
5. Minister of State Owned Enterprise Circular Letter Number. PER-07 / MBU / 05/2015 dated May 22, 2015 and amended by PER-09 / MBU / 07/2015 dated July 3, 2015 on the Partnership and Community Development Program of State-Owned Enterprises
6. Technical Guidelines for Implementation of Partnership Program and Community Development Program (PKBL) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) in accordance with Board of Director Decree Number DU.142 / KP.903 / KI-04 dated October 27, 2004 and Board of Director Decree Number DU.281 / KP.903 / KI-11 dated December 30, 2012 and Board of Director Decree Number DU.086 / KP.903 / KI-14 dated February 25, 2014.
7. Minister of SOE Regulation number: PER-03 / MBU / 12/2016 dated December 16, 2016 on Amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09 / MBU / 07/2015 dated July 3, 2015 regarding Partnership Program and Environment Business Development State property in Article 7, Article 8 and Article 9.



Program Kemitraan dikembangkan untuk mencapai tujuan:

1. Mengembangkan dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan menjaga tata hubungan yang mendorong kondisi saling menunjang antara BUMN, koperasi dan swasta, khususnya pengusaha kecil, menengah dan koperasi;
- 2 Mendorong koperasi dan usaha kecil sebagai lembaga ekonomi rakyat yang mampu melaksanakan, meningkatkan dan mengembangkan usahanya secara lebih efektif dan efisien serta dapat memberi nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi para anggotanya maupun masyarakat di sekitar.

Pada tahun 2016, Program Kemitraan memprioritaskan pembinaan kepada usaha kecil, baik perorangan maupun badan, serta Koperasi Unit Desa (KUD), terutama KUD Calon Mandiri.



The Partnership Program is developed with the aims of:

1. Developing and creating healthy business climate and maintaining a relationship order that encourages mutually supportive condition between state-owned enterprises, cooperatives and the private sector, particularly small and medium-sized entrepreneurs and cooperatives;
- 2 Encouraging cooperatives and small business as people's economic institution which capable to implement, increase and develop its business in more efficient and effective way along with giving more value added and benefit for their members as well as the surrounding community.

Within 2016 the Partnership Program is been prioritized to nurturing small business, either individual or institution as well as Village Unit Cooperatives (KUD), mainly self-sufficient nominated KUD.

Sumber dan Penggunaan Dana Program Kemitraan pada tahun 2016 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Sources and Use of Partnership Program Funds in 2016 are summarized as follows:

No.	Uraian / Description	2015	2016
Dana Tersedia / Available Funds			
1.	Saldo Awal / Beginning Balance	1.744	1.161
2.	Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina / Share of Profits from Mentoring SOE	1.452	1.200
3.	Pengembalian Pinjaman & Bunga / Loan Payment and Interest	2.022	2.445
4.	Jasa Giro / Checking Account Charges	18	12
5.	Angsuran Belum Teridentifikasi / Unidentified Payments	11	10
6.	Pendapatan Lain-lain / Other Income	-	2
Jumlah Dana Tersedia / Sum of Available Funds		5.247	4.830
Penggunaan Dana / Use of Funds			
1.	Pemberian Pinjaman / Lending	4.009	3.835
2.	Dana Pembinaan / Mentoring Funds	77	10
Jumlah Penggunaan Dana / Use of Funding		4.086	3.845
Saldo Akhir Kas / Ending Balance		1.161	985
Sebaran mitra binaan yang tercakup program pkbl bki			
1.	DKI Jakarta / DKI Jakarta	705	630
2.	Yogyakarta / Yogyakarta	900	500
3.	Jawa Timur / East Java	435	470
4.	Jawa Barat / West Java	540	340
5.	Jawa Tengah / Central Java	780	370
6.	Kalimantan Barat / West Kalimantan	165	500
7.	Kalimantan Timur / East Kalimantan	-	340
8.	Sumatera Utara / North Sumatera	95	145
9.	Sulawesi Selatan / South Sulawesi	335	540
10.	Dana Pembinaan / Mentoring Funds	54	-
Jumlah / Total		4.009	3.835

Berdasarkan sektor industri, Dana Program Kemitraan pada tahun 2016 tersalurkan melalui 108 unit Mitra dengan total nilai pinjaman mencapai Rp 3,8 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, maka baik jumlah unit maupun nilai penyaluran Program Kemitraan mengalami penurunan. Pada tahun 2015, dana Program Kemitraan tersalurkan ke 168 unit dengan total nilai sebesar Rp 3,9 miliar.

Based on the industry sector, the Partnership Program Fund in 2016 is channeled through 108 Partners units with total loan value of Rp 3.8 billion. When compared to 2015, both the number of units and the value of the Partnership Program distributed were decreased. In 2015, the Partnership Program funds are channeled to 168 units with a total value of Rp 3.9 billion.

Rincian penyaluran dana Program Kemitraan berdasarkan sektor industri dapat dilihat pada tabel dibawah:

Details of Partnership Program funds distribution by industry sector

No.	Bidang / Field	2015		2016	
		Jumlah unit / Number of Units	Nilai / Amount	Jumlah unit / Number of Units	Nilai / Amount
1.	Jasa / Services	34	765	17	575
2.	Peternakan / Farm	3	70	2	45
3.	Perindustrian / Industrial	55	1.495	41	1.565
4.	Perikanan / Fishery	2	10	7	195
5.	Perdagangan / Trade	69	1.525	36	1.325
6.	Pertanian / Agriculture	5	90	4	80
7.	Perkebunan / Plantation	-	-	1	50
Jumlah Penggunaan		168	3.955	108	3.835

Sementara itu untuk Program Bina Lingkungan, BKI menyalurkan dana sebesar Rp 1,45 miliar dalam berbagai program. Rincian penggunaan dana untuk program bina lingkungan disajikan pada tabel dibawah:

Meanwhile, for Community Development Program, BKI disbursed Rp 1.45 billion in various programs. " Details of the use of funds for environmental development programs are presented in the table below:

No.	Sumber / Source	2015	2016
Dana Tersedia / Funds Available			
1.	Saldo Awal / Beginning balance	1.204	133
2.	Penembalian Dana ke BUMN Pembina / Refund to BUMN Pembina	(1.203)	-
3.	Alokasi Nagian Laba dari BUMN Pembina / Allocation of Nagian Profit from BUMN Pembina	1.582	1.332
4.	Jasa Giro / Current account service	7	1
Jumlah Dana Tersedia		1.590	1.466
Penggunaan Dana / Use of Funds			
1.	Bantuan BUMN Peduli / The assistance of BUMN Pedull	-	-
2.	Bantuan Bencana Alam / Natural Disaster Aid	-	130
3.	Bantuan Pendidikan & Pelatihan / Education & Training Assistance	253	240
4.	Bantuan Peningkatan Kesehatan / Health Improvement Assistance	13	61
5.	Bantuan Prasarana Sarana Umum / Infrastructure Support for Public Facilities	103	196
6.	Bantuan Sarana Ibadah / Help Means of Worship	476	391
7.	Bantuan Pelestrarian Alam / Natural Rescue Aid	11	10
8.	Pengentasan Kemiskinan / Poverty Alleviation	596	258
9.	Hibah Ke Prgoram kemitraan / Grants To Prgoram partnership	-	48
10.	Beban dan Pengeluaran Lainnya / Other Expenses	5	130
Jumlah Penggunaan / Total Usage		1.457	1.464
Saldo Akhir / Total Usage		133	2

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Consolidated Financial Report

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2016

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN KEUANGAN 2016 Financial Statement 2016

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016

DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) 31 DESEMBER 2016	1
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2016	3
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2016	4
LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2016	5
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016 SERTA TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2016	6



PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero) HEAD OFFICE

Address : Jl. Yos Sudarso No. 38 - 39 - 40, Tanjung Priok, JAKARTA - 14320, INDONESIA
Phone : (62 - 021) 4301017, 4301703, 4300993 Facsimile : (62 - 021) 43936175, 43901973
PO BOX : 1010/JKU
E-mail : ho@bki.co.id

SURAT PERYATAAN DIREKSI

TENTANG

**TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kami atas nama direksi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), menyatakan bahwa:

1. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016;
2. Laporan keuangan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Untuk dan atas nama Direksi

Jakarta, 13 Februari 2017

Direktur Utama

Direktur Keuangan & Administrasi

Rudiyanto

Timbul Tambunan





Nomor Izin Usaha : Kep - 304/KM.5/2005
Tanggal 14 September 2005
SENTRA BISNIS ARTHA GADING NIAGA
Blok E, No. 9, Jl. Boulevard Artha Gading,
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
Telephone : +62-21 - 45852846, 45861183
 +62-21 - 45861184, 45861185
Fax. : +62-21 - 45845591
Website : www.sahatpardede.com
Website : www.iapa.net

Nomor: 103.130217 LAIGSR

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik
GHAZALI, SAHAT DAN REKAN



Handoko Tripriyono, CPA
Izin Akuntan Publik No. AP.0990

13 Februari 2017

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2.c, 3	89.395.855.169	174.528.905.053
Piutang Usaha			
Pihak Berelasi	2.d, 2.f, 4	39.462.578.603	32.852.687.560
Pihak Ketiga	2.d, 4	262.520.131.848	222.135.307.808
Penyisihan piutang usaha	2.d, 4	(37.562.403.230)	(35.254.112.181)
Tagihan bruto			
Pihak Berelasi	2.e, 2.f, 5	10.846.885.434	16.281.560.363
Pihak Ketiga	2.e, 5	38.307.619.220	21.203.901.188
Aset dimiliki untuk dijual			
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar tahun 2016 Rp10.458.092.680 dan tahun 2015 Rp10.458.092.680)	2.k, 6	12.880.416	12.880.416
Uang Muka	7	14.706.025.116	12.474.289.598
Pajak Dibayar Dimuka	2.m, 15.a	116.819.528.613	64.915.150.933
Biaya Dibayar Dimuka	8	20.435.916.119	2.990.767.706
Aset lancar lainnya	9	357.847.394	682.983.261
Jumlah Aset Lancar		555.302.864.702	512.824.321.705
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap			
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar tahun 2016 Rp91.513.839.510 dan tahun 2015 Rp71.660.298.772)	2.h, 2.j, 10	195.551.493.761	158.635.609.783
Aset Pajak Tangguhan	2.m, 15.e	20.204.065.786	17.092.222.243
Aset tidak lancar lainnya	11	585.028.215	749.939.795
Jumlah Aset Tidak Lancar		216.340.587.762	176.477.771.821
JUMLAH ASET		771.643.452.464	689.302.093.526

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Hutang Usaha			
Pihak Ketiga	12	11.081.399.347	1.275.725.043
Hutang lain-Lain			
Pihak Berelasi	2.f, 13	2.940.884.038	4.024.787.293
Pihak Ketiga	13	12.405.018.792	15.358.252.276
Hutang biaya			
Pihak Berelasi	2.f, 14	3.012.774.474	2.555.574.350
Pihak Ketiga	14	37.867.943.001	51.343.572.646
Hutang pajak	2.m, 15.c	89.293.473.989	56.238.757.913
Hutang bruto			
Pihak Berelasi	2.f, 16	192.213.200	56.160.000
Pihak Ketiga	16	8.124.411.697	6.984.253.310
Liabilitas jangka pendek lainnya	17	5.230.535	280.535
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		164.923.349.073	137.837.363.366
Liabilitas Jangka Panjang			
Imbalan Kerja	2.n, 18	46.945.534.470	43.781.183.365
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		46.945.534.470	43.781.183.365
Jumlah Liabilitas		211.868.883.543	181.618.546.731
EKUITAS			
Modal saham			
Modal dasar 600.000 saham, masing-masing nilai nominal per lembar saham Rp1.000.000.			
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 255.000 lembar saham.	19	255.000.000.000	255.000.000.000
Saldo laba			
Saldo laba yang dicadangkan	20	232.559.451.681	184.178.635.642
Saldo laba yang belum dicadangkan		67.613.274.993	56.810.816.039
Pendapatan Komprehensif			
- Keuntungan / (Kerugian) Aktuaria - Bersih		2.028.959.353	8.938.576.769
- Selisih kurs penjabaran laporan keuangan mata uang asing entitas luar negeri		2.572.882.894	2.755.518.345
Jumlah Ekuitas		559.774.568.921	507.683.546.795
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		771.643.452.464	689.302.093.526

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
PENDAPATAN	2.l, 21	737.993.402.735	706.648.960.946
BEBAN JASA	2.l, 22	(231.224.377.503)	(256.133.510.770)
LABA KOTOR		506.769.025.232	450.515.450.176
BEBAN USAHA			
Beban Pemasaran dan Humas	2.l, 23	10.405.411.119	8.882.685.389
Beban Administrasi dan Umum	2.l, 24	403.569.361.936	347.747.200.664
Jumlah Beban Usaha		413.974.773.055	356.629.886.053
LABA USAHA		92.794.252.177	93.885.564.123
Pendapatan lain-lain	2.l, 25	8.360.439.027	21.726.682.779
Beban lain-lain	2.l, 25	(11.349.558.613)	(7.586.283.523)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		(2.989.119.586)	14.140.399.256
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		89.805.132.591	108.025.963.379
PAJAK PENGHASILAN			
Pajak Kini	2.m, 15.d	(23.000.495.336)	(30.234.088.886)
Pajak Tangguhan	2.m, 15.e	808.637.738	2.730.615.215
Jumlah Pajak Penghasilan		(22.191.857.598)	(27.503.473.671)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN		67.613.274.993	80.522.489.708
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA			
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	25	(182.635.451)	57.470.054
Keuntungan/(Kerugian) Aktuaria	25	(9.212.823.222)	21.696.532.039
Pajak Penghasilan Terkait	25	2.303.205.806	(5.424.133.010)
Total Pendapatan komprehensif		(7.092.252.867)	16.329.869.083
LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		60.521.022.126	96.852.358.791

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2016
 (Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Cadangan Modal	Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	Pendapatan Komprehensif Lain	Jumlah Ekuitas
Saldo per 31 Desember 2014	255.000.000.000	56.412.145.284	121.458.214.451	(4.635.773.969)	428.234.585.766
Pembentukan cadangan umum	-	127.766.490.358	(127.766.490.358)	-	-
Dividen	-	-	(14.500.000.000)	-	(14.500.000.000)
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	-	-	(2.903.397.762)	-	(2.903.397.762)
Laba tahun berjalan	-	-	80.522.489.708	-	80.522.489.708
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing entitas luar negeri	-	-	-	57.470.054	57.470.054
Keuntungan/(Kerugian) Aktuaria - Bersih	-	-	-	16.272.399.029	16.272.399.029
Saldo per 31 Desember 2015	255.000.000.000	184.178.635.642	56.810.816.039	11.694.095.114	507.683.546.795
Pembentukan cadangan umum	-	48.380.816.039	(48.380.816.039)	-	-
Dividen	-	-	(8.430.000.000)	-	(8.430.000.000)
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	-	-	-	-	-
Laba tahun berjalan	-	-	67.613.274.993	-	67.613.274.993
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing entitas luar negeri	-	-	-	(182.635.451)	(182.635.451)
Keuntungan/(Kerugian) Aktuaria - Bersih	-	-	-	(6.909.617.416)	(6.909.617.416)
Saldo per 31 Desember 2016	255.000.000.000	232.559.451.681	67.613.274.993	4.601.842.247	559.774.568.921

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari:		
- Pembayaran dari pelanggan	679.329.644.549	789.862.166.555
- Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	<u>(464.890.077.655)</u>	<u>(612.649.879.165)</u>
Kas yang diperoleh dari operasi	214.439.566.894	177.212.287.390
- Pembayaran dana program bina lingkungan	(2.532.000.000)	(2.903.397.762)
- Penerimaan/(pembayaran) operasi lainnya	<u>(169.882.593.642)</u>	<u>13.167.413.936</u>
- Pembayaran pajak penghasilan	<u>(61.958.598.420)</u>	<u>(135.485.872.266)</u>
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	<u>(19.933.625.168)</u>	<u>51.990.431.298</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset lainnya	(45.764.498.881)	-
Pembelian aset tetap	<u>(11.004.925.835)</u>	<u>(39.166.722.444)</u>
Penjualan aset tetap	-	2.516.489.015
Penambahan/(pengurangan) uang jaminan	-	107.497.350
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(56.769.424.716)</u>	<u>(36.542.736.079)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran dividen	<u>(8.430.000.000)</u>	<u>(14.500.000.000)</u>
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(8.430.000.000)</u>	<u>(14.500.000.000)</u>
Kenaikan Kas dan Setara Kas Bersih	<u>(85.133.049.884)</u>	<u>947.695.219</u>
Kas dan Setara Kas Awal Periode	<u>174.528.905.053</u>	<u>173.581.209.834</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	<u>89.395.855.169</u>	<u>174.528.905.053</u>

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum.

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), selanjutnya disebut "Perusahaan" merupakan peralihan dari PN Biro Klasifikasi Indonesia yang didirikan tanggal 1 Juli 1964. Peralihan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1977. Akta pendirian Perusahaan dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 57 tahun 1977 tanggal 21 April 1977 yang diperbaiki dengan Akta Nomor 35 tanggal 19 Oktober 1978 dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Y.A.5/345/1978 tanggal 7 November 1978 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1979 tanggal 6 Februari 1979 (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tahun 1999).

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 14 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan H. Umaran Mansjur, SH, Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut mengenai penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran Badan Usaha Milik Negara, dan perkembangan kebutuhan pengelolaan Perusahaan, perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan, perubahan modal dasar dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-03102AH.01.02 tahun 2009 tanggal 14 Januari 2009.

Perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1977 berubah menjadi PT (Persero) yang merupakan peralihan dari PN Biro Klasifikasi Indonesia yang didirikan tanggal 1 Juli 1964. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) bertugas untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang jasa klasifikasi, sertifikasi, konsultansi dan supervisi di bidang kelautan serta industri jasa pada umumnya, agar terjamin keselamatan jiwa dan benda dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas yang mandiri.

b. Bidang Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasarnya, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah sebagai berikut:

a) Bidang Usaha Klasifikasi dan Registrasi Kapal, yaitu:

- Pemeriksaan kontruksi, pengawasan dan pengujian serta pencatatan sertifikasi klas dan registrasi kapal;
- Pengujian dan sertifikasi material dan komponen;
- Pengujian dan penerbitan sertifikasi kualitas juru las, inspektur las dan ahli las;
- Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi aktivitas statutoria yang mendapat otorisasi dari Pemerintah Republik Indonesia, maupun pemerintah negara lain;
- Bertindak sebagai agen dan/atau mewakili klasifikasi asing/konsultan asing; dan
- Melaksanakan sertifikasi sesuai standar Internasional.

b) Bidang Komersil (Konsultansi & Supervisi), yaitu:

- Konsultansi dan supervisi di bidang kelautan dan industri minyak dan gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
- Penilaian, perencanaan, dan pengawasan dibidang teknologi kelautan dan industri minyak dan gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
- Pelatihan keahlian teknik dan non teknik dibidang teknologi kelautan dan industri minyak dan gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
- Kegiatan jasa rekayasa, jasa konstruksi dan jasa pemborongan non konstruksi dibidang instalasi minyak dan gas, panas bumi serta industri pertambangan pada umumnya.

c) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk properti, perkantoran, apartemen, dan perhotelan.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Perusahaan

Kantor Pusat PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) berdomisili di Jakarta Jl. Yos Sudarso No 38-40, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14320. Jumlah seluruh unit kerja yaitu Kantor Pusat dan cabang adalah berjumlah 41 unit kerja, yang terdiri dari 2 (dua) segmen usaha yaitu segmen Klasifikasi 19 unit kerja dan segmen Komersil berjumlah 20 unit kerja. Kantor Pusat dan unit produksi masing-masing segmen adalah sebagai berikut:

Unit Kerja Kantor Cabang Segmen Klasifikasi sebagai berikut:

No.	Cabang Segmen Klasifikasi	No.	Cabang Segmen Klasifikasi
1	Cabang Pratama Klas Ambon	11	Cabang Madya Klas Palembang
2	Cabang Madya Klas Banjarmasin	12	Cabang Madya Klas Pontianak
3	Cabang Utama Klas Batam	13	Cabang Pratama Klas Pekanbaru
4	Cabang Pratama Klas Belawan	14	Cabang Utama Klas Surabaya
5	Cabang Utama Klas Samarinda	15	Cabang Madya Klas Semarang
6	Cabang Pratama Klas Bitung	16	Cabang Utama Singapore
7	Cabang Madya Klas Banten	17	Cabang Pratama Klas Sorong
8	Cabang Pratama Klas Cirebon	18	Cabang Utama Klas Tanjung Priok
9	Cabang Pratama Klas Jambi	19	SBU Lepas Pantai Jakarta
10	Cabang Pratama Klas Makassar		

Unit Kerja Kantor Cabang Segmen Komersil sebagai berikut:

No.	Cabang Segmen Komersil	No.	Cabang Segmen Komersil
1	Perwakilan Komersil Ambon	11	Cabang Pratama Komersil Makassar
2	Cabang Pratama Komersil Banjarmasin	12	Cabang Pratama Komersil Palembang
3	Cabang Utama Komersil Batam	13	Perwakilan Komersil Pontianak
4	Cabang Pratama Komersil Belawan	14	Cabang Madya Komersil Pekanbaru
5	Cabang Utama Komersil Balikpapan	15	Cabang Madya Komersil Surabaya
6	Perwakilan Komersil Bitung	16	Cabang Pratama Komersil Semarang
7	Cabang Pratama Komersil Banten	17	Perwakilan Komersil Sorong
8	Perwakilan Komersil Cirebon	18	SBU Industri
9	Perwakilan Komersil Cilacap	19	SBU Energi
10	Perwakilan Komersil Jambi	20	SBU Marine

d. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi serta Karyawan

Susunan Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-12/MBU/2014 tanggal 15 Januari 2014 dan Nomor: SK-93/MBU/2014 tanggal 30 April 2014 sebagai berikut:

Dewan Komisaris

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Komisaris Utama	:	Sukatno
Komisaris	:	Minto Widodo
Komisaris	:	Erwin Rosmali
Komisaris	:	Faisal Ahmad

Direksi

Dewan Direksi, yaitu Direktur Utama bertugas mulai 19 Desember 2013 berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor: SK-424/MBU/2013, Direktur Klasifikasi mulai tanggal 3 Agustus 2012 berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor: SK-284/MBU/2012, Direktur Komersil mulai tanggal 5 Maret 2013 berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor: SK-175/MBU/2013 dan Direktur Keuangan dan Administrasi berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor: SK-32/MBU/2014 tanggal 5 Februari 2014, mulai tanggal 14 November 2016, Kementerian BUMN telah memberhentikan dengan hormat Direktur Komersil, sesuai dengan SK No. 256/MBU/11/2016. Susunan Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi serta Karyawan (lanjutan)

Direksi

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Direktur Utama	Rudiyanto	Rudiyanto
Direktur Keuangan & Administrasi	Timbul Tambunan	Timbul Tambunan
Direktur Klasifikasi	Iman Satria Utama	Iman Satria Utama
Direktur Komersil	-	Ibrahim Gause

Pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 jumlah karyawan Perusahaan masing-masing adalah 1.062 orang dan 789 orang.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Laporan keuangan Perusahaan disusun oleh Direksi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan diotoriasi untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 13 Februari 2017. Prinsip akuntansi yang penting telah diterapkan secara konsisten dalam menyusun laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan Keuangan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, yaitu yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntasi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (historical cost), kecuali untuk akun tertentu dinyatakan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan Keuangan disajikan dengan menggunakan dasar akrual (accrual basis), kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung (direct method) dan dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

Angka-angka dalam Laporan Keuangan ini disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru Dan Revisi (PSAK) dan Interpretasi Standar Keuangan (ISAK)

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2016, PT BKI (Persero) telah menerapkan beberapa standar dan interpretasi baru atau revisi yang relevan dengan operasi PT BKI (Persero) yaitu sebagai berikut:

- 1) Amandemen PSAK No. 4: Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri. Amandemen ini memperkenankan penggunaan metode ekuitas sebagai salah satu metode pencatatan investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi dalam laporan keuangan tersendiri entitas tersebut.
- 2) PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015): Segmen Operasi. PSAK ini menambahkan pengungkapan deskripsi singkat segmen operasi yang telah digabungkan dan indikator ekonomik memiliki karakteristik yang serupa.
- 3) PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015): Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa entitas manajemen (entitas yang menyediakan jasa personil manajemen kunci) adalah pihak berelasi yang dikenakan pengungkapan pihak berelasi. Dan entitas yang memakai entitas manajemen mengungkapkan biaya yang terjadi untuk jasa manajemennya.
- 4) Amandemen PSAK No. 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi. Amandemen ini memberikan klarifikasi tentang pengecualian konsolidasi untuk entitas investasi ketika kriteria tertentu terpenuhi.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

- b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru Dan Revisi (PSAK) dan Interpretasi Standar Keuangan (ISAK) (lanjutan)
- Efektif sejak tanggal 1 Januari 2016, PT BKI (Persero) telah menerapkan beberapa standar dan interpretasi baru atau revisi yang relevan dengan operasi PT BKI (Persero) yaitu sebagai berikut (lanjutan):
- 5) PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015): Aset Tetap. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa dalam PSAK No. 16 dan PSAK No. 19, aset dapat direvaluasi dengan mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi terhadap jumlah tercatat bruto ataupun neto. Akumulasi penyusutan atau amortisasi adalah perbedaan antara jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat aset tersebut. Jumlah tercatat aset tersebut disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.
 - 6) PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015): Aset Tak Berwujud. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa dalam PSAK No. 16 dan PSAK No. 19, aset dapat direvaluasi dengan mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi terhadap jumlah tercatat bruto ataupun neto. Akumulasi penyusutan atau amortisasi adalah perbedaan antara jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat aset tersebut. Jumlah tercatat aset tersebut disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.
 - 7) PSAK No. 22 (Penyesuaian 2015): Kombinasi Bisnis, mengklarifikasi ruang lingkup dan kewajiban membayar imbalan kontinjenji yang memenuhi definisi instrumen keuangan diakui sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas. PSAK ini juga mengakibatkan dampak penyesuaian terhadap PSAK No. 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No. 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjenji dan Aset Kontinjenji".
 - 8) Amandemen PSAK No. 24: Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja. Amandemen ini menyederhanakan akuntansi untuk kontribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga yang tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, misalnya iuran pekerja yang dihitung berdasarkan persentase tetap dari gaji.
 - 9) PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan. Penyesuaian ini memberikan koreksi editorial pada PSAK No. 25 paragraf 27.
 - 10) PSAK No. 53 (Penyesuaian 2015): Pembayaran Berbasis Saham, mengklarifikasi definisi kondisi vesting dan secara terpisah mendefinisikan kondisi kinerja dan kondisi jasa.
 - 11) Amandemen PSAK No. 65: Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi. Amandemen ini mengklarifikasi tentang pengecualian konsolidasi untuk entitas investasi ketika kriteria tertentu terpenuhi.
 - 12) Amandemen PSAK No. 66: Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama. Amandemen ini mensyaratkan bahwa seluruh prinsip kombinasi bisnis dalam PSAK No. 22: Kombinasi Bisnis dan PSAK lain beserta persyaratan pengungkapannya diterapkan untuk akuisisi pada kepentingan awal dalam operasi bersama dan untuk akuisisi kepentingan tambahan dalam operasi bersama, sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman yang ada dalam PSAK ini.
 - 13) Amandemen PSAK No. 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi. Amandemen ini mengklarifikasi tentang pengecualian konsolidasi untuk entitas investasi ketika kriteria tertentu terpenuhi.
 - 14) PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015): Pengukuran Nilai Wajar. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pengecualian portofolio dalam PSAK No. 68 dapat diterapkan tidak hanya kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan, tetapi juga diterapkan pada kontrak lain dalam ruang lingkup PSAK No. 55.
 - 15) PSAK No. 70, Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak. PSAK ini memberikan pengaturan akuntansi atas aset dan liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak. Entitas dapat memilih menerapkan sesuai dengan SAK lain dalam mengakui, mengukur, menyajikan dan mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak atau menerapkan persyaratan dalam PSAK 70.
 - 16) ISAK No. 30: Pungutan, merupakan interpretasi atas PSAK No. 57: Provisi, Liabilitas Kontinjenji dan Aset Kontinjenji, yang mengklarifikasi akuntansi liabilitas untuk membayar pungutan, selain daripada pajak penghasilan yang berada dalam ruang lingkup PSAK No. 46: Pajak Penghasilan, serta denda lain atas pelanggaran perundang-undangan, kepada Pemerintah.

Atas pemberlakuan standar dan interpretasi yang efektif pada 1 Januari 2016, tidak terdapat dampak yang material terhadap laporan keuangan entitas.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

- b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru Dan Revisi (PSAK) dan Interpretasi Standar Keuangan (ISAK) (lanjutan)
Standar Akuntansi yang Telah Disahkan namun belum Berlaku Efektif.
Berikut ini adalah standar akuntansi yang telah disahkan oleh DSAK yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan PT BKI (Persero) namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun 2016, efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017:
Amandemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan. Amandemen ini mengklarifikasi, bukan mengubah secara signifikan, persyaratan PSAK No. 1, antara lain, mengklasifikasi mengenai materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasiannya kebijakan akuntansi signifikan.
- c. Kas dan setara kas
Kas dan setara kas terdiri dari uang kas, uang yang ada di bank serta deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan uang jaminan atas penerbitan bank garansi berdurasi jangka pendek. Sebagai Aset Keuangan, Kas dan Setara kas dicatat pada tanggal perolehannya pada nilai wajarnya dan selanjutnya diukur pada nilai perolehan yang diamortisasi.
- d. Piutang usaha
Piutang usaha disajikan sebesar jumlah yang diperkirakan dapat direalisasi yaitu jumlah tercatat awal dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Piutang usaha mencerminkan jumlah yang telah ditagihkan kepada pelanggan atas jasa yang telah dilakukan. Adapun jumlah yang ditagihkan mengacu pada termin kontrak yang telah disepakati dengan pelanggan.
Penyisihan Piutang tak tertagih dihitung secara kolektif dengan menggunakan roll - rate model. Adapun parameter probability of default dan loss given default yang dipergunakan dalam model tersebut diperoleh dari hasil survei data empiris Perusahaan selama 3 sampai dengan 5 tahun terakhir.
- e. Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja
Tagihan bruto kepada pemberi kerja mencerminkan pengakuan pendapatan yang dilakukan sampai dengan tanggal neraca berdasarkan hal pengakuan progress fisik yang dicapai pada tiap-tiap kontrak jasa yang sedang dikerjakan dikurangi dengan nilai pekerjaan yang sudah ditagih (di-invoice-kan) kepada pelanggan yang bersangkutan.
Berikut kebijakan pengakuan pendapatan atas tagihan bruto berdasarkan masing-masing progress fisik jenis pekerjaan:
- 1) Jasa Klasifikasi Penerimaan Klas dan Bangunan Baru (PKBB)
Pengukuran progress fisik pendapatan mengacu pada pedoman sebagai berikut:
 - Selesai drawing approval dinilai 25% selesai.
 - Selesai peletakan kapal dinilai 50% selesai.
 - Selesai penerbitan sertifikat sementara, dinilai 75% selesai.
 - Selesai penerbitan sertifikat permanen, dinilai 100% selesai.
 - 2) Jasa Klasifikasi Penerimaan Klas Bangunan Lama (PKBL)
Untuk jasa PKBL, pengukuran progress fisik pendapatan mengacu pada pedoman sebagai berikut:
 - Selesai drawing approval dinilai 50% selesai.
 - Selesai penerbitan sertifikat permanen, dinilai 100% selesai.
 - 3) Jasa Klasifikasi selain PKBB dan PKBL
Tidak dilakukan pengakuan progress fisik mengingat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang singkat.
 - 4) Jasa Komersial
Jasa komersial yang nilai kontraknya lebih dari 100juta, pengakuan progress fisik diukur sebagai rasio (dalam persentase) antara realisasi jumlah man-hour terhadap budget man-hour secara keseluruhan dengan memperhatikan tahapan fisik yang telah dicapai. Selain pengakuan pendapatan in-progress, juga dilakukan pengukuran biaya kontrak in progress yaitu sebesar progress fisik yang dicapai dikalikan total anggaran menurut RAB. Hasil tersebut setelah dikurangi jumlah realisasi biaya yang sebenarnya terjadi dicatat sebagai beban kontrak yang masih harus dibayar.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

f. Transaksi dengan Pihak-Pihak Yang Berelasi

Pengungkapan pihak-pihak yang berelasi berdasarkan PSAK 7 (Revisi 2010) menyatakan bahwa karyawan kunci adalah termasuk pihak-pihak yang berelasi, pada paragraf 16 mensyaratkan pengungkapan kompensasi terhadap manajemen kunci. Berdasarkan definisi pada paragraf 09 menyatakan sebagai berikut: "Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur dan komisaris (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari entitas".

Dengan ketaatan kepada PSAK tersebut, pengungkapan kompensasi terhadap manajemen kunci adalah sebagai berikut:
Jumlah gaji & tunjangan untuk beban Komisaris dan Direksi

31 Desember 2016	31 Desember 2015
Rp15.685.310.093	Rp12.837.671.231

Definisi terkait lainnya adalah "Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah". Pengungkapan transaksi dengan BUMN berupa rekening bank dan deposito, piutang dan utang kepada BUMN adalah sebagaimana disajikan pada catatan 29 dalam laporan ini.

g. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing yang terjadi sepanjang tahun dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan kedalam Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi nilai tukar yang diakibatkan penjabaran dikreditkan atau dibebankan ke perhitungan laba rugi periode berjalan.

Kurs tengah yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebagai berikut:

Mata uang asing	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Dolar Amerika (USD)	13.436	13.795
Dolar Singapura (SGD)	9.299	9.751
EURO	14.162	15.070

h. Aset Tetap

Perusahaan telah menerapkan PSAK 16 (Revisi 2011) mengenai "Aset Tetap" dengan memilih menggunakan model biaya dalam mengukur aset tetapnya sebagaimana tersebut dalam paragraf 30. Sesuai dengan metode tersebut, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya dan akumulasi rugi penurunan nilai (jika ada). Aset tetap kecuali hak atas tanah, disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (double declining method) kecuali bangunan/ gedung disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) sesuai dengan tarif penyusutan sebagai berikut:

<u>Jenis aset tetap</u>	<u>Umur Manfaat (tahun)</u>
Bangunan	20 – 40 Tahun
Kendaraan bermotor roda 2	4 – 5 Tahun
Kendaraan bermotor roda 4	5 -8 Tahun
Inventaris	4 – 16 Tahun

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Aset Tetap (lanjutan)

Biaya Perolehan Aset Tetap setelah dikurangi estimasi nilai residunya disusutkan selama estimasi umur manfaat Aset Tetap yang bersangkutan. Setiap akhir periode pelaporan keuangan dilakukan kaji ulang terhadap estimasi umur manfaat dan nilai residu aset tetap. Penyesuaian beban penyusutan sebagai hasil kaji ulang tersebut diperlakukan secara prospektif.

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya pemugaran, dan penambahan dalam jumlah signifikan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PSAK No. 16 (Revisi 2011) tentang aset tetap, dikapitalisasi. Aset yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap yang bersangkutan tercermin dalam operasi tahun berjalan.

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (estimated recoverable amount) maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

i. Aset Tak Berwujud

Pengungkapan aset tak berwujud adalah berdasarkan PSAK 19 (revisi 2010) dalam paragraf 08 didefinisikan bahwa Aset tak berwujud adalah aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Jika piranti lunak bukan merupakan bagian integral dari perangkat kerasnya, maka piranti lunak komputer diperlakukan sebagai aset tak berwujud, namun jika piranti lunak merupakan bagian integral dari perangkat kerasnya maka diperlakukan sebagai aset tetap.

j. Aset Dalam Pembangunan

Aset dalam pembangunan meliputi bangunan dan prasarana lainnya, yang dinyatakan berdasarkan biaya pembangunan, biaya pegawai langsung, biaya tidak langsung dalam pembangunan tersebut dan biaya-biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai aset selama masa pembangunan. Akumulasi biaya aset dalam pembangunan akan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan dan kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat pembangunan selesai dan aset tersebut siap untuk dipergunakan.

k. Aset Dimiliki Untuk Dijual

Aset dimiliki untuk dijual merupakan aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi dan sudah mendapat persetujuan dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara untuk dijual. Aset ini dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Jika nilai buku aset belum mencapai Rp 1, maka penyusutan untuk tahun bersangkutan hanya selama beberapa bulan sampai diterbitkannya Surat Persetujuan dari Menteri Negara BUMN. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap yang bersangkutan tercermin dalam operasi tahun berjalan.

l. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dan Beban Jasa secara bertahap sesuai tahap kemajuan yang dicapai pada tiap-tiap akhir bulan. Akun Tagihan Bruto di Laporan Posisi Keuangan mencerminkan pekerjaan yang masih dalam tahap penyelesaian pada akhir periode pelaporan keuangan.

Biaya operasi yang digolongkan sebagai beban jasa adalah meliputi biaya-biaya langsung dan overhead yang dapat diatribusikan langsung atau dialokasikan secara sistematis kepada tiap-tiap kontrak. Biaya-biaya yang tidak memenuhi kriteria biaya jasa digolongkan sebagai beban usaha. Beban usaha diakui pada saat terjadinya.

m. Perpajakan

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak dalam tahun berjalan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku.

Pajak penghasilan tangguhan disajikan dengan jumlah penuh dengan menggunakan metode kewajiban. Pajak penghasilan tangguhan timbul akibat perbedaan temporer yang ada antara aset dan kewajiban atas dasar pajak dengan nilai tercatat aset dan kewajiban dalam laporan keuangan. Tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku digunakan dalam menentukan pajak penghasilan tangguhan.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

- m. Perpajakan (lanjutan)
Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.
Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah diterima.
- n. Imbalan Jangka Panjang Bagi Karyawan
Perusahaan menyelenggarakan program imbalan jangka panjang bagi karyawan yaitu meliputi Imbalan Pensiu, Imbalan Balas Jasa dan Pengabdian, Imbalan Cuti Besar serta Imbalan DPLK. Pengakuan dan pengukuran beban serta pembentukan provisi sebagai konsekuensi dari keempat program imbalan tersebut dihitung secara aktuarial dengan menggunakan metode dan asumsi sebagai berikut:
1. Metode aktuarial yang dipergunakan : Projected Unit Credit
 2. Tingkat diskonto untuk menghitung nilai kini manfaat imbalan mengacu pada tingkat imbal hasil surat utang negara yang berdurasi relatif sama dengan rata-rata sisa masa kerja karyawan atau rata-rata sisa jatuh tempo pembayaran manfaat kepada karyawan.
 3. Tingkat kenaikan gaji dasar mengacu pada rata-rata kenaikan gaji dasar pada periode-periode sebelumnya.
 4. Laba / rugi aktuaria yang terjadi tidak diakui sekaligus, melainkan diamortisasi selama rata-rata sisa masa kerja karyawan untuk jumlah yang melebihi 10 % dari asset program atau 10 % dari nilai kini liabilitas.
 5. Beban jasa lalu yang sudah vested diakui sekaligus, sedangkan untuk yang belum vested diamortisasi selama sisa periode sampai dengan menjadi vested.
- o. Aset keuangan dan kewajiban keuangan
Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 50 (Revisi 2010) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2011) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012, kebijakan akuntansi atas aset dan kewajiban keuangan adalah sebagai berikut:
1. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut (i) aset keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman dan piutang, (iii) aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung pada tujuan saat aset keuangan tersebut diperoleh. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal.
 - (i) Aset keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi
Aset keuangan yang nilai wajarnya diakui di laporan laba atau rugi adalah aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset untuk diperdagangkan. Sebuah aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset untuk diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti yang menunjukkan latar belakang untuk mengambil keuntungan jangka pendek.
 - (ii) Pinjaman dan piutang
Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak terpengaruh oleh pasar aktif. Pinjaman dan piutang awalnya diakui sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pinjaman dan piutang terdiri dari piutang usaha dan piutang lainnya.
 2. Kewajiban keuangan
Perusahaan mengklasifikasikan kewajiban keuangan dalam kategori (i) kewajiban keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi dan (ii) kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
 - (i) Kewajiban keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi
Kewajiban keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi adalah kewajiban keuangan yang diklasifikasikan sebagai kewajiban yang diperdagangkan. Sebuah kewajiban keuangan diklasifikasikan sebagai kewajiban yang diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti yang menunjukkan latar belakang untuk mengambil keuntungan jangka pendek.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

o. Aset keuangan dan kewajiban keuangan (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar derivatif yang dikelola dalam hubungannya dengan kewajiban keuangan yang dimaksud termasuk dalam "laba/rugi selisih kurs".

(ii) Kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Kewajiban keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi adalah hutang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman, dan obligasi.

3. Estimasi nilai wajar

Perusahaan menggunakan harga pasar untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan yang aktif diperdagangkan di pasar.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Perusahaan menggunakan metode diskonto arus kas dengan menggunakan asumsi-asumsi yang didasarkan pada kondisi pasar pada tanggal neraca yang kemudian digunakan untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan.

p. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen untuk membuat berbagai estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas serta pengukuran aset, liabilitas, komitmen dan kontinjenji pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Akun-akun yang kemungkinan merupakan estimasi dan asumsi antara lain: Penyisihan piutang, Liabilitas imbalan kerja, Pajak penghasilan - Pajak Kini, Beban Bonus serta akun-akun terkait. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

3. KAS DAN SETARA KAS

	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
Kas		
Rupiah	4.194.446.294	1.099.452.011
SGD (2016: SGD 1.683,75; 2015: SGD 1.528)	149.741.332	14.895.043
USD (2016: 5.800)	<u>77.928.800</u>	-
Jumlah Kas	4.422.116.426	1.114.347.054
Bank		
Rupiah:		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	22.379.655.635	46.192.947.933
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.133.273.805	2.713.867.286
PT Bank Jabar Banten	212.644.560	62.239.003
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	<u>193.634.922</u>	-
Jumlah Valuta Rupiah	32.919.208.922	48.969.054.220
Mata uang asing:		
Dolar Amerika:		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016: USD93.982,96; 2015: USD296.727)	1.262.755.050	10.993.817.370

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016: USD20.249,5; 2015: USD2.142.132,6)	272.072.282	350.431.076
Dolar Singapura:		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016: SGD98.389.; 2015: SGD631.147)	914.920.799	1.078.241.027
Overseas Express Bank Singapura (2016: SGD226.344,95; 2015: SGD248.693)	<u>2.104.781.690</u>	<u>2.523.014.304</u>
Jumlah Bank Mata Uang Asing	<u>4.554.529.821</u>	<u>14.945.503.777</u>
Jumlah Bank	<u><u>37.473.738.743</u></u>	<u><u>63.914.557.999</u></u>
Deposito Berjangka:		
<u>Rupiah:</u>		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Syariah	9.000.000.000	9.000.000.000
PT Bank BNI (Persero) Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Syariah	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.000.000.000	20.000.000.000
PT Bank Bukopin	2.000.000.000	12.000.000.000
PT Bank Jabar Banten	5.000.000.000	19.000.000.000
PT Bank BRI (Persero) Tbk	5.000.000.000	10.000.000.000
PT Bank BRI Syariah	-	-
PT Bank Muamalat	<u>14.500.000.000</u>	<u>37.500.000.000</u>
Jumlah Deposito	<u>47.500.000.000</u>	<u>109.500.000.000</u>
Jumlah Kas dan Setara Kas	<u><u>89.395.855.169</u></u>	<u><u>174.528.905.053</u></u>

Jaminan Bank garansi jangka pendek adalah uang di bank unit produksi yang sementara tidak dapat digunakan karena dijadikan jaminan garansi bank dalam durasi jangka pendek.

	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
Deposito berjangka:		
Tingkat suku bunga	6,5% – 9,5%	4,5% – 9,5%
Jangka waktu	1 – 3 bulan	1 – 3 bulan

4. PIUTANG USAHA

Saldo piutang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
Piutang Usaha Berelasi		
PT Pertamina (Persero) Dit. Hilir Bidang Perkapalan	13.793.997.997	15.079.269.816
PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java	10.520.749.086	1.109.631.083
PT Sucofindo (Persero)	-	7.457.720.458
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1.349.280.022	4.880.496.037
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	3.277.802.412	3.295.110.466
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	<u>10.520.749.086</u>	<u>1.030.459.700</u>
Jumlah Piutang Usaha Berelasi	<u><u>39.462.578.603</u></u>	<u><u>32.852.687.560</u></u>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PIUTANG USAHA (lanjutan)

	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
Piutang Usaha Pihak Ketiga		
Conocophilips Indonesia Inc. Ltd	4.935.441.895	6.026.416.047
PT Chevron Pacific Indonesia	2.279.811.097	5.785.940.147
Cnooc Ses Ltd.	1.942.672.208	4.036.842.749
Bureau Veritas	1.360.525.930	1.386.250.387
KSO HK-Moeladi Promatcon	8.798.050	3.182.385.450
Anugerah Wijaya Bersaudara	1.276.420.260	1.713.026.327
Star Energy (Kakap) Ltd.	124.919.418	1.518.041.053
PT Syncro Synergy	1.458.394.896	1.466.956.746
Lain-lain (dibawah 1Milyar)	<u>249.133.148.094</u>	<u>197.019.448.902</u>
Jumlah Piutang Usaha Pihak Ketiga	<u>262.520.131.848</u>	<u>222.135.307.808</u>
Jumlah Piutang Usaha	<u>301.982.710.451</u>	<u>254.987.995.368</u>
Dikurangi penyisihan piutang	<u>(37.562.403.230)</u>	<u>(35.254.112.181)</u>
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	<u>264.420.307.221</u>	<u>219.733.883.187</u>

Saldo piutang usaha dirinci berdasarkan jenis usaha jasa dan penyisihan piutang sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
Piutang Jasa Klasifikasi	118.948.950.327	107.943.807.201
Piutang Jasa Komersil	183.033.760.124	147.044.188.167
Sub Jumlah	301.982.710.451	254.987.995.368
Dikurangi penyisihan piutang	<u>(37.562.403.230)</u>	<u>(35.254.112.181)</u>
Jumlah Piutang Usaha	<u>264.420.307.221</u>	<u>219.733.883.187</u>

Rincian piutang berdasarkan umurnya adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
1 sampai dengan 12 bulan	259.642.729.226	210.221.117.917
13 sampai dengan 24 bulan	15.123.507.531	25.286.368.496
25 sampai dengan 36 bulan	11.596.516.414	6.351.976.062
Di atas 36 bulan	<u>15.619.957.280</u>	<u>13.128.532.893</u>
Jumlah Piutang Usaha	<u>301.982.710.451</u>	<u>254.987.995.368</u>

Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2011) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Sesuai dengan PSAK tersebut, Perusahaan telah melakukan penilaian kecukupan penyisihan piutang tak tertagih pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Berdasarkan penilaian yang dilakukan, pada tanggal 31 Desember 2016 Perusahaan menambah penyisihan piutang usaha sebesar Rp2.308.291.049, sehingga saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2016 berjumlah Rp37.562.403.230. Tambahan penyisihan tersebut seluruhnya dibebankan pada tahun 2016. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan yang telah dibentuk cukup memadai untuk mengantisipasi kerugian piutang tak tertagih.

Ikhtisar mutasi saldo penyisihan piutang usaha per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
Saldo awal tahun	35.254.112.181	26.092.514.920
Penyisihan yang dibentuk	<u>2.308.291.049</u>	<u>9.161.597.261</u>
Saldo akhir tahun	<u>37.562.403.230</u>	<u>35.254.112.181</u>

5. TAGIHAN BRUTO

	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
Nilai kontrak pekerjaan	410.853.283.774	96.518.790.657
Rata-rata progress penyelesaian pekerjaan	<u>12%</u>	<u>39%</u>
Diakui dalam Tagihan Bruto	<u>49.154.504.654</u>	<u>37.485.461.551</u>

	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
Tagihan Bruto Berelasi:		
PT Pertamina RU	3.533.281.113	-
PT Pertamina EP	2.873.804.339	10.657.911.310
KSO Pertamina	1.560.000.000	-
PT. Pertamina (Persero)	182.694.000	3.576.229.905
PT Antam (Persero) Tbk	329.899.337	623.369.739
PT Pertamina Gas	-	477.125.000
Kementrian Kelautan & Perikanan	-	454.645.378
PLTU Cilacap	-	137.049.772
PT Pertamina Hulu Energi	712.652.345	-
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	593.429.000	104.714.386
PT. Pertamina Drilling Services Indonesia	-	-
PT.Pertamina UBEP Limau	413.246.500	250.514.873
Pertamina Geothermal Energy	274.178.800	-
PT PGN LNG Energy	218.100.000	-
PT Wijaya Karya	<u>155.600.000</u>	<u>-</u>
Jumlah Tagihan Bruto Berelasi	<u>10.846.885.434</u>	<u>16.281.560.363</u>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. TAGIHAN BRUTO (lanjutan)

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Tagihan Bruto Pihak Ketiga:		
Exxon Mobile	6.444.770.385	-
Chevron Indonesia	2.941.001.193	1.453.566.642
Chevron Pacific Indonesia	2.606.258.677	-
Hyundai Engineering & Contruction	2.419.250.945	-
Conoco Philips	2.854.311.120	-
Husky-Cnooc Manura LTD	1.763.572.080	-
Chevron Geothermal Indonesia LTD	1.054.482.000	-
PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara	1.004.398.495	-
Cnoocs Ses. Ltd.	1.470.147.280	407.499.386
Premiere Oil Natuna	836.934.029	-
PT Total E&P Indonesia	773.807.000	-
Menergy Offshore Limited	764.579.171	-
EMP Malacca Strait SA	754.200.000	-
Bumi Armada (Armada Madura EPC)	743.731.000	-
PT Alstom	585.750.000	-
Rekayasa Teknik	448.200.000	-
PT Dalle Engineering Construction	432.000.000	-
BUT Chevron	420.750.000	-
BP Berau	359.584.196	-
PT Pelayaran Menaratama Samudra Indah	334.875.000	-
PT Arun Gas	310.750.000	-
PT Jaya Gas Indonesia	303.530.128	-
PT Rekayasa Industri	298.500.000	-
PT Bio Energy Bangsa	222.750.000	-
PT Sumber Penghidupan Abadi Jaya	180.420.000	-
PT Sillo Maritime Perdana	175.500.000	-
PT Hokari Linex Pratama	165.600.000	-
PT Cahaya Tunggal Perkasa	163.513.693	-
Terminal Peti Kemas Kodja	160.575.000	-
PT Sepuluh Sumber Anugrah	142.500.000	-
PT Mikgro Metal Perdana	135.000.000	-
Star Energy (Wayang Windu) LTD	131.790.000	-
PT BW Offshore TSB Invest	121.312.500	-
PT Badak Natural Gas Liquefaction	103.102.568	1.001.529.498

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. TAGIHAN BRUTO (lanjutan)

	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
PT Petro Storindo Energi	-	320.666.017
PT Gatramas Internusa	-	130.191.453
PT Pupuk Kaltim	-	158.474.576
Lain-lain (dibawah Rp100juta)	<u>6.680.172.760</u>	<u>17.731.973.616</u>
Jumlah Tagihan Bruto Pihak Ketiga	<u>38.307.619.220</u>	<u>21.203.901.188</u>
Jumlah Tagihan Bruto	<u>49.154.504.654</u>	<u>37.485.461.551</u>

Seluruh saldo tagihan bruto di atas mencerminkan nilai pekerjaan segmen Komersil dan Klas yang per 31 Desember 2016 dan 2015 masih dalam tahap penyelesaian dan belum dilakukan penagihan termin.

6. ASET DIMILIKI UNTUK DIJUAL

	2016				
	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklasifikasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
<u>Harga Perolehan:</u>					
Kendaraan	7.016.450.864	-	-	-	7.016.450.864
Inventaris gol I	964.104.378	-	-	-	964.104.378
Inventaris gol II	326.708.229	-	-	-	326.708.229
Inventaris gol III	2.163.709.625	-	-	-	2.163.709.625
Jumlah Harga Perolehan	<u>10.470.973.096</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10.470.973.096</u>
<u>Akumulasi Penyusutan:</u>					
Aset tersedia dijual – Kendaraan	10.458.092.680	-	-	-	10.458.092.680
Nilai Buku	<u>12.880.416</u>				<u>12.880.416</u>
2015					
	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklasifikasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
<u>Harga Perolehan:</u>					
Kendaraan	11.563.073.401	1.966.340.498	6.512.963.035	-	7.016.450.864
Inventaris gol I	3.918.544.069	6.285.836.203	9.240.275.894	-	964.104.378
Inventaris gol II	2.521.261.131	3.371.149.967	5.565.702.869	-	326.708.229
Inventaris gol III	2.163.709.625	26.795.263	26.795.263	-	2.163.709.625
Jumlah Harga Perolehan	<u>20.166.588.226</u>	<u>11.650.121.931</u>	<u>21.345.737.061</u>	<u>-</u>	<u>10.470.973.096</u>
<u>Akumulasi Penyusutan:</u>					
Aset tersedia dijual – Kendaraan	19.869.968.381	11.650.121.903	21.061.997.604	-	10.458.092.680
Nilai Buku	<u>296.619.845</u>				<u>12.880.416</u>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. HUTANG USAHA

Akun ini merupakan kewajiban Perusahaan atas bagian kerjasama kepada partner asing maupun dalam negeri yang pembayarannya dilakukan secara periodik. Saldo hutang usaha per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Hutang Usaha Pihak Ketiga		
Det Norske Veritas – GL	11.081.399.347	1.275.725.043
Jumlah Hutang Usaha Pihak Ketiga	<u>11.081.399.347</u>	<u>1.275.725.043</u>

13. HUTANG LAIN-LAIN

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Hutang Lain-lain Pihak Berelasi:		
PT Telekomunikasi Indonesia	662.134.000	2.352.000.000
PT Asuransi Jasindo	9.194.000	-
Dana Pensiun PT BKI	61.720.525	1.007.863.600
PT. PLN	569.239.200	-
IPERINDO	30.000.000	-
Rumah Sakit Jakarta	21.261.500	-
Kantor Pos	7.445.005	-
PT. Sucifundo	6.800.000	-
BPJS Kesehatan	4.080.295	-
Koperasi Pegawai BKI (Kantor Pusat)	1.500.717.713	664.923.693
Koperasi Pegawai BKI (Surabaya)	63.291.800	-
Koperasi Pegawai BKI (Batam Komersi)	5.000.000	-
Jumlah Hutang Lain-lain Berelasi	<u>2.940.884.038</u>	<u>4.024.787.293</u>
Hutang Lain-Lain Pihak Ketiga:		
Wearnes Automotive, Pte. Ltd.	102.289.000	429.044.000
PT Pratita Prama Nugraha	244.717.000	146.305.000
PT Permata Sejahtera Buana	-	268.181.818
PT Global Solution	335.835.000	1.098.439.500
PT. Brantas Abipraya	5.124.036.364	-
PT. Dwipa Perkasa	1.796.280.000	-
PT. Rekayasa Penta Asia	1.254.575.000	-
PT. Duta Transformasi Insani	237.500.000	-
CV. Margosari	203.500.000	-
PT Kharisma	-	218.933.000
PT. Multi Teknologi Inspекsi	168.000.000	-
Lembaga Management FEUI	145.454.545	-
PT Mitra Integrasi Informatika	-	2.969.000.000
PT Dynatech International	-	2.314.800.000
PT Savira Pratama Abadi	-	2.152.500.000
PT Rekayasa Solverindo	870.635.820	1.377.675.000
PT JW Marine Energy Consultan	104.260.000	729.000.000
PT Yodya Karya	-	684.494.040
PT Inti Segara Services	-	378.010.750

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. HUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Hutang Lain-Lain Pihak Ketiga(lanjutan):		
CV Revanza Agung	-	213.510.273
PT Skema Energi Asia	-	210.000.000
CV Orens Cakram	-	189.000.000
PT Multi Talenta Solution	-	174.675.000
Universitas Riau	-	171.000.000
PT Karyatama Cipta	-	138.471.960
CV.Fajar	-	130.750.000
PT PJ - Tek Mandiri	-	122.500.000
PT Pro Spec	-	114.000.000
Hotel Lor in Sentul	-	100.324.997
Koperasi Prima Jaya Migas	131.200.000	-
PT Tripiranti Maju Jaya	114.000.000	-
PT Galih Kursa Utama	103.713.000	-
PT Elnusa	128.125.000	-
Lain-lain (dibawah Rp100 juta) sebanyak :	<u>1.340.898.063</u>	<u>1.027.636.938</u>
Hutang Lain-Lain Pihak Ketiga	<u>15.345.902.830</u>	<u>19.383.039.569</u>
Jumlah Hutang Lain-lain	<u>12.405.018.792</u>	<u>15.358.252.276</u>

14. HUTANG BIAYA

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Hutang Biaya Pihak Berelasi:		
Beban Direksi dan Komisaris	3.012.774.474	2.555.574.350
Hutang Biaya Lainnya:		
Beban Personel	15.508.623.462	22.916.507.772
Beban produksi konsultansi & supervisi	20.839.576.059	26.540.745.490
Beban fasilitas kerja	434.563.549	272.288.795
Beban pengembangan operasi	983.424.277	481.492.960
Beban pemasaran	81.808.250	21.566.500
Beban pemeliharaan	8.469.804	28.795.000
Beban lainnya	11.477.600	1.082.176.129
Jumlah Hutang Biaya	<u>40.880.717.475</u>	<u>53.899.146.996</u>

Beban yang masih harus dibayar atas beban Personel dan beban Direksi dan Komisaris terdiri atas pembebatan atas insentif jasa produksi karyawan dan tantiem Direksi dan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

15. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
PPN Masukan	6.222.736.360	3.029.597.245
PPH pasal 23	14.788.914.143	7.578.553.688
PPH pasal 25	95.807.878.110	54.307.000.000
Jumlah Pajak Dibayar Dimuka	<u>116.819.528.613</u>	<u>64.915.150.933</u>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Taksiran Pajak Penghasilan

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Pajak kini	(23.000.495.336)	(30.234.088.886)
Penghasilan/(beban) pajak tangguhan	808.637.738	2.730.615.215
Jumlah	<u>(22.191.857.598)</u>	<u>(27.503.473.671)</u>

c. Utang Pajak

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Pajak Penghasilan Pasal 21 Wapu	13.532.353.463	9.484.488.762
Pajak Penghasilan Pasal 23 Wapu	714.871.387	214.265.486
Pajak Penghasilan Pasal 29	55.922.728.033	30.253.244.886
PPH Final	36.000	1.238.545.251
PPN masukan – Wapu	2.035.015.185	651.864.843
Pajak Pertambahan Nilai (Pajak Keluaran)	<u>17.088.469.921</u>	<u>14.396.348.685</u>
Jumlah	<u>89.293.473.989</u>	<u>56.238.757.913</u>

d. Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi antara laba sebelum taksiran pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Laba sebelum pajak	89.805.132.591	108.025.963.379
Beda tetap:		
Pendapatan jasa giro	(522.108.253)	(624.298.890)
Pendapatan bunga deposito	(5.648.133.377)	(7.291.929.818)
Pendapatan sewa ruang ATM & Gedung Lama	(76.000.000)	-
Pengembangan perusahaan/ Beban yang tidak dapat dikurangkan	1.322.141.919	969.000.000
Kerjasama pihak keiga	1.328.712.430	7.888.451.950
Rekreasi dan olahraga	244.243.419	148.000.000
Koreksi beban pendapatan tahun lalu	1.829.662.595	621.920.964
Listrik, air, telepon (rumah dinas)	271.908.941	105.670.000
Cinderamata	-	72.000.000
Sumbangan dan biaya duka	211.870.130	99.117.098
Jumlah beda tetap	<u>(1.037.702.196)</u>	<u>1.987.931.304</u>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Rekonsiliasi Fiskal (lanjutan)

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Beda waktu:		
Penyisihan piutang		
- Beban Penyisihan piutang tahun berjalan	2.308.291.049	9.161.597.262
- Penilaian Kembali Aset Pajak Tangguhan yang tidak diakui	6.696.732.652	-
Provisi Imbalan Kerja Jangka Panjang Karyawan	(6.048.472.117)	801.265.221
Penyusutan aset	277.999.366	959.598.378
Jumlah beda waktu	<u>3.234.550.950</u>	<u>10.922.460.861</u>
Taksiran laba kena pajak bersih tahun berjalan	92.001.981.345	120.936.355.544
Taksiran laba fiskal dibulatkan	92.001.981.345	120.936.355.544
Taksiran pajak penghasilan badan (25%)	23.000.495.336	30.234.088.886
Pajak atas pendapatan komprehensif lainnya		-
Kredit pajak:		
Pajak Penghasilan pasal 23	7.210.360.458	7.578.553.688
Pajak Penghasilan pasal 24 Luar Negeri		-
Pajak Penghasilan pasal 25	36.563.878.110	54.307.000.000
Jumlah kredit pajak	<u>43.774.238.568</u>	<u>61.885.553.688</u>
Pajak penghasilan kurang (lebih) bayar	(20.773.743.232)	(31.651.464.802)

e. Aset Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban adalah sebagai berikut:

	2016			
	Saldo Awal	Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan	Dibebankan pada Komprehensif Lain	Saldo Akhir
Kewajiban manfaat karyawan	10.945.295.841	(1.512.118.029)	2.303.205.806	11.736.383.618
Penyisihan piutang ragu-ragu	7.139.344.882	2.251.255.925	-	9.390.600.807
Penyusutan asset	(992.418.480)	69.499.842	-	(922.918.639)
Jumlah pajak tangguhan	<u>17.092.222.243</u>	<u>808.637.738</u>	<u>2.303.205.806</u>	<u>20.204.065.786</u>
	2015			
	Saldo Awal	Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan	Dibebankan pada Komprehensif Lain	Saldo Akhir
Kewajiban manfaat karyawan	16.169.112.546	200.316.305	(5.424.133.010)	10.945.295.841
Penyisihan piutang ragu-ragu	4.848.945.567	2.290.399.315	-	7.139.344.882
Penyusutan asset	(1.232.318.074)	239.899.595	-	(992.418.480)
Jumlah pajak tangguhan	<u>19.785.740.039</u>	<u>2.730.615.215</u>	<u>(5.424.133.010)</u>	<u>17.092.222.243</u>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Revaluasi Aset Tetap

Perseroan telah melakukan revaluasi atas Aset Tetap oleh jasa penilai independen untuk tujuan perpajakan dan telah mendapatkan persetujuan penetapan dari Kantor Pajak No. KEP – 570 /WPJ.19/2016 tanggal 28 Desember 2016 dengan besaran nilai pajak sebesar Rp2.655.546.187,- dan telah disetor Rp525.952.100,- pada tanggal 28 Desember 2015 dan Rp2.131.903.687,- pada tanggal 30 Juni 2016.

16. HUTANG BRUTO

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Bidang klasifikasi	3.431.086.829	4.014.833.737
Bidang Komersil	<u>4.885.538.068</u>	<u>3.025.579.573</u>
Jumlah	<u>8.316.624.897</u>	<u>7.040.413.310</u>

Utang Bruto untuk bidang klasifikasi dan bidang komersil adalah saldo uang muka survey yang diterima dari perusahaan pelayaran/rekanan yang akan diperhitungkan dengan invoice terbit yaitu pada saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan.

Utang bruto berdasarkan rincian pelanggan untuk tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Hutang Bruto Berelasi		
PT Pertamina (Persero)	15.000.000	56.160.000
PT PLN (Persero)	<u>177.213.200</u>	<u>-</u>
Jumlah Hutang Bruto Berelasi	<u>192.213.200</u>	<u>56.160.000</u>
Hutang Bruto Pihak Ketiga		
Verified Gross Mass Container	2.262.574.022	-
PT. PANN	160.215.300	160.215.300
PT Lintas Utara Lines	117.100.000	-
Tonasa Lines	100.000.000	100.000.000
PT. Pusaka Samudera Indonesia	87.712.590	87.712.590
PT. Mustika Alam Lestari	84.780.000	87.712.590
Bapak Maniji Nur untuk kapal berkat kurnia-01	70.730.000	70.730.000
PT. Newship Nusa Bersama	62.065.300	62.065.300
PT. Samudera Timur Mas	55.000.000	-
Atlantic China Welding Consumalbes Inc.	-	173.979.199
PT. Andika Jana Bhumi Sejahtera	-	140.724.564
Nippon Kaiji Kyokai	-	130.199.498
Sdr. Atoet Parantopo	-	123.101.000
PT. PACC Ship Managers	-	98.094.000
PT. Nusantara Shipping Line	-	65.000.000
Dian Andriani	-	64.547.000
Cnooc Ses. Ltd.	-	62.208.259
Chosun Vina CO LTD	-	60.352.381
PT. Pelabuhan Borneo Karya Swadiri untuk kapal	-	59.620.000
PT. BH Marine & Offshore Engineering	-	57.312.400
PT. Indo Shipping	-	54.027.600
Suryo Anggoro	-	51.150.000
Lain-lain (dibawah 50 juta) sebanyak :	<u>5.124.234.485</u>	<u>5.275.501.629</u>
Jumlah Hutang Bruto Pihak Ketiga	<u>8.124.411.697</u>	<u>6.984.253.310</u>
Jumlah Hutang Bruto	<u>8.316.624.897</u>	<u>7.040.413.310</u>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

Akun ini merupakan iuran pegawai kepada DPLK BNI dan Dana Pensiun BKI, yaitu sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
DPLK BNI	5.230.535	280.535
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	<u>5.230.535</u>	<u>280.535</u>

18. PROVISI IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG KARYAWAN

a. Imbalan Dana Pensiun

Manfaat Pensiun diberikan kepada karyawan yang telah memasuki usia pensiun atau berhenti bekerja oleh sebab lainnya yang diatur dalam peraturan dana pensiun. Besarnya manfaat pensiun yang diberikan ditentukan oleh masa kerja karyawan dan besarnya Penghasilan Dasar Pensiun terakhir (gaji pokok ditambah tunjangan keluarga).

Pendanaan program pensiun ini dibentuk setiap bulan dari iuran karyawan sebesar 6% dan iuran yang ditanggung Perseroan sebesar 15,4% dari gaji dasar karyawan.

Pengelolaan dana program pensiun dilakukan oleh Dana Pensiun PT Biro Klasifikasi Indonesia. Adapun peraturan dana pensiunnya yang terakhir kali ditetapkan oleh Keputusan Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia No. B.0038D/KP903/KI-05 tanggal 01 Januari 2005 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-049/KM.12/2006 tanggal 03 Agustus 2006.

Penetapan beban (pendapatan) imbalan pasca kerja program dana pensiun tahun 2016 dan 2015:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Beban jasa kini	2.935.863.515	2.865.443.685
Beban bunga	6.836.297.564	7.186.259.819
-/- Imbalan Hasil investasi	5.301.931.932	4.775.128.161
Beban (pendapatan) yang diakui	<u>4.470.229.147</u>	<u>5.276.575.343</u>

Rekonsiliasi pendanaan imbalan pasca kerja program pensiun untuk tahun 2016 dan 2015:

	2016	2015
Nilai Kini Kewajiban	83.335.942.582	75.958.861.818
Nilai Wajar Aset	64.850.248.170	58.910.354.804
Status Pendanaan	18.485.694.412	17.048.507.014
Biaya dibayar dimuka (Cadangan) yang diakui pada akhir periode	<u>18.485.694.412</u>	<u>17.048.507.014</u>

Rekonsiliasi biaya dibayar dimuka (cadangan) imbalan pasca kerja program pensiun pada posisi 31 Desember 2016 dan 2015:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Biaya dibayar dimuka (Cadangan) awal	17.048.507.014	36.771.268.170
Beban (Pendapatan)	4.470.229.147	5.276.575.343
Pendapatan Komprehensif Lain	3.204.375.772	20.175.036.675
Iuran Pemberi Kerja	6.237.417.521	4.824.299.824
Biaya dibayar dimuka (Cadangan) akhir periode	<u>18.485.694.412</u>	<u>17.048.507.014</u>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. PROVISI IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG KARYAWAN (lanjutan)

Asumsi Aktuarial

- (1) Perhitungan beban dan kewajiban aktuaria tersebut di atas dihitung oleh aktuaris independen PT Dian Artha Tama. Untuk perhitungan tahun 2014 dan 2015 berdasarkan laporan aktuaris No:185.A/PSAK/DAT/II/2016 dan 185.B/PSAK/DAT/II/2016 tanggal 17 Februari 2016. Untuk perhitungan tahun 2015 dan 2016 berdasarkan laporan aktuaris No:185.B/PSAK/DAT/II/2016 dan 117-D/PSAK/DAT/I/2017 tanggal 04 Januari 2017. Perhitungan aktuaris dilakukan dengan frekuensi setahun sekali. Adapun asumsi aktuaria yang dipergunakan adalah sebagai berikut:
- (2) Metode perhitungan yang dipergunakan : Projected Unit Credit.
- (3) Tingkat bunga diskonto yang dipergunakan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah 8,4% p.a. dan 8% p.a.
- (4) Tingkat bunga imbalan hasil investasi aset program per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah 9% p.a dan 10% p.a.
- (5) Tingkat kenaikan gaji berkala 5 % per tahun.
- (6) Tabel mortalita yang dipergunakan: GAM-1971
- (7) Usia pensiun 56 tahun.
- (8) Jumlah pegawai peserta program imbalan di atas per 31 Desember 2016 adalah 415 orang.

b. Imbalan Balas Jasa dan Pengabdian Masa Kerja

Penyelenggaraan Program Balas Jasa didasarkan pada Peraturan Direksi No.DU.249a/KP.106/KI-08 tanggal 31 Desember 2008. Manfaat Balas Jasa berupa pembayaran jumlah lumpsum diberikan kepada karyawan yang memasuki usia pensiun atau berhenti bekerja oleh sebab lain yang diatur dalam Peraturan Direksi tersebut. Adapun jumlah lumpsum yang diberikan ditentukan berdasarkan besarnya gaji terakhir dikalikan dengan angka indeks tertentu yang besarnya ditentukan oleh golongan gaji pegawai yang bersangkutan.

Adapun pengabdian masa kerja adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan yang telah bekerja selama 25 tahun. Imbalan diberikan berupa uang penghargaan 1 (satu) kali THP (Take Home Pay), peniti emas 8 gram dan piagam penghargaan.

Penyelenggaraan program imbalan ini didanai secara internal Perusahaan.

Penetapan beban (pendapatan) imbalan balas jasa dan pengabdian masa kerja tahun 2016 dan 2015:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Beban jasa kini	1.875.434.836	1.861.894.245
Beban bunga	2.309.068.846	2.150.897.096
-/- Imbalan Hasil investasi	-	-
Beban (pendapatan) yang diakui	4.184.503.682	4.012.791.341

Rekonsiliasi pendanaan imbalan balas jasa dan pengabdian masa kerja untuk tahun 2016 dan 2015:

	2016	2015
Nilai Kini Kewajiban	27.103.539.036	25.656.320.514
Nilai Wajar Aset	-	-
Status Pendanaan	27.103.539.036	25.656.320.514
Biaya dibayar dimuka (Cadangan) yang diakui pada akhir periode	27.103.539.036	25.656.320.514

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. PROVISI IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG KARYAWAN (lanjutan)

b. Imbalan Balas Jasa dan Pengabdian Masa Kerja (lanjutan)

Rekonsiliasi biaya dibayar dimuka (cadangan) imbalan pasca kerja program pensiun pada posisi 31 Desember 2016 dan 2015 :

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Biaya dibayar dimuka (Cadangan) awal	25.656.320.514	26.886.213.699
Pembayaran imbalan	8.751.412.701	3.712.098.549
Beban (Pendapatan)	4.184.503.682	4.012.791.341
Pendapatan Komprehensif Lain	6.014.127.541	1.530.585.977
Iuran Pemberi Kerja	-	-
Biaya dibayar dimuka (Cadangan) akhir periode	<u>27.103.539.036</u>	<u>25.656.320.514</u>

Asumsi Aktuarial

Perhitungan beban dan kewajiban aktuarial tersebut di atas dihitung oleh aktuaris independen PT Dian Artha Tama. Untuk perhitungan tahun 2014 dan 2015 berdasarkan laporan aktuaris No:185.A/PSAK/DAT/II/2016 dan 185.B/PSAK/DAT/II/2016 tanggal 17 Februari 2016. Untuk perhitungan tahun 2015 dan 2016 berdasarkan laporan aktuaris No:185.B/PSAK/DAT/II/2016 dan No:117-A/PSAK/DAT/I/2017 tanggal 04 Januari 2017. Perhitungan aktuaris dilakukan dengan frekuensi setahun sekali. Adapun asumsi aktuarial yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- (1) Metode perhitungan yang dipergunakan : Projected Unit Credit
- (2) Tingkat bunga diskonto yang dipergunakan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah 8,4% p.a. dan 8% p.a.
- (3) Tingkat bunga imbalan hasil investasi aset program per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah 0% p.a dan 10% p.a.
- (4) Tingkat kenaikan gaji berkala 5 % per tahun.
- (5) Tabel mortalita yang dipergunakan: GAM-1971
- (6) Usia pensiun 56 tahun.
- (7) Jumlah pegawai peserta program imbalan di atas per 31 Desember 2016 adalah 664 orang.

c. Imbalan Cuti Besar

Perusahaan memberikan imbalan cuti besar sebesar 1 (satu) kali THP (Take Home Pay) yang diberikan setiap 5 tahun sekali pada saat karyawan menjalani hak cuti besar. Penyelenggaraan program imbalan ini didanai secara internal Perusahaan.

Penetapan beban (pendapatan) imbalan cuti besar tahun 2016 dan 2015:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Beban jasa kini	463.079.213	426.428.887
Beban bunga	94.467.455	80.946.844
-/- Imbalan Hasil investasi	-	-
Laba/rugi aktuarial	485.149.872	490.202.080
Beban (pendapatan) yang diakui	<u>1.042.696.540</u>	<u>997.577.811</u>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. PROVISI IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG KARYAWAN (lanjutan)

c. Imbalan Cuti Besar

Rekonsiliasi pendanaan imbalan balas jasa dan pengabdian masa kerja untuk tahun 2016 dan 2015:

	2016	2015
Nilai Kini Kewajiban	1.319.681.064	1.049.638.387
Nilai Wajar Aset	`-	`-
Status Pendanaan	1.319.681.064	1.049.638.387
Biaya dibayar dimuka (Cadangan) yang diakui pada akhir periode	1.319.681.064	1.049.638.387

Rekonsiliasi biaya dibayar dimuka (cadangan) imbalan pasca kerja program pensiun pada posisi 31 Desember 2016 dan 2015:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Biaya dibayar dimuka (Cadangan) awal	1.049.638.387	1.011.835.544
Pembayaran imbalan	772.653.863	959.774.968
Beban (Pendapatan)	1.042.696.540	997.577.811
Pendapatan Komprehensif Lain	`-	`-
Iuran Pemberi Kerja	`-	`-
Biaya dibayar dimuka (Cadangan) akhir periode	1.319.681.064	1.049.638.387

Asumsi Aktuarial

- (1) Perhitungan beban dan kewajiban aktuarial tersebut di atas dihitung oleh aktuaris independen PT Dian Artha Tama. Untuk perhitungan tahun 2014 dan 2015 berdasarkan laporan aktuaris No:185.A/PSAK/DAT/II/2016 dan 185.B/PSAK/DAT/II/2016 tanggal 17 Februari 2016. Untuk perhitungan tahun 2015 dan 2016 berdasarkan laporan aktuaris No:185.B/PSAK/DAT/II/2016 dan No:117-B/PSAK/DAT/I/2017 tanggal 04 Januari 2017. Perhitungan aktuaris dilakukan dengan frekuensi setahun sekali. Adapun asumsi aktuarial yang dipergunakan adalah sebagai berikut:
- (2) Metode perhitungan yang dipergunakan : Projected Unit Credit
- (3) Tingkat bunga diskonto yang dipergunakan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah 8% p.a. dan 9% p.a.
- (4) Tingkat bunga imbalan hasil investasi aset program per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah 10% p.a dan 10% p.a.
- (5) Tingkat kenaikan gaji berkala 5 % per tahun.
- (6) Tabel mortalita yang dipergunakan: GAM-1971
- (7) Usia pensiun 56 tahun.
- (8) Jumlah pegawai peserta program imbalan di atas per 31 Desember 2016 adalah 664 orang.

c. DPLK

Penetapan beban (pendapatan) program DPLK tahun 2016 dan 2015:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Beban jasa kini	13.178.029	9.923.445
Beban bunga	2.404.570	570.622
-/- Imbalan Hasil investasi	`-	`-
Beban (pendapatan) yang diakui	15.582.599	10.494.067

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. PROVISI IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG KARYAWAN (lanjutan)

c. DPLK (lanjutan)

Rekonsiliasi pendanaan program DPLK untuk tahun 2016 dan 2015:

	2016	2015
Nilai Kini Kewajiban	36.619.958	26.717.450
Nilai Wajar Aset	-	-
Status Pendanaan	36.619.958	26.717.450
Biaya dibayar dimuka (Cadangan) yang diakui pada akhir periode	36.619.958	26.717.450

Rekonsiliasi biaya dibayar dimuka (cadangan) program DPLK pada posisi 31 Desember 2016 dan 2015:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Biaya dibayar dimuka (Cadangan) awal	26.717.450	7.132.770
Pembayaran imbalan	-	-
Beban (Pendapatan)	15.582.599	10.494.067
Pendapatan Komprehensif Lain	5.680.091	9.090.613
Iuran Pemberi Kerja	-	-
Biaya dibayar dimuka (Cadangan) akhir periode	36.619.958	26.717.450

Asumsi Aktuarial

- (1) Perhitungan beban dan kewajiban aktuarial tersebut di atas dihitung oleh aktuaris independen PT Dian Artha Tama. Untuk perhitungan tahun 2014 dan 2015 berdasarkan laporan aktuaris No:185.A/PSAK/DAT/II/2016 dan 185.B/PSAK/DAT/II/2016 tanggal 17 Februari 2016. Untuk perhitungan tahun 2015 dan 2016 berdasarkan laporan aktuaris No:185.B/PSAK/DAT/II/2016 dan 117-C/PSAK/DAT/I/2017 tanggal 04 Januari 2017. Perhitungan aktuaris dilakukan dengan frekuensi setahun sekali. Adapun asumsi aktuarial yang dipergunakan adalah sebagai berikut:
- (2) Metode perhitungan yang dipergunakan : Projected Unit Credit
- (3) Tingkat bunga diskonto yang dipergunakan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah 8,4% p.a. dan 8% p.a.
- (4) Tingkat bunga imbalan hasil investasi aset program per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah 0% p.a dan 10% p.a.
- (5) Tingkat kenaikan gaji berkala 5 % per tahun.
- (6) Tabel mortalita yang dipergunakan: GAM-1971
- (7) Usia pensiun 56 tahun.
- (8) Jumlah pegawai peserta program imbalan di atas per 31 Desember 2016 adalah 191 orang.

19. MODAL SAHAM

Modal saham Perusahaan per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp255.000.000.000 dan Rp255.000.000.000, seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan surat Menteri BUMN nomor : S-539/MBU/09/2014 tanggal 17 September 2014 hal Peningkatan modal dasar, penambahan modal disetor dan perubahan anggaran dasar PT BKI (Persero) disebutkan bahwa modal dasar perseroan yang semula sebesar Rp180.000.000.000 ditingkatkan menjadi Rp600.000.000.000. Meningkatkan penempatan saham sebanyak 210.000 saham, masing-masing saham dengan nilai Rp1.000.000 sehingga seluruhnya seharga 210.000.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia. Dengan adanya penambahan modal disetor tersebut, maka modal ditempatkan/disetor PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yang semula sebesar Rp45.000.000.000 menjadi sebesar Rp255.000.000.000. Menyetujui perubahan pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar PT BKI (Persero) untuk disesuaikan dengan peningkatan modal dasar. Penambahan Modal dasar sebesar Rp 210.000.000.000 di ambil dari kapitalisasi sebagian Cadangan Perseroan sampai dengan tahun buku 2013.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PEMBAGIAN LABA

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 02 Mei 2016 dengan Keputusan RUPS Nomor: RIS-29/D7.MBU/3/04/2016, pemegang saham telah menetapkan penggunaan laba bersih tahun 2015, sehingga penggunaan laba bersih tahun buku 2016 dan 2015 sebagai berikut:

	Penggunaan laba tahun buku 2016	Penggunaan laba tahun buku 2015
Pembagian Dividen	8.430.000.000	14.500.000.000
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	-	2.903.397.762
Pemindahan dari laba	48.380.816.039	127.766.490.358
Jumlah	56.810.816.039	145.169.888.120

Saldo cadangan umum per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	Pembagian laba tahun buku 2016	Pembagian laba tahun buku 2015
Saldo awal	184.178.635.642	56.412.145.284
Pemindahan dari laba	48.380.816.039	127.766.490.358
Saldo akhir	232.559.451.681	184.178.635.642

21. PENDAPATAN JASA

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Jasa klasifikasi	393.531.342.535	375.242.141.444
Jasa komersil	365.191.182.205	360.853.293.751
Bagian partner kerjasama	(20.729.122.005)	(29.446.474.249)
Jumlah	737.993.402.735	706.648.960.946

Rincian pendapatan jasa klasifikasi, jasa konsultansi dan supervisi dan bagian partner kerjasama untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Jasa Klasifikasi

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
a. Klas tunggal (Single Class)		
Klas BKI (Dalam Negeri) oleh BKI		
- Penerimaan klas	53.500.897.465	75.509.787.442
- Mempertahankan klas	172.370.330.534	144.235.345.464
- Material dan komponen	33.864.534.834	22.022.386.309
- Statutoria	64.066.204.637	60.234.146.116
Subjumlah	323.801.967.470	302.001.665.331
Klas BKI (Dalam Negeri) oleh BKI		
- Penerimaan klas	1.421.946.675	2.551.189.600
- Mempertahankan klas	2.612.401.600	4.601.561.553
- Material dan komponen	6.405.610.726	1.366.428.236
- Statutoria	5.780.907.632	7.023.944.246
Subjumlah	16.220.866.633	15.543.123.635
Jumlah Klas tunggal BKI	340.022.834.103	317.544.788.966

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. PENDAPATAN JASA (lanjutan)

A. Pendapatan Jasa Klasifikasi (lanjutan)

b. Kerjasama dengan klas asing

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Klas BKI (Luar Negeri) oleh BKI		
- Mempertahankan klas	1.125.226.248	807.800.000
- Statutoria	208.234.000	162.205.500
Jumlah Kerjasama dengan Klas Asing	<u>1.333.460.248</u>	<u>970.005.500</u>
	31 Desember 2016	31 Desember 2015
c. Klas ganda / dual class (Dalam Negeri)		
- Penerimaan klas	29.170.648.618	2.462.858.138
- Mempertahankan klas	15.270.568.094	11.918.961.604
- Material dan komponen	199.117.893	35.455.134.632
- Statutoria	3.423.844.164	2.810.072.880
Jumlah Klas ganda / dual class (Dalam Negeri)	<u>48.064.178.769</u>	<u>52.647.027.254</u>
	31 Desember 2016	31 Desember 2015
d. Klas ganda / dual class (Luar Negeri)		
- Penerimaan klas	117.960.000	144.032.000
- Mempertahankan klas	3.437.548.005	3.182.092.964
- Statutoria	555.361.410	754.194.760
Jumlah Klas ganda / dual class (Luar Negeri)	<u>4.110.869.415</u>	<u>4.080.319.724</u>
Klas asing di Indonesia	-	-
Jumlah kerjasama dengan klas asing	<u>53.508.508.432</u>	<u>57.697.352.478</u>
Jumlah pendapatan jasa klasifikasi	<u>393.531.342.535</u>	<u>375.242.141.444</u>

B. Pendapatan Jasa Komersil

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Bidang pengujian	135.961.368.212	121.589.567.952
Bidang inspeksi	143.080.421.131	127.238.835.985
Bidang rekayasa teknik	86.149.392.862	111.587.741.758
Bidang jasa marine	-	425.636.056
Lain-lain	-	11.512.000
Jumlah Pendapatan Jasa Komersil	<u>365.191.182.205</u>	<u>360.853.293.751</u>

C. Bagian Partner Kerjasama

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Kerjasama klas tunggal (single class)	-	-
Kerjasama klas ganda (dual class)	20.729.122.005	29.446.474.249
Kerjasama komersil	-	-
Jumlah Bagian Partner Kerjasama	<u>20.729.122.005</u>	<u>29.446.474.249</u>

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. BEBAN JASA

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Beban perjalanan dinas survey	72.954.994.475	73.617.352.662
Beban material	23.203.010.416	28.143.636.117
Beban tenaga kerja proyek	48.952.476.909	69.097.073.296
Beban mobilisasi dan demobilisasi	23.064.004.753	33.082.455.448
Beban jasa pihak ketiga	52.057.619.471	46.508.890.898
Beban pelaporan	5.427.315.456	-
Beban Persiapan Proyek	5.150.565.309	-
Beban Perlengkapan Proyek	414.390.714	5.684.102.349
Jumlah	<u>231.224.377.503</u>	<u>256.133.510.770</u>

23. BEBAN PEMASARAN

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Beban pemasaran	6.689.548.845	6.220.473.063
Beban humas	2.692.815.554	2.313.501.859
Beban CSR	1.023.046.720	348.710.467
Jumlah	<u>10.405.411.119</u>	<u>8.882.685.389</u>

24. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Beban direksi & komisaris	15.685.310.093	12.837.671.231
Beban personel	243.171.374.456	200.205.748.735
Beban fasilitas kerja	47.298.699.413	40.679.815.206
Beban pendidikan dan riset	10.641.981.932	6.483.358.533
Beban perjalanan dinas	15.005.950.674	12.712.229.827
Beban pengembangan operasi	26.339.125.378	28.168.154.065
Beban audit	505.352.744	523.255.148
Beban pemeliharaan	10.410.698.171	10.784.535.842
Beban penyusutan	19.957.566.058	15.878.730.653
Beban penyisihan piutang usaha	2.308.291.049	9.161.597.262
Beban provisi imbalan jangka panjang karyawan	9.713.011.968	10.297.438.562
Beban PKBL	2.532.000.000	14.665.600
Jumlah	<u>403.569.361.936</u>	<u>347.747.200.664</u>

Beban personel merupakan biaya-biaya yang berkaitan dengan pembayaran kepada karyawan baik di Kantor Pusat maupun cabang-cabang. Biaya personel tersebut terdiri dari: gaji dasar, gaji merit, gaji pangkat, tunjangan kesejahteraan, honorarium, tunjangan pengobatan, tunjangan cuti, tunjangan perumahan, asuransi dan tunjangan PPh pasal 21, tunjangan pendidikan, tunjangan uang makan, tunjangan transport dan tunjangan telepon. Sedangkan beban Direksi dan Komisaris terdiri dari honorarium, tunjangan perumahan, tunjangan pengobatan, tunjangan listrik/PAM, uang cuti, assuransi, tantiem, tunjangan komunikasi, tunjangan operasional dan fasilitas kendaraan. Pembebatan tersebut adalah sesuai dengan RKAP tahun 2016 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT.BKI (Persero) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2016 tanggal 23 Desember 2015.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Pendapatan lain-lain:		
Pendapatan bunga deposito bersih	5.648.133.377	7.291.929.818
Selisih kurs laba	1.079.627.067	9.982.369.959
Jasa Giro	522.108.253	624.298.890
Sewa Rumah	40.000.000	
Revisi pendapatan jasa klasifikasi	220.319.730	309.817.479
Revisi pendapatan jasa komersil	306.903.293	
Laba Penjualan Aset	-	1.704.076.836
Lain-lain Pendapatan	543.347.307	1.814.189.797
Jumlah Pendapatan lain-lain	8.360.439.027	21.726.682.779
Beban lain-lain:		
Beban bunga	30.024.000	55.703.662
Selisih kurs rugi	3.369.841.876	3.499.317.243
Revisi Pendapatan Jasa Klasifikasi	568.948.501	931.738.443
Revisi Pendapatan Jasa Komersil	1.787.937.117	1.179.021.581
PPH Final	2.131.903.687	525.952.100
Denda pajak kurang bayar	696.031.625	173.529.111
Beban bank	638.930.017	534.407.528
Beban duka	211.870.130	96.349.735
Lain-lain Beban	1.914.071.660	590.264.120
Jumlah Beban Lain-lain	11.349.558.613	7.586.283.523
Jumlah Pendapatan/(Beban) Lain-Lain	(2.989.119.586)	14.140.399.256
Penghasilan/(beban) komprehensif lainnya		
	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	(182.635.451)	57.470.054
Keuntungan/(Kerugian) Aktuaria	(9.212.823.222)	21.696.532.039
Pajak Penghasilan Terkait	2.303.205.806	(5.424.133.010)
Jumlah Penghasilan/(beban) komprehensif lainnya	(7.092.252.867)	16.329.869.083

26. MANAJEMEN RISIKO FINANSIAL

Dari kegiatan usaha yang dijalankannya, Perusahaan menghadapi risiko-risiko keuangan yang meliputi:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Likuiditas
3. Risiko Pasar

Pengelolaan risiko-risiko tersebut saat ini dijalankan oleh Divisi Manajemen Resiko di Kantor Pusat dengan mengacu limit-limit risiko yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

- a. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko kerugian yang akan diderita Perusahaan apabila pelanggan gagal melunasi baik sebagian maupun seluruh kewajibannya kepada Perusahaan. Terdapat tiga faktor utama yang dapat menyebabkan pihak pelanggan mengalami gagal bayar yaitu kondisi makro ekonomi atau kondisi usaha pelanggan yang kurang baik, kesulitan keuangan yang dialami pelanggan, atau karakter/itikad baik pelanggan.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. MANAJEMEN RISIKO FINANSIAL (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

Berdasarkan pengalaman secara empiris, eksposur risiko kredit yang signifikan terdapat pada pos Piutang Usaha. Besarnya eksposur risiko kredit Piutang Usaha adalah sebagaimana yang tertera di Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2016 dan 2015 sebagai nilai tercatat Piutang Usaha.

Sesuai arahan yang tertera dalam RKAP 2016 dan 2015, kebijakan yang ditetapkan Manajemen Perusahaan dalam membatasi eksposur risiko kredit tersebut adalah dengan menetapkan maksimal Collection Periodpiutang usaha untuk tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing 80 hari dan 77 hari.

Dalam realisasinya, collection periodpiutang usaha selama tahun 2016 dan 2015 tercatat mencapai 107 hari dan 115 hari. Oleh karena itu, dalam tahun 2016 dan 2015, Perusahaan meningkatkan pencadangan untuk mengantisipasi timbulnya kerugian tidak tertagihnya Piutang Usaha tersebut. Sebagaimana tertera dalam Catatan No. 5 atas laporan keuangan, Perusahaan telah menambah cadangan kerugian penurunan nilai piutang selama tahun 2016 sebesar Rp2.308.291.049,- dan tahun 2015 sebesar Rp9.161.597.262,-.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko ketidakmampuan Perusahaan untuk melunasi kewajiban keuangannya kepada pihak ekstern. Risiko ini timbul akibat ketidaksesuaian periode penerimaan kas dari penagihan piutang usaha dan periode jatuh tempo pembayaran kepada pihak ekstern (maturity mismatch). Risiko likuiditas berkaitan erat dengan risiko kredit, yaitu semakin panjang collection periodatas piutang usaha maka Perusahaan akan semakin rentan mengalami risiko likuiditas.

Untuk menggambarkan eksposur risiko likuiditas per 31 Desember 2016, berikut ini diuraikan periode jatuh tempo liabilitas jangka pendek selama periode 12 bulan ke depan yaitu sebagai berikut:

	Periode Jatuh Tempo 2017			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Hutang Usaha	11.081.399.297	-	-	-
Hutang Lain-lain	15.345.902.830	-	-	-
Hutang Biaya	40.880.717.475	-	-	-
Hutang Pajak	89.293.473.989	-	-	-
Hutang Bruto	8.316.624.897	-	-	-
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	5.230.535	-	-	-

Sesuai arahan yang tertera dalam RKAP 2016 dan 2015, kebijakan yang ditetapkan Manajemen Perusahaan dalam membatasi eksposur risiko likuiditas tersebut adalah dengan menjaga pencapaian cash ratio adalah masing-masing 680,01% dan 334,36% dari jumlah liabilitas jangka pendek.

Dalam realisasinya, cash ratio per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing mencapai 54,04% dan 126,62%.

c. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko terjadinya laba/rugi kurs akibat pertukaran mata uang asing yaitu USD atau SGD ke dalam Rupiah dan dari selisih penilaian kurs penutup saldo aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing.

Eksposur risiko pasar dari nilai tukar mata uang asing yang dimiliki Perusahaan pada posisi 31 Desember 2016 dan 2015 dapat digambarkan sebagai berikut:

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. MANAJEMEN RISIKO FINANSIAL (lanjutan)

c. Risiko Pasar

	2016			
	Dolar Amerika Serikat	Dolar Singapura	Euro	Setara Rupiah
Kas dan setara kas	114.232,46	324.734,11	-	4.554.529.821
Piutang usaha	1.365.477,97	787.562,30	-	25.670.103.833
Kewajiban	-	-	-	-
Jumlah aset bersih	1.479.710,43	1.112.296,41	-	30.224.633.654

	2015			
	Dolar Amerika Serikat	Dolar Singapura	Euro	Setara Rupiah
Kas dan setara kas	819.852,07	372.848,37	-	13.733.846.489
Piutang usaha	-	-	-	-
	819.852,07	372.848,37	-	13.733.846.489
Kewajiban	-	-	-	-
Jumlah aset/ (kewajiban) bersih	819.852,07	372.848,37	-	13.733.846.489

27. MANAJEMEN PERMODALAN

Manajemen Perusahaan melakukan pengelolaan kecukupan permodalan dengan tujuan menjaga kemampuan Perusahaan dalam menjamin kelangsungan usahanya sehingga Perusahaan dapat memenuhi seluruh komitmennya baik kepada Pemegang Saham, Fiskus, rekanan penyedia barang/jasa, maupun karyawan.

Sesuai arahan RKAP 2016 dan 2015. Perusahaan terus berupaya menjaga rasio kecukupan modal dengan mengacu rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset yang masing-masing ditargetkan 84,82% dan 68,93%. Rasio tersebut dihitung sebagai perbandingan antara jumlah seluruh aset (di luar aset yang belum jelas statusnya) dibagi dengan jumlah modal sendiri (di luar dana yang belum jelas statusnya).

Dalam realisasinya per 31 Desember 2016 dan 2015 rasio modal terhadap total aset mencapai 73,3% dan 73,7%.

28. PERJANJIAN SIGNIFIKAN

Perusahaan memperoleh fasilitas garansi bank dari Bank Mandiri Kantor Pusat berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Garansi Bank dengan nomor: KP-COD/011/PGB/2004 tanggal 23 Juni 2004. Perjanjian ini telah diperbarui beberapa kali dan terakhir dengan Addendum XII tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Garansi Bank sesuai surat bank Mandiri Nomor: TOP.CRO/CCL.336/ADD/2015 tanggal 19 Juni 2015 dan mengacu pada surat bank Mandiri No: CBG.CB6.SPPK.022/2015 tanggal 17 Juni 2015. Addendum ini berlaku selama 1 tahun sampai dengan tanggal 23 Juni 2016. Dengan perjanjian ini perusahaan tidak perlu mengeluarkan uang tunai untuk penerbitan Garansi Bank. Besarnya plafond sebesar Rp30.000.000.000. Tujuan penggunaan adalah penerbitan tender bond Advance payment Bond Performance Bond dan Retensi Bond.

Fasilitas ini dijamin oleh: piutang usaha dan sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Nomor: 2131/Kebon Bawang yang terletak di Kelurahan Kebon Bawang, kecamatan Tanjung Priok, Bidang tanah dan bangunan ini telah dibebani dengan Hak Tanggungan dengan nilai total sebesar Rp30.000.000.000.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Tujuan penggunaan: Penerbitan tender bond (untuk mengikuti tender), advance payment bond performance bond (atas dasar kontrak kerja atau SPK), retensi bond (surat penegasan dari bowheer bahwa proyek telah memasuki masa retensi). Jumlah Fasilitas Bank Garansi yang dipergunakan sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp30.000.000.000.

29. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
<u>Kas dan Setara Kas</u>		
<u>Bank</u>		
Rupiah:		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	22.379.655.635	46.192.947.933
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.133.273.805	2.713.867.286
PT Bank Jabar Banten	212.644.560	62.239.003
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	193.634.922	-
Jumlah Rupiah	32.919.208.922	48.969.054.222
Mata uang asing:		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015: USD2.96.727; 2014: USD2.142.132.6)	1.262.755.050	10.993.817.372
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2015: USD2.142.132.6; 2014: USD2.142.132.6)	272.072.282	350.431.076
Dolar Singapura:		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2015: SGD631.147; 2014: SGD150.654.11)	914.920.799	1.078.241.027
Jumlah mata uang asing	2.449.748.131	12.422.489.475
<u>Deposito</u>		
Rupiah		
PT Bank Tabungan Negara Syariah	9.000.000.000	9.000.000.000
PT Bank BNI (Persero) Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000
PT Bank Mandiri Syariah	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.000.000.000	20.000.000.000
PT Bank Jabar Banten	5.000.000.000	19.000.000.000
PT Bank BRI (Persero) Tbk	5.000.000.000	10.000.000.000
PT Bank BRI Syariah	-	-
Jumlah deposito	31.000.000.000	60.000.000.000
Total kas dan setara kas berelasi	66.368.957.053	121.391.543.697
Total aset	771.643.452.464	689.302.093.526
Prosentase kas dan setara kas berelasi terhadap total aset	8,60%	17,6%

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI (lanjutan)

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
<u>Piutang usaha berelasi</u>		
Piutang usaha berelasi (catatan 4)	39.462.578.603	32.852.687.560
Total aset	771.643.452.464	689.302.093.526
Prosentase piutang usaha berelasi terhadap total aset	5,11%	4,8%
<u>Tagihan bruto berelasi</u>		
Tagihan bruto berelasi (catatan 5)	10.846.885.434	16.281.560.363
Total aset	771.643.452.464	689.302.093.526
Prosentase tagihan bruto berelasi terhadap total aset	1,41%	2,4%
<u>Hutang lain-lain berelasi</u>		
Hutang lain-lain berelasi (catatan 13)	2.940.884.038	4.024.787.293
Total liabilitas	211.868.883.543	181.618.546.731
Prosentase hutang lain-lain berelasi terhadap total liabilitas	1,39%	2,2%
<u>Hutang biaya</u>		
Hutang biaya berelasi (catatan 14)	3.012.774.474	2.555.574.350
Total liabilitas	211.868.883.543	181.618.546.731
Prosentase hutang biaya berelasi terhadap total liabilitas	1,42%	1,4%
<u>Hutang bruto</u>		
Hutang bruto berelasi (catatan 16)	192.213.200	56.160.000
Total liabilitas	211.868.883.543	181.618.546.731
Prosentase hutang bruto berelasi terhadap total liabilitas	0,09%	0,03%
<u>Beban Jasa Berelasi</u>		
PT Pertamina (Persero)	19.856.533.433	14.898.591.007
PT Sucofindo (Persero)	16.424.948.440	25.088.216.018
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	4.377.277.555	6.500.895.511
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1.657.691.639	1.131.327.128
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	1.424.282.308	1.279.765.364
Total beban jasa berelasi	43.740.683.375	48.898.795.027
Total beban jasa	231.224.377.503	256.133.510.770
Presentase terhadap total beban jasa	18,92%	19,1%

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI (lanjutan)

Hubungan dan sifat transaksi berelasi:

Nama Entitas	Hubungan	Sifat Transaksi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas sepengendali	Penempatan dana
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas sepengendali	Penempatan dana
PT Bank Jabar Banten	Entitas sepengendali	Penempatan dana
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Syariah	Entitas anak dari entitas sepengendali	Penempatan dana
PT Bank BRI (Persero) Tbk	Entitas sepengendali	Penempatan dana
PT Bank BRI Syariah	Entitas anak dari entitas sepengendali	Penempatan dana
PT Bank Mandiri Syariah	Entitas anak dari entitas sepengendali	Penempatan dana
PT Pertamina (Persero) Dit. Hilir Bidang Perkapalan	Entitas anak dari entitas sepengendali	Jual beli jasa klasifikasi dan/atau proyek komersil
PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java	Entitas anak dari entitas sepengendali	Jual beli jasa klasifikasi dan/atau proyek komersil
PT Sucofindo (Persero)	Entitas sepengendali	Jual beli jasa klasifikasi dan/atau proyek komersil
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Entitas sepengendali	Jual beli jasa klasifikasi dan/atau proyek komersil
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Entitas sepengendali	Jual beli jasa klasifikasi dan/atau proyek komersil
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Entitas sepengendali	Jual beli jasa klasifikasi dan/atau proyek komersil
PT Pertamina (Persero)	Entitas sepengendali	Jual beli jasa klasifikasi dan/atau proyek komersil
PT Pertamina EP	Entitas sepengendali	Jual beli jasa klasifikasi dan/atau proyek komersil
PT Antam (Persero) Tbk	Entitas sepengendali	Jual beli jasa klasifikasi dan/atau proyek komersil
PT Pertamina Gas	Entitas anak dari entitas sepengendali	Jual beli jasa klasifikasi dan/atau proyek komersil
Kementerian Kelautan & Perikanan	Entitas sepengendali	Jual beli jasa klasifikasi dan/atau proyek komersil
PLTU Cilacap	Entitas sepengendali	Jual beli jasa klasifikasi dan/atau proyek komersil
PT Pertamina Hulu Energi	Entitas anak dari entitas sepengendali	Jual beli jasa klasifikasi dan/atau proyek komersil
PT. Pertamina Drilling Services Indonesia	Entitas anak dari entitas sepengendali	Jual beli jasa klasifikasi dan/atau proyek komersil
PT.Pertamina UBEP Limau	Entitas anak dari entitas sepengendali	Jual beli jasa klasifikasi dan/atau proyek komersil

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI (lanjutan)

Hubungan dan sifat transaksi berelasi (lanjutan):

Nama Entitas	Hubungan	Sifat Transaksi
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Entitas sepengendali	Jual beli jasa klasifikasi dan/atau proyek komersil
PT Asuransi Jasindo	Entitas sepengendali	Jasa asuransi
Dana Pensiun PT BKI	Entitas pembentukan dana pensiun sendiri	Pembentukan dana pensiun
Koperasi Pegawai BKI	Entitas pembentukan sendiri	Penempatan dana

30. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan setuju untuk diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2017.



**Mengutamakan Mutu dan Pelayanan
Jasa Berdasarkan Komitmen yang
Tinggi Terhadap Masalah Keselamatan**

Giving Priority to Quality and Service

Based on High Commitment on Safety

Issues

2016

ANNUAL REPORT

LAPORAN TAHUNAN

KEEP GROWING AND
MAINTAINANCE TRUST

TERUS BERKEMBANG DAN
MENJAGA KEPERCAYAAN



Jl. Yos Sudarso 38-39-40 Tanjung Priok,
Jakarta - 14320, Indonesia
Telp. (62-21) 4301017, 4301703, 430993
Fax. (62-21) 43936175
www.bki.co.id
ho@bki.co.id